



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024;

b. bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta rencana program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

A040B8A293

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543 diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13 No Reg Peraturan Provinsi Jawa Barat: 13-304/2024);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



A040B8A293

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah daerah teknokratik dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung, oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

Perubahan RKPD menjadi pedoman:

- a. Perubahan Renja;
- b. penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, rencana perubahan APBD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun 2025; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB II
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berjalan;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

- e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2025

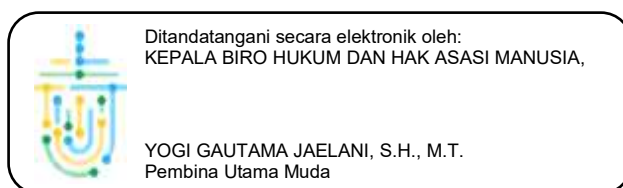
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB I

PENDAHULUAN



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang mengakomodir visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta program Presiden terpilih, Asta Cita, ke dalam dokumen pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, yang tertuang pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Nomor 900.1.1.640/SC tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025.

Selain keharusan untuk memenuhi visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakilnya yang terpilih, ada beberapa alasan yang mendasari pengambilan kebijakan untuk melakukan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yaitu:

1. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penambahan dan/atau pengurangan dan/atau pergeseran program kegiatan dan sub kegiatan beserta target indikator kinerja dan pagu anggarannya; dan
4. Adanya perubahan kebijakan pembangunan setelah pelantikan kepala daerah.

Meskipun Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dilakukan sebagaimana pertimbangan di atas, namun perubahan ini tidak mengubah keseluruhan rencana pembangunan yang telah disusun





sebelumnya. Selama arah kebijakan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang telah dirancang masih relevan, maka hal tersebut akan tetap dilanjutkan. Prinsip utama dalam perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini adalah penyesuaian tanpa menghilangkan kesinambungan pembangunan.

Gambar 1.1
Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengusung tema **“Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”**, namun pada perubahan RKPD Tahun 2025 terjadi perubahan tema menjadi **“Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Fondasi Pembangunan”**. Tema tersebut fokus pada penyediaan infrastruktur layanan dasar diantaranya jaringan jalan, pembangunan ruang kelas baru, peningkatan fasilitas kesehatan, sanitasi, *stunting*, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) Target Indikator Makro Tahun 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; (3) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (4) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025





Triwulan I; (5) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (6) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025; serta (7) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Metode pelaksanaan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui implementasi pendekatan *pentahelix-ABCGM* (*Academic, Business, Community, Government, and Media*). *Academic*, meliputi unsur perguruan tinggi dan peneliti yang berperan sebagai konseptor dengan melakukan identifikasi potensi daerah dan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi pembangunan daerah. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, serta teori-teori terbaru dan relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. *Business*, meliputi unsur pengusaha/swasta yang berperan sebagai *enabler*. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor Swasta dapat berperan sebagai *enabler* yang menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. *Community*, meliputi unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, komunitas juga berperan sebagai akselerator seiring dengan modal sosial yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Komunitas juga bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki oleh suatu wilayah. *Government* atau pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan peraturan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini, melibatkan



A040B8A293



semua jenis kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi, dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan potensi suatu wilayah. *Media* bertindak sebagai *expander* yang berperan untuk mendukung publikasi dan promosi serta membuat *brand image*. Dalam menjalankan perannya media juga berfungsi sebagai perantara diseminasi informasi diantara pemangku kepentingan dan konsep *pentahelix*;

2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, Pinjaman Daerah, obligasi daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dana masyarakat/umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta melibatkan secara aktif *stakeholder* diluar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah;
3. Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pendekatan spasial dan a-spasial melalui 6 (enam) wilayah pengembangan;
5. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam:
 - a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. Satu Data Pembangunan Jawa Barat;
6. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.





Alur proses penyusunan substansi pada proses penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik

- a. Diawali dengan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dan informasi pembangunan daerah dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pelaksanaan evaluasi atas capaian pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek.
- c. Penelaahan terhadap kebijakan nasional termasuk di dalamnya program strategis maupun yang bersifat *mandatory* yang harus dilaksanakan oleh daerah.
- d. Verifikasi terhadap usulan dari kabupaten/kota yang diakomodir dalam bentuk hibah/bantuan sosial dan reses/pokok-pokok pikiran DPRD.

Seluruh hasil dari kegiatan pada poin a hingga c menjadi dasar untuk merumuskan permasalahan, isu strategis, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus perencanaan yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses teknokratik ini melibatkan perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota, DPRD, dan pihak-pihak yang kompeten.

2. Proses *bottom up*

- a. Pelaksanaan konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan musrenbang yang melibatkan unsur *pentahelix* meliputi akademisi, pebisnis/pelaku usaha, komunitas masyarakat, pemerintah, serta media.
- b. Verifikasi usulan dari komunitas/lembaga/individu yang berasal dari masyarakat yang diusulkan melalui SIPD.

3. Proses politik

Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari hasil reses dengan konstituen.





4. Proses *top-down*

Penyelarasan dokumen RKPD terhadap dokumen RKP dan RPJMN dalam rangka sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat yaitu Kementerian/Lembaga (K/L).

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);





5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka





- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13) tanggal 9 Desember 2024; dan
 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.





1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yakni 20 (dua puluh) tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025.

Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen perencanaan daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
2. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;

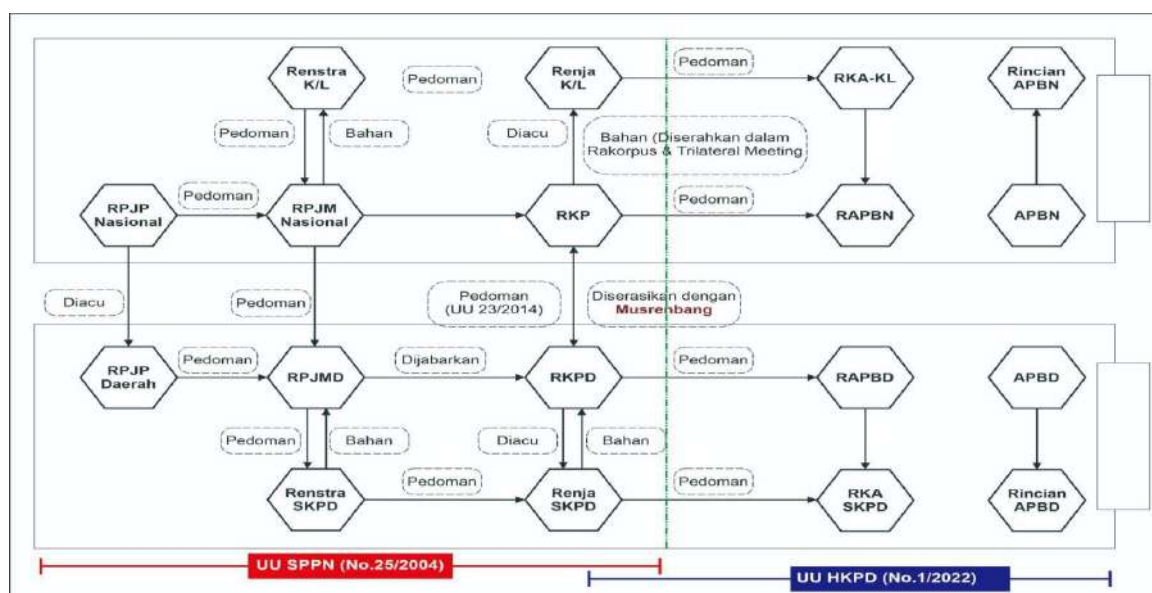




3. Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025; dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan hubungan dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2025 terhadap Dokumen Lain



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat strategis, sekaligus implementasi dari perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan jangka panjang (RPJPD). Dalam konteks tahun 2025, RKPD juga harus sinkron dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Keterkaitan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:





1. Keterkaitan dengan RPJMN Tahun 2025–2029

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 mensinkronkan prioritas nasional dengan mengakomodasi dan menyelaraskan agenda pembangunan nasional, terutama sasaran dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029.

2. Keterkaitan dengan RKP Tahun 2025

Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk turut mendukung pencapaian target-target nasional seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi hijau, digitalisasi, dan pembangunan wilayah. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi instrumen untuk integrasi pendanaan dan intervensi pemerintah pusat di daerah, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas nasional lainnya.

3. Keterkaitan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran visi jangka panjang karena merefleksikan arah pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam RPJPD Tahun 2025–2045, terutama pada tahapan pertama dari empat tahap perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat fokus fondasi transformasi karena tahun 2025 merupakan awal implementasi RPJPD Tahun 2025–2029, Perubahan RKPD Tahun 2025 harus fokus pada upaya pembangunan fondasi transformasi struktural, seperti reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

4. Keterkaitan dengan RPJMD Tahun 2025–2029.

RKPD Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029, sehingga RKPD menjadi dokumen operasional awal untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025–2030. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan turunan langsung dari RPJMD Tahun 2025–2029. Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan dalam RKPD harus merujuk dan mengacu langsung pada RPJMD, yang diturunkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.





5. Keterkaitan dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat disusun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penyempurnaan terhadap dokumen RKPD murni yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan RKPD memiliki keterkaitan erat dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renstra PD merupakan acuan utama bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan strategis 5 (lima) tahunan, sementara Renja PD merupakan dokumen rencana tahunan yang merinci pelaksanaan Renstra PD. Oleh karena itu, Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan konsistensi substansi antara arah kebijakan, sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Renstra PD dan Renja PD. Hubungan antara ketiga dokumen ini bersifat hierarkis dan saling mendukung, di mana Perubahan RKPD berfungsi sebagai instrumen penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan pembangunan, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD murni, tanpa mengesampingkan arah pembangunan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen tahunan merupakan bentuk operasionalisasi dan evaluasi implementasi dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi bagian dari perwujudan RPJPD Tahun 2025-2045, sekaligus harus disinergikan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025 agar terjadi keterpaduan antara pusat dan daerah.

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD.





1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2025, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2025;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

1.5 Sistematika

Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.





1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I-2025

2.1. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025

Menjelaskan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Triwulan I Tahun 2025. Capaian diukur berdasarkan realisasi terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD Tahun 2025) serta dokumen turunan lainnya seperti perjanjian kinerja dan rencana kerja perangkat daerah.

2.2. Capaian Program dan Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025

Menyajikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama Triwulan I Tahun 2025, baik dari sisi realisasi anggaran maupun realisasi fisik, serta keterkaitannya dengan capaian indikator kinerja.

2.3. Kinerja Pelaksanaan SPM Tahun 2024

Menjelaskan capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2024, yang merupakan kewajiban dasar pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Evaluasi pelaksanaan SPM menjadi





tolok ukur penting dalam menjamin akses, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan dasar yang merata.

2.4 Evaluasi RKPD Tahun 2024 terhadap 6 Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 terhadap enam prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut, serta menjadi dasar perbaikan pada tahun 2025.

2.5 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I-2025

Menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama Triwulan I Tahun 2025. Permasalahan tersebut berdampak pada capaian realisasi fisik dan keuangan serta terhadap ketercapaian indikator kinerja urusan pemerintahan.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi tahun 2025, proyeksi, dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2025.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2025 serta pendanaan pembangunan lainnya.





BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai penjabaran rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Menjelaskan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran, isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, serta sinkronisasi dan keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2025.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025

Menguraikan kronologis pelaksanaan pergeseran anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan program serta kegiatan yang berkembang setelah penetapan APBD murni.

5.2. Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada Pergeseran Ketiga

Menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, khususnya dalam bentuk Pergeseran Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.





5.3. Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Menjelaskan arah dan substansi rencana penyesuaian program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyesuaian dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan pada triwulan I, hasil evaluasi capaian kinerja, dan arahan kebijakan nasional serta regional terkini.

5.4. Penyesuaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Menguraikan rencana dan justifikasi penyesuaian terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Penyesuaian indikator menjadi krusial agar pengukuran kinerja pembangunan tetap relevan, terukur, dan selaras dengan dinamika implementasi program/kegiatan serta kebijakan nasional.

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.



BAB II

EVALUASI HASIL

TRIWULAN I 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I-2025

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan target dan prioritas pembangunan dengan cara mensinergikan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan segala sumber daya di suatu daerah. Dan untuk melihat pelaksanaan pembangunan yang sesuai di dalam dokumen RKPD pada tahun tersebut dilakukan penilaian indikator, program dan kegiatan serta menganalisa setiap 3 (tiga) bulan sekali guna penyusunan evaluasi RKPD pada tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I-2025 merupakan tahapan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan. Hasil evaluasi akan memberikan beberapa informasi penting, di antaranya informasi mengenai konsistensi perencanaan dan penganggaran, capaian target kinerja dan anggaran RKPD pada Triwulan I-2025, dan memperoleh informasi mengenai permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dirumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk menjadi bahan masukan guna optimalisasi, akselerasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Selanjutnya, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Adapun ruang lingkup evaluasi meliputi evaluasi terhadap perkembangan capaian indikator makro pembangunan daerah, perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, dan evaluasi terhadap perkembangan capaian indikator kinerja daerah sebagai tolak ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:



A040B8A293



Tabel 2.1
Indikator Makro Pembangunan Daerah Berdasarkan
RKPD Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2025	Capaian TW I-2025	Hasil Evaluasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,63	74,24	74,92	75,17	N/A	Kemungkinan Tercapai
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,45	5,00	4,95	4,96 - 5,37	4,98	Kemungkinan Tercapai
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,98	7,62	7,08	5,85 - 6,46	N/A	Kemungkinan Tidak Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,31	7,44	6,75	6,42 - 6,99	6,74	Sudah Melampaui Target 2025
5	Gini Rasio	Persen	0,417	0,425	0,428	0,383 - 0,390	N/A	Kemungkinan Tidak Tercapai
6	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	49,14	52,65	56,08	57,14	N/A	Kemungkinan Tercapai

Sumber :

- Kolom (4) (5) (6) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
- Kolom (7) Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025

Keterangan:

- N/A: BPS belum merilis data

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator makro dengan target pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat 2 (dua) indikator makro dengan capaian pada triwulan I tahun 2025 sudah melampaui *range* target tahun 2025, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
- Data Indikator Makro Capaian triwulan I Tahun 2025 yang belum rilis data dari Badan Pusat Statistik, sehingga secara keseluruhan belum bisa dibandingkan untuk kemungkinan tercapai atau tidak pada tahun 2025.

Dalam dokumen *World Economic Outlook* (WEO), IMF menyampaikan bahwa perekonomian dunia akan mengalami stagnasi pada tahun 2025 dan 2026. Stagnasi ekonomi tersebut disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan perekonomian di beberapa negara. Sebagai Provinsi dengan ketergantungan tinggi pada perekonomian global, stagnasi tersebut dapat menimbulkan persoalan ekonomi seperti meningkatnya harga bahan baku, menurunnya aktivitas perdagangan dunia, dll. Tantangan tersebut berpotensi untuk menciptakan perlambatan ekonomi dan pencapaian indikator makro lainnya terutama capaian di Provinsi Jawa Barat diantaranya; Laju

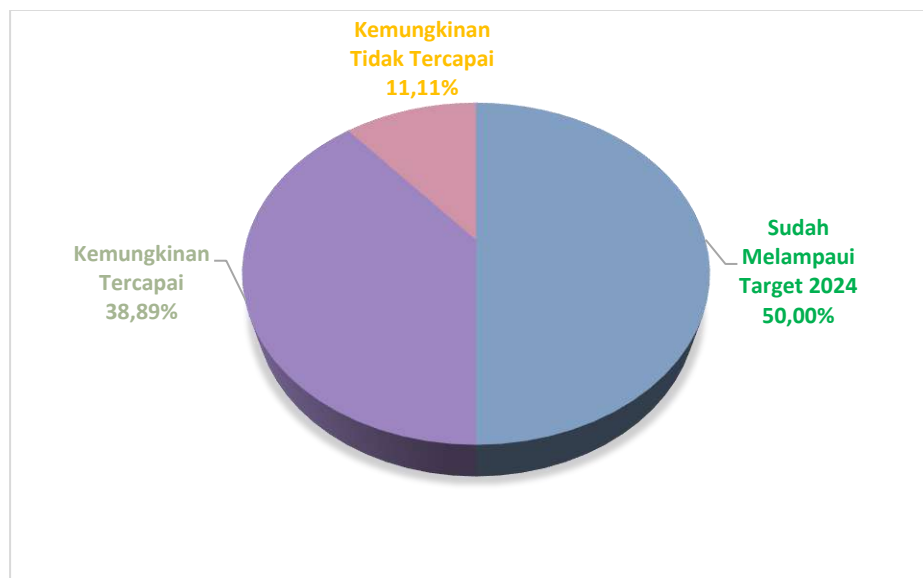




Pertumbuhan Ekonomi, *Gini Ratio*, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Pendapatan Per Kapita. Sehingga, berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penyesuaian target indikator makro sebagai bentuk respon terhadap kondisi perekonomian tersebut.

Selain itu, untuk mengetahui pencapaian sasaran pembangunan daerah, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU tahun 2024 terhadap target tahun 2024 memunculkan 3 (tiga) kelompok IKU. Pertama, kelompok IKU di mana capaian tahun 2024 sudah melampaui target tahun 2024. Kedua, kelompok IKU di mana capaian 2024 mengindikasikan target tahun 2024 akan tercapai (*on the track*). Ketiga, kelompok IKU di mana capaian tahun 2024 mengindikasikan target tahun 2025 tidak akan tercapai.

Gambar 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi IKU Tahun 2024



Sumber : Laporan Evaluasi RKPD 2024, data diolah

Hasil rekapitulasi evaluasi capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) atau 50,00 persen IKU sudah melampaui target tahun 2024, 14 (empat belas) atau 38,88 persen IKU kemungkinan akan mencapai target tahun 2024, dan 4 (empat) atau 11,11 persen IKU tidak akan mencapai target tahun 2024.





Secara rinci hasil evaluasi terhadap 7 (tujuh) indikator tujuan dan 29 indikator sasaran IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian TW I - 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I INDIKATOR TUJUAN:								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,63	74,24	74,92	N/A	75,17	Kemungkinan Tercapai
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,45	5,00	4,95	4,98	4,96 - 5,37	Kemungkinan Tidak Tercapai
3	Persentase penduduk miskin	Persen	8,06	7,62	7,46	N/A	5,85 - 6,46	Kemungkinan Tercapai
4	Gini Ratio	Poin	0,417	0,425	0,421	N/A	0,383-0,393	Kemungkinan Tidak Tercapai
5	Indeks Williamson	Poin	0,670	0,696	0,686	N/A	0,666	Kemungkinan Tercapai
6	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34	83,04	N/A	N/A	83,55	Sudah Melampaui Target 2024
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A-	N/A	A	Kemungkinan Tercapai
II INDIKATOR SASARAN:								
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,78	8,83	8,87	N/A	9,33	Kemungkinan Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,68	12,80	N/A	12,82	Kemungkinan Tercapai
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,52	74,91	75,16	N/A	75,29	Sudah Melampaui Target 2024
4	Prevalensi Stunting	Persen	20,20	21,70	15,52	N/A	12,93	Kemungkinan Tercapai
5	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.277	11.695	12,157	N/A	11.619	Sudah Melampaui Target 2024
6	Persentase penduduk miskin	Persen	8,06	7,62	7,46	N/A	5,85 - 6,46	Kemungkinan Tercapai
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71,22	71,74	N/A	N/A	N/A	Sudah Melampaui Target 2024
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin		0,482		N/A	0,46	
8	Indeks Perlindungan Anak	Angka	65,74	65,61	N/A	N/A	67,66	Sudah Melampaui Target 2024
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49,67	51,17	N/A	N/A	49,49	Sudah Melampaui Target 2024
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,21	1,18	1,13	N/A	1,42	Sudah Melampaui Target 2024
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	7,00	4,74	3,52	N/A	5,84	Kemungkinan Tercapai
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,22	4,36	4,85	N/A	4,85	Kemungkinan Tercapai





No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian TW I - 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,41	0,11	1,59	N/A	4,54	Kemungkinan Tidak Tercapai
14	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	99,750	107,460	112,170	N/A	108,440	Sudah Melampaui Target 2024
15	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92,3	93,80	93,28	N/A	94,36	Sudah Melampaui Target 2024
16	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	11,27	8,72	6,43	N/A	12,85	Kemungkinan Tidak Tercapai
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	576,90	644,40	697,37	N/A	657,77	Sudah Melampaui Target 2024
18	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21.62	28,84	26.84	N/A	28,90	Sudah Melampaui Target 2024
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,31	7,44	6,75	N/A	6,42 – 6,99	Sudah Melampaui Target 2024
20	Tingkat Konektivitas	Persen	53,2	59,62	60,47	N/A	60	Sudah Melampaui Target 2024
21	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	N/A	N/A	76,06	N/A	76,57	Kemungkinan Tercapai
22	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	53,37	54,17	56,25	N/A	55,20	Kemungkinan Tercapai
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,66	64,77	66.02	N/A	67,00	Kemungkinan Tercapai
24	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	5,86	7,25	7,99	N/A	8,88	Sudah Melampaui Target 2024
25	Indeks Risiko Bencana	Poin	131,62	123,16	114,15	N/A	115	Sudah Melampaui Target 2024
26	Indeks Desa Membangun	Poin	0,7529	0,7798	0,8012	N/A	0,80	Sudah Melampaui Target 2024
27	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34	83,04	N/A	N/A	83,55	Sudah Melampaui Target 2024
28	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	83,34	A (93,08)	A-	N/A	A	Kemungkinan Tercapai
29	Indeks Inovasi Daerah	Poin	69,15	74,77	81.27	N/A	70,15 (Sangat Inovatif)	Sudah Melampaui Target 2024

- Sumber :
- Laporan Evaluasi RKPD 2024, data diolah
 - Kolom (4), (5) dan (6) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
 - Kolom (7) Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025
 - *) Data Sementara

Berdasarkan evaluasi pada Tabel 2.2 tersebut diatas berimplikasi pada 2 (dua) hal yaitu penyesuaian target beberapa indikator yang memiliki capaian tahun 2024 atau capaian TW1 2025 diatas target tahun 2025 dan





Rasionalisasi target beberapa indikator yang diperkirakan tidak memungkinkan untuk mencapai target tahun 2025..

2.1 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang meliputi realisasi dari indikator kinerja dengan berfokus menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan. Realisasi kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.



A040B8A293



Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
1	PENDIDIKAN							
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,68	12,8	12,82	Belum Rilis	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,78	9,16	8,87	9,16	Belum Rilis	
3	APM SMA/SMK/SLB	Persen	#N/A	96,13	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
4	Nilai rapot pendidikan	Nilai	#N/A	65,61	69,79	71,41	Belum Rilis	
5	Persentase Penurunan Angka putus sekolah SMA	Persen	#N/A	0,09	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
	Persentase Penurunan Angka putus sekolah SMK	Persen	#N/A	0,14	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
	Persentase Penurunan Angka putus sekolah SLB	Persen	#N/A	0,23	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
6	Nilai Rata-rata Kompetensi Literasi	Nilai	0	64,68	67,19	68,42	Belum Rilis	
7	Nilai Rata-rata Kompetensi Numerasi	Nilai	0	59,3	69,01	58,82	Belum Rilis	
8	Indeks Refleksi Guru	Indeks	0	57,3	58,01	58,5	Belum Rilis	
2	KESEHATAN							
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,52	74,19	75,16	75,29	73,93	
2	Persentase kab/kota dengan IKS> 60%	Persen	n/a	Indikator Baru di 2024	3,7	2,12	Belum Rilis	
3	Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	Poin	n/a	Indikator Baru di 2024	75,31	73,5	98,72	
4	Presentasi kab/kota yang menurun angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Persen	84,86	95,15	86,79	89	89,51	
5	Persentase Kab/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan	Persen	n/a	Indikator Baru di 2024	55,5	30	3,7	
6	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan Kesehatan menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Persen	90,36	95,13	97,47	96,2	97,39	
7	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan di Jawa Barat	Persen	100	100	100	100	40	
8	Persentase Kabupaten/ Kota memenuhi standar ketenagaan minimal di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah	Persen	n/a	53,59	59,98	55,1	54,81	
9	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan	Persen	90,97	90,27	92	93	79,4	



A040B8A293



NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar perizinan							
10	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	Persen	n/a	96,5	89,54	96,29	80,56	
11	Persentase kab/kota dengan cakupan rumah tangga ber-PHBS >80%	Persen	n/a	Indikator Baru di 2024	70	75	34,98	
12	Persentase Kerjasama/kemitraan tingkat daerah provinsi (evaluasi pelaksanaan dan implementasi PKS nya)	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	10	2,52	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPELKEKES	Poin	88,15	87,73	98,72	88,7	95,14	
14	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	Persen	n/a	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	Poin	92,40	92,87	94,47	92,7	91,01	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	Poin	83,5	82,5	86,7	86	Belum Rilis	
17	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan pengetahuan	Persen	n/a	62	60	70	Belum Rilis	
18	Indikator Nasional Mutu di RSUD Al Ihsan	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	77	92	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	Poin	97,08	98,46	#N/A	97,15	98,48	
20	IKM atas pelayanan medik, keperawatan dan penunjang	poin	90,85	92,18	#N/A	89	92,21	
21	IKM pelayanan kepegawaian, pengembangan SDM, pendidikan, penelitian dan pengembangan	poin	90,85	92,18	#N/A	89	92,21	
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RS Paru	Poin	90,13	93,13	95,75	90,3	94,72	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	Poin	83,21	85,33	81,74	87	81,54	
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	Poin	83,92	85,81	87,7	83,55	88	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Tingkat Konektivitas	Persen	53,20	59,62	60,47	60	Belum Rilis	
2	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	0	Indikator Baru di 2024	76,91	76,57	Belum Rilis	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
3	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan	Persen	19,34	25,91	26,28	30,79	Belum Rilis	
4	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,79	83,9	86,44	87,51	85,87	
5	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	48,48	Indikator Baru di 2024	59,8	77,7	25	
6	Persentase rekomendasi hasil survei kondisi jalan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan untuk pengembangan wilayah	Persen	19,34	Indikator Baru di 2024	#N/A	100	Belum Rilis	
7	Persentase Jalan Terbangunan/Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis Untuk Pengembangan Wilayah	Persen	100	Indikator Baru di 2024	#N/A	100	Belum Rilis	
8	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD I	Persen	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang 1954,30 Km	Indikator Baru di 2024	83,84	33,13	Belum Rilis	
9	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD II	Persen		Indikator Baru di 2024	79,73	30,4	Belum Rilis	
10	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD III	Persen		Indikator Baru di 2024	89,02	32,15	Belum Rilis	
11	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD IV	Persen		Indikator Baru di 2024	87,65	35,53	Belum Rilis	
12	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD V	Persen		Indikator Baru di 2024	85,61	28,76	Belum Rilis	
13	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD VI	Persen		Indikator Baru di 2024	90,98	27,25	Belum Rilis	
14	Persentase Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Terlayani sesuai Standar (TATA RUANG)	Persen	100	Indikator Baru di 2024	66,7	83,3	Belum Rilis	
15	Persentase RTRW Kab/Kota yang sinkron dengan RTRW Provinsi (TATA RUANG)	Persen	97,14	Indikator Baru di 2024	32	55	Belum Rilis	
16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (TATA RUANG)	Persen	48,48	Indikator Baru di 2024	70,4	85,2	Belum Rilis	
17	Persentase Jalan Terbangunan/Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis (BIDTEK)	Persen	100	Indikator Baru di 2024	#N/A	100	Belum Rilis	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
18	Persentase Penyedia Jasa yang Patuh Terhadap Ketentuan Dokumen Rencana Teknis (HARBANG)	Persen	100	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	
19	Persentase Jalan Terbangun Yang Menggunakan Material Lulus Uji Pembanding (UPTD LABKON)	Persen	100	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	
20	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD I)	Persen	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang 1954,30 Km	Indikator Baru di 2024	84,05	85,52	Belum Rilis	
21	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD II)	Persen		Indikator Baru di 2024	79,73	83,2	Belum Rilis	
22	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD III)	Persen		Indikator Baru di 2024	89,02	89,21	Belum Rilis	
23	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD IV)	Persen		Indikator Baru di 2024	87,65	88,28	Belum Rilis	
24	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD V)	Persen		Indikator Baru di 2024	85,61	86,75	Belum Rilis	
25	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD VI)	Persen		Indikator Baru di 2024	90,98	90,91	Belum Rilis	
26	Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur (JAKON)		183,58	Indikator Baru di 2024	20,73	34,82	Belum Rilis	
19	Indeks Penggunaan Air	Poin	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator diganti menjadi indikator baru pada Tahun 2025 menjadi Indeks Kapasitas Air Baku
20	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,27	0,26	0,437	0,267	0,0000394	Realisasi s.d Juni 2024
21	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	55,52	56,54	57,04	56,89	56,87	Realisasi s.d Juni 2024
22	Persentase Situ yang Terpelihara	Persen	11,43	11,55	11,67	11,67	2,89	Realisasi s.d Juni 2024
23	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	100	100	#N/A	100	50	Realisasi s.d Juni 2024
24	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	48,21	50,92	52,38	50,71	52,01	Realisasi s.d Juni 2024
25	Persentase Infrastruktur SDA yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	Persen	N/A	100	100	100	50	Realisasi s.d Juni 2024
26	Akses Sanitasi layak	Persen	74,02	74,88	75,1	76	Belum Rilis	IKU PD
27	Akses Air Minum layak	Persen	93,04	93,86	94,9	95	Belum Rilis	IKU PD
28	Akses Penanganan Sampah di Perkotaan	Persen	74,03	74,64	70,77	77	Belum Rilis	IKU PD
29	Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	#N/A	93,33	#N/A	#N/A	Belum Rilis	IKU PD
30	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Kelayakan Kawasan Strategis dan Tematik	Persen	82,50	Indikator Baru di 2024	#N/A	40	Belum Rilis	IKU PD





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
31	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	IKP
32	Persentase Luas genangan yang tertangani	Persen	65,77	78,26	100	100	Belum Rilis	IKP
33	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	IKP
34	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan di Perkotaan	Persen	74,03	74,64	70,77	77	Belum Rilis	IKP
35	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	83,5	Indikator Baru di 2024	95	88,1	Belum Rilis	IKP
36	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio	N/A	Indikator Baru di 2024	0,2	0,4	Belum Rilis	IKP
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	53,37	54,17	56,25	55,2	Belum Rilis	IKU Kepala Daerah
2	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	Persen	93,89	95,65	100,26	98,76	Belum Rilis	IKU PD
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	IKP
4	Persentase perumahan terfasilitasi PSU	Persen	77,58	Indikator Baru di 2024	91,57	56,88	Belum Rilis	IKP
6	Persentase Capaian Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	67,36	Belum Rilis	IKU PD
7	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (10-15 Ha)	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	32,951	32,64	Belum Rilis	IKP
5	TRANTIBUMLINMAS							
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	87,5	100	#N/A	91	Belum Rilis	
2	Persentase Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	87,2	Indikator Baru di 2024	#N/A	95	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024
3	Persentase penanganan penegakan perda dan peraturan gubernur yang terselesaikan	Persen	85	Indikator Baru di 2024	123	60	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024
4	Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	Indikator Baru di 2024	140	80	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
5	Persentase anggota satpol PP dan PPNS yang Mendapatkan pelatihan	persen	100	Indikator Baru di 2024	100	92	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024
6	Indeks Risiko Bencana	Poin	131,62	123,16	114,15	115	Belum Rilis	
7	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,69	0,71	0,72	0,73	Belum Rilis	
8	Persentase Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024
9	Persentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persen	100	Indikator Baru di 2024	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024
10	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada saat keadaan Darurat Bencana	Persen	100	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024
11	Persentase Penanganan dan/atau Pendampingan Pasca Bencana	Persen	0,72	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024
12	Persentase Pemetaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru dipakai tahun 2024
6	SOSIAL							
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,98	7,62	7,08	5,85 - 6,46	7,46	Realisasi Periode Maret 2024
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	42,92	40,27	44,57	43,72	Belum Rilis	
3	Persentase PSKS yang Aktif	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
4	Persentase PSKS yang mendapatkan bimbingan teknis	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator baru mulai thn 2024
5	Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	100	100	#N/A	100	Belum Rilis	
6	Persentase Penyaluran Bansos Bagi KPM	Persen	#N/A	100	89.96	100	Belum Rilis	
7	Persentase KPM yang Mendapatkan Bimbingan Kewirausahaan Sosial	Persen	#N/A	100	100	100	Belum Rilis	
8	Persentase Kemandirian Ekonomi Bagi Masyarakat (KAMI BISA) yang Berhasil dalam Pengelolaan Usaha	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	75	45	Belum Rilis	
9	Persentase Anak yang Mendapat Orang Tua Angkat	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	75	Belum Rilis	
10	Persentase PPKS (Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan) yang tertangani	Persen	#N/A	1,35	#N/A	100	Belum Rilis	Ada perubahan perhitungan
11	Persentase UPTD yang Menerapkan Pedoman Rehabilitasi Sosial sesuai Ketentuan	Persen	#N/A	100	100	100	Belum Rilis	
12	Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	92	Belum Rilis	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
7	TENAGA KERJA							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,31	7,44	6.75	6,42 – 6,99	6,91	Indikator Tujuan
2	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan	Persen	0	Indikator Baru di 2024	76,61	76,11	82,88	Indikator Sasaran
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	-	100	38,27	100	64,65	IKP
4	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	100	100	100	100	62,96	IKP
5	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Dan Luar Negeri	Persen	0	88,3	100	53,51	25,59	IKP
6	Persentase Transmigran Yang Di Tempatkan	Persen	84,09	100	48,3	87	Belum Rilis	IKP
7	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	0	Indikator Baru di 2024	100	34,36	58,51	Indikator Sasaran
8	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	86,25	90	90	91	100	IKP
9	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	20,2	20	24,3	20,2	76.6	IKP
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	#N/A	90,23	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	71,22	71,74	72,76	72,1	Belum Rilis	Indikator Tujuan
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65,74	65,74*	belum rilis	66 // 67,66	Belum Rilis	Indikator Tujuan
4	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender	Persen	92,59	100	100	100	Belum Rilis	Indikator Sasaran
5	Persentase Keberhasilan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator Sasaran
6	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	0	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	Indikator Sasaran
7	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak	Persen	0	100	100	100	Belum Rilis	Indikator Sasaran





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
8	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	Persen	#N/A	51,85	#N/A	#N/A	Belum Rilis	IKP
9	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang <i>Up To Date</i> Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Persen	74	100	100	100	Belum Rilis	IKP
10	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Angka	5,23	1,71	*1,71	1,67	Belum Rilis	IKP
11	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	IKP
12	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan penguatan untuk standarisasi di Jawa Barat	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	37,08	Belum Rilis	IKP
13	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	Persen	0	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	IKP
14	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	Angka	0	0,2	*0,2	0,19	Belum Rilis	IKP
15	Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	IKP
9	PANGAN							
1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Tk. Konsumsi	Poin	87	93,8	93,28	94,36	Belum Rilis	Indikator Tujuan
2	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Tk. Ketersediaan	Poin	0	94,91	95,37	95,83	Belum Rilis	Indikator Sasaran
3	Persentase peningkatan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar mutu dan keamanan pangan	Persen	19,61	13,25	#N/A	2	Belum Rilis	Indikator Sasaran turun level menjadi IKP
4	Persentase Cadangan Pangan	Persen	#N/A	53,03	69,53	50	Belum Rilis	IKP
5	Persentase desa rentan pangan yang dintervensi	Persen	#N/A	3	#N/A	3	Belum Rilis	IKP
6	Tingkat Konsumsi Pangan:						Belum Rilis	Indikator sasaran (tambahan/sebelumnya tidak ada di RPD)
	- Energi (kkal/kap/hr)	Kkal/kap/hr	2,214	2110	#N/A	2100		
	- Protein (gr/kap/hr)	gr/kap/hr	64,7	63,6	#N/A	57		
10	PERTANAHAN							
1	Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	72,88	98,31	113,8	100	Belum Rilis	IKP, perhitungan realisasi dihitung pada akhir tahun
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	IKP, perhitungan realisasi dihitung pada akhir tahun





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang selesai tepat waktu	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	IKP, perhitungan realisasi dihitung pada akhir tahun
4	Persentase jumlah kabupaten/kota terfasilitasi redistribusi tanah dan penataan akses dibagi jumlah kabupaten/kota	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	IKP, perhitungan realisasi dihitung pada akhir tahun
5	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60	Indikator Baru di 2024	40	40	Belum Rilis	IKP, perhitungan realisasi dihitung pada akhir tahun
6	Persentase Inventarisasi sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	100	Belum Rilis	IKP, perhitungan realisasi dihitung pada akhir tahun
11	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,66	64,77	66,09	67	Belum Rilis	Perhitungan realisasi dihitung pada akhir tahun
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,13	46,87	46,86	49,1	Belum Rilis	Capaian Indeks Kualitas Air merupakan agregasi pemantauan dilakukan 11 sungai pada 3 periode pemantauan dalam 1 tahun. Sehingga hasil capaian dapat dihitung akhir tahun
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	87,83	85,03	88,34	90,97	Belum Rilis	Indeks Kualitas Udara merupakan agregasi pemantauan kualitas air laut di 6 Kab/Kota dengan 3 kategori lokasi: Pelabuhan, Wisata bahari, dan Biota laut pada 2 periode pemantauan dalam 1 tahun. Sehingga hasil capaian dapat dihitung akhir tahun
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,31	81,39	83,68	83,04	Belum Rilis	Indeks Kualitas Udara merupakan agregasi pemantauan kualitas udara di 27 Kab/Kota dengan 4 kategori lokasi transportasi, Perkantoran Pemukiman, dan Industri pada 2 periode pemantauan dalam 1 tahun.





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
								Sehingga hasil capaian dapat dihitung akhir tahun
5	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	5,86	7,25	7,98	8,88	Belum Rilis	
6	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah dan persampahan	Persen	3,83	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Merupakan nomenklatur indikator baru karena ada perubahan metode perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca
7	Tingkat Upaya Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah Domestik	Persen	#N/A	10,26	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
8	Persentase Perencanaan Pembangunan yang Sudah terintegrasi dengan rencana pembangunan lingkungan hidup	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	
9	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan***	Persen	#N/A	229,17	#N/A	100	Belum Rilis	
10	Penurunan Parameter COD (mg/L)	mg/L	#N/A	Indikator Baru di 2024	24,83	24,74	Belum Rilis	Capaian Indeks Kualitas Air merupakan agregasi pemantauan dilakukan 11 sungai pada 3 periode pemantauan dalam 1 tahun. Sehingga hasil capaian dapat dihitung akhir tahun
11	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD (Mg/L) ***	Persen	#N/A	100	#N/A	8,88	Belum Rilis	
12	Parameter Pengujian Kualitas Air yang Terakreditasi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	45,88	41	Belum Rilis	Akreditasi baru dilaksanakan pada akhir bulan Juli Tahun 2024
13	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi di Setiap Bahan/Produk yang Diuji***	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	
14	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen Laboratorium	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	Pelatihan baru dilaksanakan pada akhir bulan Juli Tahun 2024
15	Persentase Jumlah Sertifikat Kompetensi Teknis yang Diperoleh***	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
16	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) ***	Persen	#N/A	130,68	#N/A	#N/A	Belum Rilis	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
17	Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup***	Persen	#N/A	138.34	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
18	Persentase penanganan pengaduan lingkungan Hidup	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	100	Total Pengaduan s.d Semester 1 Tahun 2024 = 15; Pengaduan yang sudah tangani = 15
19	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	56,03	78,67	Belum Rilis	Penilaian Penghargaan Lingkungan masih dalam proses pelaksanaan
20	Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan***	Persen	#N/A	111.12	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
21	Persentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	81,14	80,73	Belum Rilis	Beberapa pembinaan/kampanye/edukasi masih dalam proses
22	Persentase peningkatan Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisir di Kabupaten/Kota	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	75	87,5	70	
23	Persentase Status Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten/Kota***	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
24	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai implementasinya	Persen	#N/A	100	100	100	Belum Rilis	
25	Persentase pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	100	Progress Pengawasan terhadap pelaku usaha tahun 2024 s.d semester 1 = 27 pelaku usaha
26	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan dan/atau produk hukum	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	Progress Penyusunan Naskah Akademik
27	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Persen	#N/A	100	100	100	Belum Rilis	Periodisasi Pelaporan Neraca Limbah B3 dalam 1 Tahun
28	Presentase kab/kota di wilayah pesisir yang dibina	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	66,67	Belum Rilis	Kegiatan belum dilaksanakan
29	Penurunan konsentrasi parameter SO2	µg/m3	#N/A	Indikator Baru di 2024	9,28	20,6	Belum Rilis	Indeks Kualitas Udara merupakan agregasi pemantauan kualitas udara di 27 Kab/Kota dengan 4 kategori lokasi transportasi, Perkantoran Pemukiman, dan Industri pada 2 periode pemantauan dalam 1 tahun.





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
								Sehingga hasil capaian dapat dihitung akhir tahun
30	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SOX***	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
31	Parameter Pengujian Kualitas Udara Ambien yang Terakreditasi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Akreditasi baru dilaksanakan pada akhir bulan Juli
32	Persentase Taman Kehati atau RTH Kehati yang dibina	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	97	93,1	86,21	
33	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Sektor Limbah dan Persampahan	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	84,62	
34	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota***	Persen	#N/A	250	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
35	Persentase Kampung Iklim yang dibina	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	74	75	56,5	
36	Persentase Peningkatan Kampung Iklim***	Persen	#N/A	275.89	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
37	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Desa Berbudaya Lingkungan***	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
38	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola Di 3 TPA/TPST Regional	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	57,05	90	Belum Rilis	
39	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional***	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	89,05	51,52	Indikator baru pada RPD 2024-2026
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	98,39	98,99	Indikator baru pada RPD 2024-2026
3	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	93,95	99,05	93,76	Indikator baru pada RPD 2024-2026
4	Persentase Data yang Dimanfaatkan	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	83,78	83,78	13,33	Indikator baru pada RPD 2024-2026
5	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Indeks Desa Membangun	Poin	0,7529	0,77	0,8	0,8	Belum Rilis	
2	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,2127	34,42	46,09	37,68	Belum Rilis	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
3	Persentase Desa Berkembang	Persen	N/A	17,51	9,57	12,63	Belum Rilis	
4	Persentase Desa yang difasilitasi Penataannya	persen	100	100	100	100	Belum Rilis	
5	Persentase Desa yang mendapat fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan Desa	persen	100	100	100	100	Belum Rilis	
6	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan Desa	persen	100	100	100	100	Belum Rilis	
7	Persentase Kerjasama Antar Desa Kewenangan Provinsi yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	#N/A	1,18	1,12	1,42	Belum Rilis	Indikator Tujuan
2	Angka Fertilitas Total (TFR)	Angka	2,3	2,06	2,03	2,05	Belum Rilis	Indikator Sasaran
3	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	Persen	63	63,2	64,3	64,79	Belum Rilis	IKP
4	Persentase masyarakat yang terpapar program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	87,5	Belum Rilis	IKP
5	Persentase penurunan jumlah perkawinan anak	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	21,05	5	Belum Rilis	IKP
15	PERHUBUNGAN							
1	Tingkat konektivitas Antar Wilayah	Persen	53,2	59,62	#N/A	60	Belum Rilis	2024 menggunakan indikator dan perhitungan baru
2	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	Persen	#N/A	41,21	#N/A	#N/A	N/A	Indikator ini Tahun 2024 sudah tidak digunakan kembali
3	Persentase Terminal Tipe B yang dibangun	Persen	#N/A	45,72	#N/A	#N/A	N/A	Indikator ini Tahun 2024 sudah tidak digunakan kembali
4	Tingkat ketersediaan prasarana dan dukungan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Persen	#N/A	97,52	#N/A	#N/A	N/A	Indikator ini Tahun 2024 sudah tidak digunakan kembali
5	Tingkat ketersediaan Jaringan Transportasi Massal berbasis Rel	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	N/A	Indikator ini Tahun 2024 sudah tidak digunakan kembali
6	Persentase pengguna angkutan umum di Jawa Barat	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	5,7	3,07	IKU baru sesuai Renstra





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
7	Persentase kendaraan umum yang sesuai standar keselamatan	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	23,53	IKU baru sesuai Renstra
8	Persentase infrastruktur transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	32,08	IKU baru sesuai Renstra
9	Persentase Kepuasan Masyarakat Sektor Transportasi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	90,7	IKU baru sesuai Renstra
10	Persentase wilayah yang memanfaatkan ICT untuk peningkatan layanan transportasi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	18,55	IKU baru sesuai Renstra
11	Persentase data dan informasi layanan transportasi yang terintegrasi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	40	IKU baru sesuai Renstra
12	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Provinsi	Persen	#N/A	87,85	#N/A	#N/A	N/A	Indikator hanya digunakan sampai Tahun 2023
13	Nilai V/C Ratio di Jalan Provinsi	persen	#N/A	0.82	#N/A	#N/A	N/A	
14	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	persen	#N/A	87,85	#N/A	#N/A	N/A	
15	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	persen	#N/A	87,85	#N/A	#N/A	N/A	
16	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	persen	#N/A	87,85	#N/A	#N/A	N/A	
17	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)	persen	#N/A	87,85	#N/A	#N/A	N/A	
18	Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi	persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	N/A	
19	Jumlah Dokumen Pendukung Pelabuhan Pengumpan Regional yang Disiapkan (UPTD PPP Pelabuhan Laut)	dokumen	#N/A	3	#N/A	#N/A	N/A	
20	Persentase Dermaga yang Terpenuhi Standar (UPTD PPP LL ASDP)	persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	N/A	
21	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian yang Kewenangan Provinsi	persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	N/A	
22	Persentase pengguna Angkutan umum transportasi darat	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	3	Belum Rilis	Indikator Baru Digunakan Tahun 2024
23	Persentase pengguna Angkutan Umum ASDP	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	9	Belum Rilis	
24	Persentase rencana persiapan pengelolaan pelabuhan laut	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
25	Persentase penumpang Kereta Api	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	5,53	Belum Rilis	
26	Persentase kendaraan umum yang diawasi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	60	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
27	Persentase perusahaan angkutan umum yang mempunyai sertifikat SMK	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	1,8	
28	Persentase angkutan penumpang ASDP yang sesuai standar keselamatan	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
29	Persentase fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang terpasang	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
30	Persentase Terminal yang sesuai standar	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	7,14	
31	Persentase prasarana pelabuhan yang sesuai standar	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
32	Persentase dukungan kebijakan teknis penyelenggaraan perkeretaapian	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	40	
33	Persentase Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah I	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	92,7	Belum Rilis	
34	Persentase Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah II	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	90,7	91	
34	Persentase Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah III	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	88,7	100	
35	Persentase Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah IV	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	94,3	80	
36	Persentase Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPP LLASDP	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	87,3	Belum Rilis	
37	Persentase pemanfaatan ICT untuk peningkatan layanan LLAJ	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	9	
38	Persentase Data dan Informasi LLAJ yang tersedia	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	28,57	
39	Persentase Data Pelayaran yang tersedia	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	25	
40	Persentase Data Perkeretaapian dan Penerbangan yang tersedia	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	98,85	95,53	85,22	84,47	Belum Rilis	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 menggunakan nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, sementara mulai dari Tahun 2024





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
								menggunakan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,37	4,14	4,73	4,16	Belum Rilis	
3	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator Baru digunakan Tahun 2024
4	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persen	#N/A	70	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
5	Persentase Perangkat Daerah dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Diskominfo	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	
6	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator Baru digunakan Tahun 2024
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,62	28,84	26,81	28,9	Belum Rilis	Data belum dapat dihitung
2	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen	36,98	Indikator Baru di 2024	33,12	26	14,47	Indikator Baru
3	Persentase UMKM yang naik kelas	Persen	8,38	10,38	78,25	27,5	Belum Rilis	Data belum dapat dihitung
4	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	#N/A	9,5	15,5	17	19,02	
5	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	10	9	Belum Rilis	Dilaksanakan Semester 2
6	Persentase Kepatuhan Koperasi	Persen	28,02	29,53	33,12	16	9,94	
7	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	62,5	92,7	51	30	7,88	
8	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Yang Melaporkan RAT	Persen	6,75	12,31	20,68	8	Belum Rilis	Data belum dapat dihitung
9	Persentase Koperasi Yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	40	51	8,3	Indikator Baru
10	Persentase Unit Usaha UMKM Yang Difasilitasi Pemasaran	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	35,78	44	12,27	Indikator Baru
11	Persentase UMKM Yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	37,78	66,6	22,2	Indikator Baru





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
12	Persentase UMKM Yang Berpotensi Ekspor	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	11,11	22	Belum Rilis	Indikator Baru, Data belum dapat dihitung
18	PENANAMAN MODAL							
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	576,90	644,38	697,37	657,77	170,21	Capaian TW I
2	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	174,57	210,6	251,14	233,26	128,3	Target disesuaikan dengan target dari BKPM, Capaian s.d Semester I
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90,84	91,24	4,77	4,78	92,14	Capaian s.d TW II
4	Persentase peningkatan investor	Persen	#N/A	10	14	10	Belum Rilis	Sampai TW II belum ada realisasi
5	Jumlah Investor yang berminat untuk Investasi	Investor	#N/A	7	12	12	14	Capaian s.d TW II
6	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai standar	Persen	#N/A	100	100	100	60	Capaian s.d TW II
7	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal	Persen	#N/A	15	15,5	16	7,8	Capaian s.d TW II
8	Persentase Pengaduan dan Permohonan Advokasi yang terlayani sesuai standar	Persen	#N/A	100	100	100	60	Capaian s.d TW II
9	Persentase Layanan PMPTSP yang memanfaatkan Sistem Informasi	Persen	#N/A	#N/A	100	100	60	Capaian s.d TW II dan Indikator baru
10	Persentase dokumen data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	Persen	#N/A	#N/A	100	100	60	Capaian s.d TW II dan Indikator baru
11	Persentase perubahan untuk mendukung implementasi RB,ZI, kinerja PPB dan MCP	Persen	#N/A	#N/A	100	100	60	Capaian s.d TW II dan Indikator baru
12	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Yang Sesuai Ketentuan	Persen	#N/A	#N/A	100	100	60	Capaian s.d TW II dan Indikator baru
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47*	51,17	51,17	52,51	Belum Rilis	
2	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	46,67	36,67	36,67	36,67	Belum Rilis	
3	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	60,72	61	61,4	61,64	Belum Rilis	
4	Peringkat Jawa Barat pada <i>Multievent</i> Nasional	Besar	2	2	1	3	Belum Rilis	
5	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	17,93	17,3	18.11	18,2	Belum Rilis	
6	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	Persen	57,86	68	#N/A	73,09	Belum Rilis	
7	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	3,1	3,1	3,84	4,27	Belum Rilis	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	14,25	10,5	14,39	14,46	Belum Rilis	
9	Tingkat Partisipasi Pemuda Jawa Barat dalam Kepramukaan	Persen	0,168	16,8	#N/A	17,05	Belum Rilis	
10	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik	Persen	67,14	87	#N/A	88,31	Belum Rilis	
11	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10	10	#N/A	10	Belum Rilis	
12	Persentase Medali Emas yang Diperoleh dalam Event Nasional	Persen	34,69	20	20	20	Belum Rilis	
20	STATISTIK							
1	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	poin	#N/A	2,82	3,07	2,87	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	#N/A	100	100	100	Belum Rilis	
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	#N/A	100	100	100	Belum Rilis	
21	PERSANDIAN							
1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	634	637	642	639	Belum Rilis	
2	Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024
22	KEBUDAYAAN							
1	Persentase Pembangunan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	30,36	24,21	38,39	33,21	12,84	
2	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	30,36	Belum Rilis	38,39	33,21	12,86	
3	Persentase Pengelolaan Warisan Budaya	Persen	56,65	34,24	56,53	33,47	11,81	
4	Persentase Penanganan Cagar Budaya	Persen	27,23	26,18	43,18	33,33	23,86	
5	Persentase Benda Koleksi Museum yang Dilindungi	Persen	24,57	25,13	33,97	33,18	16,59	
23	PERPUSTAKAAN							
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	72,73	60,02	72,76	72,84	Belum Rilis	Indikator Sasaran
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	70,1	70,47	75,07	73,1	Belum Rilis	Indikator Sasaran





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
3	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	Poin	1,4898	0,2331	#N/A	1,4902	Belum Rilis	IKP
4	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	Poin	0,0024	0,2207	#N/A	0,0028	Belum Rilis	IKP
5	Tingkat Kunjungan Pemustaka	Persen	0,4277	0,2571	#N/A	0,4282	Belum Rilis	IKP
6	Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Poin	2,1987	1	#N/A	2,1991	Belum Rilis	IKP
7	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	21	23	25	27	Belum Rilis	IKP
24	KEARSIPAN							
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik	Perangkat Daerah	28	36	38	37	Belum Rilis	Indikator Sasaran
2	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis	Persen	#N/A	68	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator Sasaran
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	85,83	100	100	100	Belum Rilis	IKP
4	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	60,14	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	IKP
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan	Milyar Rupiah	#N/A	24.780,19*	#N/A	25.309,19	12.016,22	IKU 2024 (Perubahan Indikator Sasaran)
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Ton	#N/A	1.589.754,29	#N/A		748.649,04	IKP
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/th	41	41.54	#N/A	#N/A	21,82	IKP
4	Persentase Ruang Laut yang Dimanfaatkan Sesuai dengan Ketentuan	Persen	N/A	84,82	85,5	86	84,82	IKP
5	Persentase pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	60,14	65,02	75	65,75	65,68	IKP (penyesuaian nama indikator)
6	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	277610,07	281.119,41	291284,15	281600	125.621,55	IKP
7	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1232495,71	1,308,634.88	1298112,2	1309100	623.027,49	IKP
8	Persentase kawasan konservasi perairan yang dikelola	Persen	#N/A	30,81	#N/A	#N/A		Indikator Sudah Tidak digunakan)





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
9	Jumlah produksi Garam	Ton	65554,34	394,462.07	245547	67000	302,13	IKP
26	PARIWISATA							
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	N/A	3,2	6,43	3,19	3,08	
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat	Kunjungan	537,443	646.437	#N/A	#N/A	0,24	Perubahan Satuan menjadi Persen
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Jawa Barat	Kunjungan	72.435.927	84.751.613	#N/A	#N/A	1,2	Perubahan Satuan menjadi Persen
4	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	#N/A	Indikator Baru di 2024	2,61	4,01	2,54	Indikator baru 2024
5	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	#N/A	Indikator Baru di 2024	1,32	1,52	1,3	Indikator baru 2024
6	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	24,39	31,71	40	60	7,19	
7	Persentase Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Nusantara	Persen	25,93	33,33	#N/A	31,82	5,96	
8	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	23,81	25,93	91,82	35,22	2,34	
27	PERTANIAN							
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	99,75	107,45	112,17	108,44	Belum Rilis	Indikator Tujuan
2	Produksi Peternakan	Ton	#N/A	2.403.121	2167697	2180630	Belum Rilis	Produksi peternakan (daging, telur, susu) digabung karena konsep perhitungan sama.
3	Persentase peningkatan mutu produk hewan	Persen	520	25,25	#N/A	15	Belum Rilis	Indikator Sasaran turun level menjadi IKP
4	Persentase peningkatan tingkat kelahiran ternak	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	1,5	1,5	Belum Rilis	IKP
5	Tingkat pemenuhan penataan prasarana peternakan	Persen	#N/A	87,82	33,3	66,7	Belum Rilis	IKP
6	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	74,09	75	Belum Rilis	IKP
7	Persentase pelaku usaha peternakan dengan produktivitas yang meningkat kinerjanya	Persen	#N/A	25	#N/A	75	Belum Rilis	IKP
8	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	12.962.696	13.086.61	16575477	15698506	7.901.905	IKP
9	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	#N/A	57,77	63.31	62,85	64,68	IKP
10	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	#N/A	160,32	211.59	160,75	128,12	IKP
11	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	Persen	#N/A	92,73	92.86	93,13	Belum Rilis	IKP





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
12	Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	#N/A	1.689.349	2,038,960	1983690	965.872	IKP
13	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	#N/A	207.505	158735	231237	129.171	IKP
14	Indeks Pertanaman (IP)	Persen	#N/A	2,04	2,10	2,07	Belum Rilis	IKP
15	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	Persen	#N/A	2,88	1,78	4,5	Belum Rilis	IKP
16	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	Persen	#N/A	100	100	100	Belum Rilis	IKP
17	Jumlah petani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh	Orang	#N/A	Indikator Baru di 2024	dalam konfirmasi ke bidang	7200	Belum Rilis	IKP
18	Persentase Kelompok Tani yang dibina oleh Penyuluh	Persen	#N/A	99	dalam konfirmasi ke bidang	99,1	Belum Rilis	IKP
19	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	Persen	#N/A	37,68	19,70	37,88	Belum Rilis	IKP
20	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	#N/A	88,98	89,60	89,7	Belum Rilis	IKP
21	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	#N/A	0,11	1,59	4,54	Belum Rilis	IKP
22	Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Persen	5,68	5,22	1,58	2	Belum Rilis	Indikator Sasaran
23	Nilai Tambah Produk Perkebunan	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	51,77	50	Belum Rilis	Indikator sasaran
24	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	Persen	31,84	39,06	40,45	41	Belum Rilis	IKP
25	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana pengolahan Perkebunan	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	11,54	15	Belum Rilis	IKP
26	Laju Peningkatan Petani yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	12	15	Belum Rilis	IKP
27	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	Persen	133,33	24,35	17,65	20	Belum Rilis	IKP
28	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana pascapanen dan pengolahan produk Perkebunan	Persen	N/A	24,35	14,29	10	Belum Rilis	IKP
29	Laju peningkatan area lahan perkebunan yang terfasilitasi penanganan dan pengendalian bencana perkebunan	Persen	N/A	62,5	100	63,5	Belum Rilis	IKP
30	Laju Peningkatan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	35,38	25	Belum Rilis	IKP





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
31	Presentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	25	Belum Rilis	IKP
32	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	Persen	26,91	28,29	34,52	29,5	Belum Rilis	IKP
28	KEHUTANAN							
1	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	0	32,33	32,88	33	Belum Rilis	
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	0	19	39,81	20,55	Belum Rilis	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (Poin)	Poin	41,88	41,99	42,07	43,28	Belum Rilis	
4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persen	0	32,33	32,88	5	Belum Rilis	
5	Persentase Peningkatan Pengelola Jasa Lingkungan Hutan yang Produktif	Persen	0	5	12,44	5	Belum Rilis	
6	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	0	9,8	8,06	5	Belum Rilis	
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	0	1,5	39,81	20,55	Belum Rilis	
8	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	Persen	0	100	100	100	Belum Rilis	
9	Persentase Lahan Kritis yang ditangani	Persen	0	2,49	0	5	Belum Rilis	
10	Persentase Gangguan dan kerusakan hutan di Jawa Barat yang tertangani	Persen	0	0,33	0,1	0,3	Belum Rilis	
11	Persentase Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai yang sudah Dipulihkan	Persen	0	49	53,91	57,09	Belum Rilis	
12	Persentase Peningkatan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix yang Ditangkarkan	Persen	0	12,31	0	23	Belum Rilis	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
1	Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.337,16	1.346,41	1391,67	1.400***	693,56	
2	Jumlah Konsumsi Listrik di Jawa Barat	GWh	65,23	67.355	7,61	78758	34.581	
3	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	2,46	5,49	70064	7,68	6,72	
4	Meningkatnya usaha pertambangan ramah lingkungan yang tertib teknis dan aspek pengusahaan.	Persen	#N/A	50	#N/A	56	20	Indikator tahun 2024 berubah menjadi meningkatnya usaha pertambangan ramah





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
								lingkungan yang tertib teknis dan aspek pengusaha
5	Persentase meningkatnya Konservasi pada cekungan air tanah di Jawa Barat	Persen	#N/A	30,42	#N/A	39,13	32,81	
6	Persentase pemenuhan Peningkatan Mutu Pelayanan penyediaan tenaga listrik kewenangan Provinsi	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	80	100	Perubahan indikator di 2024
7	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	80,78	70	51,47	Perubahan indikator di 2024
8	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	80,68	70	57,99	Perubahan indikator di 2024
9	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	77	70	53,62	Perubahan indikator di 2024
10	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	92,43	70	70,96	Perubahan indikator di 2024
11	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	87,77	70	58,6	Perubahan indikator di 2024
12	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	86,66	70	56,22	Perubahan indikator di 2024
13	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	80,55	70	42,78	Perubahan indikator di 2024
14	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	71,6	Perubahan indikator di 2024
15	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	75	Perubahan indikator di 2024





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
	Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur							
16	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	51	Perubahan indikator di 2024
17	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	53,75	Perubahan indikator di 2024
18	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	77,53	Perubahan indikator di 2024
19	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	55,04	Perubahan indikator di 2024
20	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	100	Perubahan indikator di 2024
21	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	75	Perubahan indikator di 2024
22	Persentase pemanfaatan EBT	Persen	#N/A		33	67	Belum Rilis	
23	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	#N/A	24,03	33	67	0	
24	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	#N/A	48,39	33	67	0	
25	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	#N/A	30,72	33	67	36,7	
26	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	#N/A	181,63	33	67	0	
27	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	#N/A	66,95	33	67	0	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
28	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	#N/A	24,92	33	67	0	
29	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	#N/A	46,58	33	67	0	
30	Persentase komoditas EBT yang diuji atau dikembangkan	Persen	#N/A	100	33	67	17,5	
31	Persentase usaha pertambangan yang tertib teknis	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	56,67	56	20	Indikator berubah menjadi persentase usaha pertambangan yang tertib teknis
32	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	76,47	62	38,43	Perubahan indikator di 2024
33	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	75	62	42,31	Perubahan indikator di 2024
35	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	88,89	62	46,3	Perubahan indikator di 2024
36	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	65	62	37,5	Perubahan indikator di 2024
37	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	70	62	32	Perubahan indikator di 2024
38	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	70	62	35	Perubahan indikator di 2024
40	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	71,43	62	29,41	Perubahan indikator di 2024
41	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	75	62	32,14	Perubahan indikator di 2024
42	Persentase pengujian kualitas bahan tambang	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	80	24,84	Perubahan indikator di 2024
43	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	32,87	15,59	32,38	Perubahan indikator di 2024





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
44	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas I Cianjur	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	38,87	18,96	33,8	Perubahan indikator di 2024
45	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas II Bogor	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	28,52	5,82	30,99	Perubahan indikator di 2024
46	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	33,65	24,46	42,4	Perubahan indikator di 2024
47	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas IV Bandung	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	32,03	27,21	31,65	Perubahan indikator di 2024
48	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas V Sumedang	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	34,26	10,37	40	Perubahan indikator di 2024
49	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	33,87	1,55	20	Perubahan indikator di 2024
50	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	33,16	20,77	27,68	Perubahan indikator di 2024
51	Persentase penetapan NPA	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	66	Belum Rilis	Perubahan indikator di 2024
52	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	95,06	66	85,24	Perubahan indikator di 2024
53	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	95,4	66	63,02	Perubahan indikator di 2024
54	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	96,25	66	55,77	Perubahan indikator di 2024
55	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	80,23	66	42,86	Perubahan indikator di 2024
56	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	83,68	66	67,74	Perubahan indikator di 2024
57	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	62,5	Perubahan indikator di 2024
58	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	66	76,57	Perubahan indikator di 2024
58	Persentase Meningkatnya Pengujian Kualitas Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	82,34	60	43,16	Perubahan indikator di 2024





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
30	PERDAGANGAN							
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,22	4,45	4,85	4,85	4,86	Triwulan I
2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Triliun Rupiah	349	378,83	408,26	403,58	99,39	Triwulan I
3	Laju pertumbuhan ekspor non migas	Persen	13,75	-5,22	3,47	1,6	1,3	s.d. Mei 2024
4	Pertumbuhan Layanan SKA	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	7,44	2,75	22,31	I
5	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perdagangan	Persen	100	Indikator Baru di 2024	100	100	100	
6	Peningkatan Nilai omset pelaku usaha yang terfasilitasi pemasaran produk dalam negeri	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	190	25	1466,07	
7	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkatkan Kualitasnya	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	8,89	5,75	7,65	
8	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan barang pokok	Persen	5,06	Indikator Baru di 2024	3,15	6	2,91	
9	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100	Indikator Baru di 2024	100	90	100	
10	Persentase barang beredar dan/atau jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	83,26	Indikator Baru di 2024	89	77	87	
11	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	77	73	74	
12	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon	Poin	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	4-5	4	
13	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Agro Bandung	Poin	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	4-5	Belum Rilis	
14	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Logam Elektronik Karawang	Poin	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	4-5	Belum Rilis	
15	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Keramik, Tabung Gas Bogor	Poin	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	4-5	Belum Rilis	
16	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna SKA	Miliar USD	12,25	Indikator Baru di 2024	14,11	10,5	5,42	
31	PERINDUSTRIAN							
1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	7,00	4,74	3,52	5,84	3,87	Triwulan I
2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Trilyun Rupiah	1023,4	1.099,08	1168,55	1167,82	289,81	Triwulan I





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
3	Nilai produksi Industri Pengolahan	Rupiah	N/A	Indikator Baru di 2024	2093,73	1164	476,07	
4	Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam	Pelaku Usaha	50	Indikator Baru di 2024	35	35	15	
5	Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani Pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Pelaku Usaha	50	Indikator Baru di 2024	102	110	12	
6	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Terhadap Izin Usaha Industri	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	87,5	> 50%	60	
7	Persentase peningkatan industri yang masuk SIINas	Persen	97,79	Indikator Baru di 2024	33,02	11	10,47	
32	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A (80,70)	A	A- (99.01)	A	Belum Rilis	
2	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	N/A	93,01	88,16	80,83	Belum Rilis	
3	Persentase Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis	Persen	N/A	100	100	87,12	Belum Rilis	
4	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	78,72	50,2	Belum Rilis	
5	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	62,72	50,2	Belum Rilis	
6	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	84,51	50,2	Belum Rilis	
7	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	70,02	50,2	Belum Rilis	
8	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup Administrasi Pembangunan	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	
9	Level Maturitas UKPBJ	Level	N/A	3	3	3	Belum Rilis	
10	Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	Peringkat	N/A	Indikator Baru di 2024	4	4	Belum Rilis	
11	Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	85	Belum Rilis	
12	Nilai Pelaporan Kinerja	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	13,55	12,44	Belum Rilis	
13	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai budaya kerja minimal "Baik"	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	100	73,68	Belum Rilis	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
14	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal kategori "B"	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	100	94	Belum Rilis	
15	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan kebijakan sistem kerja Dinamis	Persen	N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	
17	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro Hukum dan HAM	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	95,7	87,37	Belum Rilis	
18	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	91,11	91,34	Belum Rilis	
19	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	N/A	N/A	89,78	86,35	Belum Rilis	
20	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro Perekonomian	Poin	N/A	N/A	97,5	95,29	Belum Rilis	
21	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Poin	N/A	N/A	89,55	89,84	Belum Rilis	
22	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	#N/A	N/A	#N/A	96,91	Belum Rilis	
23	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro Organisasi	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	92,17	88,59	Belum Rilis	
24	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro Administrasi Pimpinan	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	96,03	94,71	Belum Rilis	
25	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Biro Umum	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	84,79	91,58	Belum Rilis	
33	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	N/A	4,76 Poin	4,77	4,78	Belum Rilis	
2	Persentase penyusunan Peraturan Daerah dan pelaksanaan publikasi	Persen	N/A	N/A	100	100	Belum Rilis	
3	Persentase penyusunan persetujuan anggaran dan pengawasan APBD	Persen	#N/A	N/A	#N/A	100	Belum Rilis	
4	Persentase penyusunan pembangunan berdasarkan penjangkauan aspirasi	Persen	N/A	N/A	100	100	Belum Rilis	
5	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan keuangan kesejahteraan, dan administrasi secara tepat waktu	Persen	N/A	100	100	100	Belum Rilis	
34	PERENCANAAN							





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	25,7	25,85	26,32	26	Belum Rilis	
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	N/A	Indikator Baru di 2024	27,05	26,69	Belum Rilis	Indikator baru
3	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	13,44	Belum Rilis	Indikator baru
4	Persentase Hasil Pengukuran Kinerja yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	11,4	Belum Rilis	Indikator baru
5	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	13,55	Belum Rilis	Indikator baru
6	Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	11,93	Belum Rilis	Indikator baru
7	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	13,29	Belum Rilis	Indikator baru
8	Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	9,9	Belum Rilis	Indikator baru
9	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	13,27	Belum Rilis	Indikator baru
10	Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	11,98	Belum Rilis	Indikator baru
35	KEUANGAN							
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Rilis	
2	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat beserta Pergub Penjabarannya	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum Rilis	





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
3	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	
4	Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Pajak yang tepat waktu	Tepat Waktu	#N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum Rilis	
5	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum Rilis	
6	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi/disahkan	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	
7	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	
8	Indeks Pengelolaan Aset	Poin	90	100	85,28	90	Belum Rilis	Indikator Baru di 2024
9	Persentase pendapatan pemanfaatan BMD terhadap total PAD	Persen	0,67	1,09	0,084	0,077	Belum Rilis	Indikator Baru di 2024
10	Jumlah terbit buku sertifikat tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Buku Sertifikat	#N/A	0	67	150	Belum Rilis	Indikator Baru di 2024
11	Tingkat Capaian Target Pendapatan Daerah	Persen	#N/A	70,1	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator Baru di 2024
12	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	70	60,56	68,99	64,26	Belum Rilis	Indikator Baru di 2024
13	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	#N/A	-0,55	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator Baru di 2024
36	KEPEGAWAIAN							
1	Indeks Sistem Merit	Poin	396,50	396,5	400	400	400	
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin	#N/A	53,8	53,93*	53,96	Belum Rilis	Indikator baru serta capaian 2023 dan 2024 belum rilis
3	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	116,5	116,5	115	115	115	
4	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	40	40	40	40	40	
5	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	120	120	125	125	125	
6	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120	120	120	120	120	
7	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	#N/A	21.04	20.88*	20.9	Belum Rilis	Indikator baru serta capaian 2023 dan 2024 belum rilis
8	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	#N/A	27.76	28.06*	28.07	Belum Rilis	Indikator baru serta capaian 2023 dan 2024 belum rilis





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
9	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	#N/A	5.00	5.00*	4,99	Belum Rilis	Indikator baru serta capaian 2023 dan 2024 belum rilis
37 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	100	36.08	32,80*	33.00	Belum Rilis	Indikator baru serta capaian 2023 dan 2024 belum rilis
2	Persentase peningkatan kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial	Persen	#N/A	#N/A	115,53	16.50	Belum Rilis	Indikator baru serta capaian 2024 belum rilis
3	Persentase peningkatan Kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional	Persen	#N/A	#N/A	48,3	16.50	Belum Rilis	Indikator baru serta capaian 2024 belum rilis
4	Indeks Implementasi <i>Corporate University</i>	kategori	#N/A	Indikator Baru di 2024	Mature (2955)	Mature (2955)	Belum Rilis	IKP diubah menjadi Indeks Implementasi <i>Corporate University</i> ; Indikator baru serta capaian 2024 belum rilis
38 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	#N/A	74,77	81,27 (Sangat Inovatif)	71,76 (Sangat Inovatif)	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada.
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.
3	Persentase Kekayaan Intelektual yang terlindungi	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.
4	Persentase Kematangan Inovasi Daerah	Persen	#N/A	71,08	79,77	67,05	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024.
5	Persentase Informasi Publik Bidang Kelitbangan	Persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator dihapus/tidak digunakan di Tahun 2024.
6	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang siap untuk didiseminasikan	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.
7	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang siap untuk didiseminasikan	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.
8	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang siap untuk didiseminasikan	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
9	Persentase Hasil Kelitbangan yang didiseminasikan	Persen	100	100	100	100	Belum Rilis	
10	Persentase Perlindungan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.
11	Persentase Inovasi Daerah yang terverifikasi	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.
12	Persentase publikasi kelitbangan	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada/dapat dihitung.
39	PENGHUBUNG							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penghubung	Poin	96,33	96,63	96,85	96,75	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada.
2	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol, Promosi dan Informasi yang Difasilitasi	Persen	#N/A	100	#N/A	100	Belum Rilis	Indikator baru digunakan Tahun 2024. Realisasi 2023 sudah ada.
40	PENGAWASAN							
1	Peringkat Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	Peringkat	#N/A	Belum rilis	#N/A	#N/A	-	Tidak lagi menjadi IKU
2	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nlai	#N/A	A	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Tidak lagi menjadi IKU, penyesuaian menjadi SAKIP dimensi Evaluasi di Tahun 2024
3	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Opini	#N/A	WTP	WTP	WTP	Belum Rilis	
4	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	#N/A	3	#N/A	3	Belum Rilis	
5	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD- PPK)	Persen	#N/A	97,62	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Tidak menjadi IKU di 2024, tetapi menjadi Indikator Kinerja Program dan perubahan nomenklatur menjadi MCP
6	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Program di 2024





NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2022	2023	2024	2025		KETERANGAN
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI TW I	
7	Nilai SAKIP komponen evaluasi internal	Nilai	#N/A	21,61	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Program di 2024
8	Persentase kriteria LKPD yang terpenuhi sesuai ketentuan	persen	#N/A	100	#N/A	#N/A	100	Tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Program di 2024
9	Penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	persen	#N/A	72	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Penyesuaian nomenklatur di 2024
10	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	persen	#N/A	95,93	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Pemisahan indikator di 2024 sesuai instansi yang melaksanakan pemeriksaan.
11	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah	#N/A	38	#N/A	#N/A	38	Penyesuaian nomenklatur dan perhitungan menjadi persentase di 2024
12	Persentase nilai MCP	Persen	#N/A	97,62	#N/A	97,27	Belum Rilis	
41 PEMERINTAHAN UMUM								
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34	83,04	83,04	83,55	Belum Rilis	Capaian melebihi Target. Pada RKPD 2025 sudah disesuaikan
2	Nilai Aspek Kebebasan	Poin	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator Baru
3	Nilai Aspek Kesenjangan	Poin	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator Baru
4	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Poin	#N/A	Indikator Baru di 2024	#N/A	#N/A	Belum Rilis	Indikator Baru
5	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	100	100	Belum Rilis	Indikator Baru
6	Persentase pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan beragama	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	0,409	0,414	Belum Rilis	Indikator Baru
7	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	46,42	47,78	Belum Rilis	Indikator Baru
8	Persentase Kerjasama Lembaga antar umat beragama	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	35,29	41,18	Belum Rilis	Indikator Baru
9	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi	Persen	0,037	Indikator Baru di 2024	0,039	0,041	Belum Rilis	Indikator Baru
10	Persentase pencegahan pengguna narkoba bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	5165	Indikator Baru di 2024	5,422	5,678	Belum Rilis	Indikator Baru
11	Persentase peserta (pemilih) yang mengikuti pendidikan politik	Persen	#N/A	Indikator Baru di 2024	0,007	0,007	Belum Rilis	Indikator Baru





Sumber: Bappeda 2025, diolah.



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



2.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025

Pelaporan evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I diarahkan pada data realisasi program yang dilaksanakan sampai dengan bulan Maret. Perangkat Daerah yang telah melaporkan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I sebanyak 38 dari 38 Perangkat Daerah. Seluruh Perangkat Daerah telah bekerja sama dengan baik menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja. Pelaporan Biro di Sekretariat Daerah sudah digabung dalam Laporan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah. Jumlah program pada APBD Tahun 2025 Triwulan I berjumlah 202 program. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dari 202 program Perangkat Daerah, terdapat sebanyak 200 program telah dilaksanakan oleh 38 Perangkat Daerah pada Triwulan I-2025, untuk realisasi kinerja dan anggarannya tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Kode Organisasi	Organisasi	Tahun 2024		Triwulan 1 Tahun 2025	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	91,25%	98,95%	31,23 %	13,66 %
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	95,39%	91,43%	13,13 %	14,62 %
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	100,00%	97,02%	19,41 %	24,07 %
2.11.0.00.0.00.03.0000	Dinas Lingkungan Hidup	97,83%	95,58%	2,86 %	12,92 %
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	98,96%	97,20%	24,24 %	6,45 %
1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	97,42%	92,84%	15,42 %	6,34 %
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95,41%	98,68%	27,64 %	22,57 %
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	79,94%	98,99%	14,69 %	16,82 %
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	98,64%	94,87%	25,56 %	19,14 %
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00%	95,90%	15,69 %	27,14 %
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,57%	98,34%	5,19 %	25,01 %
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	95,76%	93,65%	18,02 %	6,13 %





Kode Organisasi	Organisasi	Tahun 2024		Triwulan 1 Tahun 2025	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	92,98%	98,33%	23,82 %	40,14 %
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	83,33%	87,87%	33,34 %	11,81 %
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73,26%	93,93%	0,00 %	24,43 %
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	93,07%	97,97%	7,98 %	81,08 %
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	93,56%	93,01%	30,37 %	15,38 %
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	98,96%	97,35%	10,64 %	16,60 %
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	94,23%	94,50%	6,89 %	21,86 %
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	95,56%	97,59%	0,00 %	19,37 %
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98,50%	95,37%	24,55 %	17,68 %
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	91,86%	89,09%	21,09 %	19,79 %
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93,33%	96,76%	3,45 %	6,73 %
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99,94%	97,80%	18,87 %	25,24 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	99,91%	96,93%	21,14 %	20,78 %
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	85,84%	97,62%	33,89 %	17,00 %
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	98,57%	95,42%	7,63 %	6,01 %
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	99,38%	96,26%	14,60 %	15,60 %
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100,00%	89,12%	32,76 %	25,27 %
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	100,00%	79,17%	18,36 %	20,82 %
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	95,34%	96,43%	10,67 %	22,70 %
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	100,00%	93,18%	21,67 %	21,75 %
1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Sumber Daya Air	87,84%	96,79%	25,46 %	11,92 %
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,36%	97,57%	15,38 %	22,08 %
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	96,43%	96,61%	13,59 %	24,36 %
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	99,35%	96,69%	9,10 %	19,84 %
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95,28%	96,16%	13,09 %	13,87 %
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	96,27%	95,50%	19,93 %	17,05 %

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025





Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan capaian anggaran dan kinerja Program Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan atau realisasi anggaran mencapai Rp4.023.709.338.713,- atau sudah tercapai sebesar 13,02 persen dari total Anggaran Rp Rp30.905.991.076.124,- pada RKPD Tahun 2025 sebesar ;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan penyerapan anggaran terbesar, yaitu sebesar 81,08% persen dan penyerapan anggaran terendah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar 6,01 persen;
3. Untuk rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah untuk Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 17,14 persen; dan
4. Predikat tingkat capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah masih “Sangat Rendah”.

Pada tabel tersebut realisasi kinerja yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja Triwulan I tahun 2025 disandingkan dengan data akhir tahun 2024, karena sebagian besar indikator baru bisa diketahui realisasinya pada akhir tahun 2025.

Selain hal tersebut di atas, terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perangkat Daerah tidak hanya melaksanakan kegiatan reguler sesuai tugas pokok fungsinya, tetapi harus bertanggung jawab terhadap kegiatan seperti bantuan sosial, hibah maupun belanja transfer. Hal ini berimplikasi terhadap rendahnya realisasi (penyerapan) anggaran di beberapa kegiatan. Begitu juga permasalahan belum terampilnya SDM keuangan dalam mengoperasikan sistem SIPD perencanaan dan penganggaran serta jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di Perangkat Daerah. Adanya penyesuaian PPTK yang sebelumnya diampu oleh Pejabat Pengawas yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional serta pemahaman tentang proses Pengadaan Barang/Jasa masih belum optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.





Tabel 2.5
Realisasi Anggaran Program pada Setiap Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 14.922.703.763.062	97,46%	Rp 17.304.057.684.358	Rp 2.211.998.319.799	12,78 %	Sangat Rendah
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rp 10.964.412.025.263	98,95%	Rp 11.443.059.785.637	Rp 1.563.648.976.772	13,66 %	Sangat Rendah
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	Rp 10.964.412.025.263	98,95%	Rp 11.443.059.785.637	Rp 1.563.648.976.772	13,66 %	Sangat Rendah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 5.238.865.693.639	99,19%	Rp 5.785.585.991.774	Rp 1.284.511.146.580	22,20 %	Sangat Rendah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 5.714.987.649.603	98,74%	Rp 5.653.252.187.448	Rp 278.847.656.364	4,93 %	Sangat Rendah
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 10.558.682.021	93,08%	Rp 4.221.606.415	Rp 290.173.828	6,87 %	Sangat Rendah
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp 2.178.443.221.666	91,43%	Rp 2.507.065.115.451	Rp 366.536.249.058	14,62 %	Sangat Rendah
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	Rp 2.178.443.221.666	91,43%	Rp 2.507.065.115.451	Rp 366.536.249.058	14,62 %	Sangat Rendah
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 1.526.535.910.891	89,87%	Rp 1.824.879.358.288	Rp 292.424.203.485	16,02 %	Sangat Rendah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 587.177.735.065	95,31%	Rp 661.565.212.289	Rp 69.748.183.641	10,54 %	Sangat Rendah
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 62.789.902.840	95,24%	Rp 20.150.232.597	Rp 4.327.117.876	21,47 %	Sangat Rendah
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 269.521.190	93,83%	Rp 127.516.081	Rp 8.369.000	6,56 %	Sangat Rendah
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 1.670.151.680	96,15%	Rp 342.796.196	Rp 28.375.056	8,28 %	Sangat Rendah
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 1.368.731.335.721	96,76%	Rp 2.929.575.501.079	Rp 211.545.090.094	7,22 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	Rp 1.042.891.031.688	97,20%	Rp 2.382.451.132.173	Rp 153.593.067.347	6,45 %	Sangat Rendah
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 160.659.824.805	96,23%	Rp 222.963.230.767	Rp 36.549.912.116	16,39 %	Sangat Rendah
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 874.752.359.137	97,41%	Rp 2.153.050.301.216	Rp 116.438.889.651	5,41 %	Sangat Rendah
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 2.093.822.342	87,34%	Rp 2.011.318.330	Rp 230.012.323	11,44 %	Sangat Rendah
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 5.385.025.404	96,42%	Rp 4.426.281.860	Rp 374.253.257	8,46 %	Sangat Rendah
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	Rp 265.876.533.659	96,79%	Rp 482.823.016.767	Rp 57.553.319.034	11,92 %	Sangat Rendah
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 91.536.939.886	93,64%	Rp 142.614.616.353	Rp 22.001.850.871	15,43 %	Sangat Rendah
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 172.571.035.647	98,57%	Rp 339.484.732.510	Rp 35.520.490.546	10,46 %	Sangat Rendah
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 1.768.558.126	94,97%	Rp 723.667.904	Rp 30.977.617	4,28 %	Sangat Rendah
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 59.963.770.374	89,56%	Rp 64.301.352.139	Rp 398.703.713	0,62 %	Sangat Rendah
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 5.053.506.449	87,87%	Rp 6.470.404.537	Rp 113.380.066	1,75 %	Sangat Rendah
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp 6.583.640.082	71,71%	Rp 25.457.899.824	Rp 75.962.912	0,30 %	Sangat Rendah
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 2.979.197.191	97,37%	Rp 2.783.985.074	Rp 38.958.380	1,40 %	Sangat Rendah
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 261.846.688	94,70%	Rp 147.862.998	Rp 30.914.380	20,91 %	Sangat Rendah
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 39.712.872.319	92,17%	Rp 444.684.696	Rp 81.760.110	18,39 %	Sangat Rendah
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 5.372.707.645	95,99%	Rp 28.996.515.010	Rp 57.727.865	0,20 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 162.918.113.967	94,05%	Rp 161.831.409.120	Rp 13.805.335.914	8,53 %	Sangat Rendah
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 162.918.113.967	94,05%	Rp 161.831.409.120	Rp 13.805.335.914	8,53 %	Sangat Rendah
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 59.179.179.993	95,49%	Rp 74.925.345.872	Rp 13.521.315.255	18,05 %	Sangat Rendah
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 57.354.655.053	94,67%	Rp 3.820.708.417	Rp 172.972.383	4,53 %	Sangat Rendah
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 42.426.107.941	91,19%	Rp 77.092.098.289	Rp 23.771.956	0,03 %	Sangat Rendah
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 3.958.170.980	95,72%	Rp 5.993.256.542	Rp 87.276.320	1,46 %	Sangat Rendah
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 71.373.704.004	92,25%	Rp 90.158.250.710	Rp 14.973.818.327	16,61 %	Sangat Rendah
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	Rp 38.116.489.757	89,09%	Rp 41.680.556.630	Rp 8.250.194.454	19,79 %	Sangat Rendah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 25.096.685.991	96,86%	Rp 29.480.115.247	Rp 6.639.582.929	22,52 %	Sangat Rendah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 13.019.803.766	77,17%	Rp 12.200.441.383	Rp 1.610.611.525	13,20 %	Sangat Rendah
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 33.257.214.247	96,16%	Rp 48.477.694.080	Rp 6.723.623.873	13,87 %	Sangat Rendah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 23.833.270.668	96,41%	Rp 36.575.946.411	Rp 5.659.741.717	15,47 %	Sangat Rendah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 8.848.612.675	95,32%	Rp 11.244.982.100	Rp 1.051.145.156	9,35 %	Sangat Rendah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 575.330.904	98,76%	Rp 656.765.569	Rp 12.737.000	1,94 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp 176.825.362.441	97,02%	Rp 172.367.622.361	Rp 41.488.849.634	24,07 %	Sangat Rendah
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	Rp 176.825.362.441	97,02%	Rp 172.367.622.361	Rp 41.488.849.634	24,07 %	Sangat Rendah
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 128.785.182.229	97,27%	Rp 131.061.536.830	Rp 32.043.023.876	24,45 %	Sangat Rendah
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 11.943.189.454	92,35%	Rp 4.393.896.690	Rp 1.280.570.500	29,14 %	Sangat Rendah
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp 33.633.500	99,95%	Rp 20.400.000	Rp 2.000.000	9,80 %	Sangat Rendah
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 27.768.583.309	97,55%	Rp 29.464.093.063	Rp 5.560.298.162	18,87 %	Sangat Rendah
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 2.269.444.045	97,21%	Rp 962.307.629	Rp 44.826.994	4,66 %	Sangat Rendah
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 5.803.178.922	98,91%	Rp 6.243.242.378	Rp 2.495.930.650	39,98 %	Sangat Rendah
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 222.150.982	100,00%	Rp 222.145.771	Rp 62.199.452	28,00 %	Sangat Rendah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 1.763.607.133.533	96,48%	Rp 2.390.746.418.278	Rp 693.256.625.332	29,00 %	Sangat Rendah
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Rp 134.780.971.429	98,68%	Rp 154.320.057.789	Rp 34.890.043.210	22,61 %	Sangat Rendah
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 134.780.971.429	98,68%	Rp 154.320.057.789	Rp 34.890.043.210	22,61 %	Sangat Rendah
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 120.039.847.147	98,77%	Rp 126.518.302.062	Rp 32.809.413.120	25,93 %	Sangat Rendah
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp 18.140.300	95,57%	Rp 54.630.739	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 5.594.778.020	98,74%	Rp 18.142.899.427	Rp 1.466.247.521	8,08 %	Sangat Rendah
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 5.786.536.091	96,63%	Rp 7.060.531.309	Rp 141.891.361	2,01 %	Sangat Rendah
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 1.551.930.748	98,07%	Rp 1.225.965.881	Rp 195.652.540	15,96 %	Sangat Rendah
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Rp 1.789.739.123	99,89%	Rp 1.317.728.371	Rp 276.838.668	21,01 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 30.350.165.347	98,81%	Rp 29.213.455.020	Rp 6.906.281.307	23,64 %	Sangat Rendah
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 30.350.165.347	98,81%	Rp 29.213.455.020	Rp 6.906.281.307	23,64 %	Sangat Rendah
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 25.258.543.729	98,71%	Rp 25.662.923.055	Rp 6.378.684.673	24,86 %	Sangat Rendah
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 2.261.557.750	99,61%	Rp 1.324.269.867	Rp 161.630.856	12,21 %	Sangat Rendah
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 888.100.113	99,41%	Rp 601.449.230	Rp 109.920.441	18,28 %	Sangat Rendah
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 398.101.635	99,20%	Rp 163.287.107	Rp 28.249.742	17,30 %	Sangat Rendah
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 507.153.200	99,94%	Rp 423.329.360	Rp 11.758.000	2,78 %	Sangat Rendah
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 425.388.123	99,99%	Rp 353.412.238	Rp 86.148.484	24,38 %	Sangat Rendah
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 611.320.797	97,34%	Rp 684.784.163	Rp 129.889.111	18,97 %	Sangat Rendah
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rp 111.826.139.522	93,38%	Rp 125.094.316.312	Rp 24.588.994.604	19,66 %	Sangat Rendah
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Rp 111.826.139.522	93,38%	Rp 125.094.316.312	Rp 24.588.994.604	19,66 %	Sangat Rendah
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 94.973.561.378	96,15%	Rp 109.247.044.015	Rp 23.788.106.399	21,77 %	Sangat Rendah
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 2.033.855.647	98,11%	Rp 1.806.614.737	Rp 315.377.423	17,46 %	Sangat Rendah
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 14.418.431.397	77,94%	Rp 13.710.195.560	Rp 437.962.340	3,19 %	Sangat Rendah
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 400.291.100	98,30%	Rp 330.462.000	Rp 47.548.442	14,39 %	Sangat Rendah
2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Rp 1.420.999.570	99,91%	Rp 729.966.994	Rp 174.438.253	23,90 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
1.04.1.03.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 1.420.999.570	99,91%	Rp 729.966.994	Rp 174.438.253	23,90 %	Sangat Rendah
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Rp 307.447.065	100,00%	Rp 197.592.759	Rp 49.690.846	25,15 %	Sangat Rendah
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 93.704.912	98,84%	Rp 77.346.827	Rp 17.042.000	22,03 %	Sangat Rendah
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 116.706.295	100,00%	Rp 53.692.600	Rp 13.254.380	24,69 %	Sangat Rendah
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp 465.132.203	99,97%	Rp 264.698.078	Rp 51.069.332	19,29 %	Sangat Rendah
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 438.009.095	100,00%	Rp 136.636.730	Rp 43.381.695	31,75 %	Sangat Rendah
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rp 141.045.327.062	95,58%	Rp 201.447.124.587	Rp 26.027.194.424	12,92 %	Sangat Rendah
2.11.0.00.0.00.03.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 141.045.327.062	95,58%	Rp 201.447.124.587	Rp 26.027.194.424	12,92 %	Sangat Rendah
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 62.588.888.339	98,45%	Rp 58.439.342.593	Rp 14.348.605.010	24,55 %	Sangat Rendah
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 1.269.324.632	100,00%	Rp 1.098.193.699	Rp 92.742.005	8,44 %	Sangat Rendah
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 5.085.868.209	99,70%	Rp 5.461.016.580	Rp 833.409.586	15,26 %	Sangat Rendah
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 332.300.775	68,87%	Rp 623.335.261	Rp 76.659.385	12,30 %	Sangat Rendah
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp 127.108.620	99,23%	Rp 138.273.050	Rp 17.655.528	12,77 %	Sangat Rendah
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 853.107.092	100,00%	Rp 638.838.948	Rp 135.790.330	21,26 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp 145.814.460	99,44%	Rp 132.639.036	Rp 19.039.835	14,35 %	Sangat Rendah
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 1.133.492.146	99,79%	Rp 842.239.750	Rp 42.487.335	5,04 %	Sangat Rendah
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 393.480.800	99,39%	Rp 361.783.696	Rp 87.619.170	24,22 %	Sangat Rendah
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 2.428.019.123	99,98%	Rp 1.956.592.146	Rp 261.065.157	13,34 %	Sangat Rendah
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 66.687.922.866	92,55%	Rp 131.754.869.828	Rp 10.112.121.083	7,67 %	Sangat Rendah
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 16.095.650.379	95,90%	Rp 13.616.421.548	Rp 3.694.920.488	27,14 %	Sangat Rendah
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 16.095.650.379	95,90%	Rp 13.616.421.548	Rp 3.694.920.488	27,14 %	Sangat Rendah
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 14.435.699.527	95,75%	Rp 12.987.185.354	Rp 3.525.421.824	27,15 %	Sangat Rendah
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 638.045.271	97,34%	Rp 139.350.820	Rp 8.839.000	6,34 %	Sangat Rendah
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 213.722.930	95,61%	Rp 222.954.256	Rp 63.306.500	28,39 %	Sangat Rendah
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 744.063.381	97,62%	Rp 253.206.118	Rp 96.471.164	38,10 %	Sangat Rendah
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 64.119.270	95,30%	Rp 13.725.000	Rp 882.000	6,43 %	Sangat Rendah
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 102.714.638.234	98,34%	Rp 59.479.134.635	Rp 14.873.592.508	25,01 %	Sangat Rendah
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 102.714.638.234	98,34%	Rp 59.479.134.635	Rp 14.873.592.508	25,01 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 40.510.990.922	96,18%	Rp 43.727.429.733	Rp 9.280.426.488	21,22 %	Sangat Rendah
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp 305.208.664	99,55%	Rp 146.873.000	Rp 113.081.000	76,99 %	Tinggi
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp 152.624.751	94,28%	Rp 44.582.500	Rp 1.160.000	2,60 %	Sangat Rendah
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 38.113.902.410	99,92%	Rp 5.880.204.809	Rp 1.708.332.789	29,05 %	Sangat Rendah
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 23.631.911.487	99,62%	Rp 9.680.044.593	Rp 3.770.592.231	38,95 %	Sangat Rendah
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 15.966.642.187	99,31%	Rp 12.705.952.654	Rp 144.621.430	1,14 %	Sangat Rendah
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 15.966.642.187	99,31%	Rp 12.705.952.654	Rp 144.621.430	1,14 %	Sangat Rendah
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 5.997.336.436	99,23%	Rp 123.465.340	Rp 14.894.500	12,06 %	Sangat Rendah
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 754.472.858	99,83%	Rp 4.322.928.272	Rp 72.177.430	1,67 %	Sangat Rendah
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 9.214.832.893	99,33%	Rp 8.259.559.042	Rp 57.549.500	0,70 %	Sangat Rendah
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rp 221.475.170.062	93,65%	Rp 880.700.627.944	Rp 53.959.936.994	6,13 %	Sangat Rendah
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 221.475.170.062	93,65%	Rp 880.700.627.944	Rp 53.959.936.994	6,13 %	Sangat Rendah
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 108.553.953.021	98,74%	Rp 146.058.623.234	Rp 25.241.231.131	17,28 %	Sangat Rendah
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 107.778.415.637	88,87%	Rp 719.635.004.908	Rp 27.464.546.313	3,82 %	Sangat Rendah
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 4.101.941.124	97,82%	Rp 11.183.530.476	Rp 1.232.684.050	11,02 %	Sangat Rendah
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rp 1.040.860.280	96,00%	Rp 3.823.469.326	Rp 21.475.500	0,56 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 211.549.355.924	98,29%	Rp 179.374.757.934	Rp 72.843.823.551	40,61 %	Sangat Rendah
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 211.549.355.924	98,29%	Rp 179.374.757.934	Rp 72.843.823.551	40,61 %	Sangat Rendah
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 59.948.579.596	97,04%	Rp 48.141.114.027	Rp 12.090.172.797	25,11 %	Sangat Rendah
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 107.383.040.348	98,99%	Rp 115.374.232.612	Rp 54.568.732.314	47,30 %	Sangat Rendah
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 44.217.735.980	98,33%	Rp 15.859.411.295	Rp 6.184.918.440	39,00 %	Sangat Rendah
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp 71.757.006.664	87,87%	Rp 73.622.951.826	Rp 8.696.431.555	11,81 %	Sangat Rendah
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	Rp 71.757.006.664	87,87%	Rp 73.622.951.826	Rp 8.696.431.555	11,81 %	Sangat Rendah
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 37.706.976.251	90,00%	Rp 36.548.318.748	Rp 7.843.515.780	21,46 %	Sangat Rendah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp 1.358.088.622	97,62%	Rp 530.501.441	Rp 55.802.976	10,52 %	Sangat Rendah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 846.053.435	95,32%	Rp 492.626.108	Rp 32.106.800	6,52 %	Sangat Rendah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 448.258.625	94,19%	Rp 177.112.497	Rp 15.220.500	8,59 %	Sangat Rendah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 3.619.694.300	67,79%	Rp 893.977.535	Rp 116.857.164	13,07 %	Sangat Rendah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 9.546.098.838	79,66%	Rp 30.674.471.792	Rp 468.609.675	1,53 %	Sangat Rendah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 9.584.466.647	90,61%	Rp 1.288.208.785	Rp 76.159.330	5,91 %	Sangat Rendah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 8.647.369.946	94,97%	Rp 3.017.734.920	Rp 88.159.330	2,92 %	Sangat Rendah
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rp 54.647.500.823	93,93%	Rp 48.424.291.616	Rp 11.831.349.464	24,43 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 54.647.500.823	93,93%	Rp 48.424.291.616	Rp 11.831.349.464	24,43 %	Sangat Rendah
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 45.536.154.571	94,23%	Rp 42.614.750.287	Rp 11.049.490.635	25,93 %	Sangat Rendah
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 4.726.320.572	88,25%	Rp 3.702.870.827	Rp 630.810.832	17,04 %	Sangat Rendah
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 1.998.673.600	98,06%	Rp 925.748.807	Rp 41.949.817	4,53 %	Sangat Rendah
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 820.318.908	99,20%	Rp 386.514.549	Rp 34.552.275	8,94 %	Sangat Rendah
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 867.409.250	98,71%	Rp 365.596.000	Rp 52.733.400	14,42 %	Sangat Rendah
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 698.623.922	92,35%	Rp 428.811.146	Rp 21.812.505	5,09 %	Sangat Rendah
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp 553.560.855.116	97,97%	Rp 515.069.578.366	Rp 417.636.101.120	81,08 %	Tinggi
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 553.560.855.116	97,97%	Rp 515.069.578.366	Rp 417.636.101.120	81,08 %	Tinggi
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 43.654.740.567	97,88%	Rp 40.720.532.347	Rp 10.559.629.638	25,93 %	Sangat Rendah
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 16.211.677.719	97,11%	Rp 5.052.513.595	Rp 239.407.848	4,74 %	Sangat Rendah
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 486.777.086.390	97,99%	Rp 468.269.536.479	Rp 406.837.063.634	86,88 %	Tinggi
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 6.917.350.440	98,63%	Rp 1.026.995.945	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp 2.087.859.655	99,71%	Rp 1.471.424.238	Rp 244.419.962	16,61 %	Sangat Rendah
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 2.087.859.655	99,71%	Rp 1.471.424.238	Rp 244.419.962	16,61 %	Sangat Rendah
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 2.087.859.655	99,71%	Rp 1.471.424.238	Rp 244.419.962	16,61 %	Sangat Rendah
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp 2.856.967.700	99,76%	Rp 1.402.280.100	Rp 67.900.878	4,84 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 2.856.967.700	99,76%	Rp 1.402.280.100	Rp 67.900.878	4,84 %	Sangat Rendah
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 2.856.967.700	99,76%	Rp 1.402.280.100	Rp 67.900.878	4,84 %	Sangat Rendah
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Rp 41.333.566.270	99,05%	Rp 46.275.966.083	Rp 4.610.769.802	9,96 %	Sangat Rendah
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp 41.333.566.270	99,05%	Rp 46.275.966.083	Rp 4.610.769.802	9,96 %	Sangat Rendah
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 12.244.117.467	98,75%	Rp 11.642.461.041	Rp 124.294.408	1,07 %	Sangat Rendah
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 736.138.534	99,91%	Rp 473.485.746	Rp 116.740.714	24,66 %	Sangat Rendah
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 23.744.620.744	99,13%	Rp 30.782.490.000	Rp 4.369.734.680	14,20 %	Sangat Rendah
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp 4.608.689.525	99,28%	Rp 3.377.529.296	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp 49.310.378.288	97,78%	Rp 47.454.684.263	Rp 11.975.222.106	25,24 %	Sangat Rendah
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 49.310.378.288	97,78%	Rp 47.454.684.263	Rp 11.975.222.106	25,24 %	Sangat Rendah
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 47.629.943.419	97,79%	Rp 46.289.040.414	Rp 11.801.827.325	25,50 %	Sangat Rendah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 1.487.708.629	97,31%	Rp 1.004.855.787	Rp 151.071.151	15,03 %	Sangat Rendah
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp 192.726.240	98,76%	Rp 160.788.062	Rp 22.323.630	13,88 %	Sangat Rendah
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Rp 827.939.301	99,26%	Rp 343.426.369	Rp 90.583.676	26,38 %	Sangat Rendah
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 827.939.301	99,26%	Rp 343.426.369	Rp 90.583.676	26,38 %	Sangat Rendah
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 320.242.165	99,06%	Rp 194.676.787	Rp 51.854.000	26,64 %	Sangat Rendah
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 507.697.136	99,38%	Rp 148.749.582	Rp 38.729.676	26,04 %	Sangat Rendah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp 1.136.016.855.821	95,35%	Rp 1.213.245.066.277	Rp 223.695.007.643	18,44 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 117.912.241.139	96,93%	Rp 106.643.211.591	Rp 22.161.480.717	20,78 %	Sangat Rendah
3.25.3.25.3.25.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 117.912.241.139	96,93%	Rp 106.643.211.591	Rp 22.161.480.717	20,78 %	Sangat Rendah
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 76.326.240.323	97,13%	Rp 79.185.292.697	Rp 18.049.545.962	22,79 %	Sangat Rendah
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Rp 13.285.601.818	98,41%	Rp 4.694.247.446	Rp 804.149.017	17,13 %	Sangat Rendah
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 12.985.012.764	93,55%	Rp 7.008.308.960	Rp 2.176.201.103	31,05 %	Sangat Rendah
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 5.333.511.379	98,46%	Rp 12.433.449.474	Rp 464.163.368	3,73 %	Sangat Rendah
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 5.240.332.092	98,07%	Rp 1.916.181.417	Rp 338.670.095	17,67 %	Sangat Rendah
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 4.741.542.763	96,20%	Rp 1.405.731.597	Rp 328.751.172	23,39 %	Sangat Rendah
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Rp 75.294.824.295	96,86%	Rp 63.810.379.674	Rp 14.099.345.367	22,10 %	Sangat Rendah
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp 75.294.824.295	96,86%	Rp 63.810.379.674	Rp 14.099.345.367	22,10 %	Sangat Rendah
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 51.869.734.310	96,98%	Rp 55.539.248.106	Rp 12.520.584.261	22,54 %	Sangat Rendah
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 5.413.236.630	93,69%	Rp 1.989.965.554	Rp 267.967.101	13,47 %	Sangat Rendah
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 10.211.572.190	99,16%	Rp 4.709.278.000	Rp 916.860.166	19,47 %	Sangat Rendah
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 7.800.281.165	95,41%	Rp 1.571.888.014	Rp 393.933.839	25,06 %	Sangat Rendah
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Rp 445.250.253.886	94,53%	Rp 535.208.913.074	Rp 85.243.226.627	15,93 %	Sangat Rendah
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Rp 53.363.983.545	98,14%	Rp 63.092.070.063	Rp 11.435.555.870	18,13 %	Sangat Rendah
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp 2.731.509.283	Rp 730.319.627	26,74 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 28.136.981.524	97,61%	Rp 33.340.244.224	Rp 6.503.504.026	19,51 %	Sangat Rendah
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 16.058.596.150	99,13%	Rp 17.250.947.693	Rp 528.101.500	3,06 %	Sangat Rendah
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 6.054.864.156	98,39%	Rp 7.071.394.409	Rp 3.392.449.098	47,97 %	Sangat Rendah
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 3.113.541.715	97,45%	Rp 2.697.974.454	Rp 281.181.619	10,42 %	Sangat Rendah
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Rp 293.802.667.127	93,01%	Rp 374.523.579.845	Rp 57.610.308.125	15,38 %	Sangat Rendah
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 163.479.314.862	89,95%	Rp 216.999.726.908	Rp 38.952.552.505	17,95 %	Sangat Rendah
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 9.357.550.421	90,18%	Rp 50.110.566.575	Rp 1.848.773.049	3,69 %	Sangat Rendah
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 18.952.044.543	96,35%	Rp 24.025.038.787	Rp 371.084.876	1,54 %	Sangat Rendah
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 34.137.722.906	99,23%	Rp 25.797.034.535	Rp 5.558.748.356	21,55 %	Sangat Rendah
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 67.681.650.395	97,40%	Rp 57.551.213.040	Rp 10.857.279.339	18,87 %	Sangat Rendah
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp 194.384.000	99,68%	Rp 40.000.000	Rp 21.870.000	54,68 %	Rendah
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PERKEBUNAN	Rp 98.083.603.214	97,35%	Rp 97.593.263.166	Rp 16.197.362.632	16,60 %	Sangat Rendah
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 57.664.623.883	98,19%	Rp 62.005.563.147	Rp 14.702.117.706	23,71 %	Sangat Rendah
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 18.936.185.860	94,34%	Rp 16.377.654.122	Rp 1.020.397.351	6,23 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 8.907.766.868	97,89%	Rp 8.509.904.372	Rp 126.546.835	1,49 %	Sangat Rendah
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 4.061.565.781	98,25%	Rp 6.783.703.863	Rp 200.934.670	2,96 %	Sangat Rendah
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp 423.017.696	94,06%	Rp 195.109.845	Rp 41.580.000	21,31 %	Sangat Rendah
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 8.090.443.126	97,87%	Rp 3.721.327.817	Rp 105.786.070	2,84 %	Sangat Rendah
3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Rp 231.889.656.055	94,50%	Rp 246.265.548.247	Rp 53.825.749.295	21,86 %	Sangat Rendah
3.28.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEHUTANAN	Rp 231.889.656.055	94,50%	Rp 246.265.548.247	Rp 53.825.749.295	21,86 %	Sangat Rendah
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 210.352.011.319	94,14%	Rp 226.128.428.905	Rp 53.510.535.350	23,66 %	Sangat Rendah
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp 20.833.789.481	98,81%	Rp 13.722.567.863	Rp 239.583.253	1,75 %	Sangat Rendah
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rp 152.988.070	94,55%	Rp 93.000.824	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Rp 347.240.685	70,42%	Rp 6.223.554.959	Rp 75.630.692	1,22 %	Sangat Rendah
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Rp 203.626.500	98,29%	Rp 97.995.696	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
3,29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rp 121.069.987.003	97,59%	Rp 130.759.468.330	Rp 25.329.769.778	19,37 %	Sangat Rendah
3.29.0.00.0.00.01.0000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rp 121.069.987.003	97,59%	Rp 130.759.468.330	Rp 25.329.769.778	19,37 %	Sangat Rendah
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 89.169.780.469	98,36%	Rp 103.652.159.810	Rp 24.339.561.604	23,48 %	Sangat Rendah
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Rp 2.683.215.960	99,29%	Rp 1.338.438.170	Rp 178.759.734	13,36 %	Sangat Rendah
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Rp 2.827.173.271	98,33%	Rp 2.050.921.612	Rp 229.547.071	11,19 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Rp 12.750.736.103	92,27%	Rp 6.550.416.890	Rp 181.401.573	2,77 %	Sangat Rendah
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rp 13.639.081.200	97,40%	Rp 17.167.531.848	Rp 400.499.796	2,33 %	Sangat Rendah
3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rp 41.673.484.073	93,25%	Rp 31.052.501.703	Rp 1.686.500.017	5,43 %	Sangat Rendah
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 41.673.484.073	93,25%	Rp 31.052.501.703	Rp 1.686.500.017	5,43 %	Sangat Rendah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 423.760.169	90,13%	Rp 236.449.034	Rp 61.233.497	25,90 %	Sangat Rendah
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 424.158.918	92,64%	Rp 229.034.000	Rp 20.791.139	9,08 %	Sangat Rendah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 14.258.176.944	89,57%	Rp 13.732.616.601	Rp 168.956.639	1,23 %	Sangat Rendah
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 4.039.202.821	93,62%	Rp 1.168.840.427	Rp 43.525.664	3,72 %	Sangat Rendah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 12.344.311.775	95,64%	Rp 6.396.808.113	Rp 215.979.042	3,38 %	Sangat Rendah
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 3.364.146.591	91,83%	Rp 215.180.900	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 6.819.726.855	98,00%	Rp 9.073.572.628	Rp 1.176.014.036	12,96 %	Sangat Rendah
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp 102.788.555.628	96,26%	Rp 99.272.619.338	Rp 21.348.935.842	21,51 %	Sangat Rendah
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 102.788.555.628	96,26%	Rp 99.272.619.338	Rp 21.348.935.842	21,51 %	Sangat Rendah
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 89.606.964.087	96,93%	Rp 90.824.292.877	Rp 20.805.314.484	22,91 %	Sangat Rendah
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 12.788.177.866	91,89%	Rp 8.190.182.434	Rp 511.331.660	6,24 %	Sangat Rendah
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 145.852.500	97,24%	Rp 107.693.029	Rp 16.788.170	15,59 %	Sangat Rendah
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 247.561.175	91,64%	Rp 150.450.998	Rp 15.501.528	10,30 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Rp 137.853.742	96,01%	Rp 232.424.320	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 137.853.742	96,01%	Rp 232.424.320	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 137.853.742	96,01%	Rp 232.424.320	Rp -	0,00 %	Sangat Rendah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 1.814.137.532.593	93,37%	Rp 1.255.386.892.811	Rp 264.258.271.480	21,05 %	Sangat Rendah
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.235.418.189.844	95,50%	Rp 644.822.524.704	Rp 109.941.272.063	17,05 %	Sangat Rendah
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.235.418.189.844	95,50%	Rp 644.822.524.704	Rp 109.941.272.063	17,05 %	Sangat Rendah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 436.468.051.775	95,15%	Rp 478.088.514.331	Rp 87.182.764.145	18,24 %	Sangat Rendah
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp 16.401.891.652	85,94%	Rp 7.157.803.910	Rp 1.223.305.030	17,09 %	Sangat Rendah
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Rp 4.609.322.180	98,98%	Rp 2.122.061.304	Rp 205.274.816	9,67 %	Sangat Rendah
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 760.845.433.964	96,09%	Rp 146.548.351.335	Rp 20.085.949.568	13,71 %	Sangat Rendah
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 10.031.282.154	88,13%	Rp 6.755.652.715	Rp 518.531.600	7,68 %	Sangat Rendah
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp 329.172.505	86,65%	Rp 137.034.875	Rp 12.250.500	8,94 %	Sangat Rendah
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 4.183.767.250	82,22%	Rp 3.194.362.126	Rp 500.917.376	15,68 %	Sangat Rendah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp 2.549.268.364	100,00%	Rp 818.744.108	Rp 212.279.028	25,93 %	Sangat Rendah
4,02	SEKRETARIAT DPRD	Rp 578.719.342.749	89,12%	Rp 610.564.368.107	Rp 154.316.999.417	25,27 %	Sangat Rendah
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp 578.719.342.749	89,12%	Rp 610.564.368.107	Rp 154.316.999.417	25,27 %	Sangat Rendah
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 371.659.972.066	94,44%	Rp 296.011.529.857	Rp 79.356.242.226	26,81 %	Sangat Rendah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 207.059.370.683	80,94%	Rp 314.552.838.250	Rp 74.960.757.191	23,83 %	Sangat Rendah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 14.346.376.123.143	95,47%	Rp 8.187.909.155.697	Rp 579.523.262.503	7,08 %	Sangat Rendah
5,01	PERENCANAAN	Rp 78.427.511.870	97,57%	Rp 72.955.556.385	Rp 16.107.275.750	22,08 %	Sangat Rendah



A040B8A293



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 78.427.511.870	97,57%	Rp 72.955.556.385	Rp 16.107.275.750	22,08 %	Sangat Rendah
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 57.393.624.399	96,99%	Rp 59.778.742.801	Rp 14.544.021.454	24,33 %	Sangat Rendah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 10.716.772.920	99,05%	Rp 6.095.868.622	Rp 673.475.042	11,05 %	Sangat Rendah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 10.317.114.551	99,35%	Rp 7.080.944.962	Rp 889.779.254	12,57 %	Sangat Rendah
5,02	KEUANGAN	Rp 14.090.772.860.813	95,45%	Rp 7.950.712.825.750	Rp 526.903.984.712	6,63 %	Sangat Rendah
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 13.576.581.454.198	95,42%	Rp 7.439.357.089.669	Rp 447.142.035.421	6,01 %	Sangat Rendah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 109.445.014.103	96,05%	Rp 113.294.311.772	Rp 21.491.852.873	18,97 %	Sangat Rendah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 13.460.054.224.444	95,41%	Rp 7.320.394.183.682	Rp 424.551.681.722	5,80 %	Sangat Rendah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 7.082.215.651	95,99%	Rp 5.668.594.215	Rp 1.098.500.826	19,38 %	Sangat Rendah
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 514.191.406.615	96,26%	Rp 511.355.736.081	Rp 79.761.949.291	15,60 %	Sangat Rendah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 467.820.063.373	96,26%	Rp 481.496.952.520	Rp 75.918.952.019	15,77 %	Sangat Rendah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 46.371.343.242	96,28%	Rp 29.858.783.561	Rp 3.842.997.272	12,87 %	Sangat Rendah
5,03	KEPEGAWAIAN	Rp 80.345.178.919	96,61%	Rp 66.254.500.375	Rp 16.139.453.522	24,36 %	Sangat Rendah
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 80.345.178.919	96,61%	Rp 66.254.500.375	Rp 16.139.453.522	24,36 %	Sangat Rendah
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 61.307.966.176	97,56%	Rp 56.492.536.584	Rp 14.465.548.508	25,61 %	Sangat Rendah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 19.037.212.743	93,69%	Rp 9.761.963.791	Rp 1.673.905.014	17,15 %	Sangat Rendah
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 61.249.500.917	96,69%	Rp 61.378.689.881	Rp 12.178.647.738	19,84 %	Sangat Rendah
5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 61.249.500.917	96,69%	Rp 61.378.689.881	Rp 12.178.647.738	19,84 %	Sangat Rendah
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 50.129.359.273	96,87%	Rp 51.171.473.425	Rp 11.621.662.928	22,71 %	Sangat Rendah





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 11.120.141.644	95,91%	Rp 10.207.216.456	Rp 556.984.810	5,46 %	Sangat Rendah
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 23.625.506.108	96,43%	Rp 24.423.728.048	Rp 5.544.469.104	22,70 %	Sangat Rendah
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 23.625.506.108	96,43%	Rp 24.423.728.048	Rp 5.544.469.104	22,70 %	Sangat Rendah
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 19.698.596.042	97,85%	Rp 21.159.166.273	Rp 5.315.511.158	25,12 %	Sangat Rendah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 3.926.910.066	89,89%	Rp 3.264.561.775	Rp 228.957.946	7,01 %	Sangat Rendah
5,07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	Rp 11.955.564.516	93,18%	Rp 12.183.855.258	Rp 2.649.431.677	21,75 %	Sangat Rendah
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	Rp 11.955.564.516	93,18%	Rp 12.183.855.258	Rp 2.649.431.677	21,75 %	Sangat Rendah
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 10.870.651.042	92,57%	Rp 11.267.832.294	Rp 2.494.975.347	22,14 %	Sangat Rendah
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Rp 1.084.913.474	99,78%	Rp 916.022.964	Rp 154.456.330	16,86 %	Sangat Rendah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 95.814.988.216	79,17%	Rp 96.971.139.571	Rp 20.184.988.797	20,82 %	Sangat Rendah
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 95.814.988.216	79,17%	Rp 96.971.139.571	Rp 20.184.988.797	20,82 %	Sangat Rendah
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	Rp 95.814.988.216	79,17%	Rp 96.971.139.571	Rp 20.184.988.797	20,82 %	Sangat Rendah
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 61.220.897.121	96,44%	Rp 55.351.601.667	Rp 13.969.776.626	25,24 %	Sangat Rendah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 26.723.673.274	59,00%	Rp 38.409.907.922	Rp 5.724.806.931	14,90 %	Sangat Rendah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 7.870.417.821	64,26%	Rp 3.209.629.982	Rp 490.405.240	15,28 %	Sangat Rendah
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.440.924.583.843	96,76%	Rp 457.674.719.132	Rp 30.792.863.159	6,73 %	Sangat Rendah
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 1.440.924.583.843	96,76%	Rp 457.674.719.132	Rp 30.792.863.159	6,73 %	Sangat Rendah
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 1.440.924.583.843	96,76%	Rp 457.674.719.132	Rp 30.792.863.159	6,73 %	Sangat Rendah
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 28.777.247.937	97,92%	Rp 23.929.427.074	Rp 7.388.789.219	30,88 %	Sangat Rendah





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Organisasi / Program	Tahun 2024		Tahun 2025			
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.) TW I	Capaian (%)	Predikat
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 3.798.232.670	99,67%	Rp 10.497.906.948	Rp 2.865.358.540	27,29 %	Sangat Rendah
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 1.387.721.324.669	96,71%	Rp 414.845.841.992	Rp 19.382.197.500	4,67 %	Sangat Rendah
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 18.499.478.400	98,14%	Rp 5.548.156.901	Rp 213.757.000	3,85 %	Sangat Rendah
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 1.119.206.869	99,76%	Rp 2.303.666.217	Rp 780.801.000	33,89 %	Sangat Rendah
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 1.009.093.298	99,93%	Rp 549.720.000	Rp 161.959.900	29,46 %	Sangat Rendah
Total Anggaran		Rp 35.519.580.980.211	96,23%	Rp 30.905.991.076.124	Rp 4.023.709.338.713	13,02 %	Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB II. EVALUASI HASIL TRIMWULAN 2025



Capaian kinerja Program dibawah 50% (Sangat Rendah) pada Perangkat Daerah tersebut disebabkan oleh beberapa kendala umum yang dihadapi antara lain: Pelaksanaan program yang tidak di awal tahun, kekurangcermatan SDM bidang perencanaan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau penempatan anggaran yang belum tepat sesuai rencana kegiatan. Selain itu, kendala sumber daya yang terbatas seperti kurangnya tenaga kerja yang terampil, baik dalam kompetensi teknis maupun administratif serta ketersediaan anggaran di beberapa program Perangkat Daerah yang sangat terbatas. Kendala lain yaitu proses pengadaan yang mengalami keterlambatan, bahkan di beberapa kegiatan masih terdapat proses pengadaan belum dimulai. Ditambah lagi, banyak kegiatan yang sifatnya penyediaan, sedangkan di awal-awal tahun pelaksanaan kegiatan masih minim. Proses rotasi atau mutasi pegawai yang sangat dinamis juga berpengaruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan

2.3 Kinerja Pelaksanaan SPM Tahun 2024

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam penyediaan layanan publik yang memadai dan berkualitas. Untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan yang layak, pemerintah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah serangkaian ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Penerapan SPM ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kinerja pelayanan publik serta menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini





sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Pelayanan dasar merupakan urusan wajib bagi Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan semua komponen dalam keseluruhan jenis pelayanan dasar untuk daerah provinsi yang termasuk dalam Pasal 3 dalam Permendagri 59 Tahun 2021. Adapun jenis pelayanan yang dimaksud di antaranya:

1. Pendidikan Menengah;
2. Pendidikan Khusus;
3. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi;
4. Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota;
5. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota;
6. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
7. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi;
8. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Dalam Panti;





9. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti;
10. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti;
11. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti; dan
12. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana.

Capaian penerapan SPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Urusan Pendidikan pada pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebesar 100%. Untuk capaian SPM urusan kesehatan yakni untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi sebesar 100%.

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum di tahun 2024 untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas kabupaten/kota adalah 100%. Untuk Urusan Perumahan Rakyat pun Jawa Barat mencapai persentase 100% pada pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Urusan Tratibumlinmas untuk pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi mencapai 100%. Untuk Capaian Urusan Sosial pada pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi juga meraih capaian 100%.

Pada Tahun 2024 Capaian SPM Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah 100%. Meskipun sudah di katagori Tuntas Paripurna, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap berusaha untuk





menjaga konsistensi penerapan SPM dan peningkatan mutu layanan serta target penerima layanan. SPM sendiri akan menjadi tolak ukur dari perencanaan pembangunan daerah di tahun berikutnya sehingga diharapkan pengalokasian anggaran pemerintah daerah dapat diprioritaskan untuk urusan pemerintahan yang berkaitan dengan SPM.



A040B8A293



Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

NO	URUSAN	JENIS LAYANAN	2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	PENDIDIKAN	pendidikan menengah	100%	91,59%	100%	99,58%	100%	100%
		pendidikan khusus	100%	89,21%	100%	98,89%	100%	100%
2	KESEHATAN	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%





NO	URUSAN	JENIS LAYANAN	2022		2023		2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
6	SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100%

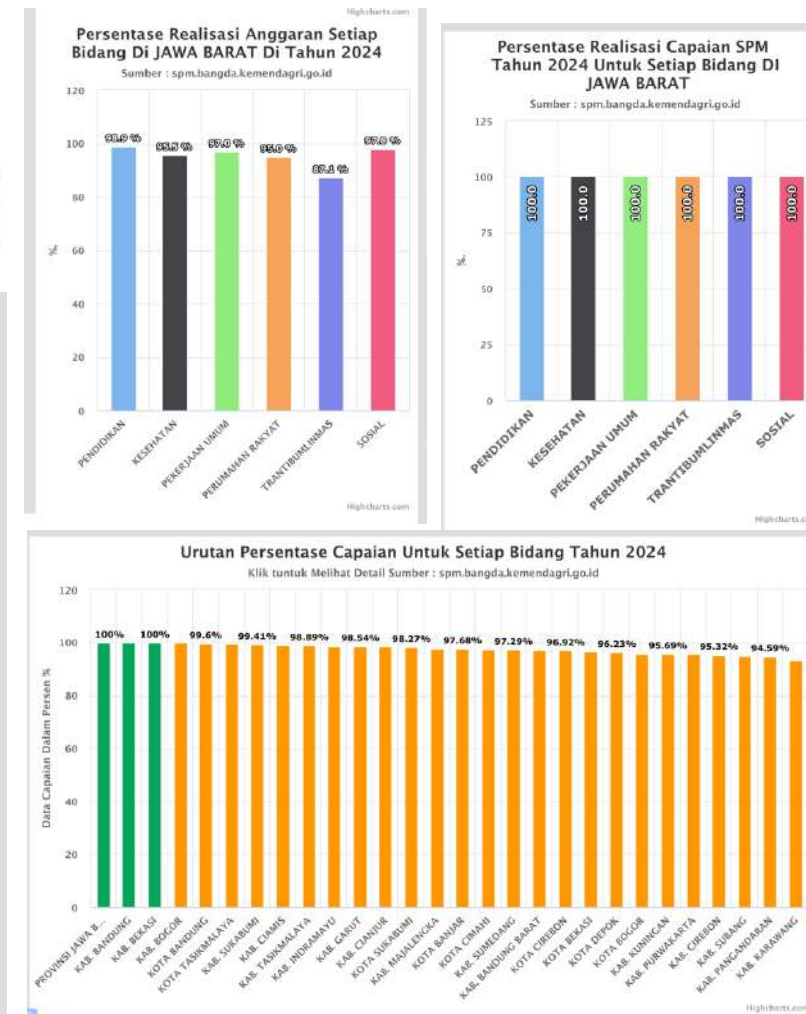
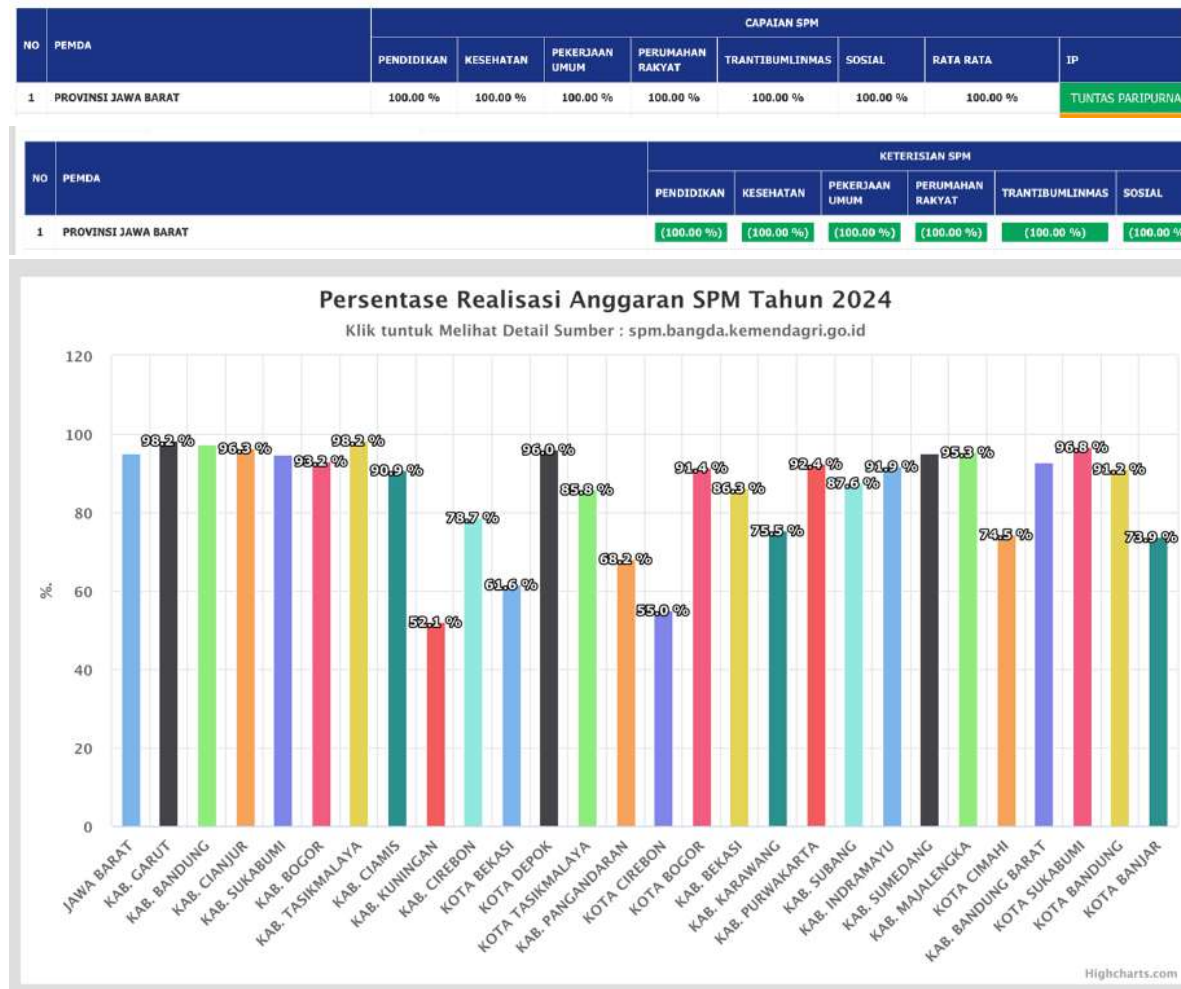
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2025, diolah



A040B8A293



Gambar 2.2
Dashboard hasil pengisian Data Capaian SPM Tahun 2024 pada platform e-SPM



Sumber: dashboard e-SPM 2025, diolah



A040B8A293



2.3.1 Permasalahan Pemenuhan SPM Per Bidang Urusan

Dalam pelaksanaan pemenuhan wajib yang harus di penuhi pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2024 meskipun telah mampu mencapai katagori Tuntas Paripurna, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan SPM tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu segera dilakukan pemecahan masalah agar dapat menjaga konsistensi capaian SPM dimasa mendatang. Berikut permasalahan yang dihadapi di berbagai sektor pemenuhan SPM pada Tahun 2024.

2.3.1.1 Pendidikan

SPM Bidang Pendidikan dengan Dinas Pendidikan sebagai *leading sector* pengampu pelayanan dasar yang meliputi pelayanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus telah melaksanakan keseluruhan pelayanan dasar dimana pelayanan dimaksud berada pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 persen.

Tabel 2.7
Capaian SPM Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (PENDIDIKAN MENENGAH)			PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (PENDIDIKAN KHUSUS)		
		Target (Penerima)	Realisasi (Penerima)	Capaian (%)	Target (Penerima)	Realisasi (Penerima)	Capaian (%)
1	2022	2.054.146	1.881.305	91,59	30.251	26.987	89,21
2	2023	100 (Persen)	96,13 (Persen)	96,13	100 (Persen)	97,38 (Persen)	97,38
3	2024	1.657.571	1.672.345	100	28,06	29,141	100

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat, diolah

Adapun beberapa Permasalahan dalam urusan Pendidikan antara lain : Data yang bersumber pada Dapodik dan Rapor Pendidikan untuk *cut-off* nya berbeda waktu. *Cut-off* rapor pendidikan di bulan Juli sedangkan untuk perencanaan SPM menggunakan tahun anggaran (mulai bulan Januari); Penghitungan kebutuhan kurang maksimal dikarenakan keterbatasan akan ketersediaan dan kesiapan data; Rapor pendidikan yang saat ini ada adalah rapor pendidikan tahun 2023 yang di *update* bukan merupakan hasil ANBK 2024, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas





kemajuan dari aksi dan pembinaan pada satuan pendidikan yang telah dilakukan pada tahun 2024; Alokasi anggaran yang tidak mencukupi sering menjadi hambatan utama dalam memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM), ini tercermin tidak semua Sub-Kegiatan dapat dianggarkan; Upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih kendala: Akses pendidikan di Provinsi Jawa Barat masih mengalami kendala, diantaranya: [1] Masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki sekolah jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi; [2] Persepsi masyarakat sekolah negeri masih menjadi prioritas untuk menyekolakan anak-anak mereka sehingga ini juga menjadi masalah baru apabila di kecamatan tempat tinggal tidak terdapat sekolah negeri; Upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih kendala: Pembangunan infrastruktur: Mengutamakan daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (Kondisi Geografis); Staff atau pegawai pada Bidang, UPTD dan Cabang Dinas sering berganti; Dengan memberikan bantuan berupa Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah SMA, SMK dan SLB baik Negeri dan Swasta, diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan masyarakat dan dapat menurunkan Angka Putus Sekolah; Untuk mengentaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) terutama pada Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dari jenjang SMP ke SMA, perlu dibangun kolaborasi dan komitmen antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan dukungan data yang akurat khusus warga miskin.

Ketimpangan distribusi layanan pendidikan masih menjadi persoalan nyata, ditunjukkan dengan masih adanya 14 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK baik negeri maupun swasta, serta 128 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Selain itu, kebutuhan ruang kelas baru (RKB) sangat tinggi, mencapai 35.098 unit berdasarkan kondisi eksisting rombongan belajar, dan bahkan melonjak hingga 628.841 unit jika mengacu pada kebutuhan ideal dengan rombongan belajar maksimal. Kesenjangan ini menyebabkan banyak sekolah harus memanfaatkan ruang non-belajar seperti laboratorium atau aula untuk proses pembelajaran. Oleh karena itu poin permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM bidang Pendidikan ialah:





a. Permasalahan

1. Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan masih belum optimal karena masih ada kecamatan yang tidak ada sekolah negeri bahkan tidak terdapat sekolah negeri maupun swasta.
2. Perlu dilakukan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Terdapat kesulitan dalam menghimpun data pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi) pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) yang menjadi kewenangan Kementerian Agama.
4. Program bantuan untuk siswa KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) pada tahun 2024 tidak dapat dicairkan karena terkendala dengan mekanisme dan teknis pencairan.

b. Solusi

1. Dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan salah satunya membangun Unit Sekolah Baru (USB) di kecamatan yang belum memiliki sekolah SMA dan SMK, dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk meningkatkan daya tampung khususnya sekolah status negeri, dikarenakan animo masyarakat menyekolahkan putra/putrinya ke sekolah negeri.
2. Berkoordinasi dengan DISDUKCAPIL dan DINSOS untuk melakukan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS).
3. Memanfaatkan API (Application Programming Interface) dari PUSDATIN untuk mendapatkan data jenjang Madrasah Aliyah (MA) yang menjadi kewenangan Kementerian Agama.
4. Membuat SOP dan mekanisme untuk bantuan KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) sehingga pada tahun 2025 dapat dicairkan.

2.3.1.2 Kesehatan

Progres kinerja pelaksanaan SPM pada pelayanan dasar Bidang Kesehatan, yakni sebesar 100 persen dengan upaya yang dilakukan melalui penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perseorangan





(UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Tabel 2.8
Capaian SPM Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi		
		Target (Jiwa)	Capaian (Jiwa)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	2022	135.147	135.147	100	100 (Persen)	100 (Persen)	100
2	2023	680	680	100	100 (Persen)	100 (Persen)	100
3	2024	26621	26621	100	2431	2431	100

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat, diolah

Adapun permasalahan pada urusan Kesehatan adalah : Proses pengumpulan data KLB bersifat dinamis. Setiap kali ada kasus baru yang terkonfirmasi, data akan segera diperbarui. Hal ini menyebabkan angka kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pembaruan data juga dipengaruhi oleh kualitas dan kecepatan pelaporan data yang dilaporkan.; Penghitungan kebutuhan KLB menjadi kurang maksimal, karna dalam penentuannya ditentukan kepada kejadian KLB; Perencanaan dan penganggaran menjadi kurang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan KLB berpatokan kepada kejadian KLB. Pelatihan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan KLB belum optimal karena adanya pergantian SDM. Hal ini menyebabkan hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang efektif untuk mempertahankan tenaga kesehatan yang terlatih dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan baru. Selain dari pada itu, Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan diantaranya:

- Belum semua kabupaten kota melaksanakan pelaporan jika terjadi bencana atau KLB wabah, hal ini tampak dari kelengkapan data puskesmas rendah, pelaporan terlambat, dan analisis data rendah.
- Kesulitan memenuhi kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).





- c. Tidak semua kabupaten kota mempunyai anggaran pada saat bencana maupun KLB wabah, Keterbatasan anggaran ini menyebabkan ketidakpenuhan standar pelayanan minimal.
- d. Minimnya penyediaan barang/jasa seperti alat skrining, BMHP, dan obat-obatan.
- e. Kurangnya pengetahuan puskesmas tentang kebutuhan SPM yang mengakibatkan kebutuhan tidak terpenuhi.
- f. Kolaborasi rumah sakit dan puskesmas PONEK dan PONEK belum optimal.
- g. Sumber daya terbatas dan perubahan pengelola program yang sering terjadi.
- h. Penggunaan data sasaran Pusdatin Kemenkes dalam menetapkan target SPM.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada bidang urusan pekerjaan umum, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dan
2. Penyediaan layanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pelayanan dasar tersebut ditujukan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, dan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat.





Tabel 2.9
Capaian SPM Sektor Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota			Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		
		Target (l/d)	Capaian (l/d)	Capaian (%)	Target (jiwa)	Capaian (jiwa)	Capaian (%)
1	2022	350	350	100	145906	145906	100
2	2023	5979	5979	100	750	750	100
3	2024	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100	6 Kab/kota	6 Kab/Kota	100

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat, diolah

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Urusan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota, penyesuaian kebutuhan air minum harus sesuai dengan demand kebutuhan air minum curah.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antarlain: ● Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. ● Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. ● Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. ● Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. ● Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat, diolah

Pada Tahun 2024 SPM Bidang Pekerjaan Umum didukung dengan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional yang masing-masing sudah mencapai kinerja





sebesar 100 persen. Adapun permasalahan pada bidang Pekerjaan umum adalah : 1) Perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk urusan air minum mengalami kendala di kode rekening SIPD, sehingga yang seharusnya Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Pembebasan Lahan untuk memperluas area SPAM Bandung Selatan masuk di sub kegiatan Pembangunan SPAM Regional. 2) SPAM 1 (Bandung Selatan): Bupati Bandung belum bersedia melepaskan tanah yang telah dibangun IPA SPAM Regional Metropolitan Bandung Selatan (aset Kementerian PUPR yg akan diserahkan ke Pemprov Jabar), Saat ini menggunakan mekanisme sewa (BUMD PT Tirta Gemah Ripah sebagai pengelola SPAM Regional kepada Perumda Tirta Raharja selaku pemilik tanah). 3) SPAM 2 (Jatigede): Pengadaan tanah sisa untuk Pembangunan IPA SPAM Jatigede Tahap I memerlukan KKPR dimana memerlukan AMDAL sebagai persyaratan, saat ini proses AMDAL oleh PT. SMI sedang di pending oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Perlunya persiapan pembebasan yang lebih mendalam, sehingga saat anggaran pembebasan lahan sudah tersedia lahan sudah bisa dibebaskan.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat

Berdasarkan data capaian, seluruh target pelayanan dasar telah terpenuhi dengan tingkat pencapaian yang maksimal (100%). Secara rinci, untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, telah dilaksanakan program rehabilitasi rumah yang terdampak bencana dengan mutu pelayanan mencapai 100%. Sementara itu, untuk indikator fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi, pencapaian juga menunjukkan hasil optimal, yaitu melalui fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan yang juga tercapai 100%.





Tabel 2.11
Capaian SPM Sektor Perumahan Rakyat
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi (Unit)			Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		
		Target (Unit)	Capaian (Unit)	Capaian (%)	Target (Unit)	Capaian (Unit)	Capaian (%)
1	2022	59	59	100	200	200	100
2	2023	60472	60472	100	80	80	100
3	2024	80	80	100	672	672	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2025

Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi hak dasar masyarakat di sektor perumahan, serta memperkuat implementasi SPM sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi dasar penting khususnya dalam menjamin akses terhadap hunian yang layak bagi masyarakat rentan bencana dan terdampak kebijakan pembangunan. Pemerintah Provinsi memiliki peran penting dalam hal pemberian bantuan teknis meliputi: a) Pendampingan penggantian kerugian; b) Penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus; c) Pembangunan Rumah Susun Umum; d) Pembangunan Rumah Khusus; dan/atau; e) Pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Sedangkan untuk Bidang Perumahan didukung dengan pelaksanaan kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi serta sosialisasi dan persiapan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana, dimana Program Pengembangan Perumahan yang mengampu kegiatan tersebut mencapai kinerja 100 persen, Adapun Permasalahan pencapaian kinerja tersebut, diantaranya karena Pemenuhan Wajib yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai saat ini memiliki permasalahan yang dapat menghambat dalam pencapaiannya yaitu masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah menjadi Penerima Bantuan Dampak Sosial Masyarakat terhadap Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, tetapi masih adanya Masyarakat yang tidak setuju dengan nominal pergantian tersebut, dalam penilaian appraisal telah sesuai dengan standar dan aturan yang





ditetapkan. Sehingga perlu untuk Memberikan pengertian dan penjelasan kepada Masyarakat bahwa dalam penilaian appraisal telah sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan.

2.3.1.5 Trantibumlinmas

Terkait dengan SPM Bidang Trantibumlinmas, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan capaian sebesar 100 persen. Dimana terlihat bagaimana pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.12
Capaian SPM Sektor Trantibumlinmas Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	2022	100 (Persen)	100 (Persen)	100
2	2023	100 (Persen)	100 (Persen)	100
3	2024	50	50	100

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat, diolah

Pada tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mengalami beberapa kendala dalam penerapan SPM bidang trantibumlinmas sub urusan trantibum. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Ketersediaan Sub kegiatan Khusus Belum terdapat sub kegiatan khusus pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi untuk pengumpulan data;
2. Pada tabel Form 5.C.3 jika dilihat dari kolom yang disediakan, tidak bisa menggambarkan kebutuhan personil Satpol PP yang dibutuhkan karena tidak ada kolom yang disediakan untuk jabatan yang dibutuhkan oleh Satpol PP. Bahkan jika dilihat dari kolom yang disediakan pada Form 5.C.3 tersebut, bukan merupakan





kewenangan dari Satpol PP mengingat Satpol PP tidak dapat menganggarkan anggaran untuk pemenuhan personil Satpol PP karena penganggaran personil Satpol PP (PNS/P3K) merupakan kewenangan mutlak (BKN/BKD). Adapun di Jawa Barat kebutuhan personil/anggota/PNS pada suatu instansi perangkat daerah penghitungannya dilakukan analisis oleh Biro Organisasi yang menghasilkan peta jabatan dan untuk mengisi jabatan sesuai dengan peta jabatan yang telah disusun oleh Biro Organisasi tersebut, merupakan wewenang dari BKD Jabar dalam melakukan rotasi dan mutasi pegawai. Jika dilihat dari Program dan kegiatan yang menjadi rujukan dalam pemilihan program pada tahun 2024 yaitu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi juga tidak ditemukan program/kegiatan/subkegiatan untuk pemenuhan personil Satpol PP. Dibandingkan dengan 5 urusan SPM lainnya, anggaran untuk SPM sub urusan trantibum hampir di seluruh Indonesia terbilang kecil/minim;

3. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa form 5.C.3 tidak mampu menggambarkan kebutuhan pemenuhan personil Satpol PP maka pada realisasi pemenuhan personil Satpol PP disesuaikan menjadi pemenuhan kapasitas personil Satpol PP;
4. SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum masih diterjemahkan secara berbeda-beda oleh banyak daerah di Indonesia. Bahkan di wilayah Jawa Barat terdapat beberapa Satuan Polisi Praja Kabupaten/Kota yang belum memahami dengan baik metode penerapan SPM Sub urusan Trantibum.
5. Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota pada Pasal 9 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Perbaikan atas kerugian materil dan cidera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada”. Dalam penyediaan anggaran ini sulit untuk memenuhi amanat 2,5% sebagaimana dimaksud, karena anggaran ini sangat berpotensi





menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang tentunya akan berpengaruh pada capaian realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Jika diperhatikan secara seksama, kendala yang ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam penerapan SPM Sub Urusan Trantibum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, seluruhnya merupakan kendala akibat dari regulasi yang tidak relevan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan ataupun dari aspek administrasi yang sulit dipenuhi akibat dari regulasi tersebut. Sehingga solusi yang kami tawarkan adalah harus dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pol PP dan Ditjen Bangda Kemendagri untuk mencari solusi bersama guna memecahkan masalah/kendala sebagaimana di atas.

2.3.1.6 Sosial

Adapun capaian untuk Urusan Sosial dengan 5 Fokus Urusannya dari Program Rehabilitasi Sosial sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 persen. Bagaimana pelayanan yang berfokus pada pelayanan yang ada di dalam panti. Yang memang erat kaitannya dengan bagaimana pelayanan SPM urusan Sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota.





Tabel 2.13
Capaian SPM Sektor Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	105	121	100	100	111	100	185	185	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	600	737	100	620	854	100	595	595	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	350	453	100	350	422	100	350	350	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	140	140	100	140	140	100	150	150	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	345.246	345.246	100	10.000	15.340	100	10.000	10.000	100

Sumber: Laporan Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat, diolah



A040B8A293



Adapun permasalahan untuk bidang urusan sosial adalah :

a. Permasalahan

1. Koordinasi dengan kabupaten/kota masih kurang terkait data yang dibutuhkan, contohnya data sasaran yang membutuhkan panti;
2. Sumber daya aparatur dan sarana pengumpulan data masih rendah
3. Peningkatan SDM kesejahteraan sosial seperti TKSK, Tagana, Relawan belum terlaksana dengan menyeluruh.
4. Sasaran yang ditetapkan belum berdasarkan data riil (by name by address), namun data rekapitulasi sasaran.
5. Penerima pelayanan masih ada yang belum sesuai dengan permendagri 59/2021 dan Permensos 9/2018.
6. Kapasitas SDM aparatur belum dapat menghitung item kebutuhan barang, jasa dan SDM secara tepat karena penentuan sasaran yang belum riil, sehingga perhitungan penganggaran kebutuhan SPM belum akurat.
7. Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan usulan pada perencanaan, khususnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi, renovasi, pemeliharaan sarana prasarana panti.
8. Anggaran yang berasal dari dana CSR belum terkelola dengan baik.
9. Panti pemerintah daerah provinsi Jawa Barat membutuhkan penambahan kapasitas tempat tidur, khususnya untuk lanjut usia terlantar dan anak terlantar.
10. Koordinasi dan kolaborasi dengan pengampu SPM lainnya belum terlaksana dengan optimal untuk efisiensi dan efektifitas layanan SPM

b. Solusi

1. Permasalahan data sasaran ini adalah permasalahan nasional artinya bukan hanya masalah provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan terkait pendataan.





2. Peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial diperlukan anggaran baik dari APBD atau sumber lainnya, sehingga diperlukan koordinasi dengan SDM Kesejahteraan Sosial tersebut dan pihak-pihak lainnya.
3. Mengadakan FGD terkait penerima layanan agar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Membuat kajian pengalokasian anggaran sehingga bisa menjadi dasar pengambilan Keputusan yang disahkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Evaluasi RKPD Tahun 2024 terhadap 6 Prioritas Pembangunan Daerah

RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, dengan 6 (enam) Prioritas pembangunan adalah: (1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata; (2) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama; (3) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah; (4) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana; (5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa; (6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Secara rinci capaian program dari pelaksanaan dari 6 (enam) prioritas pembangunan dapat dijelaskan melalui pencapaian program yang disajikan pada tabel berikut:





Tabel 2.14
Dukungan Program Terhadap Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
1	PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS PENINGKATAN KAPASITAS UMKM, PETANI, NELAYAN DAN BUDIDAYA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA SELUAS-LUASNYA									
1	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Rp2.875.117.749	Rp2.827.173.271	98,33%	100,00%	Rp2.050.921.612	Rp229.547.071	11,19%	0,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp13.819.211.778	Rp12.750.736.103	92,27%	93,46%					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan					Rp6.550.416.890	Rp181.401.573	2,77%	0,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp14.003.606.393	Rp13.639.081.200	97,40%	88,58%	Rp17.167.531.848	Rp400.499.796	2,33%	0,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp470.146.040	Rp423.760.169	90,13%	97,14%	Rp236.449.034	Rp61.233.497	25,90%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp15.918.106.565	Rp14.258.176.944	89,57%	100,00%	Rp13.732.616.601	Rp168.956.639	1,23%	62,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Program Pengembangan Ekspor	Rp4.314.277.580	Rp4.039.202.821	93,62%	100,00%	Rp1.168.840.427	Rp43.525.664	3,72%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp12.907.342.655	Rp12.344.311.775	95,64%	100,00%	Rp6.396.808.113	Rp215.979.042	3,38%	35,25%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp3.663.286.828	Rp3.364.146.591	91,83%	99,05%	Rp215.180.900	Rp0	0,00%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp13.916.842.319	Rp12.788.177.866	91,89%	99,80%	Rp8.190.182.434	Rp511.331.660	6,24%	0,05%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp150.000.000	Rp145.852.500	97,24%	100,00%	Rp107.693.029	Rp16.788.170	15,59%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp457.879.275	Rp424.158.918	92,64%	100,00%	Rp229.034.000	Rp20.791.139	9,08%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp28.827.011.768	Rp28.136.981.524	97,61%	100,00%	Rp33.340.244.224	Rp6.503.504.026	19,51%	20,19%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp16.199.466.233	Rp16.058.596.150	99,13%	100,00%	Rp17.250.947.693	Rp528.101.500	3,06%	6,19%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
15	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp34.402.693.480	Rp34.137.722.906	99,23%	100,00%	Rp25.797.034.535	Rp5.558.748.356	21,55%	33,33%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
16	Program Penyuluhan Pertanian	Rp3.194.939.636	Rp3.113.541.715	97,45%	99,13%	Rp2.697.974.454	Rp281.181.619	10,42%	10,83%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
17	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Rp13.500.073.213	Rp13.285.601.818	98,41%	100,00%	Rp4.694.247.446	Rp804.149.017	17,13%	6,67%	Dinas Kelautan dan Perikanan
18	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp5.416.926.921	Rp5.333.511.379	98,46%	99,17%	Rp12.433.449.474	Rp464.163.368	3,73%	9,58%	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp13.879.566.573	Rp12.985.012.764	93,55%	100,00%	Rp7.008.308.960	Rp2.176.201.103	31,05%	20,05%	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp5.343.629.925	Rp5.240.332.092	98,07%	100,00%	Rp1.916.181.417	Rp338.670.095	17,67%	32,92%	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp4.928.998.237	Rp4.741.542.763	96,20%	100,00%	Rp1.405.731.597	Rp328.751.172	23,39%	29,38%	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp18.499.142.859	Rp14.418.431.397	77,94%	100,00%	Rp13.710.195.560	Rp437.962.340	3,19%	18,75%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
23	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp407.200.154	Rp400.291.100	98,30%	87,50%	Rp330.462.000	Rp47.548.442	14,39%	12,50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
24	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp2.073.042.711	Rp2.033.855.647	98,11%	100,00%	Rp1.806.614.737	Rp315.377.423	17,46%	8,64%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
25	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp1.391.200.000	Rp1.358.088.622	97,62%	100,00%	Rp530.501.441	Rp55.802.976	10,52%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
26	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp887.584.400	Rp846.053.435	95,32%	100,00%	Rp492.626.108	Rp32.106.800	6,52%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
27	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp475.910.300	Rp448.258.625	94,19%	0,00%	Rp177.112.497	Rp15.220.500	8,59%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
28	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp10.578.128.000	Rp9.584.466.647	90,61%	100,00%	Rp1.288.208.785	Rp76.159.330	5,91%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
29	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp5.339.810.658	Rp3.619.694.300	67,79%	50,00%	Rp893.977.535	Rp116.857.164	13,07%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
30	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp9.105.746.267	Rp8.647.369.946	94,97%	100,00%					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

SABER EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
31	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					Rp3.017.734.920	Rp88.159.330	2,92%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
32	Program Pengembangan UMKM	Rp11.983.646.934	Rp9.546.098.838	79,66%	100,00%	Rp30.674.471.792	Rp468.609.675	1,53%	0,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
33	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp5.777.596.355	Rp5.413.236.630	93,69%	83,33%	Rp1.989.965.554	Rp267.967.101	13,47%	0,00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
34	Program Pemasaran Pariwisata	Rp10.297.587.979	Rp10.211.572.190	99,16%	100,00%	Rp4.709.278.000	Rp916.860.166	19,47%	0,00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
35	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp8.175.817.038	Rp7.800.281.165	95,41%	100,00%					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
36	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp8.175.817.038	Rp7.800.281.165	95,41%	100,00%	Rp1.571.888.014	Rp393.933.839	25,06%	42,33%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp5.988.447.354	Rp5.786.536.091	96,63%	83,33%	Rp7.060.531.309	Rp141.891.361	2,01%	2,62%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
38	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp1.791.790.066	Rp1.789.739.123	99,89%	100,00%	Rp1.317.728.371	Rp276.838.668	21,01%	54,03%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
39	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp5.788.063.489.791	Rp5.714.996.351.853	98,74%	60,86%	Rp5.653.252.187.448	Rp278.847.656.364	4,93%	36,29%	Dinas Pendidikan
40	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp11.382.374.707	Rp10.031.282.154	88,13%	100,00%	Rp6.755.652.715	Rp518.531.600	7,68%	11,11%	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian
41	Program Pengelolaan Izin Lokasi									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
42	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp5.355.336.887	Rp4.726.320.572	88,25%	31,25%	Rp3.702.870.827	Rp630.810.832	17,04%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
43	Program Promosi Penanaman Modal	Rp2.038.160.593	Rp1.998.673.600	98,06%	8,33%	Rp925.748.807	Rp41.949.817	4,53%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
44	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp826.923.000	Rp820.318.908	99,20%	100,00%	Rp386.514.549	Rp34.552.275	8,94%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
										Pelayanan Terpadu Satu Pintu
45	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp878.783.200	Rp867.409.250	98,71%	100,00%	Rp365.596.000	Rp52.733.400	14,42%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp14.107.455.868.480	Rp13.460.054.224.444	95,41%	95,00%	Rp7.320.394.183.682	Rp424.551.681.722	5,80%	8,61%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
47	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp7.378.106.016	Rp7.082.215.651	95,99%	100,00%	Rp5.668.594.215	Rp1.098.500.826	19,38%	1,25%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
48	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp48.162.389.277	Rp46.371.343.242	96,28%	99,37%	Rp29.858.783.561	Rp3.842.997.272	12,87%	14,86%	Badan Pendapatan Daerah
49	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp379.889.680	Rp329.172.505	86,65%	100,00%	Rp137.034.875	Rp12.250.500	8,94%	0,00%	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
50	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp1.135.839.000	Rp1.133.492.146	99,79%	100,00%	Rp842.239.750	Rp42.487.335	5,04%	7,09%	Dinas Lingkungan Hidup
51	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Rp19.085.586.589	Rp16.401.891.652	85,94%	100,00%	Rp7.157.803.910	Rp1.223.305.030	17,09%	0,00%	Sekretariat Daerah/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
52	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp6.153.894.609	Rp6.054.864.156	98,39%	79,17%	Rp7.071.394.409	Rp3.392.449.098	47,97%	46,53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
53	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp175.070.122.409	Rp172.571.035.647	98,57%	87,50%					Dinas Sumber Daya Air
54	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					Rp339.484.732.510	Rp35.520.490.546	10,46%	24,98%	Dinas Sumber Daya Air
55	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.827.011.768	28.136.981.524	97,61%	100,00%	Rp33.340.244.224	Rp6.503.504.026	19,51%	20,19%	Dinas Perkebunan
56	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.199.466.233	16.058.596.150	99,13%	100,00%	Rp17.250.947.693	Rp528.101.500	3,06%	6,19%	Dinas Perkebunan
57	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	34.402.693.480	34.137.722.906	99,23%	100,00%	Rp25.797.034.535	Rp5.558.748.356	21,55%	33,33%	Dinas Perkebunan



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAKIL EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
58	Program Penyuluhan Pertanian	3.194.939.636	3.113.541.715	97,45%	99,13%	Rp2.697.974.454	Rp281.181.619	10,42%	10,83%	Dinas Perkebunan
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 1	Rp380.835.712.345	Rp366.937.542.857	94,54%	91,50%	Rp290.347.741.555	Rp16.682.586.968	12,48%	12,01%	
2	PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH									
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp616.099.155.679	Rp587.177.735.065	95,31%	92,50%	Rp661.565.212.289	Rp69.748.183.641	10,54%	7,40%	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp65.924.798.006	Rp62.789.902.840	95,24%	97,66%	Rp20.150.232.597	Rp4.327.117.876	21,47%	3,50%	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp287.252.900	Rp269.521.190	93,83%	100,00%	Rp127.516.081	Rp8.369.000	6,56%	0,00%	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp1.736.961.971	Rp1.670.151.680	96,15%	100,00%	Rp342.796.196	Rp28.375.056	8,28%	0,00%	Dinas Kesehatan
5	Program Perlindungan Perempuan	Rp893.375.575	Rp888.100.113	99,41%	64,42%	Rp601.449.230	Rp109.920.441	18,28%	11,85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp628.002.493	Rp611.320.797	97,34%	65,00%	Rp684.784.163	Rp129.889.111	18,97%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
7	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp33.650.000	Rp33.633.500	99,95%	100,00%	Rp20.400.000	Rp2.000.000	9,80%	16,67%	Dinas Sosial
8	Program Rehabilitasi Sosial	Rp28.465.580.855	Rp27.768.583.309	97,55%	100,00%	Rp29.464.093.063	Rp5.560.298.162	18,87%	23,98%	Dinas Sosial
9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp2.334.590.029	Rp2.269.444.045	97,21%	100,00%	Rp962.307.629	Rp44.826.994	4,66%	8,33%	Dinas Sosial
10	Program Penanganan Bencana	Rp5.867.392.195	Rp5.803.178.922	98,91%	100,00%	Rp6.243.242.378	Rp2.495.930.650	39,98%	16,00%	Dinas Sosial
11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp222.154.009	Rp222.150.982	100,00%	100,00%	Rp222.145.771	Rp62.199.452	28,00%	33,33%	Dinas Sosial
12	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp4.368.746.606	Rp3.926.910.066	89,89%	100,00%	Rp3.264.561.775	Rp228.957.946	7,01%	0,00%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

SABITIK EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
13	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp2.270.524.100	Rp2.261.557.750	99,61%	79,63%	Rp1.324.269.867	Rp161.630.856	12,21%	5,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
14	Program Perlindungan Perempuan	Rp893.375.575	Rp888.100.113	99,41%	64,42%	Rp601.449.230	Rp109.920.441	18,28%	11,85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
15	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp401.298.800	Rp398.101.635	99,20%	100,00%	Rp163.287.107	Rp28.249.742	17,30%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
16	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp507.456.000	Rp507.153.200	99,94%	100,00%	Rp423.329.360	Rp11.758.000	2,78%	33,33%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
17	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp425.414.610	Rp425.388.123	99,99%	100,00%	Rp353.412.238	Rp86.148.484	24,38%	63,64%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
18	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp628.002.493	Rp611.320.797	97,34%	65,00%	Rp684.784.163	Rp129.889.111	18,97%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
19	Program Pengendalian Penduduk	Rp6.044.161.400	Rp5.997.336.436	99,23%	66,67%	Rp123.465.340	Rp14.894.500	12,06%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

SABITIK EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
20	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp755.760.000	Rp754.472.858	99,83%	87,50%	Rp4.322.928.272	Rp72.177.430	1,67%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
21	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp9.277.295.800	Rp9.214.832.893	99,33%	100,00%	Rp8.259.559.042	Rp57.549.500	0,70%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
22	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp16.693.635.216	Rp16.211.677.719	97,11%	98,88%	Rp5.052.513.595	Rp239.407.848	4,74%	5,14%	Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp496.743.925.633	Rp486.777.086.390	97,99%	91,44%	Rp468.269.536.479	Rp406.837.063.634	86,88%	11,67%	Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp7.013.353.840	Rp6.917.350.440	98,63%	100,00%	Rp1.026.995.945	Rp0	0,00%	0,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp582.557.000	Rp575.330.904	98,76%	100,00%	Rp656.765.569	Rp12.737.000	1,94%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp18.981.400	Rp18.140.300	95,57%	100,00%	Rp54.630.739	Rp0	0,00%	0,00%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
27	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp5.666.026.724	Rp5.594.778.020	98,74%	100,00%	Rp18.142.899.427	Rp1.466.247.521	8,08%	19,05%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
28	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp5.988.447.354	Rp5.786.536.091	96,63%	83,33%	Rp7.060.531.309	Rp141.891.361	2,01%	2,62%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
29	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp1.791.790.066	Rp1.789.739.123	99,89%	100,00%	Rp1.317.728.371	Rp276.838.668	21,01%	54,03%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
30	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp1.135.839.000	Rp1.133.492.146	99,79%	100,00%	Rp842.239.750	Rp42.487.335	5,04%	7,09%	Dinas Lingkungan Hidup
31	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp38.144.309.588	Rp38.113.902.410	99,92%	100,00%	Rp5.880.204.809	Rp1.708.332.789	29,05%	0,00%	Dinas Pemberdayaan



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAHAGIAN EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
										Masyarakat dan Desa
32	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp23.721.956.143	Rp23.631.911.487	99,62%	100,00%	Rp9.680.044.593	Rp3.770.592.231	38,95%	4,76%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp493.113.897	Rp347.240.685	70,42%	100,00%	Rp6.223.554.959	Rp75.630.692	1,22%	4,64%	Dinas Kehutanan
34	Program Penataan Desa	Rp306.599.700	Rp305.208.664	99,55%	100,00%	Rp146.873.000	Rp113.081.000	76,99%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp195.137.755	Rp192.726.240	98,76%	100,00%	Rp160.788.062	Rp22.323.630	13,88%	9,96%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
36	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp3.810.623.408	Rp3.798.232.670	99,67%	93,33%	Rp10.497.906.948	Rp2.865.358.540	27,29%	8,33%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp1.121.911.369	Rp1.119.206.869	99,76%	100,00%	Rp2.303.666.217	Rp780.801.000	33,89%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
38	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp18.850.000.000	Rp18.499.478.400	98,14%	100,00%	Rp5.548.156.901	Rp213.757.000	3,85%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp161.889.900	Rp152.624.751	94,28%	100,00%	Rp44.582.500	Rp1.160.000	2,60%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
40	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp12.398.837.919	Rp12.244.117.467	98,75%	61,08%	Rp11.642.461.041	Rp124.294.408	1,07%	2,34%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
41	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp736.778.293	Rp736.138.534	99,91%	77,08%	Rp473.485.746	Rp116.740.714	24,66%	0,00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
42	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp4.642.277.000	Rp4.608.689.525	99,28%	100,00%	Rp3.377.529.296	Rp0	0,00%	25,00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
43	Program Penanggulangan Bencana	Rp9.283.364.297	Rp8.848.612.675	95,32%	85,83%	Rp11.244.982.100	Rp1.051.145.156	9,35%	14,58%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAKIL EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
44	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp1.528.821.768	Rp1.487.708.629	97,31%	100,00%	Rp1.004.855.787	Rp151.071.151	15,03%	27,05%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 2	Rp31.797.616.508	Rp30.758.609.692	97,47%	92,59%	Rp34.305.247.024	Rp10.968.330.552	15,75%	10,28%	
3	PENGUATAN SISTEM KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN									
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp616.099.155.679	Rp587.177.735.065	95,31%	92,50%	Rp661.565.212.289	Rp69.748.183.641	10,54%	7,40%	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp65.924.798.006	Rp62.789.902.840	95,24%	97,66%	Rp20.150.232.597	Rp4.327.117.876	21,47%	3,50%	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp287.252.900	Rp269.521.190	93,83%	100,00%	Rp127.516.081	Rp8.369.000	6,56%	0,00%	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp1.736.961.971	Rp1.670.151.680	96,15%	100,00%	Rp342.796.196	Rp28.375.056	8,28%	0,00%	Dinas Kesehatan
5	Program Perlindungan Perempuan	Rp893.375.575	Rp888.100.113	99,41%	64,42%	Rp601.449.230	Rp109.920.441	18,28%	11,85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp628.002.493	Rp611.320.797	97,34%	65,00%	Rp684.784.163	Rp129.889.111	18,97%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 3	Rp114.261.591.104	Rp108.901.121.948	96,21%	86,60%	Rp113.911.998.426	Rp12.391.975.854	14,02%	3,79%	
4	PENGUATAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA									
1	Program Penanggulangan Bencana	Rp9.283.364.297	Rp8.848.612.675	95,32%	85,83%	Rp11.244.982.100	Rp1.051.145.156	9,35%	14,58%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp5.100.960.514	Rp5.085.868.209	99,70%	100,00%	Rp5.461.016.580	Rp833.409.586	15,26%	20,79%	Dinas Lingkungan Hidup



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

REVISI
BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN 2025



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp161.800.000	Rp152.988.070	94,55%	100,00%	Rp93.000.824	Rp0	0,00%	0,00%	Dinas Kehutanan
4	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp493.113.897	Rp347.240.685	70,42%	100,00%	Rp6.223.554.959	Rp75.630.692	1,22%	4,64%	Dinas Kehutanan
5	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp2.702.316.602	Rp2.683.215.960	99,29%	100,00%	Rp1.338.438.170	Rp178.759.734	13,36%	0,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp11.382.374.707	Rp10.031.282.154	88,13%	100,00%	Rp6.755.652.715	Rp518.531.600	7,68%	11,11%	Sekretariat Daerah
7	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp379.889.680	Rp329.172.505	86,65%	100,00%	Rp137.034.875	Rp12.250.500	8,94%	0,00%	Sekretariat Daerah
8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp4.368.746.606	Rp3.926.910.066	89,89%	100,00%	Rp3.264.561.775	Rp228.957.946	7,01%	0,00%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
9	Program Pengembangan Perumahan	Rp60.583.543.190	Rp57.354.655.053	94,67%	100,00%	Rp3.820.708.417	Rp172.972.383	4,53%	5,56%	Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp582.557.000	Rp575.330.904	98,76%	100,00%	Rp656.765.569	Rp12.737.000	1,94%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Program Pemberdayaan Sosial	Rp12.932.464.976	Rp11.943.189.454	92,35%	100,00%	Rp4.393.896.690	Rp1.280.570.500	29,14%	15,63%	Dinas Sosial
12	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp33.650.000	Rp33.633.500	99,95%	100,00%	Rp20.400.000	Rp2.000.000	9,80%	16,67%	Dinas Sosial
13	Program Rehabilitasi Sosial	Rp28.465.580.855	Rp27.768.583.309	97,55%	100,00%	Rp29.464.093.063	Rp5.560.298.162	18,87%	23,98%	Dinas Sosial
14	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp2.334.590.029	Rp2.269.444.045	97,21%	100,00%	Rp962.307.629	Rp44.826.994	4,66%	8,33%	Dinas Sosial
15	Program Penanganan Bencana	Rp5.867.392.195	Rp5.803.178.922	98,91%	100,00%	Rp6.243.242.378	Rp2.495.930.650	39,98%	16,00%	Dinas Sosial
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 4	Rp9.644.822.970	Rp9.143.553.701	93,56%	99,06%	Rp5.338.643.716	Rp831.201.394	11,45%	9,15%	
5	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS WILAYAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA GERAKAN MEMBANGUN DESA									
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp121.282.391.998	Rp107.778.415.637	88,87%	89,95%	Rp719.635.004.908	Rp27.464.546.313	3,82%	0,62%	Dinas Perhubungan
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp4.193.270.586	Rp4.101.941.124	97,82%	100,00%	Rp11.183.530.476	Rp1.232.684.050	11,02%	30,90%	Dinas Perhubungan



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

SABER PARIWISATA

SAKSI EVALUASI HASIL TRIWULAN 2025



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp1.084.197.200	Rp1.040.860.280	96,00%	100,00%	Rp3.823.469.326	Rp21.475.500	0,56%	0,00%	Dinas Perhubungan
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp175.070.122.409	Rp172.571.035.647	98,57%	87,50%	Rp339.484.732.510	Rp35.520.490.546	10,46%	24,98%	Dinas Sumber Daya Air
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp5.750.911.882	Rp5.053.506.449	87,87%	100,00%	Rp6.470.404.537	Rp113.380.066	1,75%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp9.180.811.082	Rp6.583.640.082	71,71%	99,41%	Rp25.457.899.824	Rp75.962.912	0,30%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp3.059.663.558	Rp2.979.197.191	97,37%	100,00%	Rp2.783.985.074	Rp38.958.380	1,40%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp276.505.603	Rp261.846.688	94,70%	85,70%	Rp147.862.998	Rp30.914.380	20,91%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Program Kawasan Permukiman	Rp46.526.278.351	Rp42.426.107.941	91,19%	100,00%	Rp77.092.098.289	Rp23.771.956	0,03%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Program Penataan Pembangunan Gedung	Rp43.088.788.852	Rp39.712.872.319	92,17%	88,81%					Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Program Penataan Bangunan Gedung					Rp444.684.696	Rp81.760.110	18,39%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp5.597.169.058	Rp5.372.707.645	95,99%	100,00%	Rp28.996.515.010	Rp57.727.865	0,20%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp897.967.482.146	Rp874.752.359.137	97,41%	97,92%	Rp2.153.050.301.218	Rp116.438.889.651	5,41%	22,57%	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
14	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp2.397.191.065	Rp2.093.822.342	87,34%	100,00%	Rp2.011.318.330	Rp230.012.323	11,44%	30,76%	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp5.585.103.096	Rp5.385.025.404	96,42%	100,00%	Rp4.426.281.860	Rp374.253.257	8,46%	32,29%	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
16	Program Penataan desa	Rp306.599.700	Rp305.208.664	99,55%	100,00%	Rp146.873.000	Rp113.081.000	76,99%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp38.144.309.588	Rp38.113.902.410	99,92%	100,00%	Rp5.880.204.809	Rp1.708.332.789	29,05%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAKTI EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp5.788.063.489.791	Rp5.714.996.351.853	98,74%	60,86%	Rp5.653.252.187.448	Rp278.847.656.364	4,93%	36,29%	Dinas Pendidikan
19	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp307.447.323	Rp307.447.065	100,00%	100,00%	Rp197.592.759	Rp49.690.846	25,15%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp48.162.389.277	Rp46.371.343.242	96,28%	99,37%	Rp29.858.783.561	Rp3.842.997.272	12,87%	14,86%	Badan Pendapatan Daerah
21	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp43.088.788.852	Rp39.712.872.319	92,17%	88,81%	Rp444.684.696	Rp81.760.110	18,39%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
22	Program Kawasan Permukiman	Rp46.526.278.351	Rp42.426.107.941	91,19%	100,00%	Rp77.092.098.289	Rp23.771.956	0,03%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
23	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp4.134.980.106	Rp3.958.170.980	95,72%	100,00%	Rp5.993.256.542	Rp87.276.320	1,46%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
24	Program Penatagunaan Tanah	Rp438.009.095	Rp438.009.095	100,00%	100,00%	Rp136.636.730	Rp43.381.695	31,75%	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
25	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp161.889.900	Rp152.624.751	94,28%	100,00%					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26	Program Peningkatan Kerja Sama Desa					Rp44.582.500	Rp1.160.000	2,60%	0,00%	
27	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp4.193.270.586	Rp4.101.941.124	97,82%	100,00%	Rp11.183.530.476	Rp1.232.684.050	11,02%	30,90%	Dinas Perhubungan
28	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp1.084.197.200	Rp1.040.860.280	96,00%	100,00%	Rp3.823.469.326	Rp21.475.500	0,56%	0,00%	Dinas Perhubungan
29	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp207.166.500	Rp203.626.500	98,29%	100,00%	Rp97.995.696	Rp0	0,00%	0,00%	Dinas Kehutanan
30	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp14.003.606.393	Rp13.639.081.200	97,40%	88,58%	Rp17.167.531.848	Rp400.499.796	2,33%	0,00%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
31	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp826.923.000	Rp820.318.908	99,20%	100,00%	Rp386.514.549	Rp34.552.275	8,94%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp1.269.325.000	Rp1.269.324.632	100,00%	93,75%	Rp1.098.193.699	Rp92.742.005	8,44%	9,25%	Dinas Lingkungan Hidup
33	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Rp482.513.400	Rp332.300.775	68,87%	100,00%	Rp623.335.261	Rp76.659.385	12,30%	54,87%	Dinas Lingkungan Hidup
34	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah	Rp128.091.000	Rp127.108.620	99,23%	100,00%	Rp138.273.050	Rp17.655.528	12,77%	26,00%	Dinas Lingkungan Hidup



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

SABER EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
	Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)									
35	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp853.126.582	Rp853.107.092	100,00%	100,00%	Rp638.838.948	Rp135.790.330	21,26%	34,98%	Dinas Lingkungan Hidup
36	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp146.628.500	Rp145.814.460	99,44%	100,00%	Rp132.639.036	Rp19.039.835	14,35%	14,00%	Dinas Lingkungan Hidup
37	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp395.900.000	Rp393.480.800	99,39%	100,00%	Rp361.783.696	Rp87.619.170	24,22%	21,50%	Dinas Lingkungan Hidup
38	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp2.428.547.000	Rp2.428.019.123	99,98%	100,00%	Rp1.956.592.146	Rp261.065.157	13,34%	9,85%	Dinas Lingkungan Hidup
39	Program Pengelolaan Persampahan	Rp72.058.623.356	Rp66.687.922.866	92,55%	88,24%	Rp131.754.869.828	Rp10.112.121.083	7,67%	2,22%	Dinas Lingkungan Hidup
40	Program Pengelolaan Persampahan Regional	Rp9.180.811.082	Rp6.583.640.082	71,71%	99,41%					
41	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					Rp25.457.899.824	Rp75.962.912	0,30%	0,00%	
42	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp161.800.000	Rp152.988.070	94,55%	100,00%	Rp93.000.824	Rp0	0,00%	0,00%	Dinas Kehutanan
43	Program Pengelolaan Hutan	Rp21.084.018.537	Rp20.833.789.481	98,81%	89,58%	Rp13.722.567.863	Rp239.583.253	1,75%	3,24%	Dinas Kehutanan
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 5	Rp180.952.695.290	Rp177.479.544.511	94,36%	96,53%	Rp233.917.300.637	Rp11.982.784.649	10,92%	10,00%	
6	INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PENATAAN DAERAH									
1	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp791.803.980.060	Rp760.845.433.964	96,09%	97,22%	Rp146.548.351.335	Rp20.087.065.068	13,71%	0,00%	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp1.434.966.866.730	Rp1.387.721.324.669	96,71%	100,00%	Rp414.845.841.992	Rp19.382.197.500	4,67%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAKIL EVALUASI HASIL TRIWULAN 2025



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
3	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi									
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp255.824.498.676	Rp207.059.370.683	80,94%	100,00%	Rp314.552.838.250	Rp75.005.586.331	23,85%	27,42%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp16.872.552.414	Rp13.019.803.766	77,17%	100,00%	Rp12.200.441.383	Rp1.610.611.525	13,20%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp4.656.914.492	Rp4.609.322.180	98,98%	100,00%	Rp2.122.061.304	Rp205.274.816	9,67%	0,00%	Sekretariat Daerah
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp5.788.063.489.791	Rp5.714.996.351.853	98,74%	60,86%	Rp5.653.252.187.448	Rp278.847.656.364	4,93%	36,29%	Dinas Pendidikan
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp2.094.033.169	Rp2.087.859.655	99,71%	100,00%	Rp1.471.424.238	Rp244.419.962	16,61%	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Penataan Organisasi	Rp2.549.350.000	Rp2.549.268.364	100,00%	100,00%	Rp818.744.108	Rp212.279.028	25,93%	0,00%	Sekretariat Daerah
10	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Rp19.085.586.589	Rp16.401.891.652	85,94%	100,00%	Rp7.157.803.910	Rp1.223.305.030	17,09%	0,00%	Sekretariat Daerah
11	Program Pengelolaan Arsip	Rp323.278.174	Rp320.242.165	99,06%	100,00%	Rp194.676.787	Rp51.854.000	26,64%	13,78%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp510.855.483	Rp507.697.136	99,38%	100,00%	Rp148.749.582	Rp38.729.676	26,04%	25,36%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Program Perizinan Penggunaan Arsip									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp470.146.040	Rp423.760.169	90,13%	97,14%	Rp236.449.034	Rp61.233.497	25,90%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp15.918.106.565	Rp14.258.176.944	89,57%	100,00%	Rp13.732.616.601	Rp168.956.639	1,23%	62,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp12.907.342.655	Rp12.344.311.775	95,64%	100,00%	Rp6.396.808.113	Rp215.979.042	3,38%	35,25%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp3.663.286.828	Rp3.364.146.591	91,83%	99,05%	Rp215.180.900	Rp0	0,00%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp195.000.000	Rp194.384.000	99,68%	100,00%	Rp40.000.000	Rp21.870.000	54,68%	33,33%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
19	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp5.088.406.586	Rp4.183.767.250	82,22%	82,22%	Rp3.194.362.126	Rp500.917.376	15,68%	0,00%	Sekretariat Daerah



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

SABLIK EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
20	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp10.819.897.269	Rp10.716.772.920	99,05%	97,22%	Rp6.095.868.622	Rp673.475.042	11,05%	19,44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp10.385.032.907	Rp10.317.114.551	99,35%	96,53%	Rp7.080.944.962	Rp889.779.254	12,57%	15,89%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp48.162.389.277	Rp46.371.343.242	96,28%	99,37%	Rp29.858.783.561	Rp3.842.997.272	12,87%	14,86%	Badan Pendapatan Daerah
23	Program Kepegawaian Daerah	Rp20.319.830.246	Rp19.037.212.743	93,69%	100,00%	Rp9.761.963.791	Rp1.673.905.014	17,15%	8,87%	Badan Kepegawaian Daerah
24	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp11.594.574.250	Rp11.120.141.644	95,91%	99,16%	Rp10.207.216.456	Rp556.984.810	5,46%	8,18%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp4.368.746.606	Rp3.926.910.066	89,89%	100,00%	Rp3.264.561.775	Rp228.957.946	7,01%	0,00%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Program Pelayanan Penghubung	Rp1.087.325.240	Rp1.084.913.474	99,78%	100,00%	Rp916.022.964	Rp154.456.330	16,86%	25,00%	Badan Penghubung
27	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp45.296.629.061	Rp26.723.673.274	59,00%	100,00%	Rp38.409.907.922	Rp5.724.806.931	14,90%	15,83%	Inspektorat
28	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp826.923.000	Rp820.318.908	99,20%	100,00%	Rp386.514.549	Rp34.552.275	8,94%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp878.783.200	Rp867.409.250	98,71%	100,00%	Rp365.596.000	Rp52.733.400	14,42%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp756.458.610	Rp698.623.922	92,35%	100,00%	Rp428.811.146	Rp21.812.505	5,09%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp2.863.975.473	Rp2.856.967.700	99,76%	100,00%	Rp1.402.280.100	Rp67.900.878	4,84%	18,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
32	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp1.009.779.998	Rp1.009.093.298	99,93%	100,00%	Rp549.720.000	Rp161.959.900	29,46%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

Badan Evaluasi Hasil Triwulan IV 2024



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
33	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp44.969.735.030	Rp44.217.735.980	98,33%	85,42%	Rp15.859.411.295	Rp6.184.918.440	39,00%	16,53%	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp255.824.498.676	Rp207.059.370.683	80,94%	100,00%	Rp314.552.838.250	Rp75.005.586.331	23,85%	27,42%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp10.819.897.269	Rp10.716.772.920	99,05%	97,22%	Rp6.095.868.622	Rp673.475.042	11,05%	19,44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp108.475.639.018	Rp107.383.040.348	98,99%	91,67%	Rp115.374.232.612	Rp54.568.732.314	47,30%	57,87%	Dinas Komunikasi dan Informatika
37	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp756.458.610	Rp698.623.922	92,35%	100,00%	Rp428.811.146	Rp21.812.505	5,09%	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp270.151.840	Rp247.561.175	91,64%	100,00%	Rp150.450.998	Rp15.501.528	10,30%	0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
39	Program Penataan Organisasi	Rp2.549.350.000	Rp2.549.268.364	100,00%	100,00%	Rp818.744.108	Rp212.279.028	25,93%	0,00%	Sekretariat Daerah
40	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp5.088.406.586	Rp4.183.767.250	82,22%	82,22%	Rp3.194.362.126	Rp500.917.376	15,68%	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp10.385.032.907	Rp10.317.114.551	99,35%	96,53%	Rp7.080.944.962	Rp889.779.254	12,57%	15,89%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
42	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp1.434.966.866.730	Rp1.387.721.324.669	96,71%	100,00%	Rp414.845.841.992	Rp19.382.197.500	4,67%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
43	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp1.009.779.998	Rp1.009.093.298	99,93%	100,00%	Rp549.720.000	Rp161.959.900	29,46%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
44	Program Pendaftaran Penduduk	Rp655.502.400	Rp638.045.271	97,34%	100,00%	Rp139.350.820	Rp8.839.000	6,34%	22,50%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
45	Program Pencatatan Sipil	Rp223.546.000	Rp213.722.930	95,61%	100,00%	Rp222.954.256	Rp63.306.500	28,39%	20,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN IV 2024



No	Program Perangkat Daerah	Triwulan IV Tahun 2024				Triwulan I Tahun 2025				PD Penanggung Jawab
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	
46	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp762.215.000	Rp744.063.381	97,62%	100,00%	Rp253.206.118	Rp96.471.164	38,10%	12,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
47	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp67.285.000	Rp64.119.270	95,30%	100,00%	Rp13.725.000	Rp882.000	6,43%	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Rata-rata Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan 6	Rp230.893.075.655	Rp223.515.582.929	94,00%	97,37%	Rp168.120.826.473	Rp12.661.087.007	16,62%	12,29%	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2024, diolah





Pelaksanaan prioritas pembangunan yang dihitung berdasarkan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada triwulan I Tahun 2025, adapun secara rinci rata-rata capaian kinerja berdasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan Dan Budidaya Untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-Luasnya sebesar 12,01%; (2) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah sebesar 10,28%; (3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan sebesar 3,79% (4) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana sebesar 9,15%; (5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Gerakan Membangun Desa sebesar 10,00%; (6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah sebesar 12,29%.

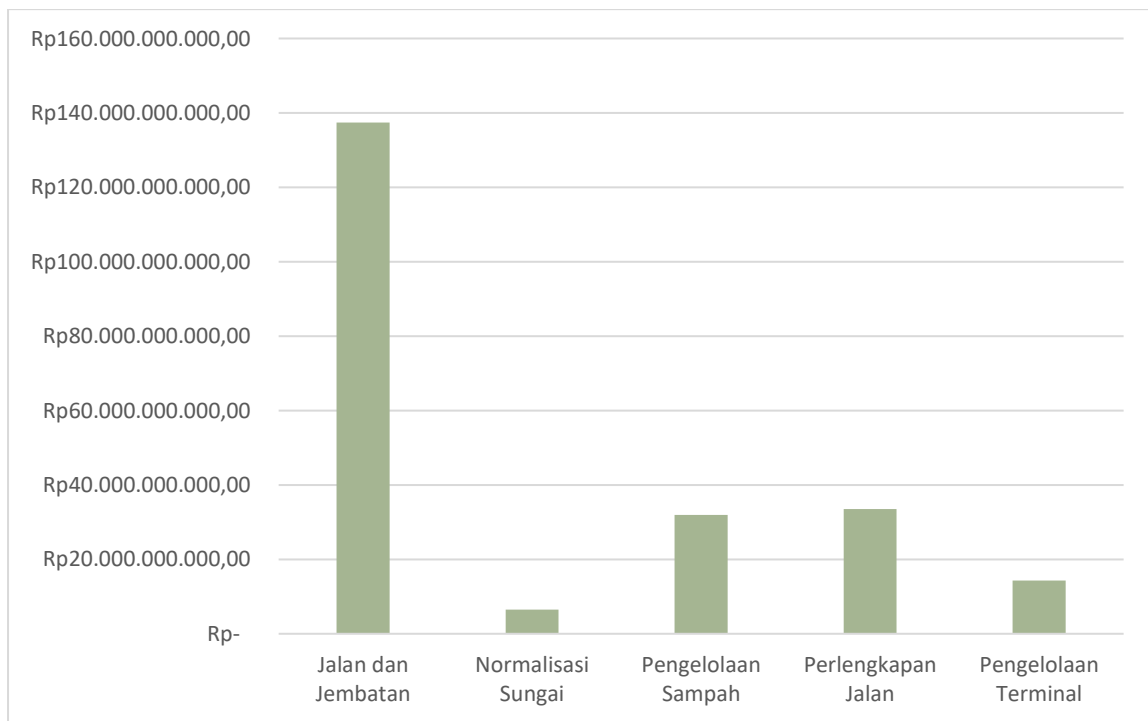
Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/Kep.841-BAPP/2024. Pemerintah melaksanakan Proyek Infrastruktur Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang sebagian besar adalah untuk pembangunan fisik dan tersebar di kabupaten/kota di Jawa Barat. Untuk tahun 2025 ini terdapat 18 (empat belas) kegiatan yang dikategorikan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat. Terdapat 4 (empat) Kelompok Proyek yaitu Jalan dan Jembatan, Normalisasi Sungai, Pengelolaan Sampah, Perlengkapan Jalan dan Pengelolaan Terminal.

Apabila dilihat dari kelompok Proyek Infrastruktur Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, kelompok Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai alokasi terbesar, sedangkan yang terkecil adalah alokasi dana untuk Normalisasi Sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





Gambar 2.3
Alokasi Pendanaan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Berdasarkan Kelompok Proyek



Sumber: Kepgub Nomor 050/Kep.841-BAPP/2024, diolah

Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 pelaksanaan Proyek Infrastruktur Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 bervariasi, beberapa proyek telah dilakukan lelang, beberapa proyek masih dalam tahap penyusunan dokumen lelang. Proses lelang juga tidak semua berjalan dengan lancar, ada beberapa proyek yang batal tender, dsb.

Berbagai upaya untuk mengantisipasi progres proyek strategis telah dilakukan oleh para PD Penanggung Jawab, salah satunya percepatan dalam proses pembuatan dokumen lelang dan mendahulukan lelang pengawas berkala dan pengawas pembangunan agar sebelum proses lelang penyedia konstruksi selesai, dokumen perencanaan sudah sesuai dengan kondisi lokasi proyek saat ini.



A040B8A293



Tabel 2.15
Rincian Alokasi Dana, Target dan Realisasi Fisik Kegiatan Proyek Strategis Provinsi Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PAKET	LOKASI	PAGU ANGGARAN (RP,00)	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sukanagara - Sindangbarang	Kab. Cianjur	15.281.550.000	100,00%	62,621 %	-37,38%	Dalam proses konstruksi
2	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1 Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Ruas Jalan Sukabumi (Baros) - Sagaranten	Kab. Sukabumi	3.314.905.755	100,00%	#N/A	#N/A	Tahap Administrasi
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Perbaikan Badan Jalan Ruas Jalan Sp. Karanghawu – Bts. Prov. Banten (Cikotok) Km. Bdg. 177+050, Km. Bdg. 182+750, dan Km. Bdg. 182+950	Kab. Sukabumi	4.955.357.143	100,00%	#N/A	#N/A	Tahap Administrasi
4	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Perbaikan Badan Jalan Ruas Jampang Tengah - Kiaradua Km.Bdg. 136+800, Km.Bdg.139+050, Km.Bdg.146+400 dan Km.Bdg.148+400	Kab. Sukabumi	5.014.433.404	100,00%	#N/A	#N/A	Tahap Administrasi
5	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Perbaikan Badan Jalan Ruas Ruas Jalan Sukabumi (Baros) - Sagaranten Km. Bdg. 109+150, Km. Bdg. 109+750, Km. Bdg. 109+850, Km. Bdg. 111+100, Km. Bdg. 112+000, Km. Bdg. 114+780, Km. Bdg. 115+100	Kab. Sukabumi	9.656.038.978	100,00%	#N/A	#N/A	Tahap Administrasi
6	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Perbaikan Badan Jalan Ruas Ruas Jalan Sukabumi (Baros) - Sagaranten Km. Bdg. 115+250, Km. Bdg. 115+800, Km. Bdg.	Kab. Sukabumi	8.483.117.359	100,00%	#N/A	#N/A	Tahap Administrasi





NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PAKET	LOKASI	PAGU ANGGARAN (RP,00)	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		115+850, Km. Bdg. 121+150 dan Ruas Jalan Sagaranten - Tegalbuleud Km. Bdg. 158+600, Km. Bdg. 163+350						
7	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Banjaran - Pangalengan	Kab. Bandung	17.055.234.361	100,00%	55,20%	-44,80%	Dalam proses konstruksi (overlay)
8	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1 Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Sodongkopo Tahap 2	Kab.Pangandaran	57.681.899.640	100,00%	8,742 %	-91,26%	Mobilisasi Komponen Jembatan
9	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Pekerjaan Perkuatan Badan Jalan Ruas jalan Palumbonsari - Johar - Tegalloa (Loji)	Kab. Karawang	15.960.613.410	100,00%	#N/A	#N/A	Tahap Administrasi
10	Dinas Sumber Daya Air	Normalisasi Sungai Ciletuh, Sungai Cikalong dan Sungai Cidahon	Sungai Ciletuh, Cikalong, dan Cidahon	3.500.000.000	100,00%	#N/A	#N/A	Tahap Persiapan
11	Dinas Sumber Daya Air	Normalisasi Sungai Ciranca dan Sungai Cipalabuhan	Sungai Cipalabuhan, Ciranca	3.000.000.000	100,00%	9,2 %	-90,80%	Pekerjaan Normalisasi Sungai Cipalabuhan
12	Dinas Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Jalan Operasional IPAL TPK Sarimukti	Kab. Bandung Barat	24.588.588.027	100,00%	14,28%	-85,72%	Tahap pengukuran ulang data lapangan untuk persiapan dokumen Mini Kompetisi, di jadwalkan akan dilaksanakan pada minggu ke II Buln Mei Paket Pengawasan Proyek Jalan Operasional Menuju Ipal sedang dalam Proses pengadaan melalui LPSE, dan Dokumen Proyek Jalan Operasional Menuju IPAL sedang dalam kelengkapan dalam finalisasi, di targetkan pada pertengahan bulan mei untuk mulai pekerjaan dilapangan
13	Dinas Lingkungan Hidup	Pemasangan Geomembrane TPK Sarimukti	Kab. Bandung Barat	7.328.400.000	100,00%	85,68%	-14,32%	Selesai



A040B8A293



NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PAKET	LOKASI	PAGU ANGGARAN (RP,00)	KEMAJUAN FISIK (%)			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	DEVIASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Dinas Perhubungan	Lampu PJU Konvensional		6.891.163.369	100,00%	69,23%	-30,77%	Tahap pelaksanaan-> Sedang dalam proses pemasangan fondasi dan pemasangan tiang
15	Dinas Perhubungan	Lampu PJU Konvensional		6.891.163.369	100,00%	90,51%	-9,49%	Tahap pelaksanaan-> Sedang dalam proses pemasangan pondasi
16	Dinas Perhubungan	Lampu PJU Konvensional		9.855.737.923	100,00%	95,00%	-5,00%	Menunggu 5 titik tersambung dengan jaringan listrik
17	Dinas Perhubungan	Lampu PJU Konvensional		9.855.737.923	100,00%	56,25%	-43,75%	Tahap pelaksanaan-> Sedang dalam proses pekerjaan pondasi
18	Dinas Perhubungan	Pembangunan Terminal Tipe B Pangandaran	Kab. Pangandaran	14.277.000.000	100,00%	#N/A	#N/A	Tahap Persiapan
TOTAL				223.590.940.661				

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2025, diolah



A040B8A293



Berdasarkan data di atas dapat dilihat hampir seluruh Proyek Infrastruktur Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 masih dalam tahap persiapan tender maupun proses tender itu sendiri, meskipun masih terdapat beberapa dinamika dan catatan dalam proses pengerjaannya sebagai mana yang telah dirangkum :

1. Nilai Pagu merupakan gabungan dari Nilai pagu konstruksi, pengawas, pengawasan berkala dan biaya lain-lain;
2. Data di atas diambil dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/Kep.841-BAPP/2024, LPSE Provinsi Jawa Barat dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

2.5 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I-2025

Pelaksanaan program setiap Perangkat Daerah pada Triwulan I-2025 dilaporkan dalam bentuk Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah melalui aplikasi e-Monev Jabar, sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Triwulan I-2025. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi sampai dengan bulan Juni, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian kinerja setiap program Perangkat Daerah. Capaian kinerja dan penyerapan anggaran program Perangkat Daerah kurang lebih hampir sama, di mana tingkat capaian kinerja masih berpredikat Sangat Rendah.

Dalam pelaksanaan program pada Triwulan I-2025, Perangkat Daerah menemui berbagai kendala, baik secara eksternal maupun internal yang dapat menghambat pelaksanaan dan pencapaian kinerja, serta hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan sehingga mampu mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja seperti adanya koordinasi yang baik di lingkup Perangkat Daerah, anggaran yang tersedia sesuai rencana kegiatan, pemanfaatan teknologi, dsb. Perlu diidentifikasi sehingga dapat dipacu dan ditingkatkan untuk mendukung pencapaian kinerja yang memenuhi target. Begitu juga faktor penghambat seperti proses pencairan dana yang terkendala, permasalahan dalam mengelola aplikasi SIPD, terbatasnya jumlah SDM yang terampil dalam mengurus perencanaan dan penganggaran, proses lelang yang tertunda, dsb. Juga





perlu diidentifikasi sehingga dapat dicari solusi agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Untuk merespons faktor penghambat dan pendukung pencapaian target kinerja kegiatan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah, maka dirumuskan dan diberikan usulan sebagai tindak lanjut yaitu berupa hal-hal dapat direkomendasikan untuk membantu meningkatkan atau mencapai kinerja kegiatan pada triwulan berikutnya. Saran rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan kedepannya ataupun dalam melakukan evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun faktor pendorong dan penghambat setiap Perangkat Daerah telah diidentifikasi berdasarkan Laporan Hasil Renja yang telah disampaikan beserta saran rekomendasi yang disajikan telah disesuaikan dengan kendala yang dialami oleh Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.16

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dan Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD pada Triwulan I Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
1	Dinas Pendidikan	a. Dukungan Kepemimpinan: Dukungan kuat dari seluruh unsur pimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan berupa arahan yang jelas dan motivasi kepada tim pelaksana. b. Sumber Daya yang Memadai: Tersedianya sumber daya yang cukup, termasuk anggaran, personel, dan infrastruktur. c. Komitmen Pemangku Kepentingan: Keterlibatan dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, dan sektor swasta. d. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang baik, termasuk penetapan tujuan yang jelas, penentuan langkah-langkah pelaksanaan, dan alokasi sumber daya dengan efisien, dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan. e. Ketepatan Kebijakan: Adanya kebijakan yang mendukung dan kondusif dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan program berjalan dengan lancar. f. Inovasi: Mengadopsi inovasi dalam pelaksanaan program dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan solusi yang lebih baik terhadap tantangan yang dihadapi.	a. Kurangnya Anggaran: Ketidacukupan dana kendala utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran yang tidak memadai dapat membatasi sumber daya yang tersedia, sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b. Ketidakpastian Kebijakan: Perubahan kebijakan pemerintah atau organisasi dapat menyulitkan pelaksanaan program. Ketidakpastian aturan dan peraturan dapat membingungkan pelaksana dan menghambat kemajuan program. c. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Kurangnya jumlah atau keterampilan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan program dapat menjadi hambatan. Ini termasuk kurangnya tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman. d. Ketidakjelasan Tujuan dan Sasaran: Jika tujuan dan sasaran program tidak jelas atau tidak dapat diukur dengan baik, pelaksanaan program dapat menjadi tidak efektif. Semua pihak terlibat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. e. Korupsi: Praktik korupsi dapat merugikan pelaksanaan program	a. Mengoptimalkan koordinasi bersama untuk mempersiapkan perubahan-perubahan terkait kebijakan pusat; b. Perencanaan yang matang dan terstruktur; c. Mempersiapkan usulan terkait kebutuhan yang dibutuhkan dalam rincian anggaran belanja dalam system SIPD; d. Melibatkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan; e. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat tercapai secara optimal; f. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan dalam diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; g. Mengakselerasi pelaksanaan kegiatan; h. Melakukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan jadwal maupun implementasi kegiatan; i. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi; j. Memberikan pemahaman dengan melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana yang menyusun laporan;





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		g. Pengelolaan Risiko yang Efektif: Identifikasi dan manajemen risiko dengan baik dapat membantu menghindari atau mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan 8. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan: Proses evaluasi yang terus-menerus dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Kesenambungan dan Keberlanjutan: Menciptakan rencana untuk kesinambungan program setelah periode pelaksanaan untuk keberlanjutan hasil.	dengan mengarahkan sumber daya ke tangan yang salah dan merusak integritas pelaksanaan. f. Krisis Alam atau Bencana: Bencana alam atau krisis ekonomi dapat mengubah prioritas dan mendesak sumber daya jauh dari program yang sedang berjalan. g. Kurangnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Keterlibatan yang kurang dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghambat dukungan dan kolaborasi yang diperlukan untuk keberhasilan program.	k. Menambah jumlah personil perencana untuk mengurangi beban tugas setiap pemegang pelaksanaan kegiatan sehingga dapat melaksanakan DPA sesuai dengan yang direncanakan; 1. Melakukan sinkronisasi perencanaan dalam pelaksanaan DPA dengan proses perencanaan dan penganggaran
2	Dinas Kesehatan	a. Komitmen Kepala Dinas Kesehatan Provinsi terhadap pencapaian kinerja utama dan program melalui proses perencanaan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi yang terintegrasi b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi c. Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas Kesehatan sudah kuat dan memiliki SOP serta pembagian tugas yang jelas d. Koordinasi baik antara Dinas Kesehatan Provinsi, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan e. Alat pendukung seperti alat pengolahan data, internet dsb dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sudah tersedia di Dinas kesehatan Provinsi Jawa	a. Pola pelaporan capaian kinerja yang berjenjang beresiko terhadap ketidaksesuaian waktu pelaporan provinsi b. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai bahan pemetaan kegiatan di tahun berikutnya c. Pelaksanaan kegiatan belum secara sempurna terintegrasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi d. Pengukuran tolak ukur keberhasilan melibatkan pihak ketiga atau pihak eksternal menyebabkan target tidak dapat tercapai sesuai waktu yang diharapkan	a. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya. b. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala. c. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan. d. Melakukan peningkatan kapasitas





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		Barat.		dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	a. Sudah ditetapkan perda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 mengenai kawasan PKN, PKW, dan PKL, selanjutnya disinkronkan dengan sistem jaringan jalan. b. Jalur Tengah Selatan sudah tersedia FS (2014 & review 2021), Basic Desain (2021), Dokumen Amdal JTS Barat (2021), Dokumen Amdal JTS Timur (2022), penanganan jalan melalui bantuan keuangan untuk peningkatan jalan kab/kota. c. Kajian Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Rebana, selanjutnya koordinasi dengan abupaten terkait, dan menyusun strategi yang baik. d. Penyusunan dokumen leger jalan sebagai dasar Perencanaan konstruksi dan syarat laik fungsi jalan. e. Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. f. Meningkatkan sosialisasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. g. Koordinasi yang baik antara Dinas, UPTD, Biro Barang dan Jasa dalam proses pengadaan, khususnya lelang Pra DPA. h. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan.	a. Sistem jaringan jalan belum maksimal mendukung aktivitas Masyarakat, terutama jaringan jalan yang menghubungkan dengan PKN, PKW, dan PKL. b. Akses Horizontal (Jabar Selatan) dan Vertikal belum maksimal, disparitas wilayah Utara vs Selatan, jalan perbatasan, kawasan Rebana, Jalur Tengah Selatan. c. Kondisi jalan yang berada di daerah rawan longsor (391 titik), rawan banjir (43 titik), rawan kecelakaan (295 titik), mayoritas jalan sudah melewati umur teknis, usia jembatan > 30 tahun, banyaknya kendaraan muatan berlebih (MST > 8 ton), Data Leger Jalan (Informasi ruas jalan dan jembatan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, utilitas) baru tersedia 700 km dari 2.362,183 km, masih terdapat persimpangan sebidang perlintasan kereta api yang belum terbangun. d. Standar lebar jalan dari 76% jalan provinsi (1.816 km) tidak memenuhi kriteria jalan kolektor (7 meter). e. Pertumbuhan volume jalan lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan volume kendaraan. f. Peralatan kebinamargaan yang kurang memadai.	a. Peningkatan akurasi analisa kebutuhan dalam perencanaan program dan kegiatan. b. Mengoptimalkan perencanaan program penanganan jalan dengan merujuk kepada histori penanganan jalan, hasil survei kondisi jalan yang lebih akurat, serta kapasitas penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. c. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana. d. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa. e. Mengadakan Pelatihan atau Bimtek Sumber Daya Aparatur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. f. Memperkuat koordinasi internal dan dengan Perangkat Daerah terkait.





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		i. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup mendekati kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. j. Adanya Kegiatan Pelatihan dan Diklat dan Bimbingan Teknik Peningkatan Sumber Daya Aparatur	g. Keterlibatan masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur belum maksimal, belum adanya data entitas rantai pasok. h. Rencana pemanfaatan ruang yang memfasilitasi aktivitas masyarakat belum optimal. i. Pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal. j. Diperlukan perbaikan mutu untuk hasil yang lebih optimal melalui penguatan fungsi pengawasan, dan peningkatan alokasi anggaran secara proporsional (sesuai kapasitas dinas dan stakeholder terkait) untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan	
4	Dinas Sumber Daya Air	Beberapa Sub Kegiatan sesuai dengan rencana dan mempunyai Kinerja yang baik	belum ada hambatan dalam pencapaian kinerja dikarenakan masih dalam persiapan pekerjaan di Triwulan I Tahun Anggaran 2025	a. Agar memperhatikan kembali dan mencermati target keuangan dan fisik agar sesuai antara rencana dan realisasi b. Untuk pelaksanaan Pekerjaan Fisik Kontraktual dan Konstruksi agar dipersiapkan lebih matang mengenai HPS kegiatan
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	a. Arahan Pimpinan yang cermat dalam penyelesaian masalah pada pekerjaan fisik; b. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan	a. Adanya perubahan peraturan sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan; b. Terdapat beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi masih dalam proses administrasi pencairan; c. Terdapat beberapa pekerjaan yang pelaksanaannya mengalami pergeseran waktu (baik yang diakibatkan oleh permasalahan di proses lelang maupun yang	a. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. b. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana. c. Memperkuat koordinasi antar Bidang





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			diakibatkan oleh perubahan pengadaan barjas ke proses e-purchasing).	
6	Satuan Polisi dan Pamong Praja	Regulasi dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Masih Kurangnya Personil sehingga banyak kegiatan yang pelaksanaannya mengalami keterlambatan	Berkoodinas dengan BKD berkaitan dengan penambahan Personil
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada saat ini tidak memenuhi beban kerja yang cukup tinggi di BPBD Provinsi Jawa Barat, karena ingin mencapai tujuan dan sasaran dengan sebaik-baiknya, penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Akibatnya, kondisi ini berpengaruh pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja; b. Adanya pelaksanaan kegiatan BPBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan dengan personil yang sama sementara sebagaimana pada poin a terdapat permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya aparatur.	Adanya sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektifitas pencapaian kinerja sebagaimana yang ditargetkan	a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan BPBD dapat tercapai secara optimal; b. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; c. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan anggaran; d. Mempercepat pelaksanaan kegiatan; e. Melakukan optimalisasi koordinasi dan menyusun jadwal kegiatan.
8	Dinas Sosial	Dengan diterapkannya sistem pelaksanaan kegiatan secara team of team dapat membuat pekerjaan lebih efektif dalam pelaksanaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan	Keterlambatan dalam realisasi anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden RI	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang lebih baik dalam memitigasi faktor penghambat yang mungkin muncul
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; b. Beberapa program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang disusun;	a. Operasionalisasi laporan penatausahaan melalui aplikasi SIPD masih mengalami hambatan sehingga menyebabkan keterlambatan pengajuan SP2D GU; b. Dalam hal pengadaan barang dan jasa adanya perubahan-perubahan harga	a. Meningkatkan koordinasi secara intens dengan pihak penyedia dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa; b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala/situsalional terhadap pelaksanaan kegiatan agar





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		c. Terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dimana setiap pengawas harus melakukan pemeriksaan 5 (lima) perusahaan per bulan selama 1 (satu) tahun sehingga hasil capaian kinerja Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan yang diampu oleh Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan di 5 (lima) Wilayah melebihi target kinerja. Selain melakukan Pemeriksaan ke Perusahaan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis juga melakukan pengujian terhadap objek riksa uji (alat) diperusahaan, dimana SPM fungsional pengawas Ketenagakerjaan spesialis minimal 7 (tujuh) alat dalam 1 (satu) bulan. Selain pemeriksaan rutin Pengawas Ketenagakerjaan juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan Masyarakat, buruh ataupun pengusaha	barang yang tidak dapat diprediksi terutama barang-barang yang harganya mengikuti kurs rupiah; c. Keterbatasan SDM di bidang pengawasan Ketenagakerjaan dan pengawas spesialis Ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah objek riksa uji yang dilakukan (perusahaan	pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal; c. Menganalisa hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan yang lebih baik kedepannya; d. Mempersiapkan perencanaan kegiatan untuk bulan berikutnya.
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	a. Dukungan dari perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan program dan kegiatan; b. Koordinasi yang baik antara bidang dalam penyediaan data dan informasi; c. Komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelesaikan pekerjaan;	Beberapa pemahaman teknis pada capaian output dan outcome masih belum sesuai dengan timeline. mengingat pelaksanaan beberapa kegiatan masih dalam tahap awal, sehingga masih belum ada penyerapan anggaran dan realisasi output dan outcome yang signifikan pada kegiatan dan program yang dilaksanakan	a. Melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang direncanakan; b. Secara berkala melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait ditingkat pusat dan daerah untuk terus memperbaiki implementasi reformasi birokrasi





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		d. Kolaborasi dan komunikasi yang inovatif antara pemangku sektor Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	a. Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. b. Melaksanakan konsolidasi antara pengelola administrasi keuangan, khususnya Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Bendahara Pengeluaran yang diawasi oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrasi. c. Telah dilaksanakannya percepatan pelaksanaan kegiatan	a. Ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dikarenakan menunggu anggaran pergeseran. b. Perlu penyesuaian anggaran kas perbulan dengan realisasi keuangan sehingga realisasi di triwulan I masih rendah tidak sesuai dengan target, hal ini pun karena masih menunggu pengesahan pergeseran.	a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dapat tercapai secara optimal; b. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; c. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan anggaran; d. Mempercepat pelaksanaan kegiatan salah satunya dengan mengusulkan anggaran perubahan; e. Melakukan optimalisasi koordinasi dan menyusun jadwal kegiatan;
12	Dinas Lingkungan Hidup	a. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan b. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan c. Terdapat kegiatan yang bergantung terhadap kegiatan lain atau lembaga lain.	a. tugas dan fungsinya, koordinasi yang baik dengan pihak terkait b. Sarana dan prasarana kerja yang memadai c. Koordinasi yang baik antara dinas dengan Cabang Dinas serta UPTD dalam penyediaan data dan informasi	a. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat b. yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. c. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Tingkatan koordinasi yang baik antara Kementrian yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;	a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kebermanfaatan Dokumen Administrasi Kependudukan; b. Belum Optimalnya Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah; c. Sulitnya proses pepadanan/penyandingan data kependudukan	a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan; b. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara komprehensif kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam pelayanan administrasi





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		b. Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal penyusunan dan analisis data Profil Kependudukan; c. Pemanfaatan Teknologi Informasi sosial media dalam hal Sosialisasi Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan	- dikarenakan diterapkannya kebijakan SIAK Terpusat yang berdampak Disdukcapil Provinsi tidak dapat memberikan/menyajikan data kependudukan kepada instansi/lembaga lain karena sudah tidak memilki data By Name By Address (BNBA); d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Untuk Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/ Kota; e. Belum Optimalnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten di Bidang Administrasi Kependudukan; f. Tantangan Kondisi Geografis	- kependudukan yang prima guna tercapainya target nasional di Jawa Barat; c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang administrasi kependudukan; d. Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota; e. Penyesuaian regulasi antara pemerintah pusat dengan daerah terkait kewenangan Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Barat dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Adanya kegiatan Pembekalan Pra Tugas Patriot Desa dan SSPMD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten untuk pembangunan desa berdasarkan Asta Cita dalam fasilitasi desa untuk meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai aspek. b. Adanya kolaborasi dan kerjasama dengan PT. Heinz ABC dan BUMDes/BUMDes Bersama dalam membawa BUMDes di Provinsi Jawa Barat menjadi baik dan professional untuk meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). c. Kolaborasi antara DPMDesa Provinsi Jawa Barat dengan Disperkim Provinsi Jawa Barat dalam survey lokasi eksisting jembatan gantung desa untuk mengidentifikasi kerusakan dan mengukur tingkat	a. Masih ada desa-desa yang belum mengetahui fungsi dalam pemanfaatan tanah kas desa. b. Masih adanya desa-desa yang membutuhkan pembinaan, dengan aksesibilitas yang belum memadai. c. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam hal teknis pemerintahan desa, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar desa. d. Masih banyaknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didesa Provinsi Jawa Barat yang sudah terbentuk cenderung naik turun dalam pengelolaannya sehingga kegiatan usaha nya menyebabkan menurunnya pendapatan bumdes/pendapatan asli desa. e. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan desa kapasitas keuangan	a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pemnafaatan tanah kas desa b. Melakukan pembinaan yang intensif ke desa-desa yang masih mempunyai permasalahan dalam hal akses, selain hal tersebut mengusulkan perbaikan terhadap akses jalan melalui progam peningkatan infrastruktur desa. c. Melakukan pembinaan dan bimbngan teknis kepada para aparatur desa. d. Bekerjasama dengan Instansi yang membina Bumdes di dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola Bumdes. e. Melakukan koordinasi yang intensif dengan BPKAD berkaitan dengan pergeseran serta melakukan percepatan di dalam pelaksnaaan pekerjaan.





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		urgensi perbaikan untuk kemudian diberikan skala prioritas pembangunan jembatan gantung desa. d. Adanya program dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2024 yang mencakup delapan fokus utama penggunaan dana desa tahun 2025, antara lain: 1. Penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa 2. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim 3. Peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan, termasuk penanganan stunting 4. Dukungan program ketahanan pangan dengan minimal alokasi 20% dari dana desa 5. Pengembangan potensi dan keunggulan desa 6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan desa digital 7. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal 8. Program sektor prioritas lainnya serta dana operasional pemerintah desa. e. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan pihak-pihak swasta dalam memudahkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan	desa dibanding dengan tanggung jawab yang semakin besar terutama untuk desa yang kuantitas Sumber Daya Alam terbatas di desa perbatasan. f. Keterbatasan konektivitas jalan dan sarana penghubung lainnya serta jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ke desa. g. Adanya pergeseran refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan terhambat serta beberapa subkegiatan yang terefisiensi menjadi tidak terlaksana.	
15	Badan Penghubung	a. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja; b. Pemanfaatan Tim Kerja internal; c. Pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan	a. Lokasi jarak antara 2 kantor (Badan Penghubung dan Anjungan di TMII) membutuhkan koordinasi yang optimal; b. Kebijakan dan manajemen TMII yang selalu berubah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan manajemen TMII berkaitan dengan kebijakan pelayanan kepada masyarakat. b. Menyusulkan kepada BPKAD untuk penambahan aset sarana dan





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			c. Kurangnya sarana prasarana pendukung baik di kantor Badan Penghubung maupun di anjungan	prasarana dan mengoptimalkan yang sudah ada
16	Dinas Perhubungan	a. Pembentukan Tim Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang menjadi langkah strategis dalam mendukung proses penyederhanaan birokrasi; b. Terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan dalam penyediaan perlengkapan jalan. c. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan di wilayah Jawa Barat, yang bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para pemangku kepentingan lainnya, guna meningkatkan kualitas komunikasi dan kerja sama lintas sektor.	a. Komunikasi dan koordinasi antar unit pelaksana kegiatan masih belum berjalan secara maksimal; b. Kompetensi pada setiap unit kerja yang belum merata; c. Data yang belum terintegrasi dengan baik; d. Tingkat pemahaman proses pengadaan barang jasa yang berbeda.	a. Dilakukan penyusunan rencana kerja atau timeline kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang lebih komprehensif dan terstruktur; b. Diterapkan koordinasi, kolaborasi dan inovasi dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan pihak yang terkait; c. Dilakukan pergeseran atau perubahan untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan; d. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 akan menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan selanjutnya; e. Melakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih intens terkait penambahan anggaran perlengkapan jalan.
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja; b. Tersedianya prosedur pelaksanaan yang baku dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; c. Adanya keselarasan dengan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan	a. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; b. Adanya ketergantungan terhadap Institusi lain dalam pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan; c. Terhambatnya proses pencairan keuangan.	Melakukan optimasi koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan pihak terkait sehingga pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	d. Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. a. Adaya komitmen kuat seluruh jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam menyelesaikan penyesuaian perencanaan kegiatan pasca efisiensi, serta koordinasi yang intensif dengan mitra dan seluruh stakeholder dalam mempercepat penyusunan dan penetapan regulasi yang diperlukan. b. Kesiapan teknis pelaksanaan program, termasuk desain kegiatan dan kesiapan pelaksana, juga menjadi modal penting dalam mendorong realisasi	Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, beraitan dengan hal tersebut Dinas KUK melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran	a. Percepatan finalisasi revisi dokumen perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan anggaran efisiensi dapat segera dimulai. b. Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan regulasi pendukung, khususnya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait program subsidi bunga kredit dan IJP, agar pelaksanaan program strategis tersebut dapat segera direalisasikan sesuai target kinerja. c. Optimalisasi koordinasi lintas unit kerja serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran juga menjadi kunci penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program. d. Pemberian asistensi teknis kepada bidang-bidang terkait, terutama dalam hal pengadaan dan pelaporan melalui sistem, dapat membantu meminimalisir kendala administratif yang berpotensi menghambat percepatan realisasi.
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan. b. Ide/gagasan untuk pengembangan Sistem Informasi c. Kemajuan teknologi dan inovasi d. Peraturan Kementerian Investasi untuk mewujudkan pemerataan	a. Keterbatasan sumber daya ; seperti anggaran yang diefisiensikan, sumber daya manusia juga sarana dan prasarana b. Perubahan sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	a. Pembuatan potensi dan peluang investasi yang layak jual; b. Profil Hilirisasi Industri Prioritas; c. Sosialisasi Perda Investasi dan Kemudahan Berusaha; d. Mempermudah proses perizinan;





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah di bidang penanaman modal	c. Kesulitan dalam pengumpulan data yang terkait realisasi investasi. d. Tidak tersampaikan nya informasi yang dibutuhkan kepada pelaku usaha tentang peluang investasi di Jawa Barat	e. Melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap proyek investasi yang sudah masuk ke Jawa Barat f. Pembinaan internal yang berkelanjutan untuk peningkatan pemahaman terkait pelaksanaan penanaman modal; g. Meningkatkan volume promosi investasi melalui flatform digital Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	a. Penjadwalan anggaran yang tepat sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dapat membantu memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan lancar dan efektif b. Komitmen dalam melaksanakan kegiatan dari semua pihak yang terlibat membantu memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan c. Ketersediaan sumber daya yang cukup dapat membantu memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien	a. Efisiensi anggaran dapat menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas program kegiatan b. Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi penyerapan anggaran serta capaian kinerja program kegiatan c. Keterbatasan sumber daya serta kurangnya komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas serta efisiensi kegiatan	a. Mengoptimalkan penjadwalan anggaran untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan efektif b. Meningkatkan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan c. Mengelola efisiensi anggaran dengan baik, untuk memastikan bahwa program kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas kegiatan d. Memonitoring dan evaluasi kegiatan secara secara konsisten untuk memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	a. Sarana dan prasarana kearsipan di setiap perangkat daerah masih perlu dipenuhi; b. Sumber daya manusia kearsipan belum merata dan tersedia di setiap Perangkat Daerah sehingga	a. Tersedianya pedoman, panduan, aturan dan kaidah kearsipan yang lengkap, lengkap dan lugas; b. Terdapatnya sumber daya manusia kearsipan, yaitu jabatan fungsional arsiparis.	Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berkenaan dengan pergeseran/ efisiensi anggaran tahun 2025





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		menyulitkan pengelolaan Arsip yang tertib sesuai ketentuan; c. Jumlah perpustakaan belum merata; d. Tingkat ketercukupan koleksi perpustakaan masih rendah dan belum memenuhi standar; e. Tingkat kemanfaatan koleksi perpustakaan oleh pemustaka masih rendah; f. Tenaga perpustakaan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat; g. Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh anggota perpustakaan masih rendah	c. Komitmen pimpinan beserta semua unsur terkait dalam peningkatan kegemaran membaca masyarakat	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Upaya pengembangan luas kawasan pergararnan perlu dukungan sarana prasarana yang memadai, dukungan stakeholder lokal maupun pusat serta kolaborasi berbagai pihak; b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan pada petambak budidaya ataupun unit pembudidaya rakyat, sehingga produksi budidaya ikan di Jawa Barat menjadi belum optimal; c. Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap yang ramah lingkungan, sehingga produksi perikanan tangkap di Jawa Barat belum optimal; d. Kurangnya SDM yang memahami menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait perencanaan dan penganggaran; e. Berkurangnya minat budidaya ikan bagi kaum muda;	a. Memiliki Potensi Budidaya Ikan yang Tinggi; b. Koordinasi yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan POKMASWAS dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Adanya bazar produk hasil perikanan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya; d. Potensi budidaya dan perikanan tangkap yang tinggi di Provinsi Jawa Barat; e. Koordinasi yang Baik Antar Unit Kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan.	a. Mengikutsertakan ASN yang menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; b. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan bagi petambak budidaya ikan baik perorangan ataupun kelompok guna meningkatkan produksi budidaya ikan di Jawa Barat; d. Memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan bagi nelayan; e. Berkoordinasi dengan BPKAD terkait pelaksanaan efisiensi anggaran;





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		f. Terdapat efisiensi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan		
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Menjawab adanya tantangan dari kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat berbagai arahan yang tidak ada dalam perencanaan sebelumnya dengan menyesuaikan dengan program, kegiatan yang ada; b. Komitmen pimpinan perangkat daerah untuk fokus dalam mencapai tujuan organisasi (IKU Perangkat Daerah) dengan anggaran yang terbatas dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas juga dalam memberikan solusi-solusi pencapaian tujuan. c. Perencanaan menjadi lebih dinamis siap dalam setiap kebutuhan yang bertujuan untuk pelayanan terhadap masyarakat, pergeseran anggaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Rapat pimpinan menjadi agenda rutin bahkan kondisional dilakukan oleh pimpinan untuk menyepakati keputusan dan langkah yang akan diambil serta menjadi media untuk berkomunikasi dan berkoordinasi yang lebih intensif dengan seluruh	a. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I merupakan masa transisi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode Tahun 2025-2030, terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan program; b. Adanya efisiensi anggaran di tahun 2025, sehingga dilakukannya pergeseran anggaran dan realokasi anggaran yang diluar perencanaan sebelumnya; c. Terdapat pergantian kepala perangkat daerah yang memberikan dampak dalam penentuan keputusan dalam merealokasi anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan. d. Perbedaan data antara e-monev Jabar dan SPJ keuangan dikarenakan adanya data yang belum diperbarui di aplikasi e-monev Jabar.	a. Melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhitungkan jadwal yang telah direncanakan. b. Melakukan pencermatan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian. c. Melakukan konsolidasi dengan pimpinan perangkat daerah agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. d. Melakukan koordinasi dengan Bappeda berkaitan dengan aplikasi e-monev sehingga data yang dihasilkan sama.
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan	a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan. b. Koordinasi yang baik antara dinas dengan UPTD dalam penyediaan data dan informasi.	a. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.



A040B8A293



NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan amanat tersebut dengan mengefisiensi belanja Perangkat Daerah yang dialokasikan untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih bermanfaat. Termasuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melaksanakan efisiensi anggaran yang didapat dari efisiensi belanja perjalanan dinas, belanja ATK, dan belanja lainnya yang dipandang tidak perlu serta tidak mendesak dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 b. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan. c. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran. d. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan. e. Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal tanam.	c. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan. d. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tanam.	b. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana. c. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan jadwal tanam, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
25	Dinas Perkebunan	a. Telah disusunnya jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga beberapa kegiatan terlaksana dengan baik; b. Telah dibuat antisipasi/mitigasi/plan lain pada beberapa pelaksanaan kegiatan sehingga ketika ada permasalahan dapat segera tertangani	a. Adanya keterlambatan pengaplikasian Kartu Kredit Perangkat Daerah (KKPD) dalam proses pembayaran yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan; b. Terkait dengan penggunaan KKPD, perlu penyesuaian pada belanja barang dan jasa karena tidak semua penyedia memiliki media Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS);	a. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak penyedia dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa; b. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak kelompok tani dan bank terkait pembuatan rekening bank kelompok tani; c. Mempercepat penggunaan Kartu Kredit Perangkat Daerah (KKPD) dalam proses pembayaran;





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			c. Adanya efisiensi anggaran dan adanya pelaksanaan pergeseran anggaran yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan Kegiatan; d. Terhambatnya penentuan CPCL yang diakibatkan oleh adanya perubahan anggaran setelah efisiensi; e. Adanya penjadwalan ulang/reschedule kegiatan yang pelaksanaannya ditentukan oleh pihak lain; f. Adanya kekeliruan dalam penyimpanan komponen sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan karena harus menunggu pengajuan komponen baru; g. Terbatasnya ketersediaan anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan Alur Kas yang telah disusun.	d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal; e. Menelaah hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan yang lebih baik kedepannya; f. Mempersiapkan perencanaan kegiatan untuk bulan berikutnya; g. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan mengoptimalkan perannya agar pencapaian tujuan, sasaran target program dan kegiatan Dinas Perkebunan dapat tercapai secara optimal; h. Melakukan akselerasi pada beberapa kegiatan yang terhambat/tertunda pelaksanaannya.
26	Dinas Kehutanan	a. Kurangnya ketersediaan aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan program/kegiatan. b. Proses pencairan anggaran mengalami keterlambatan	a. Koordinasi yang cukup baik antara dinas dengan UPTD dan CDK dalam penyediaan data dan informasi. b. Kondisi geografis dan cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan.	a. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana. b. Meningkatkan kompetensi aparatur pelaksana program dan kegiatan.
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas ESDM, unit kerja dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maupun dengan Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat	1. Terdapat hambatan mengenai pemanfaatan tenaga listrik non-PLN yang menurun di antaranya tidak dilakukan perpanjangan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) antara PT Tatajabar Sejahtera dan PT. Green Power South East Asia, sehingga PT. Green Power South East tidak memproduksi listrik mulai September 2024 dan PT Dian Swastatika Sentosa-Unit Karawang 1 dan 2 sedang dalam proses permohonan	Pencapaian Target kinerja perlu diselarkan dengan data dukung yang sesuai dan hasil monitoring





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			pencabutan IUPTLU karena beralih menjadi IUPTLS.	
		2. Kerja sama yang baik antara Dinas ESDM dengan instansi lainnya seperti Pemerintah Pusat, Perusahaan/ Pemilik Izin Usaha Sektor ESDM, Asosiasi, Akademisi, dan masyarakat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dinas	2. Belum terdapat platform aplikasi untuk melakukan validasi data secara langsung di lapangan guna mendukung keabsahan data dukung penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi sehingga data yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.	
		3. Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) y guna mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran dinas	3. Terbatasnya anggaran kegiatan pengawasan, sehingga tidak semua Pemegang IUP dapat dilakukan pengawasan.	
		4. Pemberian sambungan listrik untuk rumah tangga miskin belum berlistrik di Jawa Barat melalui skema pendanaan APBD dan CSR Jabar Caang.	4. Kewajiban pelaporan berkala oleh Pemegang IUP belum berjalan dengan baik dan optimal.	
		5. Pembangunan PLTS Atap di 7 SMA/K pada Wilayah Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendorong peningkatan bauran EBT di Jawa Barat, penyusunan Laporan Akhir PEP RAD GRK 2024, Lembar Platform Pengisian Capaian Kinerja Tahunan PEP RAD GRK, Data Hasil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi 2022 s/d 2024, data dari Aplikasi SIBENI (Sistem Informasi Bidang Energi), perhitungan pencapaian Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi secara lengkap dilaporkan melalui aplikasi AKSARA dan diverifikasi oleh BAPPENAS dan desk penyesuaian angka target tingkat penurunan emisi GRK pada sektor energi dengan BAPPEDA (koordinator PEP RAD GRK seluruh sektor di Jawa Barat).	5. Kurangnya penguatan organisasi dimana Pemilik Perusahaan atau Pemegang IUP kurang mendukung program KTT yang telah direncanakan dalam RKAB.	





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		6. Memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan kewajiban pelaporan bagi pemegang IUP serta memberikan surat teguran kepada pemegang IUP bagi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan serta mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan presentasi pelaksanaan tindak lanjut inspeksi baik secara offline/online.	6. Terdapat beberapa Pemegang IUP yang belum memiliki dokumen teknis dan pengesahannya seperti Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Rencana Pascatambang beserta bukti penempatan Jaminan Pascatambang	
		7. Memastikan komitmen perusahaan untuk mendukung program KTT yang tercantum didalam RKAB dan memastikan terkait ketersediaan personil minimal yang memegang bidang safety, produksi, lingkungan, dan admin	7. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sektor energi dan sumber daya mineral	
		8. Menyampaikan surat pemberitahuan bagi Pemegang IUP untuk melengkapi dokumen teknis yang dimiliki sebagai panduan dasar kegiatan operasional dan mewajibkan seluruh pemegang IUP untuk menyusun dokumen studi kelayakan untuk mendapat persetujuan dari pemerintah	8. Belum terbitnya peraturan pelaksana/turunan dari terbitnya beberapa peraturan/perundang-undangan dan peraturan di tingkat pemerintah provinsi	
		9. Pendampingan yang cukup intensif dalam penyusunan finalisasi dokumen Rencana Induk Pengelolaan Air Tanah pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		
		10. Melaksanakan sosialisasi/ pembinaan kepada para pengguna air tanah secara daring maupun luring terkait tatacara pengukuran, pemantauan dan pemeliharaan untuk selanjutnya dilakukan pelaporan data secara berkala ke Dinas ESDM melalui sistem e-osmosys 5.0		





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		11. Penerapan pentingnya konservasi dengan pembangunan titik sumur imbuhan dan sumur pantau dalam rangka konservasi air tanah dengan menjaga keseimbangan air tanah antara pengambilan dan aliran alamiah sehingga pembangunan dapat berkelanjutan		
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Koordinasi yang intensif antar bidang dan UPTD dalam penyediaan data dan informasi; - Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan; - Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku.	- Kekurangcermatan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan yang menyebabkan nilai deviasinya diatas - 11% atau kategori Sangat Rendah; - Anggaran mengalami refocusing, sehingga ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan; - Terdapat Kegiatan yang mengalami waktu pengunduran pelaksanaan diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran; - Kendala Administrasi (Keterlambatan Proses Pembayaran).	- Melakukan pendampingan penyusunan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan penganggaran; - Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana; - Menyusun Strategi dalam rangka akselerasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan; - Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang mengalami pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan
29	Sekretariat Daerah	- Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. - Adanya koordinasi dan komunikasi serta sinergitas diantara pemegang kegiatan di Biro, Verifikatur, dan pihak ketiga - Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana kerja memadai, ketersediaan dana tepat waktu.	- Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang menyebabkan beberapa sub kegiatan hanya dilaksanakan di sekretariat perangkat daerah, sehingga terjadi inkonsistensi perencanaan di lingkup Biro. - Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak menggambarkan kegiatan secara mendetil. - Adanya perubahan nomenklatur dan pergeseran APBD sehingga proses	- Memperhatikan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Renja Tahun 2025 Triwulan I, yaitu koordinasi yang baik antar unit kerja di Sekretariat Daerah serta kepatuhan dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, tentunya hal ini akan dipertahankan serta akan diupayakan meminimalisir faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja; - Penyesuaian pagu anggaran pada dokumen perencanaan, yang





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		d. Pelaporan kinerja yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. e. Meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	- administrasi pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan. d. Terdapat perubahan mekanisme pencapaian kinerja pada tahun berjalan sehingga terjadi penyesuaian mekanisme, sehingga pelaksanaan kinerja mengalami pengunduran waktu. e. Pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada jadwal instansi lain, sehingga sering mengalami keterlambatan pelaksanaan. f. Kekurangcermatan dalam penyusunan alokasi anggaran, target keuangan dan fisik	- didasarkan pada pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sehingga pagu anggaran dalam dokumen perencanaan tersebut dapat selaras dengan dokumen pelaksanaan anggaran serta dalam rangka konsistensi antar dokumen perencanaan. c. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses keuangan.
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	a. Koordinasi yang baik antara bagian dalam penyediaan data dan informasi, b. Komitmen dan kerjasama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan	Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program / kegiatan dan penganggaran dan komponen e-budgeting yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel.	Melakukan koordinasi intensif dengan BPSDM dan BKD untuk melakukan bimbingan teknis yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan; b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana/agenda kerja; c. Pembagian tugas PIC secara efektif dan efisien mendukung terselesaikannya penyusunan dokumen dengan baik; d. Selain data manual, terdapat aplikasi monitoring sehingga data capaian lebih akurat dan tepat sasaran; e. Tingkat kepatuhan Kabupaten/Kota terkait pelaporan semakin baik; f. Sinergitas antar unit organisasi yang menyebabkan efektivitas pencapaian	a. Adanya pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan personil yang sama; b. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada saat ini belum ideal jika dibandingkan dengan beban kerja yang cukup tinggi di Bappeda Provinsi Jawa Barat, karena ingin mencapai tujuan dan sasaran dengan sebaik-baiknya, penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Akibatnya, kondisi ini berpengaruh pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja;	a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Bappeda dapat tercapai secara optimal; b. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan dalam diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran; c. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan anggaran; d. Mempercepat pelaksanaan kegiatan; e. Melakukan optimalisasi koordinasi dan menyusun jadwal kegiatan





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		kinerja sebagaimana yang ditargetkan; dan g. Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota	c. Belum adanya pemahaman yang sama dalam penyusunan laporan; d. Banyaknya kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilaporkan, dimonitor dan dievaluasi; e. Terdapat beberapa penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan; f. Pelaksanaan kegiatan menunggu jadwal penyesuaian RAK; dan g. Fokus bidang pada penyusunan dokumen perencanaan pembangun daerah selama Triwulan	
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Perencanaan Anggaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 2. Pengelolaan Bantuan dan Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 3. Kabupaten/Kota Menerapkan Hasil Evaluasi Perencanaan Anggaran Daerah 4. Kabupaten/Kota Menerapkan Hasil Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah 5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Lingkup UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset 6. Administrasi Barang Milik Daerah Andal 7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Lingkup SKPD 8. Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		9. Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 10. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 11. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah 12. Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 13. Kabupaten/Kota Menerapkan Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah 14. Kabupaten/Kota Menerapkan Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 15. Pengelolaan Barang Milik Daerah Akuntabel dan Produktif		
33	Badan Pendapatan Daerah	a. Komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja Bapenda untuk optimal melaksanakan program/kegiatan sesuai yang direncanakan yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Gubernur Jawa Barat; b. Koordinasi yang baik antara Bapenda Pusat dengan P3DW se-Jawa Barat dalam penyediaan data dan informasi; c. Semakin meningkatnya peran sistem pengendalian internal di setiap unit pelaksanaan kegiatan serta arahan perbaikan kebijakan dari kantor Pusat Bapenda	a. Terdapat efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap capaian output yang sudah direncanakan sebelumnya; b. Anggaran Kas antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sub kegiatan/aktivitas berbeda karena adanya efisiensi; c. Terbatasnya pelaksana SDM untuk membantu administrasi keuangan karena menjalankan tugas membantu pelayanan; d. Kegiatan Operasi Gabungan, Operasi Khusus dan Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Triwulan I belum dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat	a. Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran kas dengan tetap berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas; b. Menentukan prioritas pada pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung optimalisasi pencapaian target pendapatan; dan c. Lebih cermat dalam menyusun anggaran kas pergeseran





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
			kebijakan intensifikasi pajak kendaraan bermotor (Pemutihan Pajak Kendaraan)	
34	Badan Kepegawaian Daerah	a. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, baik dari individu maupun tim, dapat meningkatkan efektivitas kinerja; b. Tersedianya sumber daya yang memadai, seperti SDM, peralatan, dan infrastruktur, dapat mempercepat pencapaian kinerja	Adanya Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025	a. Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja tidak cukup baik. b. Melakukan penyesuaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat sub bidang/Sub Bagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan di tingkat Subbid/Subbag. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan dapat mengendalikan, mengevaluasi, dan menyetujui secara sistem. b. Koordinasi yang baik terjalin antara Bappeda-BPKAD-Biro Organisasi memperlancar proses e-budgeting. Biro Organisasi penting terkait komponen-komponen harus ditetapkan dengan regulasi berupa SBU dan SBK.	a. Kebijakan efisiensi mengharuskan kehati-hatian dalam realisasi anggaran, sehingga pelaksanaan anggaran mengalami hambatan. b. Pelaksanaan kegiatan masih dalam proses Inventarisir Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dan input dalam sistem. c. Terbatasnya Anggaran Operasional. d. Kurangnya SDM Pengelola yang Kompeten. e. Ketergantungan pada Lembaga Pusat.	a. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih detail dan berbasis prioritas. b. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan data yang masuk akurat dan mutakhir. c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sumber daya internal. d. Memanfaatkan platform digital untuk pelatihan jarak jauh. e. Perkuat komunikasi dan sinergi dengan lembaga pusat untuk memastikan transfer pengetahuan dan kebijakan berjalan efektif.
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen seperti pengendalian yang menjamin program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemantauan yang dapat mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk	a. Dampak dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Sekretaris Daerah Nomor 827/KU.01.01/BAPP Hal: Rencana	a. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran dan mengoptimalkan peran Pengelola keuangan dalam proses pencairan dana;





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		dapat diambil tindakan sedini mungkin, serta evaluasi yang bertujuan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar; dan b. Berkolaborasi dengan berbagai <i>stakeholders</i> seperti Lembaga Kelitbangan di Perguruan Tinggi dan di Kementerian (sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama yang dilakukan) dan Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Efisiensi Belanja berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan beberapa target output kegiatan tidak jadi dilaksanakan yang mempengaruhi pula realisasi anggaran. b. Pada Triwulan I ini sebagian besar program/kegiatan berfokus pada pencapaian proses yang telah direncanakan dan ditargetkan dalam rencana aksi. Namun, dalam menjalankan proses tersebut ditemukan beberapa kendala terutama dalam input yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi sesuai dengan rencana; c. Narasumber merupakan salah satu input utama dalam kegiatan penelitian menjadi kendala yang dihadapi dalam menjalankan program/kegiatan di Triwulan I ini. Adanya narasumber yang mengundurkan diri, sakit, dan beberapa kondisi lainnya cukup menghambat proses penelitian/kajian yang telah disusun; d. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan merupakan program lanjutan dari Kementerian; e. Perangkat Daerah terkait yang belum mengirimkan data sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan;	b. Memprioritaskan pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja rendah-sangat rendah
37	Inspektorat	1. Dalam penyusunan PKPT sesuai kewenangan dan ruang lingkup dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk skala prioritas dalam	a. Terbatasnya jumlah pengawasan (auditor dan P2UPD) dan kualitas auditor dan P2UPD yang belum memadai dan meningkatnya	a. Efisiensi biaya kegiatan yang diutamakan Kabupaten/Kota perlu dibantu.





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
		melaksanakan kegiatan tugas pengawasan; 2. Kebutuhan tenaga ahli sesuai jenjang pendidikan fungsional secara bertahap tiap tahun diusulkan/diprogramkan; 3. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai jenis pelatihan maupun pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas para aparatur pengawasan secara internal; 4. Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah maupun Kabupaten/Kota dalam penyediaan data dan informasi.	kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme para auditor secara proporsional. b. Ketatnya waktu pemeriksaan disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat perundang-undangan, jumlah Auditan ditambah dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Inspektorat) maupun yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat (KemenPANRB, KPK, Setneg atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Lainnya), yang harus segera ditangani dan diselesaikan.	b. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Tersedianya anggaran sesuai dengan rencana pencairan kegiatan. b. Sinergitas antar pemangku kebijakan (stakeholder) sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. c. Komitmen seluruh pihak untuk dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.	a. Terdapat perbedaan satuan antara indikator program dan indikator kegiatan (persen dan jumlah). b. Terdapat beberapa indikator kegiatan yang harus diperbaiki/direvisi karena tidak dapat dihitung sebagai output.	a. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan baik pada Sekretariat maupun di Bidang-Bidang untuk mengikuti Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. b. Penyelarasan satuan untuk target indikator kegiatan dan indikator program, sehingga capaian indikator kegiatan dan capaian indikator program dapat dihitung (measurable). c. Perbaiki output kegiatan maupun satuannya, agar dapat dihitung





NO.	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI
				kinerja yang dicapai dalam periode capaian realisasi. Untuk kegiatan yang sifatnya penyediaan agar diseragamkan sesuai dengan jumlah bulan penggunaan anggaran. d. Konsistensi terhadap target sasaran kegiatan diantara seluruh dokumen mulai dari RKPD, Renja, Renstra, dan Rencana Aksi.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat 2025, diolah



A040B8A293



Berdasarkan tabel 2.16 diatas berikut disampaikan usulan kebijakan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas faktor-faktor penyebab, yaitu:

1. Tetap menjaga konsistensi program dan kegiatan Perangkat Daerah, khususnya program dan kegiatan pembangunan daerah yang bersifat strategis/prioritas dalam RPJMD terhadap RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta APBD Provinsi Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan agar tercipta perencanaan dan penganggaran yang terpadu;
2. Setiap Perangkat Daerah diharapkan konsisten mempedomani indikator kinerja program dan kegiatan beserta satuan indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD. Dengan indikator yang konsisten antar dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan ke dokumen penganggaran maka memudahkan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Pentingnya dilakukan Sosialisasi atau Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi E-Monev Jabar kepada setiap KPA maupun PPTK yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kinerja sehingga data capaian yang diperoleh lebih akurat dan tepat sasaran;
4. Perangkat Daerah perlu melakukan pemantauan jadwal pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai jadwal dengan baik sehingga dapat melaporkan realisasi secara periodik dengan taat;
5. Koordinasi secara intens perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan pihak-pihak terkait dalam hal perencanaan dan penganggaran, teknis pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan, kebutuhan sumber daya, dan sebagainya, baik secara internal atau lintas Perangkat Daerah, bahkan dengan masyarakat maupun pelaku dunia usaha.

Diharapkan dengan melihat hasil dari evaluasi pelaksanaan pada tahun 2024 dan TW I tahun 2025 maka pada perjalanan pembangunan di sisa tahun 2025 dapat memperbaiki pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah memuat kondisi capaian kinerja perekonomian Jawa Barat tahun 2024, pemutakhiran target berdasarkan prospek perekonomian pada tahun 2025 yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, termasuk analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/Sj tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan





wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan tersebut perlu memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain: 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; 2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG); 3) Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrem; 4) Pengendalian Inflasi di daerah; 5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; 6) Dukungan swasembada pangan; dan 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian Jawa Barat tahun 2025 mempertimbangkan perkembangan dan prospek perekonomian global, arah kebijakan nasional terhadap Jawa Barat, serta potensi dan modalitas pembangunan yang dimiliki Jawa Barat. Arah kebijakan ini juga disesuaikan dengan mengacu visi dan misi serta program unggulan Gubernur periode 2025-2030. Arah kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mencapai target indikator makro yang menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2025.

3.1.1 Indikator Makro dan Indikator Sasaran Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Sebagai bagian integral dari kerangka perekonomian daerah, indikator makro dan sasaran visi pembangunan menjadi acuan utama untuk mengukur pencapaian serta mengarahkan intervensi kebijakan yang efektif. Indikator-indikator tersebut merupakan arahan nasional yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja setiap daerah. Selain itu, penetapan target pada indikator tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan pada saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) tahun 2025.





Tabel 3.1
Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator Makro Pembangunan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,96 - 5,37	4,96 - 5,37
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46	5,85 - 6,46
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,42 - 6,99	6,42 - 6,99
4	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,17	75,17
5	Rasio Gini (Poin)	0,383 - 0,390	0,383 - 0,390
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	6,61

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Selain indikator makro, terdapat indikator sasaran visi yang menjadi amanah kinerja pembangunan jangka panjang yang diatur dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat. Indikator ini mencakup indikator makro yang telah ditetapkan, serta indikator tambahan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Keberadaan indikator sasaran visi ini sangat penting karena menjadi alat ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan menuju visi nasional "Indonesia Emas 2045". Indikator tersebut dibuat untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Berikut adalah daftar indikator beserta targetnya yang termasuk dalam Indikator Sasaran Visi, di luar indikator makro yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 3.2
Target Indikator Sasaran Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator Sasaran Visi Pembangunan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	57.14-57.42	57,41 - 59,6
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (Poin)	48,19	48,19
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,15 - 41,38	41,87 - 42,00
4	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	12,54	12,72
5	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,55	0,55
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,00	64,06

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 turun menjadi 2,8 persen dari sebelumnya 3,6 persen, terutama akibat kebijakan





proteksionisme perdagangan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, dan pengetatan moneter di negara maju. Meskipun inflasi global diperkirakan melandai dan mendukung pemulihan permintaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 4,9–5,1 persen, didorong oleh konsumsi domestik dan investasi swasta. OECD mencatat bahwa ekspor Indonesia dapat terdorong oleh kenaikan harga komoditas, namun pertumbuhan nasional masih di bawah tren pra-pandemi. Oleh karena itu, kesinambungan reformasi struktural dan peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3–5,6 persen, meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Target ini didorong oleh keberlanjutan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan agro-maritim melalui peran koperasi. Pembangunan SDM, sains, dan teknologi menjadi fondasi utama, yang diwujudkan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) seperti Makan Bergizi Gratis, peningkatan produktivitas pertanian, serta pembangunan infrastruktur desa. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan, pemerintah juga mengagendakan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk di Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,96–5,37 persen yang didukung oleh pemulihan konsumsi rumah tangga, serta normalisasi kondisi iklim pasca *El-Nino*. Terkendalnya perekonomian ditunjukkan oleh terkendalnya inflasi di tingkat $2,5 \pm 1\%$ yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa yang terkendali seiring dengan peningkatan efektivitas produksi dan distribusi bahan pokok penting. Secara bersamaan, prospek ekonomi global dan nasional tahun 2025 yang lebih baik dari tahun 2024 masih dibayangi oleh beragam ketidakpastian sehingga mempengaruhi kondisi Jawa Barat.





Proyeksi ini tidak terlepas dari trayektori ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada akhir periode RPJMN Tahun 2025-2029, tetapi tetap memperhatikan fenomena perlambatan dan ketidakpastian pertumbuhan global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Barat yang masih terbilang tinggi di tengah resiliensi pertumbuhan ekonomi global, menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan dalam melakukan perluasan pasar ekspor, meningkatkan produksi sektor industri pengolahan, serta melakukan percepatan pembangunan yang melibatkan investasi dalam dan luar negeri. Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan telah memasuki fase pematapan dan stabilisasi pertumbuhan dalam menyongsong tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045.

Tabel 3.3
Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2025 (persen)

Komponen PDRB	Share	Realisasi	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	
	2025 ¹⁾	2025 ²⁾	RKPD 2025 ³⁾	P-RKPD 2025 ⁴⁾
Pengeluaran				
Konsumsi Rumah Tangga	64,46	5,01	3,94	5,17 - 5,39
Konsumsi LNPR	0,68	5,83	3,34	-5,55 - -5,75
Konsumsi Pemerintah	3,60	1,23	2,46	1,23 - 1,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,17	3,12	4,10	7,10 - 7,32
Ekspor Barang dan Jasa	58,20	-0,28	5,52	13,20 - 13,43
Impor Barang dan Jasa	51,06	-3,82	5,07	16,14 - 16,37
Produksi				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,19	31,89	4,54	2,18 - 2,27
Pertambangan dan Penggalian	0,95	1,09	-0,08	-0,24 - (-0,25)
Industri Pengolahan	40,28	0,37	5,84	3,54 - 3,70
Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	-0,18	3,86	0,68 - 0,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,03	4,90	5,69 - 5,94
Konstruksi	8,24	2,96	5,91	6,29 - 6,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,70	6,23	4,85	4,92 - 5,14
Transportasi dan Pergudangan	6,44	10,68	6,78	12,61 - 13,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,17	7,92	12,85	6,50 - 6,78





Komponen PDRB	Share	Realisasi	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	
	2025 ¹⁾	2025 ²⁾	RKPD 2025 ³⁾	P-RKPD 2025 ⁴⁾
Informasi dan Komunikasi	3,90	8,61	8,64	8,48 - 8,84
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	1,61	4,01	4,46 - 4,65
Real Estate	1,17	5,81	5,34	6,81 - 7,10
Jasa Perusahaan	0,50	8,97	7,28	3,34 - 3,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,87	2,74	2,00	3,79 - 3,95
Jasa Pendidikan	3,14	3,35	6,18	5,98 - 6,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	2,65	7,60	6,07 - 6,33
Jasa Lainnya	2,38	7,40	6,71	7,50 - 7,82

Sumber: 1) BPS Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025 (% PDRB);
2) BPS Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2024 (% *y-o-y*);
3) RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat, dan;
4) Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Konsumsi Rumah Tangga diproyeksikan meningkat seiring dengan terjaganya tingkat inflasi pada target $2,5 \pm 1$ persen, namun inflasi sedikit lebih tinggi dari capaian tahun 2024 akibat perbaikan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi pada berbagai *peak season*, efektivitas sistem distribusi komoditas, dan kemudahan sistem pembayaran dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu, peningkatan penyerapan tenaga kerja, stabilitas suku bunga, dan berlanjutnya berbagai program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dapat menjadi sebab yang penting dalam meningkatkan konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2025, PMTB diproyeksikan tumbuh lebih ekspansif seiring dengan realokasi APBD untuk melaksanakan berbagai proyek Pembangunan Jalan dan Ruang Kelas Baru, serta berjalannya proyek pembangunan kawasan industri baru yang tentunya dapat meningkatkan akumulasi modal pada tahun 2025, di tengah pengetatan dana transfer APBN ke daerah. Selain itu, fokus pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan dasar di Jabar Selatan, diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan PMTB ke tingkat yang lebih tinggi.





Kinerja Ekspor Barang dan Jasa (Luar Negeri dan Dalam Negeri) Jawa Barat tahun 2025 diproyeksikan akan tumbuh dengan dorongan ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan. Penguatan peran dan fungsi Pelabuhan Patimban dan BIJB secara efisien sebagai simpul transportasi berskala internasional untuk aktivitas ekspor, serta diversifikasi produk unggulan ekspor Jawa Barat juga akan turut mendorong kontribusi kinerja ekspor di tahun 2025.

Dari sisi produksi, terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat tahun 2024 yaitu Industri Pengolahan (41,39 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (14,46 persen), serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (8,42 persen). Ketiga sektor ini diharapkan dapat tumbuh di tingkat yang lebih tinggi, terutama pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Target pertumbuhan tahun 2025 dapat diwujudkan melalui peran Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, serta hilirisasi *blue economy*. Secara eksternal, optimisme juga bersumber dari proyeksi ENSO yang menunjukkan iklim La-Nina dan Netral yang lebih dominan sepanjang 2025.

Target pertumbuhan yang lebih tinggi juga diberikan kepada sektor Industri pengolahan. Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai seiring dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing produksi di luar industri besar, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam dan luar negeri, maupun kebutuhan produksi industri besar melalui *link and match*. Selain itu, hilirisasi sektor primer juga diharapkan mampu meningkatkan *output* pada sub sektor industri Makan Minum.

Pembangunan pada tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan layanan infrastruktur transportasi, pembangunan kawasan industri, serta pengembangan sektor pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru dapat meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional, dan global. Resiliensi pertumbuhan global





diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan yang lebih tinggi bagi Jawa Barat. Selain itu, pertumbuhan nasional yang ditargetkan lebih tinggi selama periode RPJMN Tahun 2025-2029, didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur, serta eksplorasi yang lebih luas dalam mengembangkan komoditas unggulan di Jawa Barat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah terkait peningkatan pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2025.

b. Tingkat Kemiskinan

Target penurunan Kemiskinan perlu menjadi lebih optimis. Jabar sebagai wilayah prioritas hibah pembangunan untuk pemberdayaan, kerjasama RI-Unicef untuk sekolah keluarga miskin, monitoring sasaran program bantuan sosial, dan intervensi tematik pembangunan pada daerah kantong kemiskinan di Indramayu dan Bogor sudah masuk prioritas pembangunan wilayah dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Secara historis, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun adalah 174 ribu penduduk, setara dengan 32 ribu penduduk untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Mengingat target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan adanya fokus kebijakan dalam mengurangi disparitas, meningkatkan layanan dasar, elektrifikasi desa, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta terkendalinya harga-harga kebutuhan pokok, maka asumsi penurunan jumlah penduduk miskin untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 47-59 ribu penduduk.

Strategi penurunan jumlah penduduk miskin secara umum mencakup aspek peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar yang menjadi program prioritas tahun 2025 mendukung penanggulangan kemiskinan secara langsung melalui aspek pengurangan kantong kemiskinan melalui pembangunan rumah rakyat miskin, pemenuhan akses listrik, dan sanitasi lingkungan





yang lebih baik untuk mewujudkan Jabar ODF (*Open Defecation Free*). Pembangunan infrastruktur dari jalan nasional hingga jalan desa juga diharapkan mampu mendorong penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan aspek pendapatan seiring dengan kemudahan akses antar wilayah yang memperlancar aktivitas ekonomi. Program prioritas untuk melakukan pemulihan kondisi lingkungan di Jawa Barat juga mendukung penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan akses terhadap air bersih, sumber daya alam, dan penyediaan infrastruktur rendah emisi. Langkah ini efektif untuk memastikan keberlanjutan sumber pendapatan masyarakat dari sektor primer.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Proyeksi tingkat pengangguran dilakukan dalam kerangka kerja *Financial Programing Policy* (FPP), dimana dalam skenarionya pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan. Skenario ini didasarkan pada Okun's Law yang menjelaskan hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Untuk menghasilkan proyeksi TPT yang lebih komprehensif, maka komponen pembentuk TPT juga diproyeksikan menggunakan pendekatan elastisitas terhadap laju pertumbuhan ekonomi, diantaranya jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk bekerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2025 didukung oleh intervensi kebijakan yang mendorong pertumbuhan secara merata dalam rangka mengurangi disparitas pembangunan, serta peningkatan kualitas SDM, menjadi asumsi penting yang mendasari proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 570 ribu orang atau dalam arti lain setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran sebanyak 106 - 114 ribu orang pada tahun 2025. Penurunan TPT juga dipengaruhi oleh asumsi peningkatan rata-rata lama sekolah yang menyebabkan penambahan angkatan kerja menjadi lebih moderat jika dibandingkan dengan tambahan penduduk bekerja. Dengan demikian, target TPT Jawa





Barat tahun 2025 sebesar 6,42 - 6,99 persen diharapkan dapat tercapai.

Dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, kebijakan diarahkan dengan mendorong investasi, khususnya investasi padat karya serta pemberdayaan usaha mandiri melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas. Dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan berbagai pelatihan vokasi atau keterampilan kerja baik keterampilan kompetensi industri maupun usaha mandiri, serta pemberian sertifikasi keahlian, uji kompetensi keahlian untuk memperkuat akses ke pasar kerja, di fasilitasi penempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri (migran), pelaksanaan job fair, serta platform informasi laporan kerja.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Upaya pencapaian target IPM dilakukan berdasarkan 3 (tiga) dimensi yakni dimensi Pendidikan, Kesehatan, dan standar hidup layak. Pada dimensi Pendidikan dilakukan perluasan dan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar pelayanan minimum sehingga Masyarakat putus sekolah menaikan indikator rata-rata lama sekolah di Jawa Barat bisa berkurang. Selain peningkatan akses terhadap layanan Kesehatan, pada dimensi Kesehatan perlu dilakukan juga Upaya perluasan layanan Rumah Sakit Provinsi. Dalam konteks Pendidikan dan Kesehatan, perlu dilakukan Pembangunan sekolah dan pusat Kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah dengan IPM rendah seperti Ciamis dan Sukabumi, guna memastikan akses yang merata. Selain itu, peningkatan investasi infrastruktur transportasi antar-wilayah, seperti jalan dan angkutan umum, untuk memperlancar akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Pada dimensi Standar hidup layak tidak terlepas dari terpenuhinya kebutuhan Masyarakat. Melalui pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan pengeluaran Masyarakat. Selain itu, dorongan pemberdayaan dan kesejahteraan petani sangat diperlukan terutama di wilayah pertanian seperti Garut dan Indramayu, untuk mendukung daya beli petani. Dengan upaya





tersebut diharapkan komponen pembentuk IPM dapat mengalami peningkatan di tahun 2025 seperti Usia Harapan Hidup meningkat menjadi 75,29 tahun, Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun meningkat menjadi 8,9 tahun, harapan lama sekolah meningkat menjadi 12,84 tahun, dan pengeluaran per kapita di atas Rp12 juta.

e. Rasio Gini

Upaya mempersempit ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat antara lain dilakukan melalui pengembangan aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah seperti UMKM, IKM dan Ekonomi kreatif, serta mendorong aktivitas perekonomian berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dan investasi di wilayah afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan.

f. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian juga diagendakan melalui pengarusutamaan penerapan ekonomi hijau serta penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%) pada berbagai sektor-sektor pembangunan. Intensitas emisi GRK adalah perbandingan antara emisi GRK yang terlepas ke atmosfer terhadap PDRB yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK adalah (Ton CO₂eq/Rp. Milyar) adalah selisih antara intensitas emisi GRK skenario kebijakan daerah pada titik tahun tertentu dengan intensitas emisi GRK baseline daerah tahun 2010 (Ton Co₂eq/Rp. Milyar). Sedangkan Penurunan Intensitas emisi GRK (%) adalah perbandingan penurunan intensitas emisi GRK (Ton Co₂eq/Rp. Milyar) pada titik tahun tertentu terhadap intensitas emisi GRK baseline daerah tahun 2010 (Ton Co₂eq/Rp. Milyar). Target Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) pada tahun 2025 adalah sebesar 6,61 persen melalui penurunan intensitas emisi GRK pada 4 (sektor) sektor utama yaitu sektor berbasis lahan (Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Mangrove Lahan), sektor energi, sektor transportasi,





serta sektor limbah dan persampahan di tahun bersangkutan terhadap Intensitas emisi baseline GRK tahun 2010.

g. PDRB per Kapita

Peningkatan nilai PDRB per Kapita bergantung pada seberapa besar peningkatan pada nilai PDRB terhadap jumlah penduduk di tahun 2025. Sehingga dorongan terhadap Peningkatan Sektor lapangan usaha dan penekanan jumlah penduduk akan sangat mempengaruhi peningkatan Nilai PDRB per Kapita. Peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di sektor industri pengolahan dan pariwisata, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi, terutama di wilayah seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat akan sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan PDRB per Kapita. Selain itu, Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui inovasi teknologi dan pengolahan hasil panen, seperti di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, untuk mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Penguatan infrastruktur transportasi dan digital, seperti pembangunan jalan tol dan jaringan internet berkecepatan tinggi diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar-wilayah dan efisiensi distribusi barang, yang akan berdampak pada produktivitas ekonomi di daerah pedesaan seperti Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi. Pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan dan pelatihan keterampilan, yang dapat meningkatkan kontribusi sektor informal terhadap PDRB, terutama di wilayah dengan IPM rendah.

h. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Upaya peningkatan IBEI melalui berbagai upaya strategis diantaranya dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi biru di sektor-sektor yang sudah mapan yang didukung oleh investasi, adopsi teknologi, penjaminan kualitas, serta perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, dan mempromosikan sektor-sektor yang baru muncul termasuk energi terbarukan,





bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, dan konservasi laut dan jasa ekosistem, yang didukung oleh ekosistem yang lebih baik (kebijakan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas, dan pembiayaan yang berkelanjutan). Konservasi laut (blue health) yang didukung oleh penelitian dan pendidikan serta literasi kelautan yang lebih baik akan mengarahkan penguatan sektor-sektor yang sudah ada dan pertumbuhan sektor-sektor yang baru muncul, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem pesisir dan laut. Peningkatan pada pangan laut telah berkontribusi pada ketahanan yang lebih baik dalam ketahanan pangan dan sistem pangan yang berkembang.

i. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan diupayakan meningkat melalui pengembangan kawasan industri terintegrasi baik dari sisi infrastruktur, rantai pasok, hingga penyelarasan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, Pengembangan Industri Kecil & Menengah secara Komprehensif melalui penguatan kemitraan antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar, Peningkatan Diferensiasi dan Diversifikasi Produk dan Pasar Ekspor, hingga Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

j. Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap Nasional

Kontribusi PDRB Provinsi terhadap nasional akan mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam upaya peningkatan indikator tersebut perlu dilakukan dorongan terhadap sektor-sektor lapangan usaha agar meningkatkan aktivitas sektoral, serta dukungan melalui peningkatan investasi yang lebih merata.

k. Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi salah satu ukuran kinerja untuk melihat seberapa jauh kualitas pendidikan dan kesehatan mampu berkontribusi dalam peningkatan produktivitas individu.





Berdasarkan arahan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dinyatakan bahwa selama periode perencanaan tersebut, IMM akan menggantikan IPM sebagai alat ukur daya saing SDM. Jika dibandingkan dengan IPM, dimensi pendidikan IMM tidak hanya mengukur berapa lama pendidikan yang ditempuh oleh usia pelajar tetapi juga menjelaskan kualitas pendidikan individu melalui indikator rata-rata nilai asesmen tingkat nasional. Selain itu, komponen penilaian pada dimensi kesehatan lebih rinci, tidak hanya mengukur berapa usia harapan hidup tetapi juga mengukur kondisi bayi lahir hingga kondisi pangan bergizi melalui komponen prevalensi balita stunting. Disisi lain, IPM mampu mengukur seberapa besar daya beli masyarakat atau kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, namun IMM mampu mengukur kelayakan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam menciptakan SDM yang berkualitas.

Upaya peningkatan IMM dilakukan melalui berbagai upaya strategis, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan sejumlah beasiswa. Selain itu, juga memperkuat sektor kesehatan dengan memperluas akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi juga terus digencarkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang merata. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan IMM sebesar 0,55 poin pada tahun 2025.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan IKLH dapat dicapai melalui pengurangan emisi GRK yang signifikan, terutama dari sektor transportasi dan industri, yang menjadi penyumbang utama polusi. Sehingga diperlukan peningkatan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan panel surya, Pencegahan dan mengurangi pencemaran air dan udara,.





Proyeksi indikator makro dan indikator sasaran visi merupakan bentuk penyelarasan dari target pembangunan nasional. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat penghitungan lain yang memperhatikan kondisi global melalui metode Sistem Analisis Peramalan Ekonomi Regional (SAPER). Dengan mengasumsikan terjadinya kondisi tersebut, maka diproyeksikan akan terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 5,18 persen di tahun 2025.

konflik geopolitik atau aspek kebencanaan yang mampu mengguncang perekonomian. Stabilitas global dan domestik menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan ekonomi. Sehingga, dengan tidak adanya eskalasi ketegangan perdagangan internasional atau bencana alam besar yang dapat mengganggu rantai pasok, investasi, dan produktivitas sektor unggulan Jawa Barat, seperti pertanian dan industri pengolahan, diharapkan bisa menciptakan pembangunan ekonomi yang diharapkan.

Namun, apabila terjadi kondisi tertentu yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian maka percepatan pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi 5,44 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 6,56 persen, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 3,86 persen, dan pendapatan per kapita turun menjadi Rp78,85 juta per tahun. Meskipun perbaikan tetap terjadi, namun akan terasa lebih lambat dibandingkan tanpa adanya gangguan ekonomi.

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 meliputi :

- a. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;





- b. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;
- c. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
- d. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- f. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal dan non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- g. Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen;
- h. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif;
- i. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
- j. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
- k. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);





1. Penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*;
- m. Penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
- n. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
- o. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM;
- p. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
- q. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
- r. Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, *offsetting* dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*);
- s. Pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;
- t. Penataan dan restrukturisasi BUMD, meliputi upaya penyehatan kinerja BUMD, penguatan kelembagaan dan bisnis, serta peningkatan perannya dalam perekonomian daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah





dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dalam hal ini adalah adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) *riil audited* hasil dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bulan Maret 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah strategis antara lain dengan melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran belanja tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan pergeseran anggaran hasil efisiensi dan realokasi belanja tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang Pergeseran Anggaran Ketiga. Sampai dengan saat ini, pergeseran belanja telah dilakukan hingga pergeseran anggaran kedelapan.

Berdasarkan kondisi tersebut dan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 diuraikan terdiri dari kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Perubahan Anggaran Tahun 2025, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana Transfer seperti kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, tetapi tetap melihat dan menganalisis serta menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah, walaupun dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian





Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ada beberapa komponen Dana Transfer mengalami penyesuaian di antaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, mengakibatkan alokasi pendanaan DAU dan DAK mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada perubahan anggaran tahun 2025, tetap dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) dan Dinas/Balai Penghasil;
2. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan;
5. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;





9. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
10. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
11. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pemberian NPWP pada perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer ini sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah pada Perubahan RKPD 2025 tetap dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Pendataan dan pemetaan kendaraan bermotor, melalui sensus, *survey*, penelusuran sampai pada operasi gabungan dan operasi khusus untuk menjaring wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

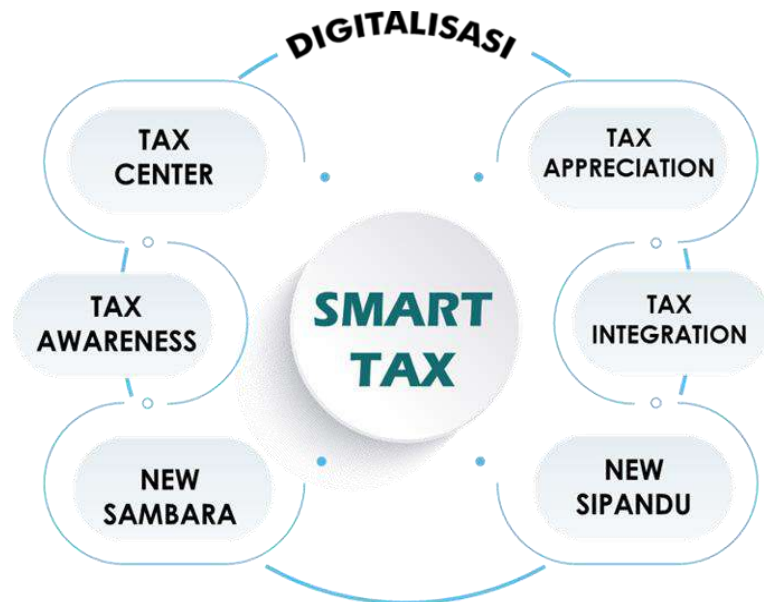
Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan target penerimaan pendapatan daerah, tetap diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Digitalisasi layanan pemerintah melalui platform digital dan elektronik sudah menjadi keharusan, khususnya dalam proses transaksi keuangan agar lebih efisien dan transparan. Hal tersebut yang kemudian mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upayanya meningkatkan pendapatan daerah



- dengan berbasis kepada digitalisasi layanan dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan secara digital, pengembangan infrastruktur digital serta kecakapan dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi.
- b. Digitalisasi tersebut kemudian diimplementasikan dengan strategi dan arah kebijakan yang disebut dengan *SMART TAX*, seperti tercantum dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan SMART TAX



Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2025, diolah.

SMART TAX dimaksud kemudian diimplementasikan ke dalam strategi dan kebijakan pendapatan berbasis digitalisasi sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dilaksanakan melalui:
 - a) *TAX AWARENESS*, Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kewajiban pajak pada semua struktur dan lapisan masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan, fokus kepada:
 - (1) Penguatan dan penyusunan regulasi pajak dan retribusi, baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,





khususnya harmonisasi dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

(2) Sosialisasi kebijakan pendapatan di tingkat pusat maupun daerah, dengan optimalisasi berbagai media sosialisasi yang paling efektif di lapangan, diantaranya sosial media, videotron, *push* notifikasi serta sosialisasi langsung berbasis kolaborasi aktivitas dengan seluruh lapisan masyarakat.

b) *NEW SAMBARA*, Upaya pelayanan samsat *online* berbasis web dan *android/ios* untuk wilayah perkotaan dan pelayanan samsat *mobile* dan *channeling* untuk wilayah pedesaan. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada :

(1) Implementasi *New Sambara* dengan elektronik Pengesahan;

(2) Digitalisasi Layanan kesamsatan, khususnya dalam perluasan *channeling* transaksi pembayaran.

c) *NEW SIPANDU*, Upaya pengelolaan data dan *analysis-insight* pajak daerah dengan pendapatan berbasis platform dan *artificial intelligence*. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada:

(1) Implementasi *Virtual Account* dalam Sistem Layanan Pembayaran Setoran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;

(2) *New SSOS* (Sistem Layanan Samsat) terintegrasi penuh dengan Elektronik *Regident* dan *Identification* (ERI), aplikasi registrasi dari Kepolisian RI;

2) Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik, dilaksanakan melalui:

a) *TAX CENTER*, Upaya mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak dalam bentuk pelayanan konsultasi pajak, pengaduan, penelusuran dan publikasi pajak berbasis teknologi komunikasi. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada:





- (1) Operasionalisasi Sim-C (*Samsat Information Centre*) dengan aktivasi layanan 24 jam pada nomor 150410, dan layanan berbasis *chatbot* pada nomor 081122301818;
 - (2) Pengembangan kompetensi SDM Layanan dan Jafung Perpajakan seiring dengan upaya Reformasi Birokrasi di daerah.
- b) *TAX APPRECIATION*, Upaya memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat secara masif sehingga menjadi *role model* bagi masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada :
- (1) Relaksasi pajak yang dilaksanakan secara selektif untuk mendorong kebijakan peningkatan pendapatan di tingkat pusat dan daerah;
 - (2) Pelaksanaan *event exhibition* bekerjasama dengan seluruh stakeholders pendapatan daerah;
 - (3) Pemberian Anugerah Philotra dari Gubernur Jawa Barat kepada para wajib pajak teladan di Jawa Barat.
- c) *TAX DATA INTEGRATION*, Upaya kolaborasi Provinsi Jawa Barat dengan pusat, kabupaten/kota dan *stakeholder* pajak daerah dalam pengelolaan data wajib pajak, sistem informasi pajak dan *join analysis* dan supervisi. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada: Integrasi data, diantaranya: data Kendaraan Bermotor dengan Korlantas Mabes Polri, data kependudukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, data wajib pajak dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, data pemilik seluler wajib pajak dengan operator, dan sebagainya;

Selain itu, secara umum, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tetap melakukan upaya-upaya lain yang efektif untuk peningkatan pendapatan, yaitu:

- a. Optimalisasi dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara profesional.
- c. Optimalisasi penerimaan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.





- d. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar Perhitungan Bagi Hasil.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
 - b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD-RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
 - c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

Dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, struktur Pendapatan Daerah diperkirakan meningkat sebesar 64,94 milyar rupiah atau meningkat 0,21 persen. Kenaikan ini salah satunya merupakan kontribusi dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 34 milyar rupiah atau naik sebesar 0,18 persen. Sementara itu, Pendapatan Transfer juga mengalami kenaikan sebesar 30,52 milyar rupiah atau meningkat 0,26 persen, kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar 199,58 milyar rupiah meskipun pada tahun 2025 juga terdapat penurunan





Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Umum sebesar 46,51 milyar rupiah dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 122,54 milyar rupiah. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



A040B8A293



Tabel 3.4
Target Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025
Provinsi Jawa Barat

KODE	URAIAN	APBD TA 2024 (LRA Unreview)	APBD TA 2025	Pergeseran ke-8 (Pergub No. 19 2 Juni 2025)	Rencana Perubahan RKPD TA. 2025	Bertambah / (Berkurang)	Persentase
1	2	3	4	5	6	(7) = (6) - (4)	
4	PENDAPATAN DAERAH	36.686.793.694.469	30.998.963.018.931	30.829.409.187.931	31.063.909.959.215	64.946.940.284	0,21%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.311.062.568.010	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	19.342.208.702.215	34.423.641.584	0,18%
4.1.01	Pajak daerah	23.432.165.679.367	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809	17.691.848.216.117	191.123.859.308	1,09%
4.1.02	Retribusi daerah	814.501.472.803	881.900.498.726	864.654.997.997	854.925.149.196	-26.975.349.530	-3,06%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	430.658.809.497	410.640.579.501	410.640.579.501	368.060.136.003	-42.580.443.498	-10,37%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	633.736.606.343	514.519.625.595	531.765.126.324	427.375.200.899	-87.144.424.696	-16,94%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.352.536.350.459	11.667.983.182.300	11.498.429.351.300	11.698.506.481.000	30.523.298.700	0,26%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	11.352.536.350.459	11.667.983.182.300	11.498.429.351.300	11.698.506.481.000	30.523.298.700	0,26%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	11.315.687.571.459	11.667.983.182.300	11.498.429.351.300	11.698.506.481.000	30.523.298.700	0,26%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.551.545.408.500	2.503.586.756.300	2.503.586.756.300	2.703.170.866.000	199.584.109.700	7,97%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.664.312.930.238	4.042.633.210.000	3.996.117.553.000	3.996.117.553.000	-46.515.657.000	-1,15%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		0		-	0	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.099.829.232.721	5.121.763.216.000	4.998.725.042.000	4.999.218.062.000	-122.545.154.000	-2,39%
	Insentif Fiskal	36.848.779.000	0	0	0	0	-
	Insentif Fiskal	36.848.779.000	0	0	0	0	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	0	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	0	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					0	-
	Jumlah Pendapatan	36.686.793.694.469	30.998.963.018.931	30.829.409.187.931	31.063.909.959.215	64.946.940.284	0,21%

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2025 (diolah kembali)



A040B8A293



3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Barat pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 tetap diarahkan kepada kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan dengan memperhatikan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif serta dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dijabarkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/Sj Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diantaranya adalah efisiensi terhadap beberapa komponen belanja. Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi: Gaji dan Tunjangan ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Gaji dan Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Daerah serta penerapan pelayanan dasar, diantaranya:
 - a. Visi dan Misi Gubernur terpilih Tahun 2025-2029;
 - b. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi berbagai jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan





air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dengan Asta Cita Presiden yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029;
5. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
6. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
7. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
8. Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah diantaranya yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan





- publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
9. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
 10. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
 11. Pengalokasian untuk pendanaan Bantuan Keuangan dan Hibah bersifat kompetitif dan menstimulus munculnya karya-karya inovatif yang memberikan efek akseleratif pencapaian target-target pembangunan strategis pembangunan daerah yang makin dirasakan masyarakat daerah;
 12. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah;
 13. Revitalisasi Kantor Dinas, Kantor Cabang Dinas/Balai/UPTD dan Satuan Pelayanan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi dan revitalisasi;
 14. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
 15. Pemberian Penghargaan Olahraga kepada atlet daerah;
 16. Pendukungan event olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
 17. Pendukungan event olahraga tingkat Asia Tenggara (*Southeast Asian Games*) Tahun 2025;
 18. Pendukungan untuk meningkatkan akses permodalan melalui subsidi bunga, penempatan dana, dan subsidi imbal jasa penjaminan;
 19. Menindaklanjuti arahan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SI Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah





Tahun Anggaran 2025 , belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 diantaranya direalokasi untuk kegiatan:

- a. Peningkatan Sektor Pendidikan;
- b. Peningkatan Sektor Perhubungan;
- c. Peningkatan Sektor Infrastruktur;
- d. Peningkatan Sektor Sumber Daya Air;
- e. Peningkatan Sektor Perumahan dan Permukiman;
- f. Peningkatan Sektor Ketahanan Bencana;
- g. Peningkatan Sektor Perhubungan;
- h. Peningkatan Sektor Lingkungan Hidup;
- i. Peningkatan Sektor Kehutanan;
- j. Peningkatan Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Peningkatan Sektor Keamanan dan Ketertiban; dan
- l. Peningkatan Sektor Penunjang Pemerintahan lainnya.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa dalam kurun waktu sampai dengan Juni 2025, pada APBD Provinsi Jawa Barat telah dilakukan pergeseran anggaran sampai dengan pergeseran kedelapan dengan tujuan agar kebutuhan yang mendesak dapat dipenuhi dan dilaksanakan. Adapun rincian pergeseran 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) adalah menggeser alokasi pada belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan mendesak perangkat daerah pada belanja barang dan jasa, belanja modal dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dalam rangka penanganan bencana serta pergeseran di dalam sub kegiatan tanpa mengubah jenis belanja.

Adapun yang menyebabkan pergeseran pertama adalah dalam rangka pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan atas pemenuhan standar baku mutu dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti dan mencegah penutupan pelayanan sampah di wilayah Bandung Raya, penanganan kawasan kumuh, serta dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kegiatan. Pergeseran kedua dilakukan dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pelaksanaan





pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2025 serta penanganan dampak bencana banjir di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pergeseran ketiga dilakukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pergeseran keempat adalah untuk mendanai penerapan teknologi operasi modifikasi cuaca dalam upaya mencegah potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Barat. Pergeseran kelima dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendampingan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, pembiayaan untuk pemenuhan kekurangan belanja bersifat mengikat, serta penyesuaian penandaan sumber dana belanja wajib yang bersumber dari pajak daerah. Serta Pergeseran keenam dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada kegiatan bela negara, serta pembiayaan untuk pemenuhan kekurangan belanja bersifat mengikat. Pergeseran ketujuh adalah untuk Penyesuaian rekening belanja pada Perangkat Daerah. Sedangkan pergeseran kedelapan adalah untuk Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dalam jumlah yang cukup antara lain pemenuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta kegiatan prioritas lainnya.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, target Belanja Daerah diasumsikan mengalami kenaikan sebesar Rp1,12 Triliun atau meningkat sebesar 3,63 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Belanja Modal sebesar 2,61 Triliun Rupiah atau meningkat 152,09 persen sebagai hasil realokasi efisiensi belanja daerah direalokasi untuk belanja belanja pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan, Pemeliharaan, Rekonstruksi Jalan dan Jembatan meskipun sebelumnya terdapat penurunan pendapatan transfer daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tercantum pada data tabel di bawah ini:





Tabel 3.5
Target Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat

KODE	URAIAN	APBD TA 2024 (LRA Unreview)	APBD TA 2025	Pergeseran ke-8 (Pergub No. 19 2 Juni 2025)	Rencana Perubahan RKPD TA. 2025	Bertambah / (Berkurang)	Pesentase
1	2	3	4	5	6	(7) = (6) - (4)	
5	BELANJA	35,548,799,933,035	31,075,544,907,123	30,905,991,076,123	32,203,350,761,578.00	1,127,805,854,455.00	3.63%
5.1	BELANJA OPERASI	19,984,707,792,554	20,160,050,586,717	19,418,686,646,664	20,021,963,895,500.00	-138,086,691,217.06	-0.68%
5.1.01	Belanja Pegawai	8,121,654,828,721	9,114,143,199,597	9,113,313,015,398	9,114,281,923,015.77	138,723,419.00	0.00%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,674,957,432,817	7,568,806,949,567	7,119,445,896,712	7,656,876,833,980.18	88,069,884,412.94	1.16%
5.1.04	Belanja Subsidi	13,357,475,900	161,341,421,779	159,341,421,779	159,341,421,779.00	-2,000,000,000.00	-1.24%
5.1.05	Belanja Hibah	5,110,982,109,616	3,281,692,265,774	2,992,519,562,775	3,057,386,966,725.00	-224,305,299,049.00	-6.84%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	63,755,945,500	34,066,750,000	34,066,750,000	34,076,750,000.00	10,000,000.00	0.03%
5.2	BELANJA MODAL	2,116,137,579,713	1,769,776,812,928	4,176,567,377,057	4,461,516,737,626.02	2,691,739,924,698.03	152.09%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8,747,686,000	23,895,774,005	68,942,616,495	177,853,211,430.00	153,957,437,425.00	644.29%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	807,445,445,134	813,268,419,070	746,243,967,260	846,229,726,204.02	32,961,307,134.04	4.05%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	449,982,952,666	299,723,784,378	1,242,628,560,300	1,275,421,282,193.94	975,697,497,815.93	325.53%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	695,251,518,838	480,722,788,307	1,964,902,600,632	2,008,165,114,503.46	1,527,442,326,196.46	317.74%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	151,004,624,972	151,840,243,168	153,701,428,370	153,714,203,294.60	1,873,960,126.60	1.23%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3,705,352,103	325,804,000	148,204,000	133,200,000.00	-192,604,000.00	-59.12%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	784,110,806	1,154,221,541,130	633,750,186,858	356,160,243,265.03	-798,061,297,864.97	-69.14%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	784,110,806	1,154,221,541,130	633,750,186,858	356,160,243,265.03	-798,061,297,864.97	-69.14%
5.4	BELANJA TRANSFER	13,447,170,449,962	7,991,495,966,348	6,676,986,865,544	7,363,709,885,187.00	-627,786,081,161.00	-7.86%
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pajak	9,992,153,126,253	5,451,031,805,167	5,451,031,805,167	5,833,280,488,886.00	382,248,683,719.00	7.01%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3,455,017,323,709	2,540,464,161,181	1,225,955,060,377	1,530,429,396,301.00	-1,010,034,764,880.00	-39.76%
	Jumlah Belanja	35,548,799,933,035	31,075,544,907,123	30,905,991,076,123	32,203,350,761,578.00	1,127,805,854,455.00	3.63%

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah kembali)



A040B8A293



Belanja Operasi diasumsikan mengalami penurunan sebesar 138,08 milyar rupiah atau menurun 0,68 persen sebagai dampak dilakukannya efisiensi belanja sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk kemudian direalokasikan pada belanja yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Penurunan belanja operasi yang paling besar diakibatkan adanya efisiensi Belanja Hibah sebesar 224,3 milyar rupiah atau menurun sebesar 6,84 persen. Belanja Tidak Terduga menurun sebesar 798,06 milyar rupiah dikarenakan terdapat hasil efisiensi belanja sebagaimana amanat Inpres 1 Tahun 2025 yang pada pergeseran APBD kedelapan dialokasikan sebagai Belanja Tidak Terduga. dan Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar 1,01 Triliun Rupiah atau menurun sebesar 39,63 persen yang diakibatkan adanya efisiensi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa apabila APBD diperkirakan mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran sebelumnya, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang





dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena adanya pengeluaran pemerintah yang bukan merupakan belanja urusan pemerintah daerah dan menjadi kewenangan daerah, tetapi perlu dialokasikan pada tahun anggaran karena telah menjadi kesepakatan. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam perubahan tahun 2025 menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *audited* BPK. Pada perubahan tahun anggaran 2025, SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang bisa digunakan adalah sebesar Rp1.756.246.837.507,- (*audited*) untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas yang direncanakan diselesaikan pada tahun 2025, sementara itu pada APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp693.387.923.336,- sehingga harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2025, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa salah satu syarat perubahan RKPD adalah adanya SiLPA yang harus digunakan pada tahun berkenaan. Adapun kerangka pendanaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:





Tabel 3.6
Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat

KODE	URAIAN	APBD TA 2024 (LRA Unreview)	APBD TA 2025	Pergeseran ke-8 (Pergub No. 19 2 Juni 2025)	Rencana Perubahan RKPD TA. 2025	Bertambah / (Berkurang)	Pesentase
1	2	3	4	5	6	(7) = (6) - (4)	
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,237,059,111,217	693,387,923,336	693,387,923,336	1,756,246,837,507	1,062,858,914,171	153.28%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	800,167,988,688	693,387,923,336	693,387,923,336	1,756,246,837,507	1,062,858,914,171	153.28%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	436,210,508,087	0	0	0	0	-
6.1.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	680,614,442	0	0	0	0	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,237,059,111,217	693,387,923,336	693,387,923,336	693,387,923,336	0	0.00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	618,806,035,144	616,806,035,144	616,806,035,144	616,806,035,144	0	0.00%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	52,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	0	0.00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	566,806,035,144	566,806,035,144	566,806,035,144	566,806,035,144	0	0.00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	618,806,035,144	616,806,035,144	616,806,035,144	616,806,035,144	0	0.00%
	Pembiayaan Netto	618,253,076,073	76,581,888,192	76,581,888,192	76,581,888,192	1,062,858,914,171	1387.87%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	1,756,246,076,073	0	0	0	0	-
	Volume APBD	37,923,852,805,686	31,692,350,942,267	31,522,797,111,267	32,820,156,796,722	1,297,359,685,455	3.66%

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah kembali)



A040B8A293



Kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 masih sama dengan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD murni tahun 2025 yaitu diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok hutang PEN sebesar Rp566,806,035,144,. serta untuk penyertaan modal daerah dalam rangka mendukung operasional Bandara Internasional Jawa Barat sebesar Rp50,000,000,000,-

3.2.4 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Jawa Barat. Sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Kabupaten/Kota; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 5) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 6) Hibah dan 7) Obligasi Daerah. Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.2.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci menghadapi keterbatasan fiskal dalam APBD. APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana transfer dan dana yang terdapat pada DIPA K/L. Rincian APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 3.7.





Tabel 3.7
Alokasi APBN untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2025

NO	JENIS APBN	2023	2024	2025
DANA TRANSFER UNTUK PROVINSI		10.530.740.384.000	11.108.773.753.000	11.733.390.439.000
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.198.044.917.000	2.738.547.844.000	2.738.547.844.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.298.968.208.000	3.996.117.553.000	4.042.633.210.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	577.847.874.000	153.640.882.000	276.679.056.000
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.455.871.633.000	4.845.084.160.000	4.845.084.160.000
5	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
6	Hibah Ke Daerah	7.752.000*	-	-
7	Insentif Fiskal	-	23.045.086.000	-
DANA TRANSFER UNTUK KAB/KOTA		57.998.299.940.000	62.523.593.745.000	64.196.978.494.000
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.563.482.712.000	3.908.639.259.000	4.724.197.613.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	31.489.666.092.000	34.418.176.609.000	36.233.589.421.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2.383.290.665.000	3.016.201.743.000	971.489.241.000
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	14.276.763.526.000	14.765.231.695.000	15.763.049.235.000
5	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
6	Hibah Ke Daerah	133.543.894.000	53.793.688.000	-
7	Insentif Fiskal	47.919.973.000	171.244.441.000	168.590.871.000
8	Dana Desa	6.103.633.078.000	6.190.306.310.000	6.336.062.113.000
DIPA K/L		45.430.119.515.000	46.302.740.447.000	39.367.789.642.000
1	Dana Dekonsentrasi	83.285.047.000	20.338.670.000	20.338.670.000
2	Dana Tugas Pembantuan	340.641.583.000	217.568.130.000	217.568.130.000
3	Kantor Pusat (KP)	12.790.564.523.000	8.750.087.875.000	8.750.087.875.000
4	Kantor Daerah (KD)	32.215.628.362.000	30.379.794.967.000	30.379.794.967.000
TOTAL		113.959.159.839.000	119.935.107.945.000	115.298.158.575.000

Sumber : DJPB Kemenkeu, 2025 (diolah kembali)
Keterangan : *) *Reimbursement* tahun sebelumnya

3.2.4.2 APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama di dalam





pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Tabel 3.8
Data APBD Kabupaten/Kota se- Jawa Barat Tahun 2022-2025

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kab. Bandung	5.000.599.664.118	5.458.320.940.791	5.928.432.484.321	6.425.156.775.479
2	Kab. Bekasi	6.474.096.774.314	6.951.799.778.476	7.675.927.850.247	8.471.083.818.174
3	Kab. Bogor	8.486.545.203.687	9.342.814.361.779	10.528.238.583.075	11.533.508.780.022
4	Kab. Ciamis	2.786.642.740.016	2.707.990.886.321	2.759.318.611.817	2.613.997.954.569
5	Kab. Cianjur	4.266.169.635.470	4.539.108.758.301	4.842.778.907.876	4.872.063.870.852
6	Kab. Cirebon	3.429.174.736.515	3.625.352.695.399	4.048.922.982.008	4.734.637.373.172
7	Kab. Garut	4.428.868.903.338	4.563.018.882.452	4.786.238.404.520	5.039.571.562.691
8	Kab. Indramayu	3.338.737.458.361	3.671.777.590.740	3.800.166.091.285	3.755.576.337.826
9	Kab. Karawang	4.871.325.136.714	5.321.238.123.579	5.867.375.518.816	6.093.618.879.041
10	Kab. Kuningan	2.684.907.391.438	2.852.772.144.220	2.983.043.827.322	2.844.197.735.477
11	Kab. Majalengka	4.044.870.941.071	3.405.223.563.895	3.064.947.022.404	3.105.392.287.973
12	Kab. Purwakarta	2.433.941.711.281	2.567.797.647.962	2.658.589.477.779	2.636.160.765.943
13	Kab. Subang	3.043.392.428.692	2.978.606.174.304	2.801.432.170.406	3.006.530.828.804
14	Kab. Sukabumi	3.962.036.722.975	4.244.515.906.805	4.555.467.173.646	4.637.883.793.087
15	Kab. Sumedang	2.773.433.695.023	2.816.822.749.856	3.043.553.209.614	2.934.191.214.462
16	Kab. Tasikmalaya	3.273.846.205.824	3.309.737.840.702	3.643.782.790.862	3.541.157.118.118
17	Kota Bandung	6.729.697.356.710	7.202.856.990.555	7.704.032.556.575	7.809.391.947.890
18	Kota Bekasi	5.590.687.535.313	5.986.265.026.438	6.423.653.318.098	7.057.120.328.180
19	Kota Bogor	2.534.201.698.792	3.171.614.163.806	3.127.361.919.483	2.970.946.868.660
20	Kota Cirebon	1.466.478.864.410	1.433.078.787.228	1.622.332.986.603	1.761.061.685.882
21	Kota Depok	3.607.544.923.853	3.926.126.110.981	4.272.937.976.222	4.627.067.866.021
22	Kota Sukabumi	1.211.193.138.745	1.160.364.434.915	1.274.828.818.997	1.295.849.541.127
23	Kota Tasikmalaya	1.691.178.535.510	1.666.796.638.856	1.693.628.860.908	1.754.623.837.429
24	Kota Cimahi	1.493.254.708.490	1.525.559.089.415	1.616.833.373.981	1.679.193.341.027
25	Kota Banjar	763.478.574.571	755.196.117.320	783.180.062.392	789.461.242.287
26	Kab. Bandung Barat	3.245.329.584.936	3.511.727.713.840	3.554.230.748.520	3.465.066.875.614
27	Kab. Pangandaran	1.297.067.392.061	988.514.549.013	1.600.017.848.987	1.567.346.019.629
	Jumlah ...	94.928.701.662.228	99.684.997.667.949	106.661.253.576.764	111.021.858.649.436

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat data APBD kabupaten/kota tahun 2022-2025, mayoritas mengalami peningkatan. Hal ini selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami peningkatan selama tahun 2022-2024.

3.2.4.3 Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar, tetapi potensi ini belum dapat memberi peran





maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

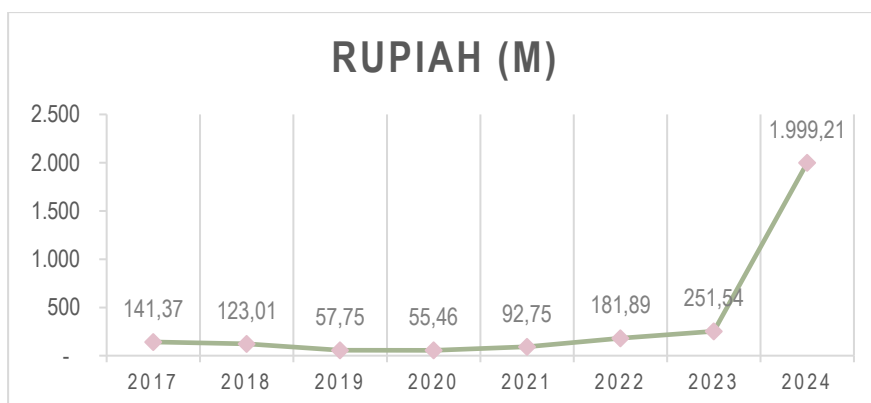
Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.2.4.4 Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Program pembangunan yang dikerja samakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat. Sampai dengan tahun 2024, telah terdaftar sebanyak 283 mitra PKBL dan TJSL Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terbagi menjadi 205 perusahaan swasta, 57 BUMN dan 21 BUMD.

Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari TJSL/PKBL dari Tahun 2017 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2
Pelaporan CSR dari 2017 sampai 2024



Sumber website CSR Jawa Barat, 2025, diolah kembali



A040B8A293



Dari gambar di atas didapatkan informasi bahwa sumber pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat bersifat sangat fluktuatif dari Tahun 2017 hingga 2024. Jumlah dana tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar Rp1,9 Triliun, disusul dengan tahun berikutnya pada tahun 2023 sebesar Rp251,54 miliar. Kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2023 menuju tahun 2024. Peningkatan terbesar realisasi CSR Tahun 2024 dari kontribusi Pembangunan RDF oleh PT Semen Jawa & TSS dan Hibah Unit *Engine* untuk SMK dan Universitas di Jawa Barat dari PT SGMW Motor Indonesia. Adapun realisasi Kegiatan PKBL dan TJSL Tahun 2024 berdasarkan kategori dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi Kegiatan PKBL dan TJSL Tahun 2022-2024

No.	Kategori	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Sosial	25.838.456.175	83.858.397.129	112.088.377.440
2	Lingkungan	31.183.728.494	19.152.236.105	472.082.968.123
3	Kesehatan	13.307.623.156	13.858.711.098	17.685.034.544
4	Pendidikan	27.991.582.973	16.364.146.020	1.323.189.515.099
5	Peningkatan Daya Beli	9.114.034.359	29.871.004.131	18.086.916.179
6	Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan	36.994.026.923	57.236.088.644	42.446.527.906
7	Sarana dan Prasarana Keagamaan	9.433.050.110	11.870.931.097	5.753.677.353
8	Program Pembangunan Lainnya	2.122.951.367	18.702.188.831	7.878.982.632
9	Covid-19	25.899.828.585	625.377.492	-
	Jumlah	181.885.282.142.00	251.539.080.547	1.999.211.999.276

Sumber: website CSR Jawa Barat, 2025, diolah kembali

Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Jawa Barat tahun 2025 ditempuh melalui:

1. Perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Jawa Barat.
2. Penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2025.





3.2.4.5 Kerja Sama Pemerintah dengan *Badan Usaha* (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta urgensi percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai strategis baik di level provinsi maupun nasional, Skema pendanaan program melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) didorong untuk beberapa program infrastruktur strategis.

Selama tahun 2024, Provinsi Jawa Barat masih mengelola 6 proyek KPBU yang terus berproses. Sampai dengan akhir tahun 2024, sudah ada 2 proyek yang sudah dalam tahap transaksi, yaitu TPPAS Regional Nambo dan TPPAS Regional Legok Nangka. Ada 3 (tiga) proyek dalam tahap persiapan yaitu SPAM Regional Jatigede, SPAM Regional Sinumbra dan Perkeretaapian Perkotaan Metro Bandung. Serta 1 (satu) proyek dalam tahap perencanaan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Status Proyek KPBU di Jawa Barat Tahun 2024

No.	Nama Proyek	Tahap Perencanaan	Tahap Persiapan	Tahap Transaksi	Tahap Konstruksi
1	TPPAS Regional Nambo			✓	
2	TPPAS Regional Legok Nangka			✓	
3	SPAM Regional Jatigede		✓		
4	SPAM Regional Sinumbra		✓		
5	Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung		✓		
6	PLTS Atap di Gedung Sekolah	✓			
7	TPPAS Regional Cirebon Raya	✓			

Sumber: Simpul KPBU Jawa Barat, 2024

Progres dari keenam proyek ini terkesan berjalan sangat lambat, hal ini disebabkan banyak tantangan yang harus dilalui oleh masing-masing proyek. Setiap proyek memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki tantangan yang berbeda. Seperti pada proyek TPPAS Regional Nambo yang mengalami tantangan dalam memenuhi pembiayaan (*financial close*), selain





juga terkait tantangan atas proses perijinan dan kesepakatan antar daerah. Sementara di proyek TPPAS Regional Legok Nangka tantangan datang dari pihak off-taker yang akan membeli produk akhir dari sampah yaitu listrik. Untuk proyek SPAM Regional tantangan yang paling besar adalah kesepakatan tarif air curah dan kemampuan PDAM dalam menyerap air yang diproduksi.

3.2.4.6 Pendanaan Obligasi Daerah dan Sukuk

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko yang ada. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan (*revenue bond*). Selain obligasi daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah obligasi syariah atau sukuk.

Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2023, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Penyiapan pranata regulasi dan kelembagaan antara lain melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Barat serta pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun secara teknokratik tanpa mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah. Sehingga, tujuan, sasaran pokok, dan arah kebijakan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025 masih tetap menggunakan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Namun demikian, dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030, maka perlu dilakukan penyesuaian arah kebijakan tahun 2025 dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan langkah awal untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang istimewa di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Jabar Istimewa adalah situasi atau kondisi di mana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah





Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan menuju Jabar istimewa, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi selama Triwulan I Tahun 2025, baik perubahan pada kebijakan nasional maupun kebijakan provinsi.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; (2) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029; (4) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; (5) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 Triwulan I; (6) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (7) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025; dan (8) Pembangunan Rendah Karbon.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 pada perubahan RKPD ini diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Adapun pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya penerapan strategi dan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.





Penetapan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga keterkaitan terhadap sasaran pembangunan nasional.

4.1.1 Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Dalam mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, pembangunan perlu dilaksanakan dengan bekerja sama antara seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan berasar pada fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan cita-cita Indonesia Emas dapat tercapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau Asta Cita yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional atau *goals* (tujuan) yang ingin dicapai, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 4.1
8 Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, 2025

Sasaran utama pembangunan nasional pada jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN tahap I Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan nasional tersebut tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju;





kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; peningkatan daya saing sumber daya manusia; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*. Kelima sasaran utama pembangunan nasional memiliki target sebagai berikut.

Gambar 4.2
Target sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2045

1

Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1 <u>Pertumbuhan Ekonomi (%)</u>	5,3	8
2 <u>GNI Per Capita (USD)</u>	5.410	8.000
2 <u>Kontribusi PDB Maritim (%)</u>	8,1	9,1
3 <u>Kontribusi PDB Manufaktur (%)</u>	20,8	21,9

2

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1 <u>Global Power Index (peringkat)</u>	33	29

3

Kemiskinan Menurun Dan Ketimpangan Berkurang

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1 <u>Tingkat Kemiskinan (%)</u>	7,0 - 8	4,5-5,0
2 <u>Rasio Gini (Indeks)</u>	0,378- 0,382	0,372 - 0,375
3 <u>Kontribusi PDRB KTI (%)</u>	21,4	22,4

4

Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1 <u>Indeks Modal Manusia (Indeks)</u>	0,56	0,59

5

Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission

INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1 <u>Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)</u>	35,53	62,37
2 <u>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)</u>	76,49	77,20

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, diolah, 2025

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis Yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi **“Pusat Cutting-edge industri, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional”**. Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan *modern*, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta





- optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
 5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
 6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Tabel 4.1
Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2025

Target Tahun 2025	%LPE	%Kemiskinan	Rasio Gini	%TPT	IMM	Penurunan Intesitas Emisi GRK
	4,96-5,37	5,85-6,46	0,383-0,390	6,42-6,99	0,57	6,61

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar 4.3
Prioritas Nasional



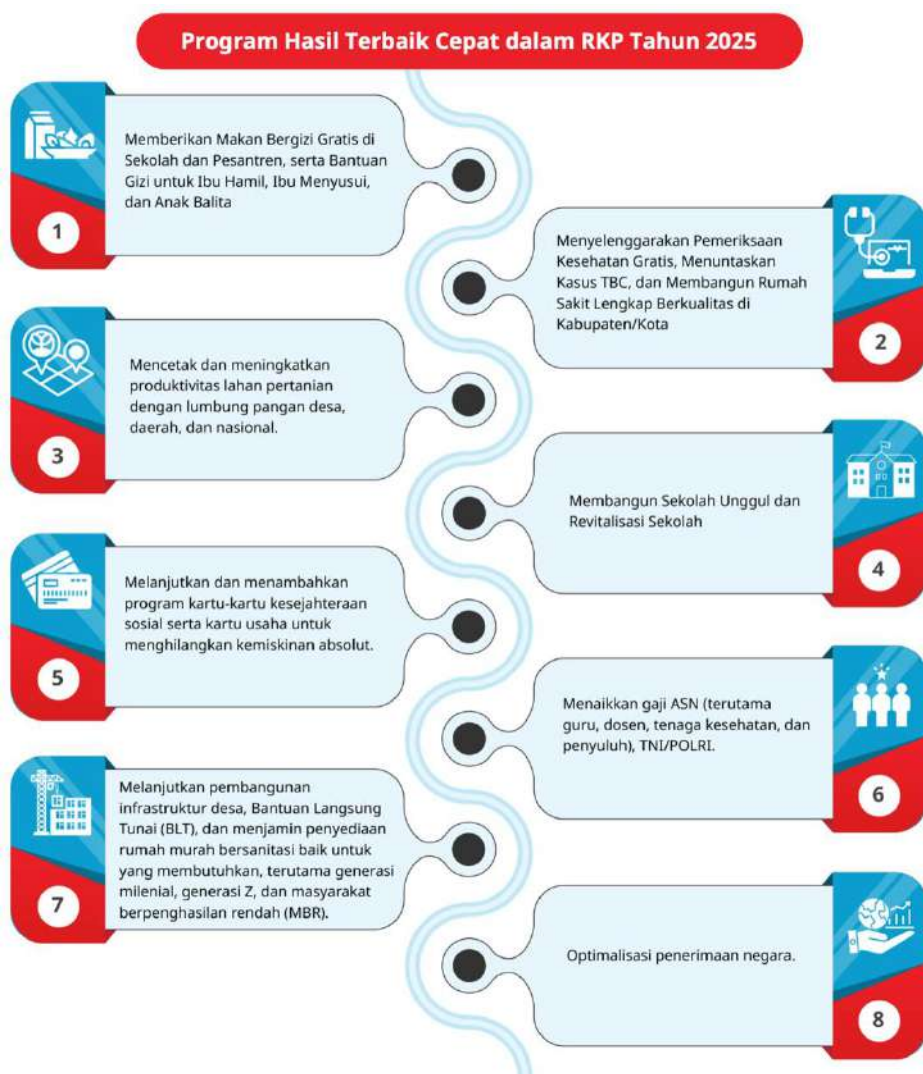
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025





Dalam rangka mempercepat dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat maka pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan Program hasil Terbaik Cepat (PHTC) terutama dalam sektor-sektor mendesak seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesejahteraan sosial.

Gambar 4.4
Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025



Sumber: RKP Tahun 2025

Indikasi intervensi/ProP per Prioritas Nasional (PN) di Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.





Tabel 4.2
Indikasi intervensi/ProP per Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Barat

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk prior berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan • Lanjutan Pembangunan pembangkit listrik tenaga air <i>Pumped Storage Upper</i> Cisokan • Fasilitasi <i>business matchmaking startup</i> digital • Fasilitasi digital <i>technopreneur</i> • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah <i>reduce-reuse-recycle</i>, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cirebon • Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan • Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun pada sistem penyediaan air minum perkotaan Majalengka • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada sistem penyediaan air minum Kota Cimahi • Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Palabuhanratu • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada Bendung Cariang di Kabupaten Sumedang • Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Patimban • Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu pada tempat pemrosesan akhir eksisting di Provinsi Jawa Barat • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota berupa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak di Kabupaten Ciamis • Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak di Kabupaten Ciamis • Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan • Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis • Pengembangan sentra cabai pada Kawasan Aneka Cabai di Kabupaten Bandung





Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	- Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Sukabumi - Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	- Pengembangan Kertajati <i>Aerocity</i> - Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban - Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman - Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki - Penguatan ekosistem film, animasi, <i>visual arts</i>, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif - Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim - Pembangunan instalasi pengolahan air tahap II Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya - Penuntasan Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey - Modernisasi Daerah Irigasi Rentang - Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi - Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan Embung Ranca Hilir di Kabupaten Subang - Layanan perencanaan dan pengawasan teknik berupa pembangunan <i>Fly Over</i> di Lemah Abang Kabupaten Bekasi - Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan - Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian pada Kereta Api Cipatat-Togog Apu-Padalarang di Kabupaten Bandung Barat - Pembangunan jalan strategis (padat karya) berupa perbaikan pedestrian dan drainase pada jalan nasional di Kota Bogor - Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun berupa penanganan tanggul kritis Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi - Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	- Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/<i>raudhatul athfal/bustanul athfal</i>) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat - Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pengajaran dan Pembelajaran





Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	• Penguatan Sistem Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan • Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas • Peningkatan Produktivitas, daya saing, dan Kemampuan Kerja • Pengelolaan dan Pengembangan BLUD SMK • Pemenuhan Pendidikan Inkluvitas dan Pendidikan Luar Biasa • Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesatren dan Penidikan Keagamaang yang Lebih berkualitas • Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Garut, Ciamis, Indramayu, dan Cirebon; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi riset sains (<i>science</i>), teknologi (<i>technology</i>), teknik (<i>engineering</i>), seni (<i>art</i>), dan matematika (<i>mathematics</i>) unggulan bertaraf internasional pada Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “Promoting Research and Innovation Though Modern and Efficient STP Project” (PRIME STeP) • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sains (<i>science</i>), teknologi (<i>technology</i>), teknik (<i>engineering</i>), seni (<i>art</i>), dan matematika (<i>mathematics</i>) unggulan di tingkat regional pada Universitas Singaperbangsa Karawang • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, <i>stroke</i>, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Fasilitasi literasi digital • Digital Pembangunan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN) di Kabupaten Majalengka • Sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi berupa pengembangan Kampus ITB Cirebon
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	• Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar • Hilirisasi industri tembaga dan bauksit • Hilirisasi industri kelapa dan karet





Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi • Pengembangan industri alat angkut termasuk <i>electric vehicle</i> dan kedirgantaraan • Pengembangan industri elektronik dan digital • Pembangunan Pelabuhan Patimban • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Pembangunan rumah susun sederhana sewa masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Bandung (<i>Bus Rapid Transit</i> Bandung Raya, Elektrifikasi Kereta Api Komuter Bandung) • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pembangunan jalan bebas hambatan berupa pembebasan lahan untuk pembangunan <i>Fly Over</i> Kiaracondong-Buahbatu di Kota Bandung • Pembangunan <i>Area Traffic Control System/ Intelligent Transportation System</i> berupa penyediaan angkutan umum massal perkotaan <i>Bus Rapid Transit</i> di Bandung Raya • Pembangunan baru kawasan permukiman berupa rumah susun khusus masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Reviu dan penyusunan pengaturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis <i>online single submission</i> dan mal pelayanan publik digital
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	• Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di Cagar Budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon • Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara di kota metropolitan Bandung • Pengamanan Pantai Eretan dan Kabupaten Cirebon • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

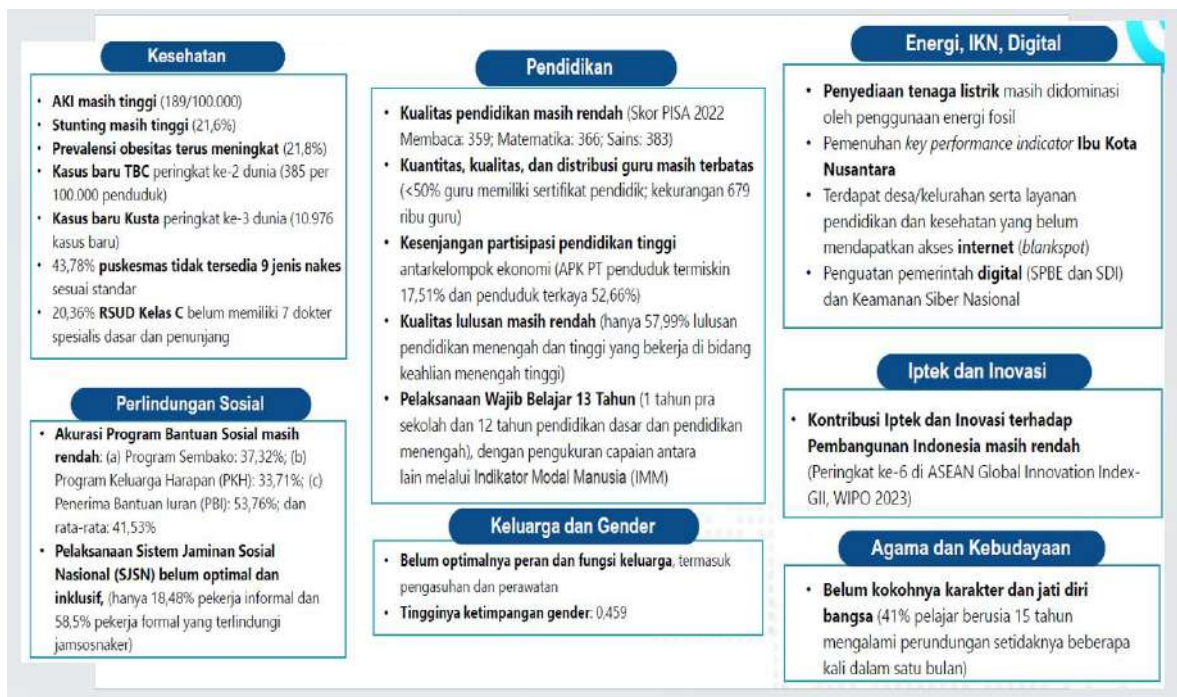
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025





RKP Tahun 2025 menjadi fondasi strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia hingga saat ini masih mengalami tantangan multidimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Tantangan multidimensi ini meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keluarga dan gender, energi, IKN, Digital, IPTEK dan inovasi, serta agama dan kebudayaan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 4.5
Tantangan Multi Dimensi RKP 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

Berdasarkan dari permasalahan dan tantangan tersebut, tema RKP 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu: SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas mewujudkan SDM berdaya saing dan produktif dengan memfokuskan melalui transformasi sosial, yaitu Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan *Stunting*; Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi





dan Lulusan STEAM Berkualitas; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang Berbasis Kebutuhan dan *Dual-System*. Selain memfokuskan pada transformasi sosial, SDM berdaya saing dan produktif memfokuskan pula pada Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (sebagai contoh: budi pekerti);

2. Infrastruktur Berkualitas mewujudkan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas melalui transformasi ekonomi, yaitu: Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; Penguatan infrastruktur digital; Pengembangan infrastruktur transisi energi; dan Percepatan infrastruktur IKN. Selain itu, dilakukan juga melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yaitu Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Pengembangan skema graduasi bansos; Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; Peningkatan produksi industri pengolahan; Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; dan Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4.3
Target Sasaran Pembangunan Nasional

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	5,3-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,76	4,5-5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	7,0-8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,379-0,382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53*	0,55





No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2024	Target 2025
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09*	38,6
7	Nilai Tukar Petani (kumulatif)	121,72	113-115
8	Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	102,97	104-105

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Keterangan: *) Capaian tahun 2023

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Selain itu, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global. Pengarusutamaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Kesetaraan Gender

Pembangunan nasional memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan





(mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB/SDGs) Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana sasaran global pada *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* yang terdiri dari 4 (empat) Pilar pada RAD-SDGs Jawa Barat, yaitu Pembangunan Sosial, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Jumlah target dan indikator SDGs Provinsi Jawa Barat disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.6
Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Jawa Barat



Sumber: Analisa Bappeda, 2023





Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, salah satunya memuat pengkajian pembangunan berkelanjutan yang bersifat prioritas sebagai dasar penentuan permasalahan, isu strategis dan sasaran strategis pembangunan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdapat 9 (sembilan) isu prioritas SDG's Jawa Barat yang ditetapkan melalui proses *crosscutting issues* antara 9 (sembilan) muatan isu KLHS terhadap capaian target SDGs Jawa Barat. Kesembilan isu prioritas SDGs tersebut, yaitu:

- 1) Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang termasuk pengembangan sistem teknologi informasi digital (berkaitan dengan TPB 4 dan TPB 5);
- 2) Belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran guna mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif (berkaitan dengan TPB 1, TPB 5, dan TPB 16);
- 3) Belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan (berkaitan dengan TPB 11, TPB 9, TPB 6, dan TPB 7);
- 4) Belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas (berkaitan dengan TPB 3, TPB 2, TPB 1, dan TPB 5);
- 5) Belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah (berkaitan dengan TPB 8, TPB 14, dan TPB 10);
- 6) Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim, serta upaya penurunan gas rumah kaca (berkaitan dengan TPB 1, TPB 9, TPB 11, dan TPB 13);
- 7) Belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja





- sama antar pihak termasuk masyarakat adat (berkaitan dengan TPB 1, TPB 5, TPB 9, TPB 16, dan TPB 17);
- 8) Penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air (berkaitan dengan TPB 2, TPB 6, dan TPB 15); dan
- 9) Belum optimalnya pengelolaan DAS dan rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut (berkaitan dengan TPB 6 dan TPB 15).

Pengarusutamaan SDG's pada dasarnya telah selaras dengan tujuan dan prioritas pembangunan daerah pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.7
Pengarusutamaan SDGs Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Adapun pengarusutamaan (*mainstreaming*) mengenai pelaksanaan pembangunan rendah karbon sebagai *platform* baru pembangunan, bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui kegiatan pembangunan dengan penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Fokus dari pembangunan rendah karbon adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon). Pembangunan Rendah Karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu: (1) lingkungan, melalui penurunan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan





ekonomi melalui pendekatan ekonomi hijau; dan (3) sosial melalui penanggulangan kemiskinan.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang kemudian dikaji ulang pada tahun 2023.

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka mentransformasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun 2019. Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat saat ini masih disusun. Prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon pada dasarnya telah tertuang pada program dan kegiatan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan program strategis, penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan proyek strategis, serta pengawasan ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan rendah karbon sudah tertuang didalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah mencantumkan indikator Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai Indikator Kinerja Utama Gubernur, sedangkan dalam Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 mengalami perubahan perhitungan dan nomenklatur menjadi Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara kumulatif dan tahunan yang menjadi Indikator Utama



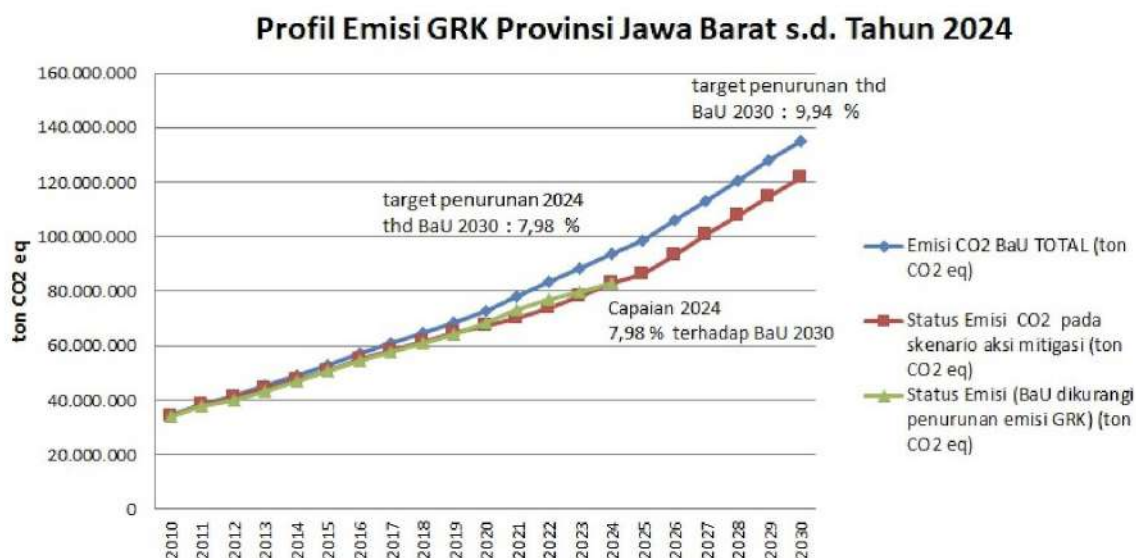


Pembangunan. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca selain sebagai Indikator Utama Pembangunan juga menjadi indikator Sasaran Visi dan Indikator Makro Pembangunan Daerah dengan nomenklatur Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang sudah memperhitungkan PDRB.

Profil emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan melalui proyeksi besar emisi *baseline* tahunan pada tahun 2045 pada kondisi tanpa aksi mitigasi (*Business as Usual*), yaitu sebesar 436.753.948,20 ton CO₂eq, dengan sumber emisi mencakup sektor energi (87,06 persen), transportasi (9,79 persen), kehutanan (0,04 persen), sampah dan limbah domestik (2,15 persen), dan pertanian (0,96 persen). Sedangkan untuk proyeksi besar emisi *baseline* kumulatif sampai dengan tahun 2045 yaitu sebesar 8.199.401.411,19 ton CO₂eq . Adapun target persentase penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat kumulatif tahun 2045 sebesar 31,65 persen sedangkan tahun 2025 sebesar 2,66 persen. Target persentase penurunan emisi GRK tahunan tahun 2045 sebesar 70,08 sedangkan tahun 2025 sebesar 9,27 persen.

Capaian persentase penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.8
Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat



Sumber: Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat (2018) dan Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



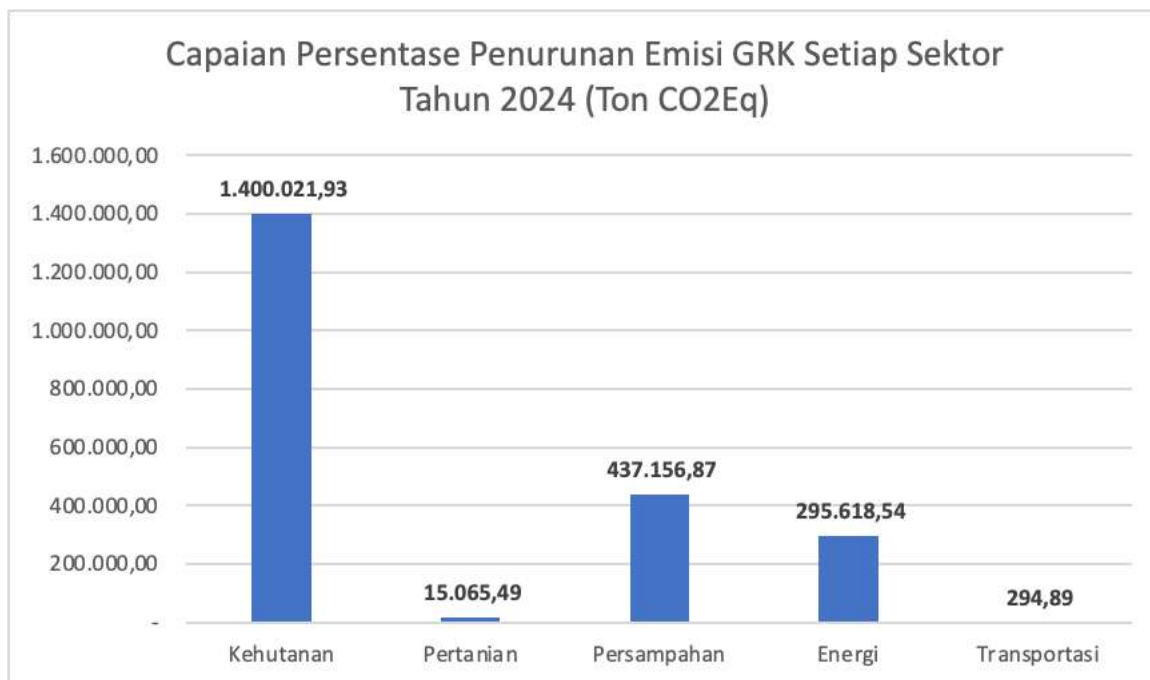


Kebijakan pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada 3 (tiga) basis bidang yang terbagi atas 5 (lima) sektor, yaitu:

1. Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian;
2. Bidang berbasis energi, meliputi sektor energi dan transportasi; dan
3. Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik.

Capaian tingkat penurunan emisi GRK pada setiap sektor tahun 2024, sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.9
Kontribusi Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca setiap Sektor Tahun 2024



Sumber: Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat (2018) dan Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Capaian tingkat penurunan emisi GRK Tahun 2024 sebesar 7,98 persen dari target 7,98 persen yang terdiri dari kontribusi sektor kehutanan sebesar 1.400.021,93 Ton CO2eq, sektor energi sebesar 295.618,54 Ton CO2eq, sektor persampahan dan limbah domestik sebesar 437.156,87 Ton CO2eq, pertanian dan Peternakan sebesar 15.065,49 ton CO2eq, dan sektor transportasi sebesar 294,89 ton CO2eq. Capaian penurunan emisi GRK Tahun 2024 ini masih bersifat daerah bukan kewilayahan, karena secara kewilayahan perlu dikoordinasikan capaian





pusat di Jawa Barat. Adapun penurunan emisi pada sektor industri menjadi ranah implementasi dari RAN-GRK karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui:

1. Sektor Kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;
2. Sektor Pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya *System Rice Intensification* (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
3. Sektor Energi, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, diantaranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi serta substitusi bahan bakar fosil ke listrik antara lain dengan pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB);
4. Sektor Transportasi, meliputi pengembangan transportasi massal, pembangunan *Integrated Transportation System* (ITS) atau *Area Traffic Control System* (ATCS), pelaksanaan *car free day*, peremajaan armada transportasi umum, penerapan manajemen parkir, dan pelatihan *eco-smart driving*; dan
5. Sektor Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPPAS Regional Lulut Nambo, Legok Nangka dan Cirebon Raya (Cira), pembangunan TPS Terpadu 3R (komposting dan daur ulang sampah), serta pembangunan IPAL domestik dan Sanimas.

Provinsi Jawa Barat, melalui dokumen Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, menuangkan kebijakan pembangunan rendah karbon ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu sasaran ke-12: **“Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan”**. Sasaran ini dicapai melalui arah kebijakan “Implementasi





pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim” dengan strategi “Meningkatkan upaya implementasi penurunan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, serta pengelolaan limbah dan sampah.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, yaitu **“JABAR ISTIMEWA, Lembur diurus, Kota ditata”**. Adapun tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter*, dan *Singer*, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya;
3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum;
4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan; dan
5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas;
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan;
4. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten;
5. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro; dan





6. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; dan
2. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.

Tujuan 4

- 4.1 Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan
2. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

- 4.2 Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.





Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan & Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025		Ket		
									Semula	Menjadi			
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang <i>Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer</i>			Indeks Modal Manusia		Poin	N/A	0,55	0,55			
					1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,16	75,29	75,29	
							b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,90	12,93	15,14	
			1.2	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	76,47	74,79 – 74,85	73,71			
					b.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	54,70 - 54,73	56,70			
			1.3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	a.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	51,78	56,50			
					b.	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Poin	N/A	3,02	3,02			
					c.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	49,51	49,51			
			1.4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	a.	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Tahun	9,24	9,16	9,35			
					b.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80	12,82	12,84			
			1.5	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	61,1	49,49	62,51	Kondisi awal 2024 berdasarkan <i>baseline</i> hasil <i>exercise</i> sementara dari Bappenas		
					b.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	66,44*	69,71	69,71			
					c.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,458	0,460	0,465			
					d.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,51	67,66	71,95			
			2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,95	4,96 - 5,37	4,98 - 5,37	
Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	12,82						12,72	12,72				





No	Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan & Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025		Ket
									Semula	Menjadi	
3	berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi			Indeks Ekonomi Hijau Daerah		Poin	N/A	61,3	61,73	
					Indeks Ekonomi Biru Indonesia		Poin	45,29	48,19	48,19	
					Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	6,75	6,42 - 6,99	6,42 - 6,99	
					PDRB Per Kapita		Juta Rupiah	56,08	59,6	59,6	
			2.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	a.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Poin	41,39	41,46	41,87 - 42,00	
					b.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	N/A	6,40	6,55	
			2.1.2	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	a.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	4,85	4,17	3,99	
			2.1.3	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	a.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Poin	N/A	4,58	4,58	
					b.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	1,59	4,54	1,69	
					c.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	112,17	112-117	112-117	
			2.1.4	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	24,70	24,72	24,72	
					b.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,05	3,50	3,11	
			2.1.5	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	a.	Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	3,3 - 3,8	
					b.	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	94,22	94,22	
					c.	Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	2,142	1,71	1,44	
					d.	Total Kredit/PDRB	Persen	33,7	34,61-34,81	23,7	
			2.1.6	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	a.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persen	N/A	22,81	22,81	
					b.	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	Persen	3,07	3,15	3,15	
							Rasio Gini		Poin	0,428	0,383 – 0,390





No	Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan & Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025		Ket		
									Semula	Menjadi			
	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan	3.1 Meningkatkan layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan		Penurunan Intensitas Emisi GRK		Persen	N/A	6,61	6,61			
					a.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,06	59,51	61,15			
					b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	56,25	56,95	56,95			
					c.	Indeks Desa	Poin	N/A	77,46	77,46			
					d.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,02	64,06	64,06			
					e.	Persentase Penurunan Emisi GRK							
					a.	Kumulatif	Persen	N/A	2,66	2,66			
					b.	Tahunan	Persen	N/A	9,27	9,27			
					f.	Indeks Risiko Bencana	Poin	114,15	109,18	109,18			
					3.2 Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat		a.	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,85 - 6,46	
							b.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	44,57	45,07	57,38	
4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi			Indeks Daya Saing Daerah		Poin	3,88	3,87	3,90			
			4.1	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	a.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,27	81,28	81,28			
					4.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	a.	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N/A	Tinggi (83,55)	86,03	
			Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan				Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	A	A	A	
		4.3	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	a.	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	Persen	86,44	86,45	86,45				

Sumber: Hasil Analisa Bappeda Jawa Barat, 2025

Keterangan: Target 2025 berdasarkan *baseline* 2025 RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045



Sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sesuai tabel diatas akan dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 dan mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2025. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, disajikan pada tabel sebagai berikut.





Tabel 4.5
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul						
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang <i>Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer</i>					
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	a.	Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 5. Program Kesejahteraan Rakyat 6. Program Kepegawaian Daerah
				b.	Menyediakan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				c.	Menyediakan layanan infrastruktur sanitasi	
				d.	Meningkatkan kualitas infrastruktur ruang terbuka hijau di perkotaan	
		2	Peningkatan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan serta penyediaan sarana-prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan primer dan rujukan termasuk layanan khusus/unggulan	a.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan termasuk layanan khusus/unggulan	
				b.	Menyediakan pelayanan kesehatan rutin bagi masyarakat	
		3	Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga medis serta tenaga kesehatan.	a.	Melaksanakan penataan dan redistribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan ke termasuk daerah-daerah sulit/terpencil	
				b.	Menyediakan beasiswa bagi dokter spesialis sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit	
		4	Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	a.	Menyediakan pelayanan kesehatan prima dan sarana/prasarana layanan kesehatan bagi lansia dan kelompok rentan lainnya	
		5	Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui deteksi dini/ <i>screening</i> ,	a.	Meningkatkan deteksi dini/ <i>screening</i> untuk penyakit menular dan tidak menular	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	b.	Menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat termasuk menjaga kesehatan lingkungan	
				c.	Memanfaatkan nilai-nilai budaya dan integrasi kearifan lokal dalam program kesehatan	
				d.	Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dalam rangka penyediaan pangan sehat, perbaikan gizi, penggunaan obat yang rasional, dan imunisasi lengkap bagi balita dan anak-anak, serta kesehatan jiwa untuk masyarakat	
				e.	Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan reproduksi	
				f.	Pengembangan kesehatan tradisional	
		6	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Menyiapkan masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas terutama di Daerah Afirmasi 3TP	
		7	Peningkatan penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i> .	a.	Meningkatkan upaya penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i>	
				b.	Meningkatkan peran Kader Posyandu dan PKK dalam upaya penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i>	
		8	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	a.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	
				b.	Meningkatkan akses, kuantitas, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak	
		9	Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	a.	Meningkatnya akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	
				b.	Mengembangkan program promotif dan preventif kesehatan dan gizi pada kelompok dalam siklus hidup	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
1.2	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	1	Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a.	Mengoptimalkan pengembangan kampung adat berbasis hutan, daerah aliran sungai, kampung nelayan dan kampung adat berbasis perkotaan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Kesejahteraan Rakyat 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 6. Program Pengelolaan Permuseuman
		2	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	a.	Melestarikan budaya lokal, Nilai budaya dan tradisi masyarakat	
		3	Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.	a.	Meningkatkan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar etnis dan umat beragama	
1.3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	1	Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.	a.	Meningkatkan keadilan hukum dan demokrasi berkualitas	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	a.	Memperkuat Regulasi dan Kebijakan untuk Partisipasi Publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	
		3	Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi	a.	Penguatan struktural (regulasi kelembagaan), budaya (kontrol masyarakat), dan agensi (fungsi media sosial) melalui pendekatan <i>pentahelix</i>	
				b.	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	
		4	Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas	a.	Meningkatkan keadilan hukum dan demokrasi berkualitas	
1.4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	1	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	a.	Mengembangkan skema pemberian beasiswa/kerjasama pembiayaan peserta pendidikan dasar dan menengah, serta pesantren.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum 4. Program Pembinaan Perpustakaan 5. Program Kesejahteraan Rakyat
				b.	Meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA	
		2	Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis	a.	Menyiapkan kurikulum STEAM dan pemenuhan infrastruktur digital untuk mendukung pengajaran berbasis TIK	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			pengembangan talenta dan karakter, digital <i>literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	b.	Meningkatkan minat baca dan literasi digital bagi seluruh masyarakat	
		3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	a.	Meningkatkan akses guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan dan sertifikasi.	
		4	Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	a.	Menyediakan jaringan internet yang menjangkau daerah terpencil/ <i>blank spot</i>	
		5	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	a.	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang memenuhi standar, aman bencana, serta sarana transportasi sekolah dasar dan menengah sesuai kondisi daerah	
				b.	Kolaborasi pengadaan tanah sekolah dengan pemerintah kabupaten/kota dan swasta	
		6	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	a.	Mengembangkan sekolah-sekolah vokasi pada pusat-pusat perkembangan wilayah/pusat ekonomi wilayah	
				b.	Mengembangkan pendidikan berkarakter yang diwujudkan antara lain melalui sekolah kebangsaan	
				c.	Mengembangkan kurikulum ekologi, sekolah kejuruan unggulan dengan sistem <i>boarding</i> , kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja, muatan lokal pancawaluya.	
		7	Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	a.	Mengembangkan akses pendidikan berkebutuhan khusus	
				b.	Mengembangkan akses pendidikan nonformal	
		8	Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu.	a.	Mengembangkan bantuan biaya pendidikan vokasi bagi warga tidak mampu	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
1.5		9	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Mengembangkan dan memperluas jangkauan sekolah terbuka dan pesantren, serta sekolah berbasis asrama	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Program Pengendalian Penduduk - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan
		10	Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global.	a.	Mengembangkan jejaring, kemitraan dan kerja sama internasional untuk memperluas peluang beasiswa pendidikan di luar negeri	
				b.	Memberikan dukungan pengembangan hub pendidikan global	
		11	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	a.	Mengembangkan kurikulum STEAM berbasis Vokasi dan keunggulan wilayah bertaraf global	
		12	Peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi	a.	Meningkatkan minat baca masyarakat	
				b.	Mengoptimalkan pembangunan literasi masyarakat	
	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	1	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	a.	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda	
				b.	Mengoptimalkan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		2	Pemberdayaan perempuan, pemuda, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	a.	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	
				b.	Penguatan karakter, kompetensi individu dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda	
		3	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	a.	Meningkatkan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
				b.	Meningkatkan cakupan dan efektivitas keluarga berencana dalam mendukung ketahanan keluarga.	10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 11. Program Perlindungan Khusus Anak 12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif						
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi					
2.1	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	1	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stock yard</i> yang modern terintegrasi).	a.	Membangun kawasan pergudangan/ <i>stock yard</i> yang modern terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				b.	Memberikan kemudahan perizinan dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya	
		2	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	a.	Membangun sarana dan prasarana kereta api logistik terutama untuk akses dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban	
				b.	Mengintegrasikan <i>dry port</i> KA Patimban dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon	
		3	Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	a.	Pengembangan penggunaan bahan baku lokal untuk kebutuhan industri unggulan	
		4	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global	a.	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi IPTEK untuk meningkatkan daya saing Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di tataran global	
				b.	Memperluas akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis	
		5	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah,	a.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas peneliti untuk penguatan riset di sektor ekonomi produktif	
				b.	Meningkatkan pembiayaan dan kolaborasi riset sektor ekonomi produktif antara pemerintah, akademik, DUDI baik dalam dan luar negeri	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
2.2	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas		dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.			1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 3. Program Pengembangan Ekspor 4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 5. Program Peningkatann Sarana Distribusi Perdagangan 6. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 8. Program Pengembangan UMKM
		6	Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>)	a.	Menata kerangka regulasi dan kelembagaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta kolaborasi multi pihak	
		7	Penguatan ekosistem industri berbasis rantai pasok dan sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	a.	Mengembangkan sektor industri (besar dan IKM/UMKM) unggulan berbasis potensi wilayah	
				b.	Penguatan pengarusutamaan penerapan industri hijau pada sektor industri	
		1	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	a.	Memperluas ekosistem digital untuk memperkuat bisnis UMKM	
				b.	Memperluas akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis	
		2	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Meningkatkan perluasan akses pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan kemitraan untuk pemberdayaan IKM/UMKM, terutama di daerah afirmasi 3TP	
				a.	Penguatan P3DN, UMK dan Koperasi	
		3	Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	b.	Memperkuat rantai pasok nilai tambah industri dalam negeri	
				c.	Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	
				d.	Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan melalui proses Litbang dan dukungan pengembangan sumber daya produksi yang berkualitas	
				e.	mengembangkan sistem perdagangan yang optimal, efisien, merata dan berdaya saing	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
		4	Penyiapan dan penataan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	a.	Menyiapkan dan melaksanakan penataan <i>government-induced activities</i> untuk peningkatan pergerakan orang dan barang di daerah afirmasi 3TP	
2.3	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	1	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	a.	Meningkatkan penyediaan instrumen hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				b.	Penguatan infrastruktur pelabuhan perikanan	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		2	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan	a.	Penyiapan lahan untuk komoditas unggulan	3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				b.	Perluasan Akses pasar	4. Program Perizinan Usaha Pertanian
				c.	Penambahan gudang penyimpanan	5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				d.	Digitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan	6. Program Pengawasan Keamanan Pangan
				e.	Hilirisasi produk pertanian, perikanan, dan kehutanan	7. Program Penanganan Kerawanan Pangan
				f.	Penataan fasilitas penangkapan dan budidaya perikanan	8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		3	Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	a.	Mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan	9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				b.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan melalui transformasi sistem regenerasi petani, penyuluhan pertanian, serta sinergi pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha	10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				c.	Mengembangkan klaster pertanian bioindustri berbasis unggulan daerah	11. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
						12. Program Pengelolaan Hutan
					13. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
					14. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
					15. Program Penyuluhan Pertanian	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
				d.	Menerapkan pertanian pangan berkelanjutan	
				e.	Menerapkan pertanian presisi	
		4	Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	a.	Meningkatkan pelayanan sistem irigasi	
		5	Pengelolaan susut dan sisa pangan untuk ketahanan pangan menuju swasembada pangan	a.	Melakukan konservasi energi dengan pemanfaatan prasarana/sarana bersumber energi terbarukan dan pemanfaatan angkutan umum massal	
				b.	Penguatan Infrastruktur dan Teknologi untuk penyelamatan pangan	
				c.	Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	
		6	Penguatan sistem pangan untuk ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan	a.	Meningkatkan ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, stabilitas pangan, kualitas pangan, dan tata kelola pangan	
		7	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	a.	Meningkatkan penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	
		8	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	a.	Memanfaatkan sumber daya perairan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, dengan menjaga kesehatan ekosistem laut	
		2.4	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	1	Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi	
b.	Mengembangkan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi					
2	Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .			a.	Meningkatkan sarana prasarana lembaga pelatihan bagi angkatan kerja	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
		3	Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Memetakan dan melakukan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi di daerah afiriasi 3TP	9. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 10. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (IKU PD) 11. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 13. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 14. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (IKU PD) 15. Program Hubungan Industrial
		4	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM.	b.	Memberikan kemudahan perizinan dan/atau insentif fiskal bagi investasi di daerah afiriasi 3TP	
				a.	Meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM	
		5	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	a.	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing berbasis klaster terintegrasi dan keunggulan wilayah	
		6	Pengembangan investasi di wilayah bertata ruang industri berbasis klaster dan potensi keunggulan wilayah dengan mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM.	a.	Meningkatkan perluasan akses pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan kemitraan untuk pemberdayaan IKM/UMKM, terutama di daerah afiriasi 3TP	
		7	Penguatan proses bisnis UMKM berkelanjutan melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	a.	Menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital dan inkubator bisnis.	
2.5	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	1	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	a.	Mengoptimalkan pengaturan harga, pengendalian biaya produksi, dan peningkatan efisiensi produksi	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				b.	Penguatan tata kelola pengendalian inflasi daerah untuk stabilisasi harga dan	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
		2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.		ketersediaan pasokan bahan pokok penting	
				a.	Mengoptimalkan Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	
				b.	Mengoptimalkan potensi CSR, KPBU, Ekonomi dan keuangan syariah	
				c.	Meningkatkan kapasitas belanja daerah	
				d.	Mengoptimalkan pendapatan transfer daerah	
				e.	Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan swasta	
				f.	Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	
				g.	Optimalisasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis desa dan kelurahan	
				h.	Peningkatan pendapatan asli daerah serta pemanfaatan potensi sumber pembiayaan alternatif & kreatif	
2.6	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	1	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	a.	Pengembangan atraksi wisata, Promosi dan pemasaran, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan paket wisata, serta penerapan pariwisata digital	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				b.	Meningkatkan penyediaan akomodasi dan sarana prasarana lainnya untuk mengembangkan produktivitas pariwisata	
				c.	Mengembangkan daya tarik wisata (wisata alam, kultural, dan <i>heritage</i>) secara kolaboratif dan partisipatif	
		2	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	a.	Peningkatan infrastruktur	
		3	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara	a.	Mengembangkan daya tarik wisata (wisata alam, kultural, dan <i>heritage</i>) secara kolaboratif dan partisipatif	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			kolaboratif dan partisipatif berbasis kearifan lingkungan.			
		4	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kakayaan budaya dan intelektual	a.	Pengembangan dan penguatan SDM, kelembagaan, dan jejaring ekonomi kreatif lintas Kabupaten/ Kota dan Nasional	
Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya						
3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan					
3.1	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	1	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis lainnya.	a.	Menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis lainnya	1. Program Penyelenggaraan Jalan
		2	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	a.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	a.	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan	3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				b.	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi terpadu perkotaan	4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		4	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	a.	Menerapkan Pembangunan infrastruktur <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> di kawasan perkotaan untuk ketahanan bencana	5. Program Pengelolaan Pelayaran
		5	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	a.	Menetapkan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb)	6. Program Pengelolaan Perkeretaapian
		6	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	a.	Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		7	Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di	a.	Meningkatkan penyediaan hunian vertikal perkotaan	8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
						9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						10. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
						11. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
						12. Program Penataan Bangunan Gedung
						13. Program Kawasan Permukiman
						14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
						15. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
						16. Program Penatagunaan Tanah





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban <i>renewal</i> pada area yang telah mengalami urban <i>decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	b.	Meningkatkan penataan kawasan kumuh perkotaan dan/atau urban <i>renewal</i>	17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 18. Program Pengembangan Perumahan 19. Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
		8	Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	a.	Meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi	20. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
		9	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.	a.	Meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan	21. Program Pengembangan Permukiman 22. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		10	Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	a.	Membangun Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan	23. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 24. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		11	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan.	a.	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar pusat kegiatan, klaster perekonomian dan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan	25. Program Penataan Desa 26. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				b.	Mengoptimalkan Bandar udara di Jawa Barat	27. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH
				c.	Membangunan dan mengoptimalkan Pelabuhan Laut dan ASDP di Jawa Barat	28. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				d.	Meningkatkan peran terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi	29. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				e.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas lalu lintas berkeselamatan;	30. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)
		12	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan <i>grid</i> tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan	a.	Mendorong pemanfaatan energi rendah emisi untuk aktivitas industri	31. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				b.	Menyediakan akses jalan yang terkoneksi ke kawasan industri	
				c.	Menyediakan akses telekomunikasi dan digital untuk aktivitas industri	
				d.	Melakukan pendampingan dan pengawasan pengelolaan limbah dan sampah industri	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program	
			bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	e.	Menyediakan dan melakukan penataan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	32. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
				f.	Menyediakan dukungan untuk penataan fasilitas hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja	33. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
				g.	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja	34. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
		13	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	a.	Membangun dan memperluas cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi di kawasan perkotaan dan perdesaan	35. Program Pengelolaan Persampahan	
		14	Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	a.	Melakukan persiapan dan dukungan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan di kawasan metropolitan	36. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		15	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	a.	Memperkuat pengelolaan jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta jalan desa	37. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	
				b.	Meningkatkan kemandirian jalan pada jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta jalan desa	38. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
		16	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1. Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalpucang-Cilacap; 2. Akses Pelabuhan Patimban. 3. Bandung Intra <i>Urban Toll Road</i> (BIUTR) 4. Cibadak-Palabuhanratu; 5. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; 6. Ciranjang-Padalarang; 7. Garut-Pameungpeuk;	a.	Mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada ruas: 1. Depok-Antasari Seksi 3 (Sawangan-Bojong Gede) 2. Depok-Antasari Seksi 4 (Bojong Gede-Salabenda) 3. Bekasi- Cawang-Melayu Seksi 2B (Margajaya-Tambun) 4. Bogor-Ringroad Seksi 3B (Kayumaning-Salabenda) 5. Ciawi-Sukabumi Seksi IIIB (Cibadak-Sukabumi Barat)	39. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
						40. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
						41. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			8. Kalipucang-Pangandaran; 9. Cirebon-Indramayu; dan 10. Cirebon-Kuningan; 11. Kertajati-Indramayu;		6. Ciawi-Sukabumi Seksi IVB (Sukabumi Barat-Sukabumi Timur) 7. Jakarta-Cikampek II Selatan (Jatiasih-Setu dan Setu-Sukabungah) 8. Akses Palabuhan Patimban 9. Cikunir-Karawaci <i>Elevate</i> 10. Bogor-Serpong Via Parung (JORR III) 11. Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III) 12. Sukabumi-Ciranjang 13. Ciranjang-Padalarang 14. Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis 15. Caringin-Cisarua 16. Akses Patimban <i>Extend</i> (sadang-Subang) 17. Bandung-Inter <i>Urban Toll Road</i>	
		17	Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan	a.	Meningkatkan kualitas dan spesifikasi jalan khusus, terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan dan perdesaan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah antar Provinsi dan dunia usaha	
		18	Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	a.	Membangun sarana dan prasarana kereta api logistik terutama untuk akses dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban	
		19	Reaktivasi layanan perkeretaapian di Jawa Barat terutama pada: 1. Layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang; 2. Layanan perkeretaapian Banjar-Pangandaran-Cijulang; 3. Layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari; 4. Layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey; serta	a.	Meningkatkan upaya penyiapan <i>readiness criteria</i> untuk mendukung reaktivasi layanan perkeretaapian, meliputi: 1. Dukungan penyiapan dokumen perencanaan 2. Dukungan penyiapan lahan 3. Upaya mitigasi dampak sosial dan lingkungan	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			5. Reaktivasi layanan perkeretaapian pada ruas Cibatug-Garut-Cikajang.			
		20	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	a.	Meningkatkan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat)	
		21	Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	a.	Menyiapkan prasarana dan sarana elektrifikasi jalur KA, terutama untuk layanan perkeretaapian komuter	
		22	Pengembangan kereta api cepat (HST/ <i>High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.	a.	Mendukung pengembangan kereta api cepat (HST/ <i>High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya	
		23	Penyiapan pembangunan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	a.	Mendukung penyiapan pembangunan <i>multi-infrastructure backbone</i> dan <i>maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian	
		24	Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu.	a.	Membangun sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP	
		25	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	a.	Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat di kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, dan/atau Daerah Afirmasi 3TP	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
		26	Meningkatkan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan	a.	Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman untuk mengembangkan desa mandiri	
				b.	Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan permukiman perdesaan dan kawasan strategis non perkotaan	
				c.	Menyediakan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perdesaan	
				d.	Menyediakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah kawasan perdesaan	
				e.	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu pada permukiman perdesaan yang dapat mendukung <i>circular economy</i>	
		27	Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	a.	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	
				b.	Meningkatkan pemanfaatan potensi keragaman hayati dan jasa lingkungan serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem sumber daya alam hayati	
		28	Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	a.	Meningkatkan upaya konservasi, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan di Daerah Aliran Sungai Prioritas (DAS Citarum, DAS Cilamaya, DAS Kali Bekasi) dan wilayah pesisir dan laut	
				b.	Mengendalikan pembangunan wilayah dan infrastruktur melalui penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	
				c.	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan peruntukkan ruang sebagaimana arahan dalam dokumen Rencana Tata	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
		29	Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	a.	Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Meningkatkan upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim khususnya aksi-aksi dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, energi, transportasi, limbah, dan persampahan	
				b.	Meningkatkan upaya-upaya untuk adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi kerugian ekonomi sebagai dampak bencana perubahan iklim pada sektor pertanian, sumber daya air, konservasi ekosistem pesisir khususnya bagian utara, dan kesehatan	
		30	Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	a.	Mengembangkan sistem pengelolaan limbah domestik secara individu maupun terpadu pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan untuk mengurangi pencemaran air dan mengurangi emisi gas rumah kaca sektor limbah domestik, menuju akses sanitasi AMAN	
		31	Pengelolaan sampah terpadu di Jawa Barat	a.	Pengelolaan sampah mandiri untuk mengurangi timbulan sampah dan penanganan kawasan tuntas sampah	
				b.	Pemanfaatan sampah menjadi energi (RDF, WtE, <i>Hydrogen</i> , atau skema lainnya) untuk mengurangi timbulan sampah di <i>landfill</i> dan mengurangi emisi gas rumah kaca	
				c.	Pengelolaan sampah di DAS untuk mengurangi penyumbatan DAS	
		32	Mengembangkan mekanisme pendukung perdagangan karbon dan pajak karbon	a.	Menyiapkan tata kelola dan kelembagaan penerapan perdagangan dan pajak karbon	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
		33	Dukungan peningkatan pelayanan sampah melalui fasilitas pengelolaan sampah regional	a.	Melakukan percepatan penyelesaian konstruksi dan operasionalisasi Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional pada wilayah Bandung Raya dan Bogor-Depok-Tangerang Selatan (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Nambo)	
				b.	Melakukan optimalisasi pelayanan sampah Regional Bandung Raya pada TPAS Regional Sarimukti sampai dengan beroperasinya TPPASR Legok Nangka, melakukan pengelolaan gas metan, serta melakukan konservasi dan penutupan TPAS Regional Sarimukti	
				c.	Melakukan fasilitasi perencanaan dan penyiapan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur) dan pengelolaan sampah terpadu (TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya)	
		34	Penyiapan dan penetapan instrumen <i>circular economy</i> dalam pengelolaan sampah.	a.	Mempersiapkan mekanisme dan instrumen pelaksanaan <i>circular-economy</i> pengelolaan sampah	
		35	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah pada ekosistem darat dan laut	a.	Mengurangi ancaman terhadap ekosistem darat dan laut pada sektor hutan dan lahan, pertanian dan perkebunan, serta perairan	
				b.	Melakukan pemanfaatan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas ekosistem darat dan laut guna melestarikan keanekaragaman hayati	
		36	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	a.	Membangun jaringan irigasi	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
		37	Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.	a.	Melakukan upaya penambahan kapasitas tampung dan pengembangan jaringan infrastruktur sumber daya air	
		38	Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: 1. Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis; 2. Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang; 3. Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; 4. Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; 5. Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; 6. Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung.	a.	Membangun bendungan/waduk baru untuk meningkatkan kapasitas tampung, pemenuhan air baku dan pengendalian banjir	
		39	Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	a.	Menyediakan infrastruktur energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan di kawasan perkotaan	
		40	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	a.	Membangun infrastruktur jaringan transmisi migas	
		41	Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan	a.	Membangun akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.			
		42	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	a.	Menguatkan kurikulum di setiap satuan pendidikan untuk mengelola risiko bencana	
				b.	Meningkatkan penggunaan sistem peringatan dini bencana	
				c.	Meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana	
				d.	Mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	
		43	Implementasi Pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.	a.	Meningkatkan upaya implementasi penurunan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan, pertanian,	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
3.2	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat				energi, transportasi, serta pengelolaan limbah dan sampah	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 6. Program Kesejahteraan Rakyat
				b.	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
		1	Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Menjamin pemenuhan dan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		2	Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	a.	Memperkuat sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi bagi kelompok marjinal, rentan dan masyarakat di daerah afiriasi 3TP (Jabar Selatan)	
		3	Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	a.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kerja penyandang disabilitas di sektor formal	
				b.	Meningkatkan partisipasi kerja penyandang disabilitas di sektor formal	
				c.	Mengembangkan edukasi sektor formal untuk menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja	
		4	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan	a.	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	b.	Menyediakan layanan panti wreda/griya lansia di 27 kabupaten/kota	
				c.	Mengoptimalkan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		5	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	a.	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	
				b.	Penguatan karakter, kompetensi individu dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda	
		6	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	a.	Meningkatkan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	
Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>						
4.1	Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi					
4.1.1	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	1	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri	a.	Meningkatkan riset berbasis permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Program Riset Dan Inovasi Daerah
				b.	Meningkatkan kolaborasi riset di berbagai sektor pembangunan terutama sektor ekonomi produktif antara pemerintah, akademik, DUDI baik dalam dan luar negeri	
		2.	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah serta dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.	a.	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di Daerah.	
4.1.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	1	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	a.	Meningkatkan Kerja sama Internasional dan Ketahanan Daerah	1. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		2	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan	a.	Menyediakan dan memperkuat Infrastruktur Pertahanan di Daerah	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).		Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)	2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 4. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		3	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	a.	Memperkuat Regulasi dan Kebijakan Kerja Sama Antardaerah dalam pengelolaan wilayah, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi	
		4	Peningkatan kualitas Demokrasi	a.	Meningkatkan kualitas etika dan budaya politik melalui Pendidikan politik	
				b.	Meningkatkan kewaspadaan daerah serta kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan untuk mencegah konflik sosial melalui kolaborasi lintas sektor	
				c.	Meningkatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	
d.	Meningkatkan penyediaan akses layanan aspirasi bagi seluruh masyarakat					
4.2	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan					
4.2.1	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	a.	Mengembangkan instrumen Regulasi Daerah yang efektif, efisien, dan selaras dengan Regulasi Nasional dan Prinsip <i>Good Governance</i>	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor 6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 7. Program Pengelolaan Arsip 8. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 9. Program Perizinan Penggunaan Arsip
				b.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik selaras dengan prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	
		2	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	a.	Mengembangkan Kelembagaan dan penataan aparatur daerah yang Adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	
				b.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah melalui Penguatan Kompetensi SDM serta Peningkatan Etos Kerja dan Integritas	
		3	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,	a.	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN serta Penguatan Sistem Manajemen Talenta	





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
			<i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	b.	Mengembangkan Sistem <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> yang Transparan	10. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
				c.	Meningkatkan Kesejahteraan ASN Berbasis Capaian Kinerja	11. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		4	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	a.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui desain kebijakan penataan wilayah (pemekaran/ penggabungan wilayah/ kabupaten/ kota/ kelurahan/desa)	12. Program Penataan Organisasi
		5	Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	a.	Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Pembangunan Berbasis Risiko	13. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
		6	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data.	a.	Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	14. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
				b.	Meningkatkan digitalisasi pada sektor strategis	15. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
				c.	Meningkatkan literasi digital	16. Program Pelayanan Penghubung
				d.	Meningkatkan keamanan siber dan pusat data	17. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				e.	Meningkatkan implementasi <i>Smart Province</i>	18. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						19. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
						20. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
						21. Program Kepegawaian Daerah
						22. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
						23. Program Penyelenggaraan Pengawasan
						24. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
						25. Program Pencatatan Sipil
						26. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
						27. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
						28. Program Pendaftaran Penduduk
						29. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi





Misi/Tujuan/ Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi		Dukungan Program
		7.	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	a.	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola organisasi pemerintahan dan pelayanan publik	

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029





Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pedoman bagi pelaksanaan program-program perangkat daerah untuk fokus pada penanganan yang bersifat prioritas dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025.

4.2.1 Isu Strategis dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional yang telah diuraikan pada Subbab 4.1.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.





Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 yang mencapai 74,92, capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 74,24 (2023). Namun mulai dari tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak lagi digunakan dan digantikan dengan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagaimana arahan nasional. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 memiliki target IMM sebesar 0,55 poin, hal ini dapat dicapai dengan mengukur seberapa baik kontribusi Jawa Barat terhadap Indonesia dalam memobilisasi modal manusia, potensi ekonomi, dan profesionalisme warganya. Sehingga perlu ada akselerasi terkait ketahanan hidup, kualitas pendidikan, dan kesehatan penduduk di Jawa Barat.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2024 yaitu 9,24 tahun dengan target pada tahun 2025 sebesar 9,35, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 yaitu 12,80 tahun dengan target pada tahun 2025 sebesar 12,84 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 mencapai 75,16 tahun dengan target pada tahun 2025 sebesar 75,29 tahun. Permasalahan utama kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat pada aspek kesehatan diantaranya adalah belum optimalnya upaya peningkatan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, serta belum optimalnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat.

Permasalahan lain terkait kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat juga terdapat pada belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah kasus sebanyak 1.231 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2024. Apabila dilihat dari kesenjangannya, masih rendahnya kesempatan kerja dan partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jawa





Barat dengan capaian di tahun 2024 sebesar 0,458 poin dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 50,59 persen dibandingkan dengan laki-laki sebesar 84,51 persen pada tahun 2024.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai *green dan blue economy* serta pembangunan inklusif diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan serta belum optimalnya penerapan *green dan blue economy*.

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai 7,08 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 5,85 – 6,46 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Barat lebih banyak terjadi di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan kesenjangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan masih tinggi dengan capaian gini rasio sebesar 0,428 poin pada tahun 2024. Sehingga diperlukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 masih mencapai 6,75 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 6,42 – 6,99 persen. Faktor pemicu tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat adalah pertumbuhan lapangan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, serta rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan berbagai upaya melalui peningkatan pertumbuhan pada sektor perindustrian dan perdagangan, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.





3. **Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan masih menjadi permasalahan di Jawa Barat.

Akar masalah kemiskinan salah satunya adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan. Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Jawa Barat meliputi belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan, air bersih dan sistem drainase, serta infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik dan limbah industri, pelayanan persampahan, serta belum terpenuhinya standar PSU dalam penyediaan perumahan.

Tantangan terbesar pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar serta infrastruktur lainnya, adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan yang perlu tetap dipertahankan. Kualitas lingkungan hidup Jawa Barat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 66,02 poin pada tahun 2024, dengan target pada tahun 2025 yaitu 64,06 poin. Meskipun capaian telah melampaui target, permasalahan utama kualitas lingkungan hidup Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran air, termasuk air laut, pencemaran udara, serta pengendalian perubahan tutupan lahan. Selain itu, masih perlu didorong upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan daerah.

4. **Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada





tahun 2024. Meskipun capaian sudah tinggi, permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan yang terpadu, adaptif, responsif, dan akuntabel.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJPD Tahap I, yaitu “Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola” serta visi pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, yaitu “Jabar Istimewa, Lembur diurus, Kota ditata”, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

“PENYIAPAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN”

Tema tersebut memiliki makna bahwa transformasi pembangunan perlu dilakukan dengan penyiapan infrastruktur dasar meliputi pembangunan jaringan jalan, pembangunan ruang kelas baru, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan sanitasi, pengentasan stunting dan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dimulai dari penyiapan infrastruktur pelayanan publik melalui peningkatan intensitas dan cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal dalam mendapatkan pelayanan publik namun memiliki nilai strategis yang tinggi.

Proses penyusunan isu strategis tahun 2025 mempertimbangkan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan mengacu pada arah kebijakan pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta memastikan keterkaitan dengan isu strategis/tantangan dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2025.





4.2.1.1 Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan

Keterkaitan isu strategis pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan isu strategis pembangunan tahun 2025, dengan permasalahan pembangunan dituangkan pada tabel berikut.



A040B8A293



Tabel 4.6
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD Jabar 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025
1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi. 2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat. 3. Masih rendahnya penerapan <i>zero new stunting</i> dan penanganan AIDS, <i>Tuberculosis</i>, dan Malaria. 4. Belum optimalnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana. 5. Belum optimalnya upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.	1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. <i>Green and Blue Economy</i> serta Pembangunan Inklusif	1. Masih rendahnya penerapan <i>link and match</i> industri kecil-industri besar. 2. Belum optimalnya penerapan UMKM dan industri hijau. 3. Percepatan digitalisasi ekonomi masih perlu didorong. 4. Belum optimalnya pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM. 5. Belum optimalnya penerapan pertanian ekologis. 6. Masih perlunya percepatan pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian, dan perikanan. 7. Nilai inventasi dan kualitas usaha masih perlu ditingkatkan. 8. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan. 9. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan. 10. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan masih perlu didorong. 11. Masih rendahnya penerapan <i>circular economy</i>.	2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
3. Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Serta Keberlanjutan Penataan Ruang	1. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir. 2. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat. 3. Perlunya percepatan pengembangan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekjur, dan Kawasan Cekungan Bandung. 4. Belum optimalnya penyediaan transportasi massal perkotaan. 5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang belum menjangkau seluruh wilayah. 6. Akses layanan listrik belum menjangkau seluruh wilayah. 7. Belum optimalnya penyediaan hunian layak huni.	3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan
4. Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	1. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan belum optimal. 2. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik. 3. Masih rendahnya pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim belum optimal dilaksanakan untuk mendukung perekonomian.	





Isu Strategis RPJMD Jabar 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025
5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana.	4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
	1. Belum optimalnya penataan dan penguatan organisasi.	
	2. Belum optimalnya upaya deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.	
	3. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional.	
	4. Belum optimalnya tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi.	
	5. Belum optimalnya penataan sistem manajemen SDM Aparatur.	
	6. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas.	
	7. Belum optimalnya penguatan pengawasan.	
	8. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.	
	9. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.	

Sumber : Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025





4.2.1.2 Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan RKP 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema pembangunan “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025-2029, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. **SDM Berdaya Saing dan Produktif**, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penetapan wajib belajar 13 Tahun;
 - b) Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
 - c) Penetapan pelayanan primer dan penuntasan *stunting*;
 - d) Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif;
 - e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
 - f) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*;
 - g) Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2. **Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas**, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - b) Penguatan infrastruktur digital;
 - c) Pengembangan infrastruktur transisi energi;
 - d) Percepatan infrastruktur IKN;
 - e) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. **Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan**, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 - b) Pengembangan skema graduasi bansos;
 - c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;





- d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
- e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
- f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- g) Peningkatan produksi industri pengolahan;
- h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; dan
- i) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

Berkaitan dengan intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di Pulau Jawa tahun 2025 diarahkan untuk:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu *global brain hub*; dan
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure)*, terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, dan banjir.

Pada tahun 2025, Wilayah Jawa-Bali memiliki sasaran utama pengembangan berupa (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah,





(2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi
Tahun 2025 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2025					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
Pertumbuhan Ekonomi	6,8	6,9	6,7	7,0	6,9	6,8
Tingkat Kemiskinan	3,55 – 3,85	5,85- 6,46	9,00 – 9,66	10,00-10,50	7,58- 8,08	4,50 – 5,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,54 – 6,40	6,42- 6,99	4,42 – 4,81	3,12 – 3,51	3,90 – 4,49	6,87 – 7,24

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Keselarasan Isu Strategis Jawa Barat Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan RPD Tahun 2024-2026, serta Isu Strategis/Tantangan dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2025, dituangkan pada tabel sebagai berikut.





Tabel 4.8
Keselarasan Isu Strategis Jawa Barat Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan RPD 2024-2026, serta Isu Strategis/Tantangan dan Arah Kebijakan RKP 2025

Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2. Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital <i>literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 4. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 6. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 7. Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	Diantaranya sebagai berikut: 1. Kualitas pendidikan masih rendah 2. Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi 3. Kualitas lulusan masih rendah 4. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun 5. Angka Kematian Ibu masih tinggi 6. <i>Stunting</i> masih tinggi 7. Prevalensi obesitas terus meningkat 8. Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia 9. Kasus baru Kusta peringkat ke 3 dunia 10. Puskesmas tidak tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 11. Akurasi Program Bantuan Sosial masih rendah 12. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal dan inklusif 13. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga 14. Tingginya ketimpangan gender 15. Belum kokohnya karakter dan jati diri bangsa	SDM Berdaya Saing dan Produktif





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	8. Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu. 9. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 10. Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global. 11. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 12. Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. 13. Peningkatan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan serta penyediaan sarana-prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan primer dan rujukan termasuk layanan khusus/unggulan. 14. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan. 15. Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya 16. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini/<i>screening</i>, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. 17. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 18. Peningkatan penuntasan dan pencegahan stunting. 19. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima 20. Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 21. Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 22. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 23. Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat. 24. Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama. 25. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 26. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 27. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga. 28. Peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi		
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi). 2. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA	Diantaranya sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia dalam tren Melambat 2. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata rata 5,0% dalam 20 tahun terakhir 3. <i>Total Factor Productivity</i> (TFP) Indonesia dalam Tren Menurun	Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. 3. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 4. Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen 5. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. 6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 7. Penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand. 8. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	9. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global 10. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 11. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 12. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 13. Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi 14. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	15. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. 16. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM. 17. Penataan dan restrukturisasi BUMD. 18. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. 19. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 20. Penguatan pengendalian inflasi daerah 21. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 22. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> 23. Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon, serta		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>) 24. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 25. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 26. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 27. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai. 28. Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. 29. Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. 30. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. 31. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. 32. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. 33. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan 34. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 35. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya. 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan. 4. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan. 5. Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan	Diantaranya sebagai berikut: 1. Kualitas Jalan Daerah yang masih rendah 2. Penuntasan manfaat bendungan terbangun 3. <i>Gap</i> Pengelolaan Sampah	Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). 6. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 7. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan. 8. Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. 9. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan. 10. Meningkatkan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan 11. Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. 12. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan. 13. Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. 14. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. 15. Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. 16. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. 17. "Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1. Cibadak-Palabuhanratu; 2. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; 3. Ciranjang-Padalarang; 4. Garut-Pameungpeuk; 5. Kalipucang-Pangandaran; 6. Cirebon-Indramayu; dan 7. Cirebon-Kuningan; 8. Kertajati-Indramayu; 9. Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; 10. Akses Pelabuhan Patimban.		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	18. Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan 19. Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. 20. Reaktivasi layanan perkeretaapian terutama pada ruas Banjar-Pangandaran. 21. Reaktivasi layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang 22. Reaktivasi layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey 23. Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari 24. Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang. 25. Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung. 26. Pengembangan kereta api cepat (HST/<i>High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. 27. Penyiapan pembangunan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	<i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa." 28. Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. 29. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). 30. Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 31. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air 32. Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. 33. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga. 34. Percepatan operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo). 35. Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya).		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	36. Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah. 37. Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. 38. Pengelolaan susut dan sisa pangan 39. Peningkatan pelayanan sistem irigasi 40. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. 41. Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air. 42. "Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: 1.Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis 2.Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang 3.Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; 4.Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; 5.Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; 6.Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung." 43. Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. 44. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	45. Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 46. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. 47. Mengembangkan mekanisme pendukung perdagangan karbon dan pajak karbon		
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1. Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah. 2. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. 3. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan. 4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 5. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 6. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	Diantaranya sebagai berikut: 1. Kontribusi IPTEK dan Inovasi terhadap Pembangunan Indonesia masih rendah 2. Terdapat desa/kelurahan serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum mendapatkan akses internet <i>blankspot</i> 3. Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI) dan Keamanan Siber Nasional	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	7. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 8. Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 9. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 10. Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 11. Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. 12. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 13. Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi 14. Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas 15. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia		





Isu Strategis RKPD Jabar 2025	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis/ Tantangan RKP 2025	Arah Kebijakan RKP 2025
	akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri 16. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah serta dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.		

Sumber : Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Catatan:

Sumber perumusan isu strategis:

1. Permasalahan pembangunan dalam RPJMD;
2. Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD;
3. Arah kebijakan RPJMD; dan
4. Arah kebijakan RKP.





4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan perwujudan langsung dari Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Prioritas 1**, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. **Prioritas 2**, yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. **Prioritas 3**, yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya; dan
4. **Prioritas 4**, yaitu Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, maka dirumuskan program prioritas pembangunan daerah yang mencakup langkah-langkah strategis melalui 24 program prioritas dan 9 (sembilan) Langkah Membangun Jawa Barat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Prioritas 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
 - a. Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan;
 - b. Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional;





- c. Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup;
 - d. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama;
 - e. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi;
 - g. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat.
2. Program Prioritas 2 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif
- a. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
 - b. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - c. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
 - d. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan;
 - e. Program Peningkatan dan pemerataan investasi;
 - f. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah;
 - g. Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD;
 - h. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan.
 - i. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan.
3. Program Prioritas 3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin Dan Kaya
- a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
 - b. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan;





- c. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim;
 - d. Program Pengurangan Risiko Bencana;
 - e. Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas).
4. Program Prioritas 4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*
- a. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah;
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan;
 - c. Program Transformasi Birokrasi berbasis digital; dan
 - d. Program Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional.

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah tersebut disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk 9 Langkah Membangun Jabar sebagai berikut:

1. LANGKAH PERTAMA

Langkah Pertama yaitu **Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan**, dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mulus dan terkoneksi dari jalan nasional hingga jalan desa (*jalan leucir*), pembangunan rumah rakyat miskin, pemenuhan akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani jaringan listrik, penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, untuk mewujudkan Jabar ODF/BABS (*Open Defecation Free*/Bebas Buang Air Besar Sembarangan), serta penataan saluran air dan drainase dalam rangka pencegahan banjir.

2. LANGKAH KEDUA

Langkah Kedua yaitu **Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di Seluruh Wilayah Pertanian,**





dilaksanakan dengan melalui-perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan bendung lapang, pembangunan cekdam/embung dan pompanisasi dengan tenaga surya.

Langkah Kedua juga mendorong terciptanya **Ekosistem Pertanian Organik serta pengembangan benih dan bibit unggul** untuk memperkuat Jawa Barat sebagai penunpu ketahanan pangan nasional. Langkah ini dilaksanakan melalui konektivitas pertanian berbasis kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta penggunaan alat pertanian modern dan tepat guna.

3. LANGKAH KETIGA

Langkah Ketiga yaitu **Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.**

Pengembangan Pendidikan Berkarakter dengan kurikulum pancawaluya disertai penguatan pendidikan budi pekerti dan agama yang didukung ketercukupan ruang kelas tingkat SD, SMP, SMA/SMK, serta pesantren dan madrasah guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan; pembentukan 10 (sepuluh) sekolah kejuruan unggulan sistem *boarding* berkapasitas 1.000 siswa per sekolah dengan kurikulum *link and match* dunia kerja, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk membentuk manager-manager baru di Jawa Barat; serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa Jawa Barat berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.

Pembentukan 10 (sepuluh) sekolah kejuruan unggulan sistem *boarding* diwujudkan melalui pembangunan SMK istimewa di kawasan industri bekerja sama dengan dunia industri dan usaha untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai serta pengembangan pendidikan dan





pelatihan vokasi yang salah satunya melalui beasiswa di perguruan tinggi dan politeknik berorientasi terapan. Program ini didampingi dengan pelatihan kewirausahaan dan penempatan kerja, untuk memastikan lulusan mampu menjadi manajer baik dalam usaha mandiri maupun perusahaan berskala nasional dan global

Agenda pembangunan bidang pendidikan ini mencakup 3 (tiga) fokus utama, yaitu: pengembangan pendidikan berkarakter, perluasan akses layanan pendidikan, dan penguatan akses lulusan ke dunia kerja. Pengembangan pendidikan berkarakter mencakup penerapan kurikulum berbasis keterampilan teknis lokal, vokasi ekologi, gerakan pembelajaran berbasis nilai pancawaluya, serta pelatihan integritas dan kedisiplinan siswa.

Program perluasan akses layanan pendidikan dilakukan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) untuk siswa SMA/SMK/SLB dan santri, serta beasiswa lanjutan bagi lulusan berprestasi ke jenjang pendidikan tinggi berorientasi terapan. Program ini juga meliputi penambahan ruang kelas baru dan pembangunan toilet bagi sekolah jenjang menengah yang membutuhkan, guna meningkatkan kenyamanan dan kelayakan proses belajar mengajar.

Dari aspek pemerataan, pembangunan sekolah baru diprioritaskan di 14 (empat belas) kecamatan yang belum memiliki sarana pendidikan jenjang SMA. Pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk usia sekolah di setiap wilayah secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan akses pendidikan di daerah yang masih belum terjangkau.

4. LANGKAH KEEMPAT

Langkah Keempat yaitu **Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan.**

Pengembangan Lapangan Kerja Baru pada sektor industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui kemudahan perizinan, penyiapan tenaga kerja terampil berbasis penempatan, penguatan *link and match* industri besar dan Industri Kecil dan





Menengah (IKM). Langkah ini didukung juga dengan pengembangan wirausaha muda di berbagai bidang, termasuk *start-up*.

Upaya pengembangan lapangan kerja baru ini meliputi dorongan terhadap investasi di sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Pada sektor industri, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri, menciptakan iklim kemitraan industri, serta mengembangkan ekosistem perwilayahan industri. Fokus pembangunan industri meliputi:

- Pemerataan dan pengembangan wilayah industri unggulan berdasarkan potensi lokal melalui pemetaan sektoral, peningkatan kawasan industri tematik, dan penguatan sentra IKM yang saling terintegrasi.
- Peningkatan kualitas industri berfokus pada peningkatan mutu bahan baku, pengembangan kapasitas SDM industri, adopsi teknologi industri ramah lingkungan, serta memperluas akses pasar bagi produk dalam negeri.
- Meningkatkan Kemudahan Berusaha Sektor Industri dengan perbaikan layanan perizinan dan dokumen usaha industri secara digital, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat investasi industri dan menjamin kenyamanan berusaha.

Pada sektor industri, pembangunan diarahkan untuk memperkuat rantai nilai tambah, menciptakan keterkaitan antara Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan industri besar, serta mengembangkan sentra-sentra IKM unggulan.

Agenda pembangunan ini juga menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai prioritas, dengan fokus pada pengembangan pendidikan vokasi di jenjang SMK, Diploma, dan Sarjana yang diarahkan pada penempatan kerja dan penciptaan wirausaha baru.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, implementasi pembangunan bidang investasi difokuskan pada:

- Penetapan dan operasionalisasi peraturan daerah yang memberikan kemudahan investasi;
- Pengembangan sarana dan prasarana wilayah guna meningkatkan kesiapan ruang investasi dan efisiensi distribusi barang serta jasa;





- Penciptaan ekosistem bisnis yang ramah dan berdaya saing tinggi.

Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, melalui:

- Standarisasi layanan jasa dan *amenitas* wisata; dan
- Pengembangan destinasi unggulan dengan melengkapi elemen atraksi buatan maupun budaya, aksesibilitas, paket wisata, aktivitas wisatawan, dan layanan pendukung.

Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada sektor-sektor unggulan Jawa Barat, seperti *fashion*, gim, kriya, dan kuliner. Penguatan ekonomi kreatif dilakukan melalui:

1. Peningkatan akses pembelajaran digital untuk pelaku kreatif;
2. Pengembangan platform industri kreatif;
3. Penguatan basis data dan jaringan riset produk kreatif;
4. Perluasan akses pemasaran produk;
5. Aktivasi dan optimalisasi pusat kreasi;
6. Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

5. LANGKAH KELIMA

Langkah Kelima yaitu **Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus serta pemberian beasiswa dokter spesialis sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.**

Penambahan layanan khusus meliputi layanan kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, sarana cuci darah, kanker, penanganan *stroke* dengan sarana bedah syaraf, layanan operasi dan layanan lainnya, termasuk penyediaan ambulans ICU dan ambulans *transport*, program dokter desa, serta pengembangan puskesmas rawat inap terutama di wilayah perbatasan provinsi, pengembangan layanan laboratorium kesehatan.





Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, selain pemenuhan terhadap infrastruktur kesehatan secara beriringan perlu dilakukan pemenuhan dan pemerataan terhadap ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki strategi prioritas untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, khususnya dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Program beasiswa ini direncanakan dalam beberapa siklus sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

6. LANGKAH KEENAM

Langkah keenam yaitu **Penanganan *stunting* dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.** Penanganan *stunting* dan gizi buruk dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan asupan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi kepada ibu hamil, ibu menyusui (ASI Eksklusif), dan balita. Langkah ini sejalan dengan program prioritas nasional pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, terdapat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu Makanan Bergizi Gratis.

Pengembangan Industri Pengobatan berbasis kearifan lingkungan, peningkatan layanan kesehatan tradisional yang didukung dengan pengembangan industri obat-obat tradisional sebagai alternatif pengobatan.

7. LANGKAH KETUJUH

Langkah ketujuh yaitu **Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.** Pemulihan kondisi lingkungan didukung oleh pembangunan infrastruktur rendah emisi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global.





Langkah ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha.

8. LANGKAH KEDELAPAN

Langkah kedelapan yaitu **Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)** dan pengolahan sampah menjadi energi lainnya. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri dilaksanakan secara terintegrasi sampai dengan tingkat Rumah Tangga (RT) yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu hingga ke hilir. Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan melalui upaya lainnya seperti daur ulang, 3R, dan pengolahan sampah menjadi energi. Dalam hal pengolahan sampah diarahkan untuk menjadi energi seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF), *Waste to Electricity* (WtE), *Waste to Hydrogen*, dan teknologi lainnya

9. LANGKAH KESEMBILAN

Langkah Kesembilan yaitu **Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak**. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, serta guru agama dan guru ngaji guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui kolaborasi antar pemerintahan daerah sebagai bentuk perwujudan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan. Transformasi birokrasi berdampak tercermin dalam karakter birokrasi yang jujur, bersih, dan tulus melayani masyarakat.

Sandingan Program Prioritas dan 9 Langkah Membangun Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.





Tabel 4.9
Sandingan Program Prioritas dan 9 Langkah Membangun Jawa Barat

No	Program Prioritas	9 Langkah Membangun Jawa Barat
1.	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	LANGKAH KELIMA: Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.
2.	Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional	
3.	Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup	LANGKAH KEENAM: Penanganan <i>stunting</i> dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
4.	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	
5.	Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
6.	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	LANGKAH KETIGA: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem <i>boarding</i> , berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.
7.	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	
8.	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	LANGKAH KEENAM: Penanganan <i>stunting</i> dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
9.	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	
10.	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	LANGKAH KEDUA: Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di Seluruh Wilayah Pertanian dan Ekosistem Pertanian Organik serta pengembangan benih dan bibit unggul melalui perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan bendung lapang, pembangunan cekdam/embung dan pompanisasi dengan tenaga surya





No	Program Prioritas	9 Langkah Membangun Jawa Barat
		LANGKAH KEENAM: Penanganan <i>stunting</i> dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
11.	Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	
12.	Program Peningkatan dan pemerataan investasi	LANGKAH KEEMPAT: Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan
13.	Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	
14.	Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	
15.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	LANGKAH KEEMPAT: Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan
16.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastuktur wilayah	LANGKAH PERTAMA: Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (<i>Open Defecation Free</i> /bebas buang air besar sembarangan) serta penataan saluran air dan drainase dalam rangka pencegahan banjir.
17.	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	LANGKAH KETUJUH: Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.
18.	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	LANGKAH KEDELAPAN: Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). LANGKAH KETUJUH:
19.	Program Pengurangan Risiko Bencana	Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.





No	Program Prioritas	9 Langkah Membangun Jawa Barat
20.	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	
21.	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	
22.	Program Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	
23.	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	LANGKAH KESEMBILAN: Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.
24.	Program Penguatan <i>Good Governance</i> , serta Kerjasama Daerah dan Internasional	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Keempat prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran, dan indikator sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.10
Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Target 2025	
				Semula	Menjadi
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,16	75,29	75,29
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,90	12,93	15,14
	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	74,79 – 74,85	73,71
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	54,70 - 54,73	56,70
	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	N/A	51,78	56,50
		Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	N/A	3,02	3,02
		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	49,51	49,51
	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	9,24	9,16	9,35
		Harapan Lama Sekolah	12,80	12,82	12,84
	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	61,1	49,49	62,51
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	66,44*	69,71	69,71
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458	0,460	0,465
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,51	67,66	71,95





Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2024	Target 2025	
				Semula	Menjadi
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan	41,39	41,46	41,87 - 42,00
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	6,40	6,55
	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	4,85	4,17	3,99
	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	N/A	4,58	4,58
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59	4,54	1,69
		Nilai Tukar Petani (NTP)	112,17	112-117	112-117
	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,70	24,72	24,72
		Rasio Kewirausahaan Daerah	3,05	3,50	3,11
	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi	N/A	3,3 - 3,8	3,3 - 3,8
		Inklusi Keuangan	N/A	94,22	94,22
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	2,142	1,71	1,44
		Total Kredit/PDRB	N/A	34,61-34,81	23,7
	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	N/A	22,81	22,81
		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	3,07	3,15	3,15
Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	76,06	59,51	61,15
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	56,25	56,95	56,95
		Indeks Desa	N/A	77,46	77,46
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,02	64,06	64,06
		Persentase Penurunan Emisi GRK			
		a. Kumulatif	N/A	2,66	2,66
		b. Tahunan	N/A	9,27	9,27
		Indeks Risiko Bencana	114,15	109,18	109,18
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,08	5,85 - 6,46	5,85 - 6,46
		Indeks Kesejahteraan Sosial	44,57	45,07	57,38
Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	81,27	70,15	81,28
	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Provinsi	N/A	Tinggi (83,55)	Tinggi (86,03)
	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	86,44	86,45	86,45

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025





Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ditetapkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan serta Arah Kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, dituangkan pada tabel berikut.





Tabel 4.11
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.	1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	
3. Masih rendahnya penerapan <i>zero new stunting</i> dan penanganan AIDS, <i>Tuberculosis</i> , dan Malaria.		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	
4. Belum optimalnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	
5. Belum optimalnya upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	
		Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	
		Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu.	
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
		Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini/<i>screening</i>, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Peningkatan penuntasan dan pencegahan stunting. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
		tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat. Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	
1. Masih rendahnya penerapan <i>link and match</i> industri kecil-industri besar.	2. Green and Blue Economy serta Pembangunan Inklusif	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi).	P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif
2. Belum optimalnya penerapan UMKM dan industri hijau.		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	
3. Percepatan digitalisasi ekonomi masih perlu didorong.		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
4. Belum optimalnya pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.		Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	
5. Belum optimalnya penerapan pertanian ekologis.		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	
6. Masih perlunya percepatan pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian, dan perikanan.		Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
7. Nilai inventasi dan kualitas usaha masih perlu ditingkatkan.		Penyiapan dan penataan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	
8. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan.		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	
9. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global	
10. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan masih perlu didorong.		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	
11. Masih rendahnya penerapan <i>circular economy</i> .		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
		Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link and match</i> industri besar dengan IKM/UMKM. Penataan dan restrukturisasi BUMD. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Penguatan pengendalian inflasi daerah Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak	



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB IV – SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025



Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
		karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (<i>result base payment</i>) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai. Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir.	3. Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Serta Keberlanjutan Penataan Ruang	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	P3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
2. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat.		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	
3. Perlunya percepatan pengembangan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekjur, dan Kawasan Cekungan Bandung.		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	
4. Belum optimalnya penyediaan transportasi massal perkotaan.		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	
5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang belum menjangkau seluruh wilayah.		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	
6. Akses layanan listrik belum menjangkau seluruh wilayah.		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	
7. Belum optimalnya penyediaan hunian layak huni.		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	
		Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.	
		Meningkatkan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan	
		Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan.	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
		Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan <i>grid</i> tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: 1. Cibadak-Palabuhanratu; 2. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; 3. Ciranjang-Padalarang; 4. Garut-Pameungpeuk; 5. Kalipucang-Pangandaran; 6. Cirebon-Indramayu; dan 7. Cirebon-Kuningan; 8. Kertajati-Indramayu; 9. Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap; 10. Akses Pelabuhan Patimban. Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry</i>	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
		port KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. Reaktivasi layanan perkeretaapian terutama pada ruas Banjar-Pangandaran. Reaktivasi layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang Reaktivasi layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang. Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung. Pengembangan kereta api cepat (HST/ <i>High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya. Penyiapan pembangunan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i>, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan belum optimal.	4. Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	P3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
2. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik.		Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	
3. Masih rendahnya pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.		Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	
4. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim belum optimal dilaksanakan untuk mendukung perekonomian.		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	
5. Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana.		Percepatan operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo).	
		Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya).	
		Penyiapan dan penetapan instrumen <i>circular economy</i> dalam pengelolaan sampah.	
		Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	
		Pengelolaan susut dan sisa pangan	
		Peningkatan pelayanan sistem irigasi	
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.	
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: 1. Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis 2. Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang 3. Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; 4. Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
		Bogor; 5. Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; 6. Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung. Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	





Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1. Belum optimalnya penataan dan penguatan organisasi. 2. Belum optimalnya upaya deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum. 3. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional. 4. Belum optimalnya tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi. 5. Belum optimalnya penataan sistem manajemen SDM Aparatur. 6. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas. 7. Belum optimalnya penguatan pengawasan. 8. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik. 9. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.	5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Mengembangkan mekanisme pendukung perdagangan karbon dan pajak karbon Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.	P4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk tahun 2025)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas	

Sumber : Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB IV – SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025



4.2.2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok DPRD Tahun 2025

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Permasalahan Kesehatan: 1. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan mobil pelayanan <i>Ambulance</i> di setiap desa/kelurahan, penyediaan alat-alat kesehatan, penyediaan obat-obatan, serta pembangunan MCK 2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui jalur BPJS, salah satunya melalui jumlah subsidi bagi BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peningkatan jumlah kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) 3. Penguatan sarana dan prasarana Posyandu di berbagai daerah serta pelatihan kader posyandu agar dapat lebih produktif 4. Peningkatan akses kesehatan Balita, Ibu Hamil dan Remaja Putri 5. Penanggulangan HIV AIDS.	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
Permasalahan Pendidikan: 1. Penguatan sistem pembelajaran jarak jauh, diantaranya berkaitan dengan fasilitasi peralatan pembelajaran, penguatan jaringan internet di <i>blank spot</i> area, distribusi kuota data internet gratis secara merata dan tepat sasaran 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), serta sarana dan prasarana penunjang untuk pendidikan formal di berbagai tingkatan, baik swasta maupun negeri, dan pembelian lahan sekolah untuk SMK 3. Pemerataan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD di berbagai daerah 4. Pengangkatan P3K untuk guru honorer dan insentif operator sekolah, serta peningkatan	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>





Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
insentif yang layak untuk guru PAUD dan Madrasah yang masih jauh dari kata layak untuk para pendidik 5. Pengadaan pelatihan <i>life skill</i> dan <i>soft skill</i>, serta penyelenggaraan informasi lapangan pekerjaan untuk lulusan SMA/SMK, serta fasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas 6. Peningkatan anggaran untuk peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku bacaan di sekolah, baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan 7. Peningkatan akses pendidikan kesehatan bagi remaja putri 8. Peningkatan kualitas layak hidup bagi masyarakat miskin sektor pendidikan; 9. Bantuan sarana dan prasarana dan operasional Perguruan Tinggi.	
Permasalahan Ekonomi: 1. Pengambilan kebijakan strategis dan taktis dalam menghadapi fenomena banyaknya tenaga kerja di Jawa Barat yang dikurangi/dirumahkan/di-PHK yang berdampak terhadap angka kemiskinan di Jawa Barat; 2. Penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan teknologi digital untuk koperasi, pelaku UMKM dan pelaku usaha di pasar tradisional di Jawa Barat, serta pemilihan usaha yang sedang <i>tren</i> di masyarakat melalui aplikasi dan pembayaran secara non tunai; 3. Peningkatan kontribusi BUMD Provinsi Jawa Barat dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat; 4. Peningkatan penguatan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu, peningkatan kemampuan <i>internet marketing</i>, pengembangan pemasaran produk dengan cara <i>digital</i>, serta peningkatan bantuan modal usaha bagi para pemuda dan masyarakat secara umum; 5. Pemberdayaan ekonomi di kalangan anak muda maupun anggota kelompok masyarakat dalam bentuk kemudahan akses dan pendampingan, fasilitasi pembentukan ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat, pengadaan bantuan sarana usaha untuk masyarakat, serta pelatihan dan pemodalan UMKM; 6. Penguatan dan sinergitas Satgas Anti Rentenir di tingkat kabupaten/kota dan provinsi; 7. Pengembangan ekonomi desa melalui pengembangan pariwisata berbasis desa, Program Desa Pangan Mandiri, penguatan modal BUMDES, penguatan bantuan untuk sektor seni dan budaya, mendorong perekonomian UMKM mulai dari aset pemerintah yang dikerjasamakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, pelatihan, bantuan modal usaha dan promosi; 8. Penyelenggaraan sosialisasi program pemerintah menyangkut usaha maupun wirausaha pada masyarakat agar referensi wirausaha semakin terbuka serta pembentukan gugus tugas atau lembaga non struktural terkait kewirausahaan;	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif





Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
9. Pembinaan wirausaha kecil/<i>home industry</i>, dengan memberikan bantuan modal usaha kecil bagi masyarakat, khususnya pemuda dan ibu rumah tangga melalui kemudahan akses kredit dari Bank Jabar Banten; 10. Penguatan dukungan di sektor pertanian untuk mendukung program kedaulatan pangan pemerintah melalui peningkatan bantuan sarana pertanian dan infrastruktur penunjang pertanian, serta penyediaan penyuluh lapang yang kapabel, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, pengadaan alat-alat pertanian dan bibit dengan kualitas unggul secara tepat sasaran, serta peningkatan jaringan irigasi pertanian; 11. Peningkatan UMKM pada pada sektor kuliner; 12. Penyelenggaraan program agrobisnis yang terintegrasi mulai dari pembukaan lahan hingga pemasaran hasil pertanian bagi para petani; 13. Pemberdayaan petani benih dalam pengembangan sumber benih unggul di Jawa Barat, serta mengatur regulasi mengenai sertifikasi benih unggul dan unggul lokal; 14. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan kerja pemuda yang putus sekolah maupun belum memiliki pekerjaan; 15. Penanganan kelangkaan pupuk bersubsidi serta peningkatan kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi ini; 16. Pengembangan wisata alam baru, termasuk di wilayah perdesaan; 17. Pengendalian harga sembako agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat; 18. Penguatan ketahanan pangan di daerah yang memerlukan pembuatan lumbung pangan desa; 19. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan, serta pengadaan pelatihan dan pemberian bantuan dalam rangka memenuhi konsumsi daging dan susu.	
Permasalahan Infrastruktur: 1. Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan, serta pemeliharaan jalan provinsi, jalan lingkungan dan jalan desa yang rusak; 2. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok. 3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti halnya gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian; 4. Pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung serbaguna di setiap desa; 5. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)/drainase utama; 6. Pembangunan polder dan sumur resapan untuk penanganan banjir;	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya





Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
7. Pembangunan rumah layak huni dan perbaikan rumah tidak layak huni; 8. Penanganan kerusakan lingkungan yang bertambah dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali; 9. Peningkatan akses terhadap infrastruktur internet lebih luas; 10. Normalisasi dan pemeliharaan sungai; 11. Penataan kawasan kumuh; 12. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum berbasis masyarakat; 13. Pengadaan sarana penerangan jalan umum; 14. Penempatan PKL di lokasi yang strategis; 15. Rehabilitasi/penataan situs cagar budaya; 16. Pengadaan armada pengangkut sampah; 17. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pemekaran daerah di kabupaten/kota.	

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

4.2.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional pada RKP 2025

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Sasaran PN 1 yaitu Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan Sasaran PN 2 yaitu mendorong: (a) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan; (b) Terbangunnya *Eco-region* Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal; (c) Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih; (d) Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi; (e) Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB; (f) Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk





- Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; dan (g) Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru.
3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran PN 3 yaitu mendorong: (a) Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan; (b) Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB; (c) Meningkatnya nilai tambah pariwisata; (d) Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas; dan (e) Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
 4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4, yaitu mendorong: (a) Pendidikan Berkualitas yang Merata; (b) Kesehatan untuk Semua; (c) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif; (d) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; dan (e) Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga.
 5. Prioritas Nasional/PN 5 yaitu, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5, yaitu mendorong: (a) Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan; (b) Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; dan (c) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.
 6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6, yaitu mendorong: (a) Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan; (b) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; (c) Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; dan (d) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.





7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 yaitu mendorong: (a) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi; (b) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani; (c) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (d) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan; (e) Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan; (g) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi; dan (h) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8, yaitu mendorong: (a) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; dan (b) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Keterkaitan Prioritas, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Nasional serta Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.





Tabel 4.13
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan
Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan 2. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga 3. Indeks Kemerdekaan Pers 4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 5. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 6. Persentase kader yang menempati Jabatan Strategis 7. Indeks Demokrasi Indonesia 8. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 9. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesenjangan 10. Indeks Hak Asasi Manusia 11. Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 12. Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik 13. Indeks Akses terhadap Keadilan	S15. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Indonesia
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	1. Asia Power Index (<i>Military Capability</i>) 2. Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>) 3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 4. <i>Global Cybersecurity Index</i>	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	- - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
S3. Terbangunnya <i>Eco-region</i> Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	5. Indeks Keamanan Laut Nasional 6. Indeks Ketahanan Pangan	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk	- Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan





Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	7. Prevalensi Ketidacukupan Pangan 8. Meningkatkan Produksi Pangan 9. Berkurangnya Impor Pangan 10. Nilai Tukar Petani Indeks Kesejahteraan Petani	swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	- - - Nilai Tukar Petani
S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	11. Indeks Ketahanan Energi 12. Pasokan Energi Primer 13. Konsumsi Energi Final per Kapita 14. Porsi EBT dalam Bauran Energi 15. Intensitas Energi Primer 16. Kapasitas Tampung Air per Kapita 17. Meningkatnya Air Minum Jaringan Perpipaan 18. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman 19. Menurunnya luas lahan kritis 20. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman 21. Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan Indeks Kualitas Infrastruktur
S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	22. Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (Peringkat GIEI) 23. Kontribusi PDB Syariah	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Inklusi Keuangan
S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	24. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB 25. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indeks Transformasi Digital Nasional
S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	26. Indeks Ekonomi Hijau 27. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 28. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) 29. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 30. Proporsi Tenaga Kerja Hijau 31. Tingkat Input Material Sirkular	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan
S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	32. Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru 33. Perlindungan Kawasan Perairan 34. Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan





Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur
	2. Wktu Tempuh pada Lintas Utama (Jam/100 Km)		
	3. Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan (%)		
	4. <i>On Time Performance</i> Udara (%)		
	5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)		
	6. Kondisi Jalur KA sesuai Standar (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)		
	7. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)		
	8. Indeks Pembangunan TIK Nasional		
	9. Konsumsi Listrik per Kapita (kwh)		
S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	10. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi
	11. Aset Perbankan/PDB (%)		Kapasitas Fiskal Daerah
	12. Aset Dana Pensiun/PDB (%)		Total Kredit/PDRB
	13. Aset Asuransi/PDB (%)		Inklusi Keuangan
	14. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
	15. Total Kredit/PDB (%)		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum
	16. Inklusi Keuangan (%)		Pembentukan Modal Tetap Bruto
S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	17. Rasio PDB Pariwisata (%)	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Rasio Kewirausahaan Daerah
	18. Devisa Pariwisata (Miliar USD)		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
	19. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		
S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	20. Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	
	21. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)		
	22. Rasio Kewirausahaan (%)		
S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	23. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun)	S4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun
	2. Harapan Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah





Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	3. Rata-rata nilai PISA a. Membaca b. Matematika c. Sains 4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional a. Literasi Membaca b. Numerasi 5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) 6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 8. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		
S15. Kesehatan untuk Semua	9. Usia Harapan Hidup (tahun)	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
	10. Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)		
	11. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
	12. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
	13. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	14. Prevalensi obesitas >18 tahun		
	15. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		
S16. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
	17. Indeks Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak
	18. Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
	19. Indeks Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender
	20. Indeks Pembangunan Gender	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial
	21. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)		
	22. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)		
S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	23. Peringkat Indeks Inovasi Global	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto Rasio Kewirausahaan Daerah
	24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	S14. Meningkatnya penerapan IPTEK, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah
	25. Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
	27. Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Olympic Games</i>		





Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	28. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games 29. Peringkat pada Asian Games 30. Peringkat pada Asian Para Games 31. Peringkat pada SEA Games 32. Peringkat pada ASEAN Para Games 33. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga (%)		
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	
S19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%) 3. Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per Kapita (Rp Juta) 4. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan (%)	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5. Biaya Logistik (%PDB) 6. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)	S7. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB) 8. Ekspor Barang dan Jasa (%PDB) 9. Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun) 10. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (%) 11. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	1. Tingkat Kemiskinan 2. Proporsi penduduk kelas menengah 3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal 4. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin
S23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	5. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan





Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	6. Persentase desa mandiri (%)	Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Desa
S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	7. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional		
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	1. Indeks Integritas Partai Politik 2. Indeks Pembangunan Hukum 3. Indeks Materi Hukum 4. Indeks Persepsi Korupsi 5. Indeks Integritas Nasional	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat
S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	6. Indeks Pelayanan Publik 7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 8. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	S16. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)
S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	9. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	10. Clearance rate tindak pidana judi 11. Clearance rate tindak pidana penyelundupan		
S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	12. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Kapasitas Fiskal Daerah
S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	13. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%) 14. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi
S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	15. Tingkat Inflasi (%)		
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
S33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	S2. Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
	3. Indeks Layanan Keagamaan		
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		Indeks Pembangunan Kebudayaan
	5. Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas		





Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana
	7. Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada empat sektor prioritas (kelautan&pesisir, air, pertanian dan kesehatan)		
	8. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana		

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Ket. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah menggunakan data Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029





4.2.3 Program Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 diimplementasikan melalui program prioritas dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan Jawa Barat. Program prioritas ditetapkan sebagai upaya transformasi pembangunan dengan melanjutkan Program Juara. Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 secara lengkap disajikan pada Lampiran II.

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada RKPD Tahun 2025 kedalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 kedalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	LANGKAH KELIMA: Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan
				3	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				4	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
				5	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional	LANGKAH KEENAM: Penanganan <i>stunting</i> dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup		8	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama		9	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				10	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				11	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				12	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				13	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				14	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				15	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				16	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	17	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				18	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	LANGKAH KETIGA: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem <i>boarding</i> , berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan- Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Bara.	19	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
				20	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				21	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
				22	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				23	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan
				24	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				25	Program Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				26	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesenjangan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	-	27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				28	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				30	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				31	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				32	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				33	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				35	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				36	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				37	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				38	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Anak dan Keluarga Berencana
2.	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	LANGKAH KEENAM: Penanganan <i>stunting</i> dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	39	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	-	42	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				43	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				44	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				45	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				46	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				47	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
				48	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	LANGKAH KEDUA: Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di Seluruh Wilayah Pertanian dan Ekosistem Pertanian Organik serta pengembangan benih dan bibit unggul melalui perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan	49	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (DTPH)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				50	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Disbun)	Dinas Perkebunan
				51	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (DKPP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				52	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (DTPH)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				53	Program Penyediaan dan Pengembangan	Dinas Perkebunan





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pembangunan bendung lapang, pembangunan cekdam/embung dan pompanisasi dengan tenaga surya		Prasarana Pertanian (Disbun)	
				54	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (DKPP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				55	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (DTPH)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				56	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Disbun)	Dinas Perkebunan
				57	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			LANGKAH KEENAM: Penanganan <i>stunting</i> dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	58	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				59	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				60	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				61	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				62	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
				63	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				64	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				65	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				66	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
				67	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				68	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	69	Program Penyuluhan Pertanian (Disbun)	Dinas Perkebunan	
			70	Program Penyuluhan Pertanian (DTPH)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			71	Program Penyuluhan Pertanian (DKPP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
		Program Peningkatan dan pemerataan investasi	LANGKAH KEEMPAT: Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong	72	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan. LANGKAH KETIGA: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem <i>boarding</i> , berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.	73	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				74	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				75	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				76	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				77	Program Kerja Sama Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				78	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				79	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				80	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				81	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				82	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		83	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		
		84	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		
		85	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		
		86	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		
		87	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		
		88	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		
		89	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		
		90	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif					





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan		91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				92	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				93	Program Perfilman Nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				94	Program Pengembangan Ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	-	95	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				96	Program BUMD Sehat	Sekretariat Daerah
				97	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
3.	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastuktur wilayah	LANGKAH PERTAMA: Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (<i>Open Defecation Free</i> /bebas buang air besar sembarangan) serta penataan saluran air dan drainase dalam rangka pencegahan banjir.	98	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				99	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				101	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				102	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
				103	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
				104	Program Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan
				105	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan dan Permukiman
				106	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				107	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Permukiman
				108	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				109	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dinas Perumahan dan Permukiman
				110	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Permukiman
111	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman				
112	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman				





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				113	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Dinas Perumahan dan Permukiman
				114	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman
				115	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan dan Permukiman
				116	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				117	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				118	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dinas Perumahan dan Permukiman
				119	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				120	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				121	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air
				122	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air
				123	Program Penetapan Tanah Ulayat	Dinas Perumahan dan Permukiman
				124	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan dan Permukiman
				125	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman
				126	Program Survei, Pengukuran dan Pemerataan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				127	Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				128	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	Dinas Perumahan dan Permukiman
				129	Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				130	Program Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
				131	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	LANGKAH KETUJUH: Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan			





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.	132	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				133	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				134	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal, dan hak MHA yang terakit dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim		135	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				136	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				137	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				138	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				139	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				140	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
				141	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				142	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
				143	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
				144	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Dinas Kehutanan
				145	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				146	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				147	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				148	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengurangan Risiko Bencana	LANGKAH KEDELAPAN: Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	149	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
				150	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
				151	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan dan Permukiman
			-	152	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				153	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				154	Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	-	155	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				156	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				157	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				158	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
				159	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
				160	Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	4. P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	-	161	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				162	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	-	163	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				164	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	LANGKAH KESEMBILAN: Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi	165	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				166	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				167	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional				





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			birokrasi berdampak.	168	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				169	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				170	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				171	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				172	Program Akreditasi dan Sertifikasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				173	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				174	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
				175	Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
				176	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
				177	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
				178	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				179	Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
				180	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				181	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				182	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				183	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				184	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
				185	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				186	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				187	Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat





No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				188	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				189	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				190	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				191	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				192	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
				193	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				194	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
				195	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Seluruh Perangkat Daerah

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

4.2.3.1 Penjabaran Prioritas Pembangunan Kedalam Program Priroutas dan Program Pembangunan Daerah

Penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 kedalam program prioritas dan program pembangunan daerah, disertai indikator kinerja program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggung jawab, dengan total pagu anggaran sebesar Rp19.936.106.680.400.-, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.15 sampai dengan Tabel 4.18 berikut.





Tabel 4.15

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	S1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,29	P1	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	L5. Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	342.796.196	Dinas Kesehatan
								2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		22.310.232.596	Dinas Kesehatan		
								P2	Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	691.520.166.510	Dinas Kesehatan
				b	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,14	P3	Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup	L6.Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan	4	Program Kesejahteraan Rakyat	203.689.638.577	Sekretariat Daerah
		S2	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	a	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	73,71	P4	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama		5	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	13.154.806.948	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	549.720.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											7	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.303.256.216	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				b	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,70				8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.061.572.365	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				9	Program Pengelolaan Permuseuman	3.366.074.864	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
				10	Program Pengembangan Kebudayaan	12.710.056.337	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
		S3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	a	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	56,50	P5	Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.053.159.733	Satuan Polisi Pamong Praja
		S4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	a	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Tahun	9,35	P6	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	LENGKAH KATILU Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai	12	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3.951.606.415	Dinas Pendidikan
				b	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84				13	Program Pengelolaan Pendidikan	5.743.653.731.417	Dinas Pendidikan
											14	Program Pembinaan Perpustakaan	1.328.845.531	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
											15	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	199.635.744	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		S5	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	a	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	62,51	P7	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat		16	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5.379.509.540	Dinas Pemuda dan Olahraga
											17	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	471.161.666.357	Dinas Pemuda dan Olahraga
											18	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
											19	PROGRAM PEMBINAAN	4.751.898.272,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan
		b	Indeks Pembangunan Kualitas	Poin	69,71									





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					Keluarga (IPKK)					dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.		KELUARGA BERENCANA (KB)		Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											20	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.399.350.490	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											21	Program Pengendalian Penduduk	123.465.340	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											22	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	273.742.107	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				c	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,465				23	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.637.321.491	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
									24		Program Perlindungan Perempuan	737.449.230	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
									25		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	360.031.288	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				d	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	71,95				26	Program Perlindungan Khusus Anak	684.784.163	Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
											27	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	353.412.238	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Total Pagu													Rp 7.203.306.031.695	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



Tabel 4.16

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	S6	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	a	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Poin	41,87 - 42,00	P8	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	L6. Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8.222.787.434	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				b	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	6,55				2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	107.693.029	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	150.450.998	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		S7	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	a	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	3,99	P9	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri		4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13.732.616.601	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	6.410.416.953	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											6	Program Pengembangan Ekspor	1.168.840.427	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	98.379.100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	345.835.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	236.449.034	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
											10	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.100.486.076	Sekretariat Daerah
											11	Program Pengembangan UMKM	30.427.144.289	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder					
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)					
		S8	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	a	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Poin	4,58	P10	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	L2. Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya.	12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	33.510.719.108	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
				b	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	1,69			L6. Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.									
																13	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	35.797.034.535	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
																14	Program Perizinan Usaha Pertanian	40.000.000	Dinas Perkebunan
																15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	13.837.195.560	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
																16	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.749.646.237	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
																17	Program Penanganan Kerawanan Pangan	330.462.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
																18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	7.125.694.112	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)
											Masyarakat Veteriner			
										19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.471.326.719	Dinas Kelautan dan Perikanan	
										20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	22.931.113.616	Dinas Kelautan dan Perikanan	
										21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.483.295.357	Dinas Kelautan dan Perikanan	
										22	Program Pengelolaan Hutan	24.658.875.702		
										23	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.698.195.425	Dinas Kelautan dan Perikanan	
										24	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.976.740.211	Dinas Kelautan dan Perikanan	
										c	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	112-117	P11
		S9	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	a	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	24,72	P12	Program Peningkatan dan pemerataan investasi	L4. Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan	26	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	247.930.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											27	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	163.361.705	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											28	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3.696.520.827	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											29	Program Promosi Penanaman Modal	772.153.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											30	Program Pelayanan Penanaman Modal	124.793.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				b	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,11	P13	Program Penciptaan Lapangan	L3. Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan	31	Program Perencanaan Tenaga Kerja	16.174.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.	32 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 33 Program Penempatan Tenaga Kerja 34 Program Pengawasan Ketenagakerjaan 35 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 36 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 37 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 38 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 39 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 40 Program Hubungan Industrial 41 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	17.932.052.775 5.778.587.185 1.177.183.138 667.601.441 479.626.108 177.112.497 1.756.386.205 911.687.535 1.084.251.195 2.371.307.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	S10	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	a Tingkat Inflasi b Inklusi Keuangan c Kapasitas Fiskal Daerah	Persen Persen Poin	3,3 - 3,8 94,22 1,44	P14 Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD		42 Program Perekonomian dan Pembangunan 43 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.222.787.434 31.234.916.583	Sekretariat Daerah Badan Pendapatan Daerah
	S11	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	a Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum b Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen Persen	3,15 22,81	P15 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan	L4. Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang	44 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 45 Program Pemasaran Pariwisata	2.835.193.439 4.809.278.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional			Berbasis Kearifan Lingkungan	industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan	46 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.571.888.014	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Total										Rp. 308.673.349.145	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



Tabel 4.17

**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Pada Prioritas 3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	S12	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	a	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	61,15	P16	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastuktur wilayah	L1. Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan).	1	Program Penyelenggaraan Jalan	2.241.930.251.384	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				b	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	56,95			L2. Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui				Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah	Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya.	2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 1.967.052.271 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.372.852.910 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 4 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 738.964.567.228 Dinas Perhubungan 5 Program Pengelolaan Pelayaran 11.243.640.151 Dinas Perhubungan 6 Program Pengelolaan Perkeretaapian 3.823.469.326 Dinas Perhubungan 7 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 147.862.998 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 28.996.515.008 Dinas Perumahan dan Permukiman 9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6.941.594.209 Dinas Perumahan dan Permukiman 10 Program penyelesaian sengketa tanah garapan 77.346.827 Dinas Perumahan dan Permukiman 11 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 197.592.759 Dinas Perumahan dan Permukiman 12 Program Penataan Bangunan Gedung 2.266.616.767 Dinas Perumahan dan Permukiman 13 Program Kawasan Permukiman 79.807.078.396 Dinas Perumahan dan Permukiman 14 Program Pengembangan Permukiman 0,00 Dinas Perumahan dan Permukiman		





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
											15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.993.256.542	Dinas Perumahan dan Permukiman
											16	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	264.698.078	Dinas Perumahan dan Permukiman
											17	Program Penatagunaan Tanah	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
											18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.783.985.074	Dinas Perumahan dan Permukiman
											19	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
											20	Program Pengembangan Perumahan	11.448.686.417	Dinas Perumahan dan Permukiman
											21	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	53.692.600	Dinas Perumahan dan Permukiman
											22	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	445.297.122.100,47	Dinas Sumber Daya Air
											23	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.967.052.271	Dinas Sumber Daya Air





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
														Dinas Sumber Daya Air
											24	Program Penetapan Tanah Ulayat		Dinas Perumahan dan Permukiman
											25	Program Pengelolaan Tanah Kosong		
				c	Indeks Desa	Poin	77,46	P17	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	L9. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.	26	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	9.795.044.593	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											27	Program Penataan Desa	146.873.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											28	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	34.415.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											29	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.795.044.593	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											30	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	638.838.948	Dinas Lingkungan Hidup
				d	Indeks Kualitas	Poin	64,06	P18	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan	L7. Mengembalikan kondisi	31	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.348.193.699	Dinas Lingkungan Hidup





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
				Lingkungan Hidup Daerah				Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.				Dinas Lingkungan Hidup
										32	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.686.068.979	Dinas Lingkungan Hidup
										33	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	638.838.948	Dinas Lingkungan Hidup
										34	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1.956.592.146	Dinas Lingkungan Hidup
										35	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	623.335.261	Dinas Lingkungan Hidup
										36	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.908.439.750	Dinas Lingkungan Hidup
										37	Program Pengelolaan Hutan	24.658.875.702	Dinas Kehutanan
										38	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	93.000.824	Dinas Kehutanan
										39	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	97.995.695	Dinas Kehutanan
										40	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan	6.278.524.751	Dinas Kehutanan





NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
										L8. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).		Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
											43	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	138.273.050	Dinas Lingkungan Hidup
											44	Program Pengelolaan Persampahan	116.316.799.271	Dinas Lingkungan Hidup
											45	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	25.457.899.823	Dinas Perumahan dan Permukiman
				e	Persentase Penurunan Emisi GRK						41	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	6.630.416.890	
					a. Kumulatif	Persen	2,66				42	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	300.588.980.350	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					b. Tahunan	Persen	9,27							Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				f	Indeks Risiko Bencana	Poin	109,18	P19	Program Pengurangan Risiko Bencana		33	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2.970.611.370	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
											34	Program Penanggulangan Bencana	13.219.470.471	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
											35	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	656.765.569	Badan Penanggulangan Bencana Daerah





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
											36	Program Penanganan Bencana	6.243.242.378	Dinas Sosial
		S13	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	a	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,85 - 6,46	P20	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)		48	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	962.307.629	Dinas Sosial
											49	Program Pemberdayaan Sosial	4.631.259.690	Dinas Sosial
											50	Program Rehabilitasi Sosial	30.967.723.174	Dinas Sosial
Total Pagu												Rp. 3.715.731.642.770		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



Tabel 4.18

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah, serta Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pada Prioritas 4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	S14	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	a	Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,28	P21	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah		1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.163.329.698,80	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		S15	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	a	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	86,03	P22	Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan		2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	16.239.856.901,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
											3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	415.252.556.792,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		S16	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	a	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	Poin	86,45	P23	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	L9. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.829.523.887,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Program Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional		5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	119.223.317.684,44	Dinas Komunikasi dan Informatika
									6		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	16.403.016.295,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
									7		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	1.611.424.238,01	Dinas Komunikasi dan Informatika	





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
										kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.	8	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.402.280.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
											9	Program Pengelolaan Arsip	194.676.787,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
											10	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	148.749.582,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
											11	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	194.676.787,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
											12	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	7.157.803.910,00	Sekretariat Daerah
											13	Program Penataan Organisasi	818.744.108,00	Sekretariat Daerah
											14	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	2.122.061.303,52	Sekretariat Daerah
											15	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	137.034.875,00	Sekretariat Daerah
											16	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	304.392.215.721,00	Sekretariat DPRD
											17	Program Pelayanan Penghubung	916.022.964,00	Badan Penghubung
											18	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.391.215.848,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											19	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi	6.795.868.622,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

A040B8A293



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Program Prioritas Daerah		Program Strategis Gubernur	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)
												Pembangunan Daerah		
											20	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.729.642.784.286,94	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
											21	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.529.844.215,36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
											22	Program Kepegawaian Daerah	11.575.905.820,88	Badan Kepegawaian Daerah
											23	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.207.216.456,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											24	Program Penyelenggaraan Pengawasan	38.409.907.921,56	Inspektorat Daerah
											25	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.635.621.982,00	Inspektorat Daerah
Total Pagu												Rp. 8.708.395.656.789		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



4.2.4 Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional dalam Tahun 2025

Dalam rangka penyelerasan pembangunan di Provinsi Jawa Barat maka dilakukan persandingan yang menunjukkan dukungan Program Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 serta Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025 yang disajikan pada tabel berikut.





Tabel 4.19
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4	5
1	Memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia	1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		2. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
1	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
		Lanjutan Pembangunan pembangkit listrik tenaga <i>air Pumped Storage Upper</i> Cisokan	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		Fasilitasi <i>business matchmaking startup</i> digital	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Fasilitasi <i>digital technopreneur</i>	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan UMKM
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	Peningkatan kualitas lingkungan	Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah <i>reduce-reuse-recycle</i> , atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cirebon	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka di Kab. Bandung		Program Pengelolaan Persampahan
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota berupa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak di Kabupaten Ciamis		Program Pengelolaan Persampahan Regional
3	Swasembada pangan, energi, dan air	Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan		Program Pengelolaan Persampahan





No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur		P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun pada sistem penyediaan air minum perkotaan Majalengka	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada sistem penyediaan air minum Kota Cimahi		
		Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Palabuhanratu		
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada Bendung Cariang di Kabupaten Sumedang		
		Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Patimban		
		Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu pada tempat pemrosesan akhir eksisting di Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Persampahan
		Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis		
		Pengembangan sentra cabai pada Kawasan Aneka Cabai di Kabupaten Bandung		
		Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Sukabumi		
		Pengembangan Kertajati <i>Aerocity</i>		Program Pengelolaan Penerbangan





No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
		Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Penyelenggaraan Jalan
		Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pembangunan instalasi pengolahan air tahap II Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Penuntasan Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Modernisasi Daerah Irigasi Rentang		
		Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan Embung Ranca Hilir di Kabupaten Subang	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Layanan perencanaan dan pengawasan teknik berupa pembangunan <i>Fly Over</i> di Lemah Abang Kabupaten Bekasi		Program Penyelenggaraan Jalan
		Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan		
		Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian pada Kereta Api Cipatat-Togog Apu-Padalarang di Kabupaten Bandung Barat		Program Pengelolaan Perkeretaapian
		Pembangunan jalan strategis (padat karya) berupa perbaikan pedestrian dan drainase pada jalan nasional di Kota Bogor		Program Penyelenggaraan Jalan





No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun berupa penanganan tanggul kritis Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku		Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Penurunan kematian ibu dan bayi		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	Pembangunan kualitas keluarga		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (<i>taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal</i>) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat		Program Pengelolaan Pendidikan
		Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Garut, Ciamis, Indramayu, dan Cirebon; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Perlindungan Perempuan
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi riset sains (<i>science</i>), teknologi (<i>technology</i>), teknik (<i>engineering</i>),		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				Program Perlindungan Khusus Anak
				Program Pengelolaan Pendidikan





No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
		seni (<i>art</i>), dan matematika (<i>mathematics</i>) unggulan bertaraf internasional pada Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “ <i>Promoting Research and Innovation Though Modern and Efficient STP Project</i> ” (PRIME STeP) Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sains (<i>science</i>), teknologi (<i>technology</i>), teknik (<i>engineering</i>), seni (<i>art</i>), dan matematika (<i>mathematics</i>) unggulan di tingkat regional pada Universitas Singaperbangsa Karawang Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Fasilitasi literasi digital Digital Pembangunan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN) di Kota Depok		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Kesejahteraan Rakyat
1	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar Hilirisasi industri tembaga dan bauksit Hilirisasi industri kelapa dan karet	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional	Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi Pengembangan industri alat angkut termasuk <i>electric vehicle</i> dan kedingantaraan Pengembangan industri elektronik dan digital Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3	Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.	Pembangunan Pelabuhan Patimban		Program Pengelolaan Pelayaran
1	Pemerataan ekonomi	Pembangunan rumah susun sederhana sewa masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Bandung (<i>Bus Rapid Transit</i> Bandung Raya, Elektrifikasi Kereta Api Komuter Bandung)	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengembangan Perumahan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Perkeretaapian





No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
		Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh Pembangunan jalan bebas hambatan berupa pembebasan lahan untuk pembangunan <i>Fly Over</i> Kiaracondong-Buahbatu di Kota Bandung Pembangunan <i>Area Traffic Control System/Intelligent Transportation System</i> berupa penyediaan angkutan umum massal perkotaan <i>Bus Rapid Transit</i> di Bandung Raya Pembangunan baru kawasan permukiman berupa rumah susun khusus masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung		Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengembangan Perumahan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	Membangun <i>Single Identity Number</i> dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu	Reviu dan penyusunan pengaturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
1	Melestarikan budaya	Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di Cagar Budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Program pengelolaan permuseuman Program pengembangan kebudayaan
2	Penanganan bencana	Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara di kota metropolitan Bandung Pengamanan Pantai Eretan dan Kabupaten Cirebon	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
				Program Penanganan Bencana
3	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



4.2.4.1 Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2025

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2025 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital, disajikan dalam subbab ini. RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah tahun 2025 agar target-target pembangunan baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan pada RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.20
Keterkaitan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan ●Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi ●Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial





Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. •Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. •Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	6. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 8. Program Pengelolaan Kota Administrasi 9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 10. Program Penempatan Tenaga Kerja 11. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 12. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 13. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 14. Program Perlindungan Khusus Anak 15. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 16. Program Penanganan Bencana 17. Program Penanggulangan Bencana 18. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 19. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 20. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 21. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 22. Program Perizinan Usaha Pertanian
Goal 2 Tanpa Kelaparan •Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. •Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. •Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan <i>input</i> lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 9. Program Perizinan Usaha Pertanian 10. Program Penyuluhan Pertanian 11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 13. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 15. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya





Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
•Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. •Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	
Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera •Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup •Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. •Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. •Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. •Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. •Target 3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Rehabilitasi Sosial 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)





Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
•Target 3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. •Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
Goal 4 Pendidikan Berkualitas •Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. •Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. •Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. •Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. •Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Goal 5 Kesenjangan Gender •Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. •Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di	1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Perlindungan Perempuan 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga





Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. •Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. •Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak •Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua •Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan •Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. •Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau •Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. •Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. •Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi •Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam





Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. •Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. •Persentase akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke layanan keuangan •Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. •Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. •Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Pengembangan UMKM 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 6. Program Penempatan Tenaga Kerja 7. Program Pengembangan Kebudayaan 8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman 10. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 11. Program Pemasaran Pariwisata 12. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 14. Program Perekonomian dan Pembangunan
Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur •Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. •Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. •Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4. Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) 5. Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Program Pengembangan Aplikasi Informatika





Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.	
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan - Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. - Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	- Program Kesejahteraan Rakyat - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah - Program Hubungan Industrial - Program Penanganan Bencana - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
Goal 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan - Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. - Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. - Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan - Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	- Program Kawasan Permukiman - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Kesejahteraan Rakyat - Program Pengembangan Perumahan - Program Pelayanan Penghubung - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Penanggulangan Becana - Program Pencegahan, Penganggulan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. - Program penangan bencana - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab - Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. - Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)





Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. •Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim •Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. •Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Penanganan Bencana
Goal 14 Ekosistem Lautan •Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. •Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. •Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4. Program Pengaturan pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau ***** 5. Program Perencanaan Lingkungan hidup 6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil
Goal 15 Ekosistem Daratan •Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. •Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. •Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat	1. Program Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengelolaan Hutan 5. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya





Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
penting bagi pembangunan berkelanjutan. •Target 15.9 Pada tahun 2021, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. •Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh •Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. •Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. •Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. •Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	1. Program Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perlindungan Khusus Anak 3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4. Program Pengkuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 5. Program Penataan Organisasi
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan •Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Program Penataan Organisasi 4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 7. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Aspek III : Gender Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan





Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	
Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital 1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (<i>local knowledge</i>), kearifan lokal (<i>local wisdom</i>), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas 2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	 1. Program Penataan Desa 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pembinaan Sejarah 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2023

4.2.5 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang.

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, meliputi:

1. Pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan (WP) dengan ketetapan kawasan yang dikendalikan perkembangannya, kawasan yang didorong perkembangannya, kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
2. Pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;





4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung;.
5. Pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Nasional;
6. Pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
7. Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
8. Pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) pertahanan dan keamanan.

Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
 - a. Menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur- Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
 - b. Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
 - c. Meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.





2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. Meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
 - b. Mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
 - c. Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
 - d. Meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - e. Menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - f. Pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah Selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi meliputi:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
 - b. Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan





- terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
- c. Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
 - d. Mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
 - e. Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
 - f. Mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
 - g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
 - h. Mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah Timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
 - i. Mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
 - j. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
 - k. Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:





- a. Meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
 - b. Membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
 - d. Mempertahankan lokasi kawasan ekosistem esensial;
 - e. Mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung Hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
 - g. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - h. Mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
 - i. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - j. Meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30 persen dari luas DAS;
 - k. Mempertahankan dan meningkatkan kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - l. Mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
- a. Mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;





- b. Mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir Pantai Utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
 - c. Melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
 - d. Merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 - e. Memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
 - f. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi wilayah; dan
 - g. Pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30 persen dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.
6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
 - a. Merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b. Mengembangkan kegiatan ekonomi wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - c. Pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
 - d. Mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
 - e. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada tanah timbul melalui pengaturan pola ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di





wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

- a. Meningkatkan ekonomi wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b. Menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
 - c. Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
 - d. Mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi kawasan terjaga; dan
 - b. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan Budi Daya terbangun; dan
 - c. Strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

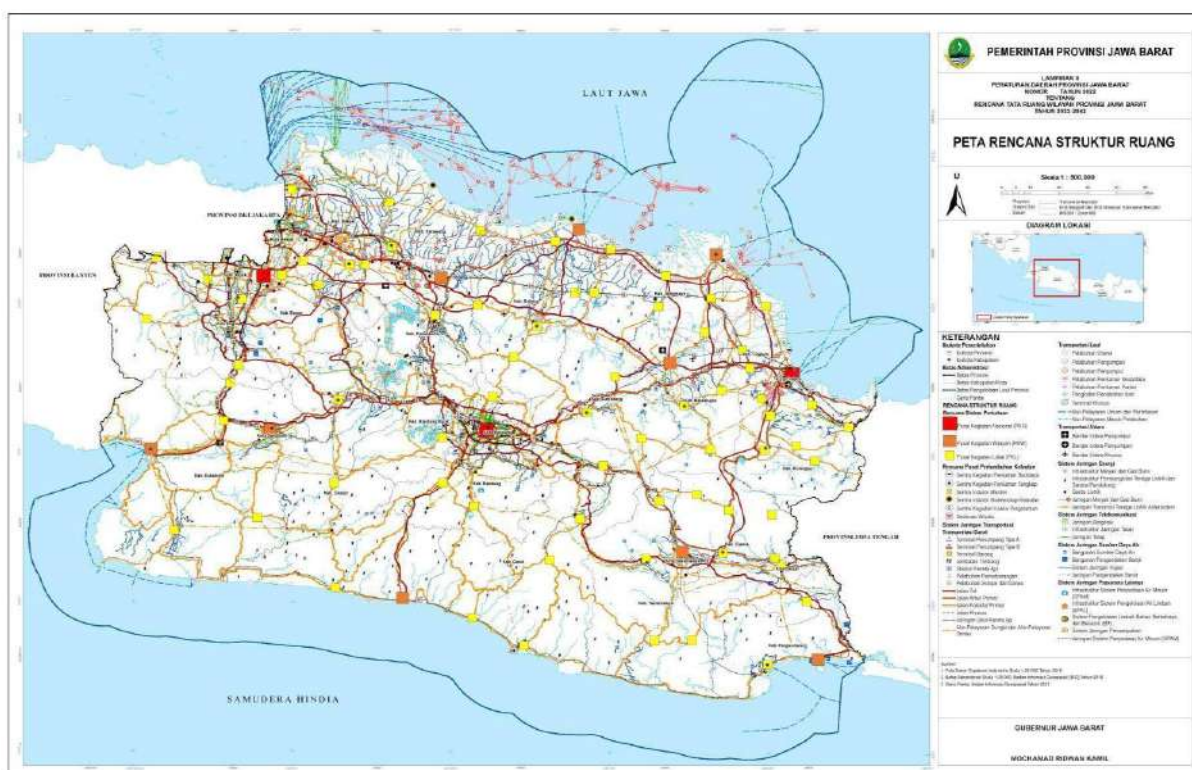
a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Struktur ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara



hierarkis memiliki hubungan fungsional. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, penetapan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem dan jaringan prasarana lainnya.

Gambar 4.10
Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber: Perda No.9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, penetapan rencana pola ruang wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dimana berdasarkan kebijakan dan strategi terkait pola ruang dalam peraturan daerah tersebut adanya target tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari wilayah daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042, sedangkan untuk kawasan budidaya





relatif tidak mengalami perubahan secara kontekstual, karena pada dasarnya perubahan di dalam kawasan budidaya selama sesuai dengan karakteristik, daya dukung, dan daya tampung wilayahnya tetap dikembangkan.

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung provinsi meliputi upaya:

- (a) Menetapkan kawasan lindung provinsi meliputi kawasan lindung dalam kawasan hutan (terdiri atas hutan konservasi dan hutan lindung) serta kawasan lindung di luar kawasan hutan (terdiri atas kawasan yang menunjang fungsi lindung di wilayah darat);
- (b) Mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);
- (c) Mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
- (d) Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, maka penentuan rencana kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Kawasan hutan yang menjadi kawasan lindung yakni kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi bersumber dari Surat Keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 9404 Tahun 2019. Pada tahun 2021 Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kawasan Hutan yang digunakan sebagai dasar deleniasi Pola Ruang, menggunakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2021 tentang





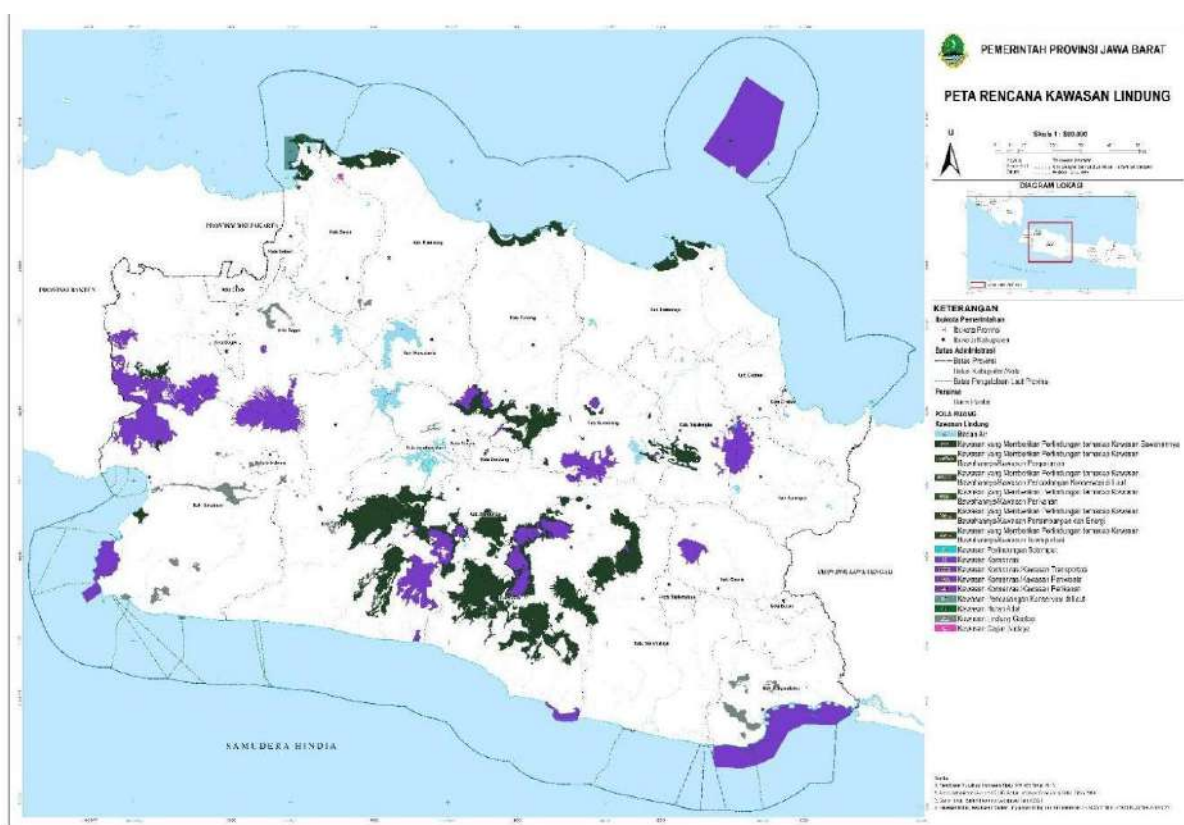
Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2020;

- 2) Kawasan hutan pangongan dengan luas 7.286,08 Ha dan kawasan hutan cadangan 29.075,13 Ha;
- 3) Kawasan Hutan adat Leuweng Gede yang sejatinya merupakan hutan larangan yang dijaga dengan aturan-aturan adat.
- 4) Kawasan resapan air merupakan kawasan imbuhan air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- 5) Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 dengan luas 15.999 Ha.
- 6) Kawasan Lindung Geologi bersumber data dari Direktorat Geologi hasil penyelidikan sampai dengan, Badan Geologi tahun 2018.
- 7) Kawasan Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan danau/waduk.
 - (a) Sempadan sungai tidak bertanggung bukan kawasan perkotaan
 - (b) Sempadan danau/waduk sebesar 50 meter
 - (c) Sempadan pantai sebesar 100 meter
- 8) Kawasan rawan bencana alam berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG, 2016) dan BNPB Provinsi Jawa Barat tahun 2016 terdiri atas: Kawasan Bahaya Gunung api, Gerakan tanah, rawan tsunami, dan sesar aktif.
- 9) Kawasan cagar budaya;
- 10) Kawasan lindung berdasarkan RZWP3K Provinsi (Revisi Revisi Materi Teknis Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 Tahun 2021, versi November 2021)
- 11) Hasil sinkronisasi antar RTR secara hierarkis dengan:
 - (a) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN



- (b) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018
- (c) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Gambar 4.11
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung
Provinsi Jawa Barat



Sumber: Perda Nomor 9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

2. Kawasan Peruntukan Budidaya

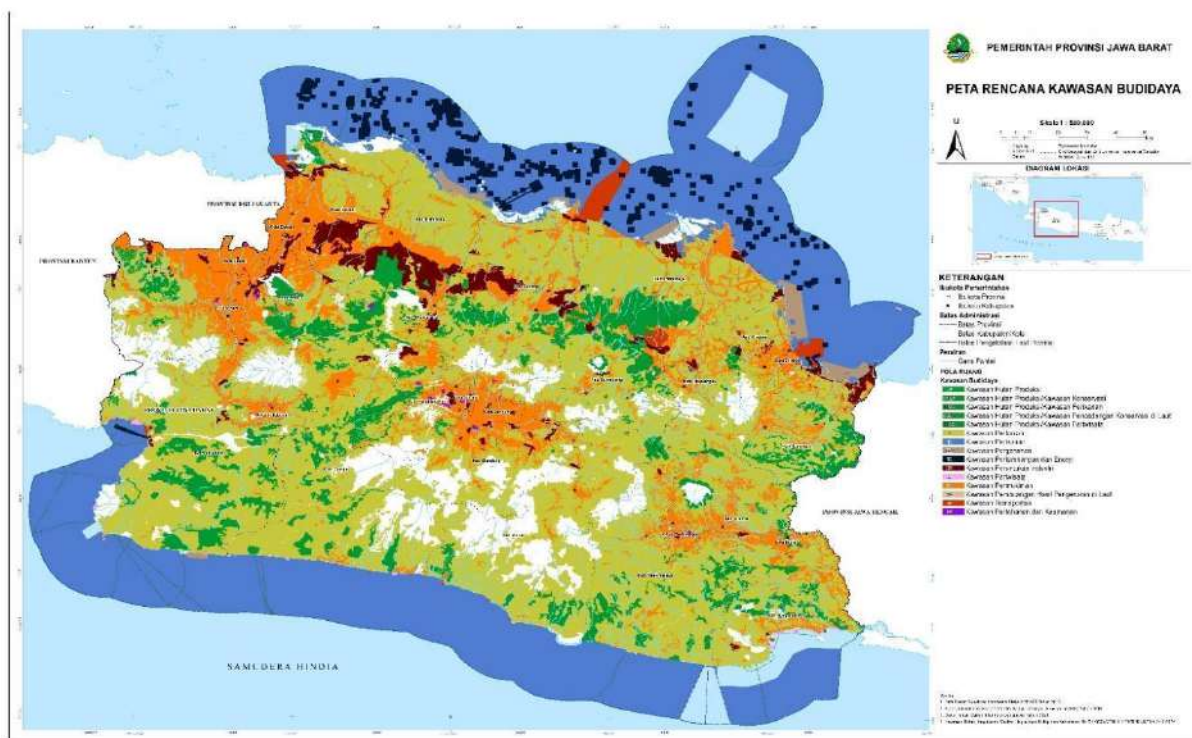
Kawasan peruntukan budi daya adalah kawasan peruntukan budi daya yang dipandang sangat penting/strategis menurut peraturan perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi, secara administrasi bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas Kawasan Hutan Produksi (Hp); Kawasan Pertanian (P); Kawasan Perikanan (IK); Kawasan Pergaraman (KEG);





Kawasan Pertambangan dan Energi (TE); Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Kawasan Pariwisata (W); Kawasan Permukiman (PM); Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA); Kawasan Transportasi (TR); dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK). Kawasan peruntukan budidaya disesuaikan dengan perkembangan karakteristik struktur dan pola ruang yang terjadi. Selain itu pengaruh perubahan iklim dan karakteristik eksternal mewarnai pola ruang yang direncanakan. Perubahan karakteristik pola ruang yang terjadi antara lain berkaitan dengan persoalan, isu dan tantangan dalam mewujudkan pola ruang yang modern berbasis teknologi informasi, berkelanjutan, inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, mendorong terwujudnya ketahanan energi, adaptif terhadap bencana, mendorong terwujudnya ketahanan pangan, serta kompetitif dan membuka ruang investasi namun tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Gambar 4.12
Peta Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya Provinsi Jawa Barat



Sumber: Perda Nomor 9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung dan budidaya tercantum dalam Peta Pola Ruang RTRW





Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 yang menampilkan dominasi ruang dalam skala peta provinsi (1:250.000).

Kawasan lindung berupa delineasi badan air, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, dan kawasan cagar budaya.

c. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Hasil evaluasi KSP di Provinsi Jawa Barat ditetapkan 5 (lima) KSP dari 24 KSP sebelumnya, maka rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dalam revisi RTRWP Jawa Barat Tahun 2022-2042 terdiri dari beberapa sudut kepentingan. Tabel dan gambar berikut di bawah ini menyajikan Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Tabel 4.21
Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Kriteria
1	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	KSP Bandung Utara	- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian - Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro - Memiliki pusat kegiatan pada Kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam
2	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Sukabumi Bagian Selatan dsk	- Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi - Memiliki potensi ekspor - Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap



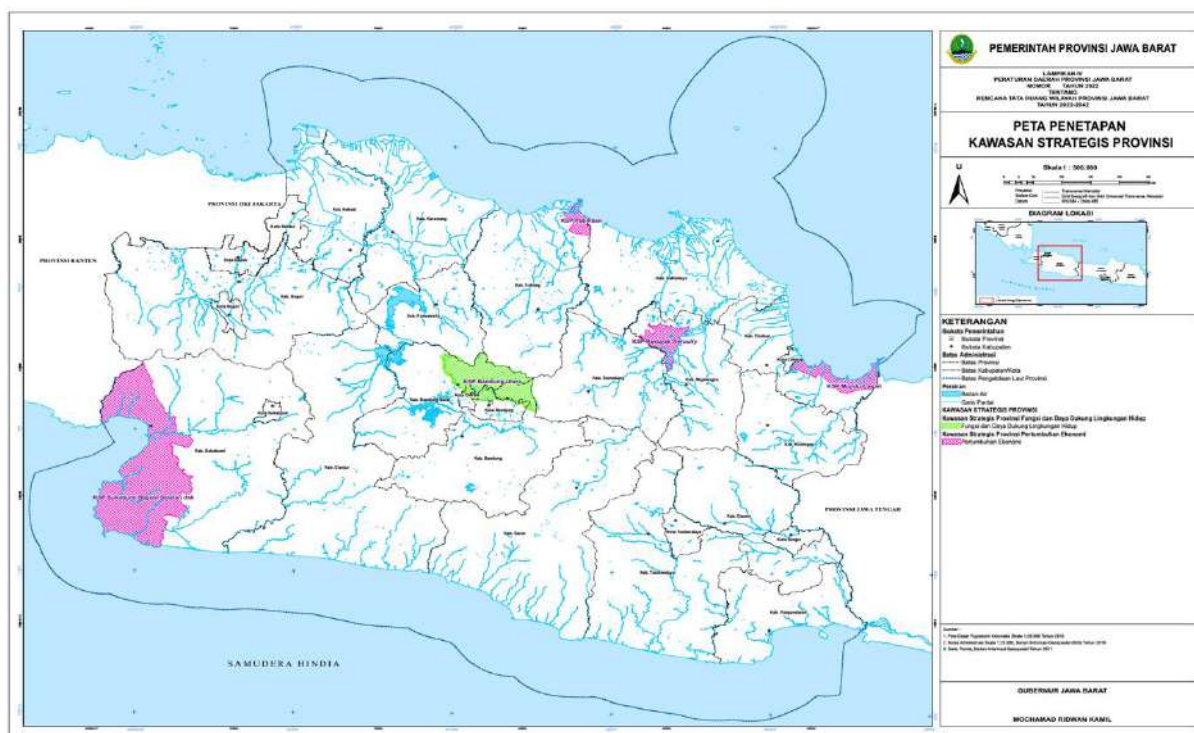


No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Kriteria
			sektor dan pengembangan wilayah ▪ Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
3	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Aerocity-Kertajati	▪ Keberadaan BIJB sebagai bandar udara internasional; ▪ Potensi peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui kegiatan distribusi logistik; ▪ Potensi pengembangan kawasan tematik pendukung dan penghubung Aerocity; ▪ Keberadaan BUMD Provinsi Jawa Barat yang dapat diarahkan sebagai pengelola kawasan; ▪ Penetapan kawasan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam rencana struktur ruang (Bersama Kadipaten).
4	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Patimban	▪ Keberadaan Pelabuhan Utama Patimban yang merupakan Pelabuhan internasional; ▪ Potensi peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kegiatan ekspor-impor dan distribusi logistik; ▪ Potensi pengembangan kawasan untuk mendukung kawasan industri di sekitarnya; ▪ Penetapan kawasan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam rencana struktur ruang;
5	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Mundu - Losari	▪ Pengembangan kawasan yang dapat mendukung percepatan peningkatan daya saing ekonomi kawasan; ▪ Peningkatan konektivitas antar kawasan, terutama menuju simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; ▪ Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik; ▪ Melindungi kawasan pesisir dan pantai serta kawasan lainnya yang berfungsi lindung; ▪ Menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; ▪ Peningkatan kerja sama antarwilayah (Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah)

Sumber: Perda Nomor 9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



Gambar 4.13
Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat



Sumber: Perda Nomor 9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

4.2.6 Kebijakan Kerjasama Perbatasan

Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi yang berbatasan langsung adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan antar daerah. Perangkat Daerah berkomitmen untuk merencanakan, mengawal dan melaksanakan rencana kegiatan kerja sama pembangunan Jawa Barat sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Hubungan kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dengan daerah-daerah perbatasan, yakni Banten dan Daerah Khusus Jakarta, terus ditingkatkan dan diselaraskan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam urusan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Persoalan mendasar lainnya yang membutuhkan kerja sama antar daerah perbatasan adalah kualitas infrastruktur jalan dalam upaya konektivitas jalur perbatasan yang lebih memadai untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik. Kerja sama perbatasan akan mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah perbatasan sesuai dengan potensi yang dimiliki baik Banten, Daerah



Khusus Jakarta maupun Jawa Barat yang sangat melimpah dan saling membutuhkan satu sama lain.

a. Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan di Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

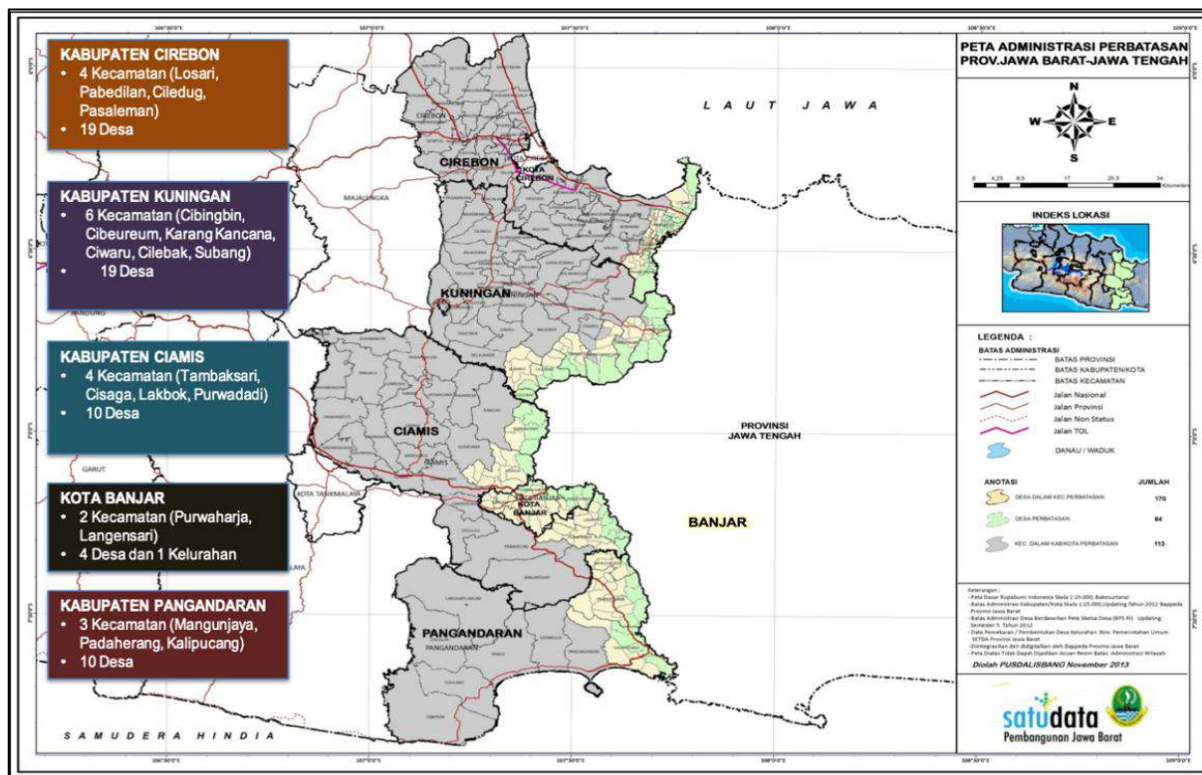
Objek kerja sama yaitu pembangunan daerah yang berbatasan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di daerah yang berbatasan, dengan ruang lingkup meliputi: Pemerintahan; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perhubungan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; dan Perindustrian dan Perdagangan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada gambar berikut.





Gambar 4.14
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2022

b. Perbatasan Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Urusan Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta difokuskan pada pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dengan ruang lingkup meliputi urusan: Kesehatan; Pendidikan; Sosial; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Perumahan dan Permukiman; Pariwisata; Koperasi dan Usaha Kecil; Perdagangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Perhubungan; Pekerjaan Umum; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perencanaan; dan Kebudayaan.

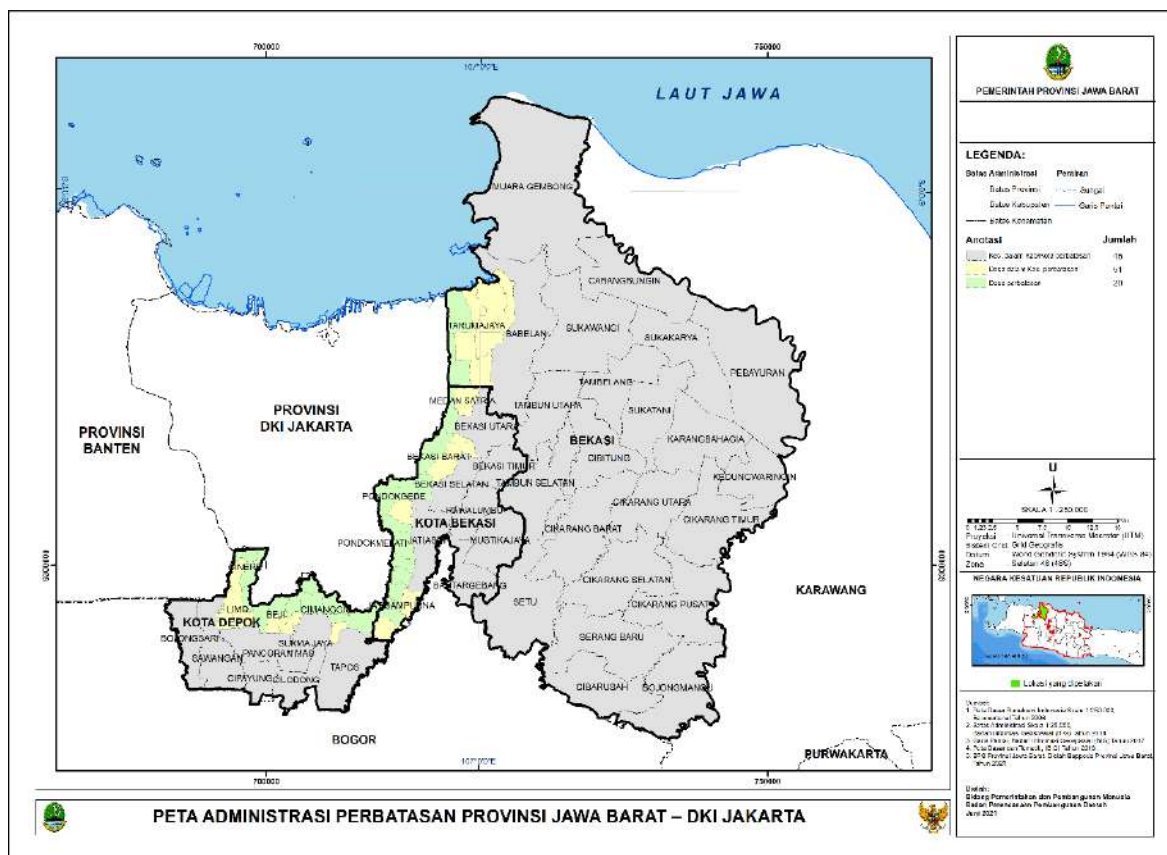
Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Peta wilayah





perbatasan Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.15
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Daerah Khusus Jakarta



Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

c. Perbatasan Jawa Barat dan Banten

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024. Dalam pelaksanaannya terdapat 18 (delapan belas) urusan kerjasama pembangunan antara Jawa Barat-Banten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni Tahun 2021-2024, meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, trantibumlinmas, perumahan dan permukiman, pariwisata, KUK, perdagangan, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta perencanaan.

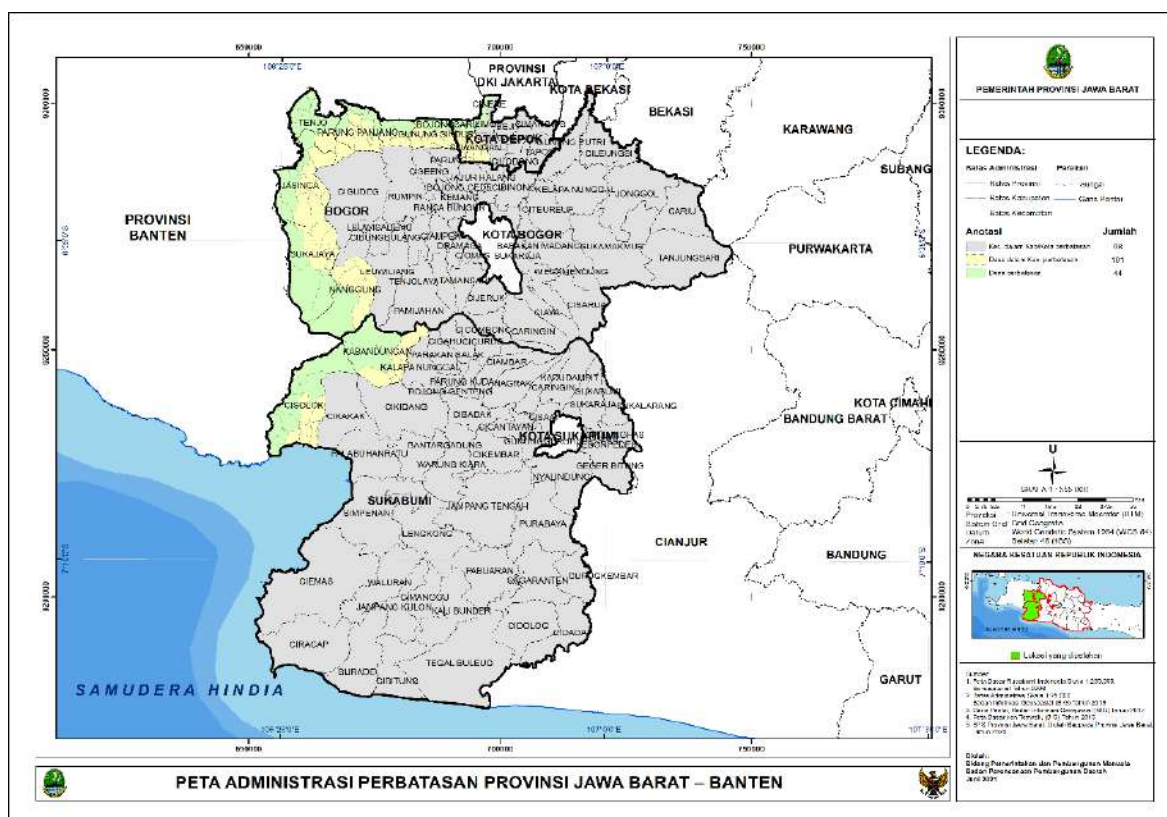
Lingkup kabupaten/kota yang berbatasan yaitu Kota Tangerang Selatan dengan Depok dan Bogor, Kabupaten Tangerang dengan





Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak dengan Sukabumi. Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.16
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Banten



Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang dituangkan dalam bab ini meliputi perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang diwujudkan dalam serangkaian pergeseran dan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyesuaian indikator kinerja program. Perubahan rencana program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Perubahan rencana program dan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025 ini prinsipnya tetap mengacu terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait Nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, *output* dan *outcome*, namun dilakukan penyesuaian terhadap target indikator program dan kegiatan serta pembiayaan.

Adapun penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam perubahan RKPD terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyesuaian program dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2025-2029, terutama pada program realokasi tahun 2025 dengan memasukan program dan kegiatan prioritas Gubernur terpilih di tahun 2025 yaitu penyiapan infrastruktur dasar dan penguatan fondasi





- pembangunan yang terfokus pada penyediaan infrastruktur layanan dasar beserta antisipasi dampak sosial dari pelaksanaan pembangunan;
- b. Kesesuaian dengan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 - c. Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
 - e. Upaya menjamin pencapaian target indikator kinerja program; dan
 - f. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025.

5.1 Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025

Pergeseran pertama APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 19 Februari 2025. Hal-hal yang diatur dan berkaitan dengan pergeseran tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan atas pemenuhan standar baku mutu dalam pengelolaan instalasi pengolahan air limbah tempat pengolahan kompos Sarimukti dan mencegah penutupan pelayanan sampah di wilayah Bandung Raya, penanganan kawasan kumuh, serta dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap belanja pada perangkat daerah terkait.

Pergeseran kedua APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 10 Maret 2025. Hal-hal yang diatur dan berkaitan dengan pergeseran tersebut dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025 serta penanganan dampak bencana banjir di Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan alokasi anggaran melalui pergeseran dari belanja





tidak terduga ke belanja bantuan keuangan dan belanja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi penanggulangan bencana.

Pergeseran ketiga APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 20 Maret 2025. Hal-hal yang diatur dan berkaitan dengan pergeseran tersebut dalam rangka implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu pada pergeseran ketiga dalam rangka menyelaraskan dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan Program Kepala Daerah terpilih pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, serta mensinergikan program Asta Cita Presiden dan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional.

Pergeseran keempat APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Hal-hal yang diatur dan berkaitan dengan pergeseran tersebut untuk mendanai penerapan teknologi operasi modifikasi cuaca dalam upaya mencegah potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Barat, perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga ke belanja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi penanggulangan bencana.

Pergeseran kelima APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 16 April 2025. Hal-hal yang diatur dan berkaitan dengan pergeseran tersebut untuk memenuhi kebutuhan





pembiayaan pendampingan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, pembiayaan untuk pemenuhan kekurangan belanja bersifat mengikat, serta penyesuaian penandaan sumber dana belanja wajib yang bersumber dari pajak daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.

Pergeseran keenam APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 8 Mei 2025. Hal-hal yang diatur dan berkaitan dengan pergeseran tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada kegiatan bela negara, serta pembiayaan untuk pemenuhan kekurangan belanja bersifat mengikat, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.

Pergeseran ketujuh APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 19 Mei 2025. Hal-hal yang diatur dan berkaitan dengan pergeseran tersebut untuk Penyesuaian rekening belanja pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pemenuhan honorarium Instansi Vertikal, Dinas Pendidikan dan Biro Umum untuk penyelenggaraan Upacara Kebangkitan Nasional, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk pemenuhan dukungan pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.

Pergeseran kedelapan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 2 Juni 2025. Hal-hal yang diatur dan berkaitan dengan pergeseran tersebut untuk Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dalam jumlah yang cukup antara lain pemenuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan





Perjanjian Kerja, serta kegiatan prioritas lainnya, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.

Berdasarkan kronologis pergeseran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 yang telah dijelaskan tersebut, berikut ini disampaikan tabel rekapitulasi anggaran perangkat daerah pada pergeseran I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII pada APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:



A040B8A293



Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Pergeseran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII pada APBD Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	Penetapan APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 1 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 2 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 3 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 4 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 5 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 6 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 7 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 8 APBD TA. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	PENDAPATAN DAERAH	30.998.963.018.931	30.998.963.018.931	30.998.963.018.931	30.829.409.187.931	30.829.409.187.931	30.829.409.187.931	30.829.409.187.931	30.829.409.187.931	30.829.409.187.931
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631
4.1.01	Pajak Daerah	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809	17.500.724.356.809
4.1.02	Retribusi Daerah	864.654.997.997	864.654.997.997	864.654.997.997	864.654.997.997	864.654.997.997	864.654.997.997	864.654.997.997	864.654.997.997	864.654.997.997
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	410.640.579.501	410.640.579.501	410.640.579.501	410.640.579.501	410.640.579.501	410.640.579.501	410.640.579.501	410.640.579.501	410.640.579.501
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	531.765.126.324	531.765.126.324	531.765.126.324	531.765.126.324	531.765.126.324	531.765.126.324	531.765.126.324	531.765.126.324	531.765.126.324
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.667.983.182.300	11.667.983.182.300	11.667.983.182.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.667.983.182.300	11.667.983.182.300	11.667.983.182.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300	11.498.429.351.300
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000	23.194.776.000
5	BELANJA	31.075.544.907.123	31.075.544.907.123	31.075.544.907.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123
5.1	BELANJA OPERASI	20.160.050.586.717	20.160.050.586.717	20.163.583.786.717	19.417.322.246.664	19.418.686.646.664	19.418.686.646.664	19.418.686.646.664	19.418.686.646.664	19.418.686.646.664
5.1.01	Belanja Pegawai	9.114.143.199.597	9.114.143.199.597	9.114.143.199.597	9.113.313.015.398	9.113.313.015.398	9.113.313.015.398	9.113.313.015.398	9.113.313.015.398	9.113.313.015.398
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.568.806.949.567	7.568.806.949.567	7.572.340.149.567	7.118.081.496.712	7.119.445.896.712	7.119.445.896.712	7.119.445.896.712	7.119.445.896.712	7.119.445.896.712
5.1.04	Belanja Subsidi	161.341.421.779	161.341.421.779	161.341.421.779	159.341.421.779	159.341.421.779	159.341.421.779	159.341.421.779	159.341.421.779	159.341.421.779
5.1.05	Belanja Hibah	3.281.692.265.774	3.281.692.265.774	3.281.692.265.774	2.992.519.562.775	2.992.519.562.775	2.992.519.562.775	2.992.519.562.775	2.992.519.562.775	2.992.519.562.775
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	34.066.750.000	34.066.750.000	34.066.750.000	34.066.750.000	34.066.750.000	34.066.750.000	34.066.750.000	34.066.750.000	34.066.750.000
5.2	BELANJA MODAL	1.769.776.812.928	1.769.776.812.928	1.769.776.812.928	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

KODE	URAIAN	Penetapan APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 1 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 2 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 3 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 4 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 5 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 6 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 7 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 8 APBD TA. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.2.01	Belanja Modal	1.769.776.812.928	1.769.776.812.928	1.769.776.812.928	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057	4.176.567.377.057
5.2.01	Belanja Modal Tanah	23.895.774.005	23.895.774.005	23.895.774.005	68.942.616.495	68.942.616.495	68.942.616.495	68.942.616.495	68.942.616.495	68.942.616.495
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	813.268.419.070	813.268.419.070	813.268.419.070	746.243.967.260	746.243.967.260	746.243.967.260	746.243.967.260	746.243.967.260	746.243.967.260
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.723.784.378	299.723.784.378	299.723.784.378	1.242.628.560.301	1.242.628.560.301	1.242.628.560.301	1.242.628.560.301	1.242.628.560.301	1.242.628.560.301
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	480.722.788.307	480.722.788.307	480.722.788.307	1.964.902.600.632	1.964.902.600.632	1.964.902.600.632	1.964.902.600.632	1.964.902.600.632	1.964.902.600.632
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	151.840.243.168	151.840.243.168	151.840.243.168	153.701.428.370	153.701.428.370	153.701.428.370	153.701.428.370	153.701.428.370	153.701.428.370
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	325.804.000	325.804.000	325.804.000	148.204.000	148.204.000	148.204.000	148.204.000	148.204.000	148.204.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.154.221.541.130	1.154.221.541.130	1.125.688.341.130	635.114.586.858	633.750.186.858	633.750.186.858	633.750.186.858	633.750.186.858	633.750.186.858
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.154.221.541.130	1.154.221.541.130	1.125.688.341.130	635.114.586.858	633.750.186.858	633.750.186.858	633.750.186.858	633.750.186.858	633.750.186.858
5.4	BELANJA TRANSFER	7.991.495.966.348	7.991.495.966.348	8.016.495.966.348	6.676.986.865.544	6.676.986.865.544	6.676.986.865.544	6.676.986.865.544	6.676.986.865.544	6.676.986.865.544
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.540.464.161.181	2.540.464.161.181	2.565.464.161.181	1.225.955.060.377	1.225.955.060.377	1.225.955.060.377	1.225.955.060.377	1.225.955.060.377	1.225.955.060.377
	Total Surplus/(Defisit)	- 76.581.888.192	- 76.581.888.192	- 76.581.888.192	- 76.581.888.192	- 76.581.888.192	- 76.581.888.192	- 76.581.888.192	- 76.581.888.192	- 76.581.888.192
6	PEMBIAYAAN	76.581.888.192	76.581.888.192	76.581.888.192	76.581.888.192	76.581.888.192	76.581.888.192	76.581.888.192	76.581.888.192	76.581.888.192
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336	693.387.923.336
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	616.806.035.144	616.806.035.144	616.806.035.144	616.806.035.144	616.806.035.144	616.806.035.144	616.806.035.144	616.806.035.144	616.806.035.144
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

KODE	URAIAN	Penetapan APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 1 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 2 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 3 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 4 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 5 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 6 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 7 APBD TA. 2025	Penetapan PERGESERAN 8 APBD TA. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xx	VOLUME APBD (Penerimaan)	31.692.350.942.267	31.692.350.942.267	31.692.350.942.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267
xx	VOLUME APBD (Pengeluaran)	31.692.350.942.267	31.692.350.942.267	31.692.350.942.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267	31.522.797.111.267

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2025

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



Tabel 5.2
Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Pergeseran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII pada APBD Tahun Anggaran 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD TA. 2025 MURNI (Rp)	PERGESERAN 1 (Rp)	PERGESERAN 2 (Rp)	PERGESERAN 3 (Rp)	PERGESERAN 4 (Rp)	PERGESERAN 5 (Rp)	PERGESERAN 6 (Rp)	PERGESERAN 7 (Rp)	PERGESERAN 8 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan	11.230.738.330.166	11.230.738.330.166	11.230.738.330.166	11.443.059.785.634	11.443.059.785.634	11.443.059.785.634	11.443.059.785.634	11.443.059.785.634	11.443.059.785.634
2	Dinas Kesehatan	2.496.736.716.151	2.496.736.716.151	2.496.736.716.151	2.507.065.115.452	2.507.065.115.452	2.507.065.115.452	2.507.065.115.452	2.507.065.115.452	2.507.065.115.452
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	974.432.533.290	974.432.533.290	974.432.533.290	2.382.451.132.173	2.382.451.132.173	2.382.451.132.173	2.382.451.132.173	2.382.451.132.173	2.382.451.132.173
4	Dinas Sumber Daya Air	336.926.127.071	336.926.127.071	336.926.127.071	482.823.016.766	482.823.016.766	482.823.016.766	482.823.016.766	482.823.016.766	482.823.016.766
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	187.964.684.283	187.964.684.283	187.964.684.283	226.862.728.254	226.862.728.254	226.862.728.254	226.862.728.254	226.862.728.254	226.862.728.254
6	Satuan Polisi Pamong Praja	45.759.907.341	45.759.907.341	45.759.907.341	41.680.556.631	41.680.556.631	41.680.556.631	41.680.556.631	41.680.556.631	41.680.556.631
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.644.418.277	42.644.418.277	46.177.618.277	47.113.294.081	48.477.694.081	48.477.694.081	48.477.694.081	48.477.694.081	48.477.694.081
8	Dinas Sosial	181.769.315.089	181.769.315.089	181.769.315.089	172.367.622.360	172.367.622.360	172.367.622.360	172.367.622.360	172.367.622.360	172.367.622.360
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	158.006.737.798	158.006.737.798	158.006.737.798	154.552.482.109	154.552.482.109	154.552.482.109	154.552.482.109	154.552.482.109	154.552.482.109
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	49.660.363.130	49.660.363.130	49.660.363.130	41.919.407.674	41.919.407.674	41.919.407.674	41.919.407.674	41.919.407.674	41.919.407.674
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	224.383.938.608	224.383.938.608	224.383.938.608	188.186.386.377	188.186.386.377	188.186.386.377	188.186.386.377	188.186.386.377	188.186.386.377
12	Dinas Lingkungan Hidup	212.101.273.508	212.101.273.508	212.101.273.508	201.447.124.581	201.447.124.581	201.447.124.581	201.447.124.581	201.447.124.581	201.447.124.581
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.901.640.608	15.901.640.608	15.901.640.608	13.616.421.548	13.616.421.548	13.616.421.548	13.616.421.548	13.616.421.548	13.616.421.548
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	78.588.514.390	78.588.514.390	78.588.514.390	59.479.134.635	59.479.134.635	59.479.134.635	59.479.134.635	59.479.134.635	59.479.134.635
15	Dinas Perhubungan	314.757.946.265	314.757.946.265	314.757.946.265	880.700.627.944	880.700.627.944	880.700.627.944	880.700.627.944	880.700.627.944	880.700.627.944
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	215.767.848.671	215.767.848.671	215.767.848.671	182.248.462.249	182.248.462.249	182.248.462.249	182.248.462.249	182.248.462.249	182.248.462.249
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	91.448.968.279	91.448.968.279	91.448.968.279	73.622.951.827	73.622.951.827	73.622.951.827	73.622.951.827	73.622.951.827	73.622.951.827
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.067.930.266	60.067.930.266	60.067.930.266	48.424.291.617	48.424.291.617	48.424.291.617	48.424.291.617	48.424.291.617	48.424.291.617
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	553.494.783.615	553.494.783.615	553.494.783.615	515.069.578.367	515.069.578.367	515.069.578.367	515.069.578.367	515.069.578.367	515.069.578.367
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.486.693.523	50.486.693.523	50.486.693.523	47.798.110.635	47.798.110.635	47.798.110.635	47.798.110.635	47.798.110.635	47.798.110.635
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	152.430.765.740	152.430.765.740	152.430.765.740	106.643.211.594	106.643.211.594	106.643.211.594	106.643.211.594	106.643.211.594	106.643.211.594
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	124.006.511.809	124.006.511.809	124.006.511.809	110.086.345.756	110.086.345.756	110.086.345.756	110.086.345.756	110.086.345.756	110.086.345.756
23	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	369.133.758.062	369.133.758.062	369.133.758.062	374.523.579.845	374.523.579.845	374.523.579.845	374.523.579.845	374.523.579.845	374.523.579.845
24	Dinas Perkebunan	110.084.221.639	110.084.221.639	110.084.221.639	97.593.263.165	97.593.263.165	97.593.263.165	97.593.263.165	97.593.263.165	97.593.263.165
25	Dinas Kehutanan	253.061.982.008	253.061.982.008	253.061.982.008	246.265.548.255	246.265.548.255	246.265.548.255	246.265.548.255	246.265.548.255	246.265.548.255
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	143.708.590.755	143.708.590.755	143.708.590.755	130.759.468.332	130.759.468.332	130.759.468.332	130.759.468.332	130.759.468.332	130.759.468.332
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	154.953.516.111	154.953.516.111	154.953.516.111	130.325.121.044	130.325.121.044	130.325.121.044	130.325.121.044	130.325.121.044	130.325.121.044
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	23.227.948.702	23.227.948.702	23.227.948.702	8.169.608.232	8.169.608.232	8.169.608.232	8.169.608.232	8.169.608.232	8.169.608.232
29	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	8.350.601.000	8.350.601.000	8.350.601.000	3.529.334.770	3.529.334.770	3.529.334.770	3.529.334.770	3.529.334.770	3.529.334.770
30	Biro Kesejahteraan Rakyat	384.849.270.381	384.849.270.381	384.849.270.381	160.153.183.668	160.153.183.668	160.153.183.668	160.153.183.668	160.153.183.668	160.153.183.668
31	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pemerintahan	7.199.445.354	7.199.445.354	7.199.445.354	6.079.187.921	6.079.187.921	6.079.187.921	6.079.187.921	6.079.187.921	6.079.187.921
32	Biro Perekonomian	10.376.845.126	10.376.845.126	10.376.845.126	4.726.411.493	4.726.411.493	4.726.411.493	4.726.411.493	4.726.411.493	4.726.411.493
33	Biro Pengadaan Barang/Jasa	9.035.450.000	9.035.450.000	9.035.450.000	4.733.655.659	4.733.655.659	4.733.655.659	4.733.655.659	4.733.655.659	4.733.655.659





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD TA. 2025 MURNI (Rp)	PERGESERAN 1 (Rp)	PERGESERAN 2 (Rp)	PERGESERAN 3 (Rp)	PERGESERAN 4 (Rp)	PERGESERAN 5 (Rp)	PERGESERAN 6 (Rp)	PERGESERAN 7 (Rp)	PERGESERAN 8 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34	Biro Organisasi	4.529.708.300	4.529.708.300	4.529.708.300	1.388.570.049	1.388.570.049	1.388.570.049	1.388.570.049	1.388.570.049	1.388.570.049
35	Biro Administrasi Pimpinan	59.210.320.166	59.210.320.166	59.210.320.166	42.865.418.927	42.865.418.927	42.865.418.927	42.865.418.927	42.865.418.927	42.865.418.927
36	Biro Umum	402.645.366.987	402.645.366.987	402.645.366.987	413.177.153.986	413.177.153.986	413.177.153.986	413.177.153.986	413.177.153.986	413.177.153.986
37	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	623.024.865.416	623.024.865.416	623.024.865.416	610.564.368.108	610.564.368.108	610.564.368.108	610.564.368.108	610.564.368.108	610.564.368.108
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	87.514.394.545	87.514.394.545	87.514.394.545	72.955.556.386	72.955.556.386	72.955.556.386	72.955.556.386	72.955.556.386	72.955.556.386
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.291.462.913.462	9.291.462.913.462	9.287.929.713.462	7.440.721.489.672	7.439.357.089.672	7.439.357.089.672	7.439.357.089.672	7.439.357.089.672	7.439.357.089.672
40	Badan Pendapatan Daerah	552.669.821.274	552.669.821.274	552.669.821.274	511.355.736.083	511.355.736.083	511.355.736.083	511.355.736.083	511.355.736.083	511.355.736.083
41	Badan Kepegawaian Daerah	73.300.845.932	73.300.845.932	73.300.845.932	66.254.500.375	66.254.500.375	66.254.500.375	66.254.500.375	66.254.500.375	66.254.500.375
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.915.862.447	68.915.862.447	68.915.862.447	61.378.689.881	61.378.689.881	61.378.689.881	61.378.689.881	61.378.689.881	61.378.689.881
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.315.587.646	26.315.587.646	26.315.587.646	24.423.728.046	24.423.728.046	24.423.728.046	24.423.728.046	24.423.728.046	24.423.728.046
44	Badan Penghubung	13.169.657.878	13.169.657.878	13.169.657.878	12.183.855.258	12.183.855.258	12.183.855.258	12.183.855.258	12.183.855.258	12.183.855.258
45	Inspektorat	108.903.621.752	108.903.621.752	108.903.621.752	96.971.139.571	96.971.139.571	96.971.139.571	96.971.139.571	96.971.139.571	96.971.139.571
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	491.824.364.302	491.824.364.302	491.824.364.302	457.674.719.133	457.674.719.133	457.674.719.133	457.674.719.133	457.674.719.133	457.674.719.133
JUMLAH		31.075.544.907.123	31.075.544.907.123	31.075.544.907.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123	30.905.991.076.123

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2025

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK (BSrE) BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

V-10



5.2 Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada Pergeseran Ketiga

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tersebut mencakup beberapa langkah yang perlu dilakukan, diantaranya :

- Melakukan reviu atas pelaksanaan anggaran belanja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.
- Mengidentifikasi dan mengeliminasi pengeluaran yang tidak prioritas atau tidak mendesak.
- Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan anggaran

Selain itu pada pergeseran ketiga dalam rangka menyelaraskan dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan Program Kepala Daerah terpilih pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, serta mensinergikan program Asta Cita Presiden dan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional. Beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan ataupun ditambahkan pada pergeseran ketiga, tercantum pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Kegiatan Prioritas pada Pergeseran Ketiga Tahun 2025

No	Kegiatan Prioritas	Perangkat Daerah	Anggaran
1	Evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	2.100.000.000
2	Konsultan Perencana Perorangan (Rekonstruksi Jalan)	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	6.000.000.000
3	Marka Jalan (Jalan Baru)	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	6.898.819.787
4	Pekerjaan Khusus Saluran drainase	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	83.135.215.200
5	Pelebaran jalan	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	90.834.442.837
6	Pemeliharaan berkala jalan (badan jalan, saluran, marka jalan)	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	100.000.000.000
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	645.414.750
8	Pengadaan alat berat (untuk mendukung pemeliharaan rutin jalan, penanganan bencana, dll)	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	45.076.000.000





No	Kegiatan Prioritas	Perangkat Daerah	Anggaran
9	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	44.393.646.626
10	Penggantian Jembatan	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	77.000.000.000
11	Penyediaan Trotoar (Pasteur - Gedung Sate)	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	24.098.502.697
12	Perencanaan Teknis Jalan	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	27.500.000.000
13	Rehabilitasi Jalan	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	45.870.242.250
14	Rekonstruksi jalan (badan jalan, saluran, marka jalan)	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	956.876.668.752
15	Uji BB dan Penyelidikan Tanah	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	730.000.000
16	APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	Dinas Perhubungan	8.050.642.883
17	Cermin Tikungan	Dinas Perhubungan	205.920.708
18	Guardrail (4 meter (<i>Beam</i>)/ Pagar Pengaman Jalan	Dinas Perhubungan	9.422.400.404
19	<i>High Mast</i> 30 Meter	Dinas Perhubungan	2.374.000.000
20	Kajian CCTV	Dinas Perhubungan	281.774.024
21	Kajian Pembangunan Terminal Penumpang Angkutan Umum Tipe B Cikarang	Dinas Perhubungan	582.335.828
22	Kompensasi Operator Transport (Becak Delman)	Dinas Perhubungan	3.705.000.000
23	Marka Jalan (Jalan Lama)	Dinas Perhubungan	6.544.532.807
24	Meterisasi Listrik APJ/Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan	14.238.438.659
25	Patok Deliniator	Dinas Perhubungan	887.511.796
26	Pembangunan Fisik Terminal Cikarang	Dinas Perhubungan	13.540.089.400
27	Pemeliharaan APJ/Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan	12.989.057.313
28	Pemeliharaan Aset Bandara Nusawiru	Dinas Perhubungan	41.267.795.790
29	Pengadaan APJ/Penerangan Jalan Umum (<i>Ready to Smart</i> + Ornamen)	Dinas Perhubungan	449.858.208.570
30	Perencanaan Pengawasan (PJU)	Dinas Perhubungan	13.595.090.173
31	Pintu Perlintasan Sebidang	Dinas Perhubungan	3.383.758.660
32	Rambu Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	6.619.509.864
33	Rambu <i>Portable</i>	Dinas Perhubungan	567.000.000
34	RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)	Dinas Perhubungan	1.183.236.297
35	Tambahan Media Reklame APJ (Alat Penerangan Jalan)	Dinas Perhubungan	360.696.669
36	Tambahan Rambu APJ (Alat Penerangan Jalan)	Dinas Perhubungan	503.350.368
37	<i>Traffic Cone</i>	Dinas Perhubungan	3.000.000.000
38	<i>Warning Light</i>	Dinas Perhubungan	2.416.314.040
39	<i>Water Barrier</i>	Dinas Perhubungan	992.800.000
40	Pengadaan Satuan Sambungan Listrik (Pengumpulan Data Penerima)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.336.690.000
41	Normalisasi Sungai, Situ, Embung dan Muara	Dinas Sumber Daya Air	70.167.894.347
42	Pembebasan dan Pengelolaan Mata Air	Dinas Sumber Daya Air	4.500.000.000





No	Kegiatan Prioritas	Perangkat Daerah	Anggaran
43	Pengadaan Alat Besar (Sumber Daya Air)	Dinas Sumber Daya Air	42.785.633.421
44	Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis	Dinas Sumber Daya Air	98.078.909.241
45	Beasiswa Peserta Didik P3KE	Dinas Pendidikan	25.200.000.000
46	BPMU dengan Syarat Ijazah Tuntas untuk SMA/SMK/SLB Swasta	Dinas Pendidikan	580.000.000.000
47	Ekstrakurikuler Integritas dan Kedisiplinan Siswa (belanegara)	Dinas Pendidikan	6.000.000.000
48	Gerakan Pembelajaran dan Pembentukan Pendidikan Karakter Pancawaluya	Dinas Pendidikan	800.000.000
49	Pelatihan Vokasi untuk Anak Kelas 12 SMK/SMA (Investasi BYD)	Dinas Pendidikan	7.500.000.000
50	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	330.739.000.000
51	Pembangunan Toilet Bagi Sekolah (SMA/SMK/SLB) Yang Membutuhkan	Dinas Pendidikan	15.000.000.000
52	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Dinas Pendidikan	86.960.240.769
53	Penyelenggaraan Pelatihan Kecakapan Hidup (Vokasi Ekologi)	Dinas Pendidikan	315.000.000
54	Penyelesaian lahan USB (Unit Sekolah Baru)	Dinas Pendidikan	53.271.624.580
55	Perbaikan Ruang Kelas (Kondisi Rusak Berat)	Dinas Pendidikan	58.720.591.837
56	Biaya Operasional Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.226.150.000
57	Biaya Operasional Mobil Pelayanan Gigi	Dinas Kesehatan	64.311.000
58	BMHP dan Biaya Operasional Safari Pembangunan	Dinas Kesehatan	1.791.011.755
59	Kesehatan Tradisional Al-Ihsan	Dinas Kesehatan	888.031.944
60	Konversi Bus Kesehatan	Dinas Kesehatan	500.000.000
61	Obat Tradisional Al-Ihsan	Dinas Kesehatan	10.000.000.000
62	Pembangunan RSUD Al-Ihsan	Dinas Kesehatan	34.977.678.000
63	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Al-Ihsan (Layanan Unggulan)	Dinas Kesehatan	25.264.682.309
64	Pengadaan <i>Ambulance Transport</i> (Keresidenan)	Dinas Kesehatan	3.648.375.000
65	Pengadaan Mobil <i>Ambulance</i> ICU (5 Keresidenan)	Dinas Kesehatan	14.283.000.000
66	Pengadaan Mobil <i>Ambulance</i> Mini ICU (RSUD Jampang Kulon)	Dinas Kesehatan	3.570.750.000
67	Pengadaan Mobil Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	5.832.225.000
68	Pengadaan Mobil Pelayanan Gigi	Dinas Kesehatan	1.458.056.250
69	Peningkatan Sistem Layanan Kanker dan Jantung (Layanan Unggulan)	Dinas Kesehatan	182.106.000
70	Beasiswa S2 MTI (ITB Lanjutan)	Badan Kepegawaian Daerah	500.000.000





No	Kegiatan Prioritas	Perangkat Daerah	Anggaran
71	Penyediaan Beasiswa Dokter Spesialis untuk Layanan Unggulan pada RSUD	Badan Kepegawaian Daerah	1.347.857.140
72	Reformulasi Kegiatan Pendidikan Politik "Youth Voter" (Badan Kesbangpol)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.700.000.000
73	Satgas Investasi (Gerakan Manunggal Jabar)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.500.000.000
74	Kajian Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal Sunda	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.000.000.000
75	LED	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000
76	Kesenian (Safari Pembangunan)	Biro Administrasi Pimpinan	504.000.000
77	Media Luar Ruang (Biro Adpim)	Biro Administrasi Pimpinan	442.506.000
78	Kajian Audit BUMD	Biro BUMD. Investasi dan Administrasi Pembangunan	2.000.000.000
79	Narasumber	Biro Hukum dan HAM	200.000.000
80	BPMU dengan Syarat Ijazah Tuntas untuk MA Negeri dan Swasta	Biro Kesejahteraan Rakyat	100.000.000.000
81	Interior dan Mebeleur di Kantor Gubernur	Biro Umum	15.300.000.000
82	Mobil Patroli Tim Kebersihan	Biro Umum	700.000.000
83	Mobil Patroli Tim Pengamanan	Biro Umum	700.000.000
84	Museum Digital	Biro Umum	11.000.000.000
85	Outsourcing Jasa Pelayanan Umum	Biro Umum	1.125.000.000
86	Outsourcing Patroli Tim Kebersihan	Biro Umum	551.853.176
87	Pemadam Kebakaran (Outsourcing dan Baju Pengaman)	Biro Umum	6.000.000.000
88	Perlengkapan Mobil Patroli Tim Kebersihan	Biro Umum	200.000.000
89	Perlengkapan Mobil Patroli Tim Pengamanan	Biro Umum	200.000.000
90	Pemadam Kebakaran (Keresidenan)	Biro Umum	1.000.000.000
91	Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Peduli Lingkungan	Dinas Kehutanan	1.000.000.000
92	Penanaman Pohon di Eks Area Penertiban Puncak, Citarum dan Sukabumi	Dinas Kehutanan	896.000.000
93	Jatinangor City Digital Knowledge	Dinas Komunikasi dan Informatika	473.100.315
94	Optimalisasi Data Geospasial untuk Pemantauan Alih Fungsi Lahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000
95	Pembinaan Kualitas Data Potensi Desa dan Kelurahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	116.775.000
96	Tenaga Ahli (Diskominfo Transfer Teknologi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.300.000.000
97	Safari Pembangunan (Disparbud)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.790.000.000
98	Lomba Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000.000





No	Kegiatan Prioritas	Perangkat Daerah	Anggaran
99	Perbaikan Gedung Terdampak Bencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000
100	Safari Pembangunan (DPMDes)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.549.950.000
101	Stimulus Bankeu Desa (Operasional Perangkat Desa, BPD, PMT Posyandu, Infrastruktur Jalan Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	690.430.000.000
102	Piala Gubernur Sepak Bola Pelajar	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.000.000.000
103	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.095.726.775
104	Penyediaan Buku TPBIS	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah	250.000.000
105	Insenerator Perumahan (Kapasitas 1 TPD)	Dinas Perumahan dan Permukiman	6.080.000.000
106	Insenerator Sampah Sungai (Kapasitas 5 s.d. 10 TPD) - DAS Citarum	Dinas Perumahan dan Permukiman	10.580.000.000
107	Mobil <i>Pick Up</i> Sampah Rukun Warga DAS Citarum	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.000.000.000
108	Motor Sampah	Dinas Perumahan dan Permukiman	940.000.000
109	Pembangunan Fasilitas Mobil Toilet	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.400.000.000
110	Pembangunan Gapura di Perbatasan Wilayah Kab/Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman	11.600.731.985
111	Pembangunan Gapura di Perbatasan Wilayah Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman	12.000.000.000
112	Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Dinas Perumahan dan Permukiman	5.000.000.000
113	Perencanaan dan Pengawasan Rumah Panggung	Dinas Perumahan dan Permukiman	44.000.000
114	Perencanaan Penataan Kampung Nelayan di KSP Mundu-Losari Kab. Bekasi	Dinas Perumahan dan Permukiman	500.000.000
115	Perencanaan, Pengawasan dan Kajian Pembangunan Gapura di Perbatasan Wilayah Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.900.000.000
116	Truk Tangki Air Bersih (5000 Liter)	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.750.000.000
117	Penataan Situs Peninggalan Sejarah Leluhur Sunda (Kampung Adat Cigugur)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.000.000.000
118	Benih Padi Bersertifikat (Inbrida)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.894.000.000
119	Mesin Pengering Hasil Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.400.000.000
120	Pompanisasi Tenaga Surya Lahan Pertanian Tadah Hujan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.500.000.000
121	Pupuk Organik Cair (Pertanian Organik)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.404.500.000
122	Pelatihan Vokasi untuk Anak Lulusan SMK/SMA (Investasi BYD)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.000.000.000
123	Audit Bersama Inspektorat	Inspektorat	5.000.000.000
124	DED Perbaikan Gedung Satpol PP (Roboh <i>Heritage</i>)	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000





No	Kegiatan Prioritas	Perangkat Daerah	Anggaran
125	Penertiban Kawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000.000
TOTAL			4.610.456.378.996

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jawa Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas terlihat bahwa ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas Gubernur yang terbagi ke beberapa sektor, diantaranya sektor Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan. Untuk mendukung prioritas Gubernur tersebut, terdapat penambahan nomenklatur subkegiatan diantaranya Pelebaran Jalan Menuju Standar; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana; Prasarana dan Utilitas Sekolah; Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air; Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya. Penambahan subkegiatan didasarkan pada kemendesakan kegiatan yang harus dilaksanakan menyesuaikan dengan visi dan misi Gubernur terpilih.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 dapat terlihat bahwa Pergeseran Ketiga yang paling signifikan perubahannya. dimana beberapa alokasi anggaran pada jenis belanja disesuaikan terhadap arahan Inpres dan juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025. Dalam Surat Edaran tersebut di poin 2 Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut:

- Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
- Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah;
- Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan peraturan





- perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* terukur;
 - e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
 - g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Berdasarkan arahan tersebut efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pergeseran ketiga ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4
Rekapitulasi Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	APBD MURNI 2025 (Rp.)	EFISIENSI	
			Rp.	%
A	Efisiensi Belanja Pendukung	1.715.489.114.775	819.675.480.432	47.78
	Belanja Barang dan Jasa	1.715.489.114.775	819.675.480.432	47.78
	1. Perjalanan Dinas (Seminar, Studi Banding, FGD)	762.990.087.268	389.046.529.793	60.00
	2. Seremonial	128.780.286.789	72.299.689.449	60.00
	3. Kajian	101.709.635.406	49.893.005.418	50.00
	4. Percetakan	62.313.598.002	45.330.678.893	75.90
	5. Publikasi	59.003.723.948	33.443.454.623	59.10
	6. Honor tim pelaksanaan kegiatan	26.384.029.258	13.192.014.629	50.00
	7. Belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki <i>output</i> yang terukur	574.307.754.104	216470.107.628	37.69
B	Belanja Hibah	3.281.692.265.774	277.969.256.141	8.47
C	Bankeu Kab/Kota dan BK Desa	2.540.464.161.181	1.392.619.100.804	54.82
D	Belanja Lainnya	1.552.600.122.101	382.845.956.023	24.66
E	SILPA		127.000.000.000	
	TOTAL	9.090.245.663.831	3.000.109.793.399	33.00

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jawa Barat. 2025

Tabel 5.5
Rekapitulasi Anggaran Belanja APBD TA 2025 pada Pergeseran Ketiga

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	PERGESERAN 3 APBD TA. 2025	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	30.998.963.018.931	30.829.409.187.931	-169.553.831.000





KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	PERGESERAN 3 APBD TA. 2025	Selisih
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.307.785.060.631	19.307.785.060.631	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.667.983.182.300	11.498.429.351.300	-169.553.831.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.667.983.182.300	11.498.429.351.300	-169.553.831.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.194.776.000	23.194.776.000	0
5	BELANJA	31.075.544.907.123	30.905.991.076.123	-169.553.831.000
5.1	BELANJA OPERASI	20.160.050.586.717	19.417.322.246.664	-742.728.340.053
5.1.01	Belanja Pegawai	9.114.143.199.597	9.113.313.015.398	-830.184.199
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.568.806.949.567	7.118.081.496.712	-450.725.452.855
5.1.04	Belanja Subsidi	161.341.421.779	159.341.421.779	-2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	3.281.692.265.774	2.992.519.562.775	-289.172.702.999
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	34.066.750.000	34.066.750.000	0
5.2	BELANJA MODAL	1.769.776.812.928	4.176.567.377.057	2.406.790.564.129
5.2.01	Belanja Modal	1.769.776.812.928	4.176.567.377.057	2.406.790.564.129
5.2.01	Belanja Modal Tanah	23.895.774.005	68.942.616.495	45.046.842.490
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	813.268.419.070	746.243.967.260	-67.024.451.810
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.723.784.378	1.242.628.560.301	942.904.775.923
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	480.722.788.307	1.964.902.600.632	1.484.179.812.325
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	151.840.243.168	153.701.428.370	1.861.185.202
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	325.804.000	148.204.000	-177.600.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.154.221.541.130	635.114.586.858	-519.106.954.272
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.154.221.541.130	635.114.586.858	-519.106.954.272
5.4	BELANJA TRANSFER	7.991.495.966.348	6.676.986.865.544	-1.314.509.100.804
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.451.031.805.167	5.451.031.805.167	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.540.464.161.181	1.225.955.060.377	-1.314.509.100.804
	Total Surplus/ (Defisit)	-76.581.888.192	-76.581.888.192	0
6	PEMBIAYAAN	76.581.888.192	76.581.888.192	0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	693.387.923.336	693.387.923.336	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	616.806.035.144	616.806.035.144	0
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-





KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	PERGESERAN 3 APBD TA. 2025	Selisih
xx	VOLUME APBD (Penerimaan)	31.692.350.942.267	31.522.797.111.267	-169.553.831.000
xx	VOLUME APBD (Pengeluaran)	31.692.350.942.267	31.522.797.111.267	-169.553.831.000

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Jawa Barat. 2025

Penyesuaian diatas merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri pada poin 4 bahwa hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan untuk bidang pendidikan bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, serta poin 5 dilakukan penyesuaian alokasi APBD melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Perkada mengenai penjabaran APBD TA 2025. Sehingga dalam hal ini penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk mendukung program-program sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 sebelumnya.

5.3 Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam mewujudkan visi-misi Gubernur terpilih serta Program dan Kegiatan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan juga perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini memuat beberapa penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan di Perangkat Daerah yang sifatnya mendukung pencapaian target Perangkat Daerah maupun target pembangunan daerah di Tahun 2025 dalam koridor belanja yang sebelumnya sudah tercantum dalam APBD Murni dan Pergeseran. Selain itu yang menjadi bagian dari Perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan yang menjadi prioritas provinsi untuk mendukung Visi Misi Gubernur serta 9 Langkah membangun Jawa Barat, yang merupakan tindaklanjut dari kegiatan dalam pergeseran ketiga yang sifatnya sebagai persiapan atau perencanaan, ataupun kegiatan prioritas yang perlu dilakukan namun belum teralokasikan pada pergeseran ketiga. Kegiatan prioritas berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian yang telah





dilakukan, dengan mempertimbangkan urgensi, dampak, dan keterkaitan dengan tujuan pembangunan dengan rincian sebagai berikut:



A040B8A293



Tabel 5.6
Rekapitulasi Kegiatan Strategis pada Perubahan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	1 Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	1	Pengadaan <i>Ambulance Transport</i> untuk Bantuan Desa	10 Unit <i>Ambulance</i> desa terpencil	9.120.937.500	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		2	Jaminan Kesehatan PBPU dan BP	26 Kab/Kota	130.000.000.000	Bantuan Keuangan Kab/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3	Pembayaran Layanan Kesehatan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	6 UOBK RS	20.563.266.722	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		4	Dokter Desa	20 Dokter	2.160.000.000	Hibah	Dinas Kesehatan
		5	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (<i>Ambulance</i>)	2 Unit	1.360.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	1	Penataan Kawasan Kampung Toleran Susuru Kab.Ciamis	1 Paket	5.000.000.000	Bantuan Keuangan Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Operasional Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Lingkup Provinsi Jawa Barat	1 Lembaga	750.000.000	Hibah	Biro Kesejahteraan Rakyat
		3	Dukungan Kegiatan Kebudayaan	2 Kegiatan	1.500.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4	Penyediaan Buku Budaya, Lomba bertutur pelajar, Layanan Pusling, dan Diseminasi naskah kuno	1520 Eksemplar	362.837.425	Belanja Perangkat Daerah	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	3 Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dukungan Patroli Terpadu Pengawasan Pengawasan/ Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27 Kab/Kota	1.397.367.000	Belanja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah administrasi Jawa Barat	27 Kab/Kota	745.090.310	Belanja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja





Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah		Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
			3	Pengadaan Peralatan Lalu Lintas		20.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
	4	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	1	Pembangunan RKB di SMA/SMK Negeri	91 Unit	53.565.723.939	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			2	Beasiswa Santri Kurang Mampu/Miskin (Optimalisasi Layanan Program Pendidikan Pesantren melalui Penyaluran Bantuan Operasional Santri Kurang Mampu)	1800 Santri	5.106.510.000	Hibah	Biro Kesejahteraan Rakyat
			3	Beasiswa bagi peserta didik kategori Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)	5.555 Siswa	20.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			4	Beasiswa Pendidikan Tinggi	457 Orang	10.000.000.000	Hibah	Biro Kesejahteraan Rakyat
			5	Pengembangan Pendidikan Berbasis Ekologi	1 Sekolah	5.000.000.000	Bantuan Keuangan kab/Kota	Dinas Pendidikan
			6	BPMU SMA/SMK Swasta	512 Sekolah	22.000.000.000	Hibah	Dinas Pendidikan
			7	BPMU MAN/MAS	68328 Siswa	41.000.000.000	Hibah	Biro Kesejahteraan Rakyat
			8	Hibah KETM	865 Siswa	1.730.000.000	Hibah	Dinas Pendidikan
	5	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	1	Pelayanan KB	200 Akseptor	428.970.000	Hibah	DP3AKB
			2	Peningkatan Layanan Pengaduan, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, dan Pemeliharaan kantor	1 Orang Psikolog	150.413.568	Belanja Perangkat Daerah	DP3AKB
			3	Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga	1 Kegiatan	1.523.050.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga
			4	Seleksi Atlet Daerah untuk POPNAS 2025	1 Kegiatan	151.850.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga
			5	Pemusatan Latihan Daerah POPNAS 2025	1 Kegiatan	759.918.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga
			6	Penyelenggaraan POPDA 2025	1 Kegiatan	1.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga
			7	Pengiriman kontingen pada POPNAS 2025	1 Kegiatan	623.872.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga





Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		8	Dukungan Kegiatan Olahraga	1 Kegiatan	46.206.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga
		9	Kegiatan Sekolah Kebangsaan		2.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Sosial
	6	1	Penertiban dan Pembersihan sempadan Sungai, Situ, dan irigasi	1 Kegiatan	1.440.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air
		2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	9 kegiatan	15.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura
		3	Perbanyak Benih dan mesin Pemipil Jagung	1 kegiatan	1.625.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura
		4	Mobil Distribusi Susu	1 Unit	655.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		5	Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian	105 Orang	493.020.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura
	7	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2 Lokasi	10.367.640.923	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Peremajaan tanaman teh	1 Kegiatan	1.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
	8	1	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	1 Dokumen	130.918.452	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
	9	1	Pengadaan Peralatan Pelatihan Pada Balai Latihan Kerja Mandiri	1 Unit Bus MTU; 1 Paket peralatan barista; 1 paket peralatan tata boga; 1 paket Peralatan Pelatihan Tata Rias Wajah; 1 paket Peralatan Pelatihan Las Listrik	1.001.350.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	10	1	Penataan Situs Peninggalan sejarah kampung cigugur	1 Paket	1.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan





Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah		Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
		Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	2	Penelitian dan Penataan Situs Kuta Tanggeuhan Kab. Cianjur	1 Paket	1.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	11	Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	1	Pendukung Gerakan Pangan Murah (GPM)	1 Kegiatan	172.500.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	12	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastuktur wilayah	1	Preservasi Jalan dan Jembatan, Survei, perencanaan, dan pengawasan		100.555.693.546	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
			2	Pengadaan Satuan Sambungan Listrik	121,871 Satuan Sambungan	286.251.670.599	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			3	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)		15.000.000.000	Bantuan Keuangan Kab/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			4	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kegiatan	228.532.500	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
			5	Penataan Kawasan Kumuh	1 lokasi	2.714.980.106	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Permukiman
			6	Pembangunan Pemenuhan Air Baku Masyarakat (Transmisi & Reservoir) Legok Nangka		1.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air
			7	Pembangunan Jembatan Gantung Menuju Sekolah	16 Unit	10.480.935.924	Bantuan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	13	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	1	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Rangkaian HUT Jabar dan Jabar Berseka TK. Desa, Patroli Linmas, Koperasi Merah Putih, Pemberian Makanan Tambah)	5.311 Desa	92.942.500.000	Bantuan Keuangan Kab/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan (Rangkaian HUT Jabar dan Jabar Berseka TK. Kelurahan, Patroli Linmas,	646 Kelurahan	11.305.000.000	Bantuan Keuangan Kab/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah





Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
			Koperasi Merah Putih, Pemberian Makanan Tambahan)				
		3	Pembangunan Purwarupa Balai Desa Jawa Barat	1 Balai Desa (Purwarupa)	4.500.000.000	Bantuan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Kegiatan	100.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5	Lomba Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	200.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		6	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa	1 Kegiatan	80.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		7	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kegiatan Posyandu, PKK, dan <i>Evoting</i> Pilkades	1 Kegiatan	608.925.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	14	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim					
		1	Normalisasi Kali Bekasi	1.405 Bidang dengan luas 97,63 Hektar	100.000.000.000	Hibah	Dinas Sumber Daya Air
		2	Penataan Pelabuhan Ratu		10.245.900.000	Bantuan Keuangan kab/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan		10.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan
		4	Lingkungan Hidup <i>Award</i> dan Jabar Berseka	1 Kegiatan	1.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		5	Tanah Urug TPA Sarimukti	40.937,5 m3	6.447.656.250	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		6	Anggaran operasional TPPAS Regional Nambo	50 ton/hari	5.025.651.865	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		7	Penyusunan Kajian Audit Lingkungan Kawasan Tambang Ilegal	1 Dokumen	200.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		8	Kajian Keselamatan Operasionalisasi Insinerator dan Study Potensi Kandungan Gas	2 Dokumen	100.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup





Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah		Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
				Metan di TPPAS Regional Sarimukti				
			9	Pembangunan Sumur Pantau di wilayah Jawa Barat	7 titik sumur dan dokumen FS/DED	1.522.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			10	Penyusunan FS/DED Biogas Komunal untuk penanganan pencemaran Sungai Cikapundung oleh limbah ternak di Sub - Daerah Air Sungai (DAS) Citarum	1 dokumen	166.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	15	Program Pengurangan Risiko Bencana	1	Pembangunan Rumah Panggung	40 unit	7.627.978.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Permukiman
			2	Pembangunan Rumah pasca longsor		10.000.000.000	Bantuan Keuangan kab/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2000 Orang	2.150.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			4	Pengadaaan Kendaraan untuk bencana	2 Unit	2.485.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			5	Mobil Pemadam Kebakaran	5 Unit (Keresidenan)	10.000.000.000	Bantuan Keuangan kab/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	16	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	1	Lembaga Lanjut Usia Indonesia (Tingkat Provinsi)	1 Lembaga	200.000.000	Hibah	Dinas Sosial
			2	Peningkatan Kesejahteraan Sosial PKRI, Janda PKRI dan Keluarga Pahlawan	1 Lembaga	10.000.000	Bantuan Sosial	Dinas Sosial
			3	Perbaikan sarana dan prasarana di Apartemen Transit Solokan Jeruk, Ujungberung, Rancaekek, Batujajar	1 kegiatan	773.187.400	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Dan Permukiman
P4 Mewujudkan Masyarakat dan	17		1	Pembayaran Sisa Pekerjaan Studi Identifikasi Daerah Rawan Air	1 pekerjaan	471.189.672	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Dan Permukiman





Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	2	Pengadaan <i>Drone Geospatial Real Time Kinematics</i> , sertifikasi, dan pelatihan <i>remote pilot</i>	1 Paket	140.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Perangkat pendukung sidebar	1 Paket	4.200.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4	Finalisasi Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029		1.653.072.234	Belanja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	Kajian Struktur Gedung Pencaksilat sebagai rekomendasi BPK RI	1 kajian	100.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Dan Permukiman
		6	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Orang	413.790.318	Belanja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		7	Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	1 Kegiatan	86.900.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	18 Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	1	Dana Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi		10.791.700.000	Hibah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	Pembayaran Sisa Pekerjaan Rumah Dinas Kejaksaan	1 unit tipe A	1.721.932.071	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Permukiman
		3	Dana Operasional Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat	Operasional KPID Jawa Barat	543.605.000	Hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	19 Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	1	Peningkatan kapasitas ASN	1 Kegiatan	2.200.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	PORNAS XVII KORPRI Tahun 2025	1 Kegiatan	1.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	985.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Samsat se Jawa Barat	1 Kegiatan	5.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Pemagaran Gedung Kantor dan Lainnya	6 Pekerjaan	33.592.438.764	Belanja Perangkat Daerah	Biro Umum
		6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan	s.d Desember 2025	10.714.361.153	Belanja Perangkat Daerah	Biro Umum





Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
		7	Kegiatan Operasional Biro Adpim	1 Kegiatan	9.593.335.244	Belanja Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan
		8	Kegiatan Tambahan Operasional DPMD	1 Kegiatan	2.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		9	Fasilitasi Mamin Tamu dan Mamin Rapat	s.d Desember 2025	9.559.951.300	Belanja Perangkat Daerah	Biro Umum
		10	Penambahan Belanja Pegawai	40 Orang	1.190.476.107	Belanja Perangkat Daerah	Biro Umum
		11	DED untuk Pembangunan UPTD Dinas Perkebunan	1 DED	197.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
		12	Sosper DPRD	6 Bulan	50.000.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
		13	Belanja Pegawai		968.907.618	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		14	Hibah Blangko KTP EL	1 Paket	1.406.618.950	Hibah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		15	Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Perkantoran	1 Kegiatan	415.050.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		16	Pemindahan Layanan Samsat Kota Bogor	1 Kegiatan	1.718.452.161	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
		17	Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin dan Pemeliharaan Gedung Kantor		1.840.000.000	Belanja Perangkat Daerah	
		18	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20 orang	500.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		19	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	732.383.000	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura
		20	Pemeliharaan Kendaraan	3 kendaraan roda empat	100.050.000	Belanja Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		21	Pemeliharaan Kawasan SPORt Jabar Arcamanik	7 Paket Pekerjaan	400.182.845	Belanja Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga





Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah		Kegiatan Strategis		Target	Anggaran	Skema	Perangkat Daerah
			22	Pemeliharaan Gedung LKPP	1 Kegiatan	1.200.000.000	Belanja Perangkat Daerah	Biro Umum
			23	Supervisi PSU Kab. Tasikmalaya dan Dukungan Kegiatan Kesbangpol	1 Kegiatan	763.204.800	Belanja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan		4.044.600.904	Belanja Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
						1.246.097.255.170		





Kegiatan prioritas pada Tabel 5.6 di atas merupakan salah satu bentuk prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Barat yang diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan adanya kegiatan prioritas tersebut, maka terdapat penyesuaian dan/atau perubahan pada struktur jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada setiap urusan pemerintahan pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Berikut ini disajikan data perbandingan berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan antara program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada APBD Murni Tahun 2025, pergeseran APBD Tahun 2025, dan Perubahan RKPD Tahun 2025.



A040B8A293



Tabel 5.7
Perbandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Anggaran pada APBD Tahun 2025, Pergeseran APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

No.	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD P-RKPD (5-3)		JUMLAH KEGIATAN PD P-RKPD (8-6)		JUMLAH SUBKEGIATAN PD P-RKPD (11-9)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Pendidikan	3	3	3	13	13	13	84	89	93	11.230.738.330.166	11.443.059.785.634	11.512.483.923.745					9		Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	5	5	5	20	20	20	63	66	65	2.496.736.716.151	2.507.065.115.452	2.549.423.830.389							Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	11	11	24	24	24	101	104	104	1.333.752.626.522	2.929.575.501.075	3.134.864.316.364					3		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	4	4	12	12	13	31	31	31	163.682.503.228	161.831.409.124	172.947.554.630			1				Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4	4	4	15	15	15	41	40	44	88.404.325.618	90.158.250.712	95.435.708.022					3		Satuan Polisi dan Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	7	7	7	20	20	20	91	91	91	181.769.315.089	172.367.622.360	177.062.622.360							Dinas Sosial
7	Tenaga kerja	6	6	6	19	19	19	53	52	52	157.603.563.598	154.320.057.789	156.736.963.165					1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	7	7	7	19	19	19	43	43	43	33.832.881.729	29.213.455.020	30.224.077.140							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
9	Pangan	4	4	4	13	13	13	46	46	46	130.450.344.479	125.094.316.311	126.584.736.245							Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD P-RKPD (5-3)		JUMLAH KEGIATAN PD P-RKPD (8-6)		JUMLAH SUBKEGIATAN PD P-RKPD (11-9)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10	Pertanahan	5	5	5	5	5	5	6	6	6	1.888.214.894	729.966.994	729.966.994							Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Lingkungan Hidup	11	11	11	20	20	20	44	44	45	212.101.273.508	201.447.124.581	187.862.357.968					1		Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	13	13	13	28	25	25	15.901.640.608	13.616.421.548	15.023.040.498						3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	11	11	11	39	37	37	78.588.514.390	59.479.134.635	62.468.059.635						2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	3	4	4	4	6	6	6	15.827.481.401	12.705.952.654	12.274.714.102							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan	4	4	4	20	20	20	40	44	44	314.757.946.265	880.700.627.944	900.700.627.944					4		Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	3	3	3	10	10	10	45	44	44	210.562.736.041	179.374.757.911	184.118.362.911						1	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	8	8	8	16	16	16	31	34	34	91.448.968.279	73.622.951.827	74.591.859.445					3		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
18	Penanaman Modal	6	6	6	14	14	14	39	37	37	60.067.930.266	48.424.291.617	48.839.341.617						2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	14	14	14	38	39	39	553.494.783.615	515.069.578.367	519.574.657.212							Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	1	1	1	1	1	1	5	5	5	2.394.029.210	1.471.424.238	1.611.424.238							Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	1	1	1	2	2	2	5	5	5	2.811.083.420	1.402.280.100	1.402.280.100							Dinas Komunikasi dan Informatika



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD P-RKPD (5-3)		JUMLAH KEGIATAN PD P-RKPD (8-6)		JUMLAH SUBKEGIATAN PD P-RKPD (11-9)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
22	Kebudayaan	4	4	4	10	10	10	23	21	21	47.010.681.393	46.275.966.084	47.830.738.199						2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	3	3	3	13	13	13	35	34	34	49.695.922.212	47.454.684.265	47.817.521.690						1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	2	2	2	4	4	4	6	6	6	790.771.311	343.426.370	343.426.370							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	6	6	6	24	24	24	81	77	77	152.430.765.740	106.643.211.594	117.370.303.469						4	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	Pariwisata	4	4	4	12	12	12	32	32	34	76.995.830.416	63.810.379.672	64.708.567.557					2		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27	Pertanian	7	7	7	25	25	25	75	71	71	573.151.573.830	535.208.913.076	553.593.396.142						4	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ; Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan; Dinas Perkebunan
28	Kehutanan	5	5	5	18	18	18	49	50	51	253.061.982.008	246.265.548.255	257.584.388.255					2		Dinas Kehutanan
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	5	23	22	22	50	50	50	143.708.590.755	130.759.468.332	420.539.138.931				1			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30	Perdagangan	7	7	7	17	17	17	39	39	39	44.050.498.602	31.052.501.704	31.052.501.702							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	Perindustrian	4	4	4	13	13	13	47	44	44	110.903.017.509	99.272.619.340	99.272.619.342						3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32	Transmigrasi	1	1	1	1	1	1	3	3	3	403.174.200	232.424.320	176.868.944							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33	Sekretariat Daerah	8	8	8	29	29	29	88	88	88	909.424.956.016	644.822.524.705	757.529.597.273							Sekretariat Daerah
34	Sekretariat DPRD	2	2	2	17	17	17	48	48	48	623.024.865.416	610.564.368.108	660.564.368.108							Sekretariat DPRD



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Subkegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD P-RKPD (5-3)		JUMLAH KEGIATAN PD P-RKPD (8-6)		JUMLAH SUBKEGIATAN PD P-RKPD (11-9)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
35	Perencanaan	3	3	3	14	14	14	70	70	70	87.514.394.545	72.955.556.386	74.608.628.620							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36	Keuangan	4	4	4	15	15	15	92	85	85	9.844.132.734.736	7.950.712.825.755	8.370.608.954.869					7		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah
38	Kepegawaian	2	2	2	11	11	11	38	38	38	73.300.845.932	66.254.500.375	68.168.290.693							Badan Kepegawaian Daerah
39	Pendidikan dan Pelatihan	2	2	2	9	9	9	24	21	21	68.915.862.447	61.378.689.881	61.378.689.881					3		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
40	Penelitian dan Pengembangan	2	2	2	11	11	11	32	26	26	26.315.587.646	24.423.728.046	24.610.678.046					6		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
41	Pengelolaan Penghubung	2	2	2	7	7	7	19	19	19	13.169.657.878	12.183.855.258	12.183.855.258							Badan Penghubung
37	Inspektorat Daerah	3	3	3	11	11	11	31	31	31	108.903.621.752	96.971.139.571	96.971.139.571							Inspektorat
42	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	12	12	12	36	36	34	491.824.364.302	457.674.719.133	471.429.623.933					2		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		189	189	189	581	580	581	1797	1777	1786	31.075.544.907.123	30.905.991.076.123	32.203.303.721.577	0	0	1	1	27	41	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat. diolah. 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



Berikut ini juga disajikan tabel Rekapitulasi Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang didasarkan pada hasil *input* perangkat daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, disampaikan juga proyeksi kebutuhan perangkat daerah berdasarkan Prognosis kebutuhan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Sedangkan rinciannya akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini.





Tabel 5.8
Rekapitulasi Usulan Perubahan Belanja Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025

NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	APBD 2025 MURNI Rp.	SEBELUM PERUBAHAN (PERGESERAN VIII) Rp.	JUMLAH PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 Rp.	SELISIH (Kolom 5 - Kolom 3) Rp.
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	11.230.738.330.166	11.443.059.785.634	11.512.483.923.745	281.745.593.579
2	Dinas Kesehatan	2.496.736.716.151	2.507.065.115.452	2.549.423.830.389	52.687.114.238
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	974.432.533.290	2.382.451.132.173	2.483.006.825.719	1.508.574.292.429
4	Dinas Sumber Daya Air	336.926.127.071	482.823.016.766	585.263.016.766	248.336.889.695
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	187.964.684.283	226.862.728.254	240.271.995.503	52.307.311.220
6	Satuan Polisi dan Pamong Praja	45.759.907.341	41.680.556.631	43.823.013.941	-1.936.893.400
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.644.418.277	48.477.694.081	51.612.694.081	8.968.275.804
8	Dinas Sosial	181.769.315.089	172.367.622.360	177.062.622.360	-4.706.692.729
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	158.006.737.798	154.552.482.109	156.913.832.109	-1.092.905.689
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	49.660.363.130	41.919.407.674	42.498.791.242	-7.161.571.888
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	224.383.938.608	188.186.386.377	189.013.886.377	-35.370.052.231
12	Dinas Lingkungan Hidup	212.101.273.508	201.447.124.581	187.862.357.968	-24.238.915.540
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.901.640.608	13.616.421.548	15.023.040.498	-878.600.110
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	78.588.514.390	59.479.134.635	62.468.059.635	-16.120.454.755
15	Dinas Perhubungan	314.757.946.265	880.700.627.944	900.700.627.944	585.942.681.679
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	215.767.848.671	182.248.462.249	187.132.067.249	-28.635.781.422
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	91.448.968.279	73.622.951.827	74.591.859.445	-16.857.108.834
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.067.930.266	48.424.291.617	48.839.341.617	-11.228.588.649
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	553.494.783.615	515.069.578.367	519.574.657.212	-33.920.126.403
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.486.693.523	47.798.110.635	48.160.948.060	-2.325.745.463
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	152.430.765.740	106.643.211.594	117.370.303.469	-35.060.462.271
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	124.006.511.809	110.086.345.756	112.586.345.756	-11.420.166.053
23	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	369.133.758.062	374.523.579.845	392.373.982.845	23.240.224.783
24	Dinas Perkebunan	110.084.221.639	97.593.263.165	98.790.263.165	-11.293.958.474





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	APBD 2025 MURNI Rp.	SEBELUM PERUBAHAN (PERGESERAN VIII) Rp.	JUMLAH PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 Rp.	SELISIH (Kolom 5 - Kolom 3) Rp.
1	2	3	4	5	6
25	Dinas Kehutanan	253.061.982.008	246.265.548.255	257.584.388.255	4.522.406.247
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	143.708.590.755	130.759.468.332	420.539.138.931	276.830.548.176
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	154.953.516.111	130.325.121.044	130.325.121.044	-24.628.395.067
28	Sekretariat Daerah				
a.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	23.227.948.702	8.169.608.232	8.169.608.232	-15.058.340.470
b.	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	8.350.601.000	3.529.334.770	3.529.334.770	-4.821.266.230
c.	Biro Kesejahteraan Rakyat	384.849.270.381	160.153.183.668	217.009.693.668	-167.839.576.713
d.	Biro Badan Usaha Milik Daerah. Investasi dan Administrasi Pembangunan	7.199.445.354	6.079.187.921	6.079.187.921	-1.120.257.433
e.	Biro Perekonomian	10.376.845.126	4.726.411.493	4.726.411.493	-5.650.433.633
f.	Biro Pengadaan Barang/Jasa	9.035.450.000	4.733.655.659	4.733.655.659	-4.301.794.341
g.	Biro Organisasi	4.529.708.300	1.388.570.049	1.388.570.049	-3.141.138.251
h.	Biro Administrasi Pimpinan	59.210.320.166	42.865.418.927	52.458.754.171	-6.751.565.995
i.	Biro Umum	402.645.366.987	413.177.153.986	459.434.381.310	56.789.014.323
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	623.024.865.416	610.564.368.108	660.564.368.108	37.539.502.692
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	87.514.394.545	72.955.556.386	74.608.628.620	-12.905.765.925
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.291.462.913.462	7.439.357.089.672	7.848.490.165.721	-1.442.972.747.741
32	Badan Pendapatan Daerah	552.669.821.274	511.355.736.083	522.118.789.148	-30.551.032.126
33	Badan Kepegawaian Daerah	73.300.845.932	66.254.500.375	68.168.290.693	-5.132.555.239
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.915.862.447	61.378.689.881	61.378.689.881	-7.537.172.566
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.315.587.646	24.423.728.046	24.610.678.046	-1.704.909.600
36	Badan Penghubung	13.169.657.878	12.183.855.258	12.183.855.258	-985.802.620
37	Inspektorat	108.903.621.752	96.971.139.571	96.971.139.571	-11.932.482.181
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	491.824.364.302	457.674.719.133	471.429.623.933	-20.394.740.369
Jumlah		31.075.544.907.123	30.905.991.076.123	32.203.350.761.577	1.127.805.854.454

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat. diolah. 2025



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



5.4 Penyesuaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan acuan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mengakomodir visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, maka diperlukan penyesuaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 yang sejalan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Indikator yang diuraikan merupakan bentuk pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara umum disusun berdasarkan pertimbangan target penyelenggaraan pembangunan periode 2025-2029 sesuai proporsi terhadap target jangka panjang pembangunan daerah Tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan agar terdapat kesinambungan dan akuntabilitas pembangunan daerah sekaligus menjaga konsistensi dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Daerah berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah ditetapkan secara *mandatory* oleh Pemerintah Pusat. Indikator-indikator ini merupakan cerminan prioritas nasional yang harus dicapai oleh seluruh daerah, tanpa pengecualian. Melalui pendekatan ini, perencanaan pembangunan di Jawa Barat diarahkan agar tetap adaptif terhadap dinamika politik, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta konsisten terhadap tujuan pembangunan nasional.

IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*, yang pada umumnya merupakan hasil dari *crosscutting* beberapa urusan atau program. Beberapa indikator kinerja utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami penyesuaian baik





target ataupun perubahan pada nomenklatur indikator kinerja, diantaranya:

- a) Dalam kerangka RPJPD, terjadi pergeseran indikator utama pembangunan manusia dari Indeks Pembangun Manusia (IPM) menjadi Indeks Modal Manusia (IMM). Hal ini, mencerminkan orientasi pembangunan yang tidak hanya fokus pada kualitas hidup saat ini, tetapi juga pada potensi produktivitas sumber daya manusia di masa depan. IMM memberikan gambaran lebih strategis tentang kesiapan generasi mendatang dalam menghadapi tantangan ekonomi, teknologi, dan globalisasi. IMM lebih cocok untuk merancang strategi Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang karena mengukur potensi produktivitas masa depan, dan memungkinkan perbandingan antar negara dan antar daerah secara lebih relevan dengan konteks global;
- b) Terdapat beberapa indikator yang capaian tahun 2024 telah melebihi target tahun 2025, diantaranya: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, dan Indeks Kualitas Infrastruktur. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2024 lebih tinggi daripada target 2025 karena adanya perbedaan metode perhitungan. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah mengalami penurunan dikarenakan pendapatan lebih besar daripada belanja dan lain-lain, hal ini dikarenakan proporsi belanja pegawai yang lebih banyak. Indeks Kualitas Infrastruktur mengalami perubahan indikator komposit yang menyebabkan perubahan terhadap pembobotan pada penilaian indikator tersebut;
- c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca baik Kumulatif ataupun Tahunan angka baseline 2024 dihitung secara kewilayahan menggunakan Indikator baru dan perhitungan baru sesuai metadata perhitungan GRK dari Bappenas, sedangkan pada laporan tahun 2024 yang masih menggunakan indikator lama "Tingkat Upaya Penurunan Emisi GRK sebesar 7,98" dihitung hanya lingkup daerah dan berbeda rumus perhitungannya, sehingga *baseline* perhitungan ini merupakan konversi terhadap rumus baru dan indikator baru (dihitung secara kewilayahan bukan hanya daerah);

Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2025 telah disesuaikan pada tabel dibawah ini:





Tabel 5.9
Indikator Kinerja Utama
pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Semula			Menjadi				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Ket
I	Indikator Tujuan:			Indikator Tujuan:				
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,17	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,55	Indikator Kinerja Utama
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,96 - 5,37	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,95	4,96 - 5,37	
3				Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	12,82	12,72	
4				Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	N/A	61,30	
5				Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEL)	Poin	45,29	48,19	
6				PDRB per Kapita	Juta Rupiah	56,08	57,41 - 59,6	
7	Gini Rasio	Poin	0,383 - 0,393	Rasio Gini	Poin	0,43	0,383 - 0,390	
8				Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	6,61	
9				Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,88	3,90	Indikator Kinerja Utama
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A-	A	Indikator Kinerja Utama
11	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,55	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N/A	86,03	Indikator Kinerja Utama
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,42 - 6,99	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,75	6,42 - 6,99	
13	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,85 - 6,46					
14	Indeks Williamson	Poin	0,383 - 0,393					
II	Indikator Sasaran:			Indikator Sasaran:				
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,29	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,16	75,29	
2	Prevalensi Stunting	Persen	12,93	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat Pendek) pada balita	Persen	15,90	15,14	Indikator Kinerja Utama
3				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	N/A	73,71	
4				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	56,70	
5				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	66,44*	69,71	
6				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	56,50	Indikator Kinerja Utama
7				Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	49,51	
8				Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Poin	N/A	3,02	Indikator Kinerja Utama





No	Semula			Menjadi				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Ket
9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,16	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Tahun	9,24	9,35	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,82	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80	12,84	
11	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	49,49	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	61,1	62,51	Indikator Kinerja Utama
12	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5,84	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	41,39	41,87 - 42,00	
13	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,54	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	1,59	1,69	
14	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,85	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,85	3,99	
15				Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	Indikator Kinerja Utama
16				Inklusi Keuangan	Persen	N/A	94,22	
17				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persen	N/A	22,81	
18	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,85	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,07	3,15	
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,42 - 6,99					
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	657,77	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Milyar Rupiah	N/A	24,72	
21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,46	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,458	0,458	Indikator Kinerja Utama
22	Nilai Tukar Petani	Persen	108,44	Nilai Tukar Petani	Poin	112,17	112-117	Indikator Kinerja Utama
23	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,57	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,06	63,11	Indikator Kinerja Utama
24	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	55,20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	56,25	56,95	Indikator Kinerja Utama
25	Indeks Desa Membangun	Poin	0,80	Indeks Desa	Persen	N/A	77,46	Indikator Kinerja Utama
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,00	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,02	64,06	Indikator Kinerja Utama
27	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	8,88	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif dan Tahunan				Indikator Kinerja Utama
28				a. Kumulatif	Persen	N/A	2,66	
29				b. Tahunan	Persen	N/A	9,27	
30	Indeks Risiko Bencana	Poin	115	Indeks Risiko Bencana	Poin	114,15	109,18	Indikator Kinerja Utama
31				Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	N/A	3,11	Indikator Kinerja Utama
32	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,85 - 6,46	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	Indikator Kinerja Utama





No	Semula			Menjadi				
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Ket
33	Indeks Inovasi Daerah	Poin	70,15 (Sangat Inovatif)	Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,27	81,28	Indikator Kinerja Utama
34				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	N/A	4,58	Indikator Kinerja Utama
35				Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	23,70	
36				Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	2,142	1,444	Indikator Kinerja Utama
37	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000	11.619					
38	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	N/A					
39	Indeks Perlindungan Anak	Angka	67,66	Indeks Perlindungan Anak	Angka	70,51*	71,95	Indikator Kinerja Utama
40	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,42					
41	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	94,36					
42	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	Persen	28,90					
43	Tingkat Konektivitas	Persen	60,00					
44	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,55	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N/A	86,03	Indikator Kinerja Utama
45	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General)	Persen	86,44	86,45	
46				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	N/A	6,40	Indikator Kinerja Utama
47				Indeks kesejahteraan sosial (IKESOS)	Poin	56,88	57,38	

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029





Tabel 5.10
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Aspek Geografi dan Demografi					Aspek Geografi dan Demografi					
1					Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,97	83,42	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
2					Indeks Ketahanan Air	Poin	N/A	73,22	DSDA, Dishut, DESDM, DLH, BBWS, DIsperskim, DTPH, BPBD, Bappeda, Dinsos, BHLK, Badan Geologi	
3					Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	N/A	6,61	Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Bappeda	
4					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,02	64,06	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Perkebunan, DKP, Dishub, DSDA
5					Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Persen	N/A	3,02	Kesatuan Bangsa dan Politik
6					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	10,54	13,5	Dinas Perumahan dan Permukiman
7					Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	7,04	23,04	Dinas Perumahan dan Permukiman
8					Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	46,46	81,73	Dinas Perumahan dan Permukiman
9					Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/Kapita	1391,67	1.396,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10					Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Persen	N/A	4,58	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
11					Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	105,28	Dinas Sumber Daya Air
12					Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Konsumsi Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	37,60	Dinas Perumahan dan Permukiman
13					Indeks Risiko Bencana	Poin	114,15	109,18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)				
15					a. Kumulatif	Persen	N/A	2,66	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, DinasKetahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Bappeda
16					b. Tahunan	Persen	N/A	9,27	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Bappeda
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1					Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,95	4,96 - 5,37	
2					PDRB per Kapita	Rp Juta	56,08	57,41 - 59,6	
3					Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4					Gini Ratio	Poin	0,428	0,383 - 0,390	
5					Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,55	
6					Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,75	6,42 - 6,99	
7					Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,16	75,29	Dinas Kesehatan
8					Angka Kematian Ibu	Per 100,000 kelahiran hidup	N/A	151	Dinas Kesehatan
9					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,90	15,14	Dinas Kesehatan
10					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	N/A	95	Dinas Kesehatan
11					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	90	Dinas Kesehatan
12					Indeks Kesejahteraan Petani	poin	N/A	0,6522	DTPH, DISBUN, DKPP, DKP, DISHUT
13					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	97,73	98,00	Dinas Kesehatan
14					Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	Persen			Dinas Pendidikan
15					i) Literasi Membaca	Nilai	60,94	61,59	Dinas Pendidikan
16					ii) Numerasi	Nilai	50,42	52,27	Dinas Pendidikan
17					Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum				Dinas Pendidikan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pada asesmen tingkat nasional untuk:				
18					i) Literasi Membaca	Nilai	67,19	68,05	Dinas Pendidikan
19					ii) Numerasi	Nilai	69,01	69,22	Dinas Pendidikan
20					Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,24	9,35	Dinas Pendidikan
21					Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80	12,84	Dinas Pendidikan
22					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,81	9,64	Biro Kesejahteraan Rakyat
23					Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	84,31	86,42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan
24					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	34,1	39,77	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Kesejahteraan Rakyat,
25					Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	N/A	24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26					Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	N/A	56,7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	N/A	73,71	Biro Kesejahteraan Rakyat
28					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	66,44*	69,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
29					Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,458	0,458	Dinas Pemberdayaan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
30					Indeks Perlindungan Anak	Angka	70,51*	71,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
31					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,23*	90,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
32					Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	61,10*	62,51	Dinas Pemuda dan Olahraga
33					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	72,76	72,77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
34	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan	Persen	76,11	IKU PD	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	45,61	46	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPSTP, DISKUK
ASPEK DAYA SAING DAERAH					ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1					Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	12,82	12,72	
2					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	1,59	1,69	
3					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,85	3,99	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4					Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	41,39	41,87 - 42,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,07	3,10	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6					Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	N/A	536,60	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persen	N/A	22,81	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8					Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	N/A	3,11	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
9					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,71	68,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan
10					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	N/A	49,88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DP3AKB
11					Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,27	81,28	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
12					Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	N/A	61,30	Data dari tim PSDA, Disnakertrans, Disdik, Disbun, DTPH, Dishut, DLH, ESDM, Dishub, DKP, Disperindag,
13					Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	45,29	48,19	Dinas Kelautan dan Perikanan
14					Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	24,36* (2023)	25,18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15					Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	N/A	6,40	Dinas Komunikasi dan Informatika



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16					Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Persen	N/A	7,88	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17					Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	N/A	24,72	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18					Ekspor Barang dan Jasa	Persen	N/A	21,90 - 21,94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19					Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,06	63,11	DBMPR, Dishub, DSDA, Disperkim, ESDM
20					Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	56,25	56,95	Dinas Perumahan Dan Permukiman
21					Modal Share Angkutan Umum	Persen	N/A	13	Dinas Perhubungan
22					Persentase Desa Mandiri	Point	39,09	40,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	N/A	1,58	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
24					Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	Biro Perekonomian (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
25					Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	23,70	
26					Inklusi Keuangan	Persen	N/A	94,22	



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-50



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27					Efektivitas Kerjasama Internasional	Persen	N/A	90,91	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
28					Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Poin	N/A	0,557	Multi OPD, DLH, DTPH, DSDA, Dishut, Disbun, DSDA, DKP, Disperkim, DKPP
29					Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	125,44 (2023)	145,15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30					Return of Assets (RoA) BUMD Jabar	Persen	0,65	0,68	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
ASPEK PELAYANAN UMUM					ASPEK PELAYANAN UMUM				
1					Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,30	89,32	Biro Hukum dan HAM
2					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	4,73	4,74	Dinas Komunikasi dan Informatika
3					Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	N/A	Dinas Komunikasi dan Informatika
4					Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,76	4,77	Biro Organisasi
5					Indeks Integritas Nasional	Poin	73,84	72,96	Inspektorat
6					Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	56,50	Satuan Polisi Pamong Praja
7					Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	N/A	86,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8					Indeks Kepatuhan Daerah	Poin	83,08*	83,50	Biro Hukum dan HAM
9					Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A-	A	Biro Organisasi



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-51



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10					Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	100	91	Satuan Polisi Pamong Praja
11					Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,88	3,90	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah
12					Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Poin	N/A	49,51	Satuan Polisi Pamong Praja
13					Persentase Penegakan Perda	Persen	N/A	60	Satuan Polisi Pamong Praja
INDIKATOR KINERJA KUNCI					INDIKATOR KINERJA KUNCI				
1	PENDIDIKAN				PENDIDIKAN				
1					Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,24	9,35	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun	Tahun	69,77	IKU PD, Perhitungan baru untuk target tahun 2024-2026	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun		Presen	71,15	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun	Tahun	57,64	IKU PD	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas		Presen	55,14	Dinas Pendidikan
4	Nilai Rapor Pendidikan	Nilai	71,41	IKU PD	Nilai Rapor Pendidikan		Nilai	69,79	Dinas Pendidikan
5					Indeks Pemerataan Guru	Poin	0,72	0,75	Dinas Pendidikan
6	Persentase Penurunan Angka Putus Sekolah	Persen	0,11	IKP	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB	Persen	0,06	0,11	Dinas Pendidikan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Nilai Rata-rata Kompetensi Literasi	Nilai	68,42	IKP	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB	Nilai	67,19	68,05	Dinas Pendidikan
8	Nilai Rata-rata Kompetensi Numerasi	Nilai	58,82		Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB	Nilai	69,01	69,22	Dinas Pendidikan
9					Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB	Nilai	69,65	70,15	Dinas Pendidikan
10					Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB	Nilai	65,12	65,61	Dinas Pendidikan
11					Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB	Nilai	72,22	72,71	Dinas Pendidikan
12					Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen	84,91	86,42	Dinas Pendidikan
13					Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persen	82,16	82,68	Dinas Pendidikan
14	Indeks Refleksi Guru	Indeks	58,5	IKP					Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN				KESEHATAN				
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,29	IKU PD	Nilai Standar Pelayanan Minimal Provinsi (KLB dan Bencana)	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
2					Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	97,73	98,6	Dinas Kesehatan
3					Indeks Kepuasan Masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah (rumah sakit, puskesmas, unit transfusi darah, dan laboratorium kesehatan masyarakat)	Poin	n/a	77	Dinas Kesehatan
4					Angka Kematian Ibu (per 100.000KH)	per 100.000 kelahiran hidup	98,6	122	Dinas Kesehatan



A040B8A293



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5					Angka Kematian Balita (per 1000KH)	Per 1000 kelahiran hidup	N/A	12,38	Dinas Kesehatan
6					Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)	Persen	83	90	Dinas Kesehatan
7					Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	Persen	N/A	5	Dinas Kesehatan
8					Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan	Persen	N/A	40	Dinas Kesehatan
9					Angka Kematian Ibu (per 100.000KH)	per 100.000 kelahiran hidup	98,6	122,00	Dinas Kesehatan
10					Persentase balita stunting (pendek dan sangat pendek)	Persen	7,1	7	Dinas Kesehatan
11					Angka Kematian Balita (per 1000KH)	1000 kelahiran hidup	7,28	12,38	Dinas Kesehatan
12					Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)	Persen	83	90	Dinas Kesehatan
13					Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persen	N/A	60	Dinas Kesehatan
14	Presentasi kab/kota yang menurun angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Persen	89	IKP	Angka populasi bebas penyakit tidak menular	Persen	51,85	62,96	Dinas Kesehatan
15					Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	Persen	N/A	15	Dinas Kesehatan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16					Persentase penduduk usia ≥7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	N/A	10	Dinas Kesehatan
17	Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	Persen	73,5	IKP	Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kekebalan kelompok	Persen	22,22	25,93	Dinas Kesehatan
18						Nilai Standar Pelayanan Minimal Provinsi Urusan Kesehatan	Persen	100	100
19	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Persen	96,2	IKP	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	97,73	98	Dinas Kesehatan
20	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	Persen	96,29			Persentase kabupaten/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	Persen	N/A	65
21	Persentase Kabupaten/ Kota memenuhi standar ketenagaan minimal di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah	Persen	55,1	IKP	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	N/A	60	Dinas Kesehatan
22	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi	Persen	100			Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	Persen	100	100





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kesehatan di Jawa Barat								
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	Poin	92,7	IKP	Indikator Nasional Mutu (INM) di Laboratorium Kesehatan	Persen	N/A	80	Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPELKES	Poin	88,7	IKP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di UPELKES	Persen	94,69	89,5	Dinas Kesehatan (UPELKES)
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	Poin	87	IKP	Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Pameungpeuk	Persen	N/A	N/A	Dinas Kesehatan (RSUD Pameungpeuk)
26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	Poin	83,55	IKP	Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Jampangkulon	Persen	-	-	Dinas Kesehatan (RSUD Jampang Kulon)
27					Indikator Nasional Mutu (INM) di RS Jiwa	Poin	N/A	N/A	Dinas Kesehatan (RS Jiwa)
28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RS Paru	Poin	90,3	IKP	Indikator Nasional Mutu (INM) di UOBK RS Paru	Persen	-	-	Dinas Kesehatan (RS Paru)
29	Indikator Nasional Mutu di RSUD Al-Ihsan	Persen	77	IKP	Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Welas Asih	Persen	69	77	Dinas Kesehatan (RSUD Welas Asih)
30					Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	Persen	15	17	Dinas Kesehatan
31	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	Persen	100	IKP	Persentase faskes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	59,85	60	Dinas Kesehatan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32					Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
33					Persentase sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pelatihan sesuai kompetensi	Persen	60	0	Dinas Kesehatan
34	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar perizinan	Persen	93	IKP	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK) dan Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) yang sesuai standar perizinan	Persen	92	93	Dinas Kesehatan
35	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Al-Ihsan	Poin	97,15	IKP					Dinas Kesehatan
36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	Poin	92,7	IKP					Dinas Kesehatan
37	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPELKES	Poin	88,7	IKP					Dinas Kesehatan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
38	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	Poin	87	IKP					Dinas Kesehatan
39	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	Poin	83,55						Dinas Kesehatan
40	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	Poin	86	IKP					Dinas Kesehatan
41	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RS Paru	Poin	90,3						Dinas Kesehatan
42	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Al-Ihsan	Poin	97,15	IKP					Dinas Kesehatan
43	IKM atas pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang	Poin	89						Dinas Kesehatan
44	IKM pelayanan kepegawaian, pengembangan SDM, pendidikan, penelitian, dan pengembangan	Poin	89	IKP					Dinas Kesehatan
45	Persentase Kab/kota yang melaksanakan pengawasan	Persen	30						Dinas Kesehatan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kualitas kesehatan lingkungan								
46	Persentase kab/kota dengan IKS> 60%	Persen	2,12	IKP					Dinas Kesehatan
47	Persentase kab/kota dengan cakupan rumah tangga ber-PHBS >80%	Persen	75	IKP					Dinas Kesehatan
48	Persentase kerjasama/ kemitraan tingkat daerah provinsi (evaluasi pelaksanaan dan implementasi PKS-nya)		10	IKP					Dinas Kesehatan
									Dinas Kesehatan
49	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan pengetahuan	Persen	70	IKP					Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Tingkat Konektivitas	Persen	60	Indikator Tujuan	Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	86,44	90,11	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
2	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,57	Indikator Tujuan	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	59,80	61,23	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
3	Persentase aksesibilitas menuju kawasan	Persen	30,79	IKU PD Perubahan konsep perhitungan aksesibilitas dan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Kepada	Persen	N/A	15,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	potensial pusat-pusat kegiatan			Penyesuaian Target	Masyarakat Jasa Konstruksi				
4	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	87,51	IKU PD Penyesuaian Target	Persentase Jalan Terbangunan/ Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis (BIDANG TEKNIK)	Persen	100	100	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
5	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	77,7	IKP PD Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase rekomendasi hasil survey kondisi jalan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan (HARBANG)	Persen	100	100	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
6	Persentase rekomendasi hasil survei kondisi jalan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan untuk pengembangan wilayah (HARBANG)	Persen	100	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase Jalan Terbangun Yang Menggunakan Material Lulus Uji Pembanding (UPTD LABKON)	Persen	N/A	100	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
7	Persentase Jalan Terbangun/ Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis Untuk Pengembangan Wilayah (BIDANG TEKNIK)	Persen	100	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD I	Persen	83,84	89,21	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
8	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan	Persen	33,13	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai	Persen	79,73	84,19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD I				standar di wilayah UPTD II				
9	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD II	Persen	30,4	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD III	Persen	89,04	94,6	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
10	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD III	Persen	32,15	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD IV	Persen	87,65	92,19	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
11	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD IV	Persen	35,53	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD V	Persen	85,61	93,68	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
12	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualifikasi baik dan sedang di wilayah UPTD V	Persen	28,76	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD VI	Persen	90,98	94,5	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Persentase panjang jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah berkualitas baik dan sedang di wilayah UPTD VI	Persen	27,25	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase pemanfaat ruang yang mematuhi ketentuan rekomendasi pemanfaatan ruang kewenangan provinsi (TATA RUANG)	Persen	24	87,50	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
14	Persentase Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang Terlayani sesuai Standar (TATA RUANG)	Persen	83,3	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase RTRW Kab/Kota yang sinkron dengan RTRW Provinsi (TATA RUANG)	Persen	30,45	81	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
15	Persentase RTRW Kab/Kota yang sinkron dengan RTRW Provinsi (TATA RUANG)	Persen	55	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (TATA RUANG)	Persen	5,6	18,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (TATA RUANG)	Persen	85,2	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
17	Persentase Jalan Terbangun/ Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis (BIDTEK)	Persen	100	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
18	Persentase Penyedia Jasa yang Patuh Terhadap Ketentuan Dokumen Rencana Teknis (HARBANG)	Persen	100	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang



A040B8A293



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Persentase Jalan Terbangun yang Menggunakan Material Lulus Uji Pembanding (UPTD LABKON)	Persen	100	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
20	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD I)	Persen	85,52	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
21	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD II)	Persen	83,2	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
22	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD III)	Persen	89,21	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
23	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD IV)	Persen	88,28	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
24	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD V)	Persen	86,75	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
25	Persentase panjang jalan dan jembatan berkualifikasi baik dan sedang (UPTD VI)	Persen	90,91	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26	Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur (JAKON)	Persen	34,82	IKP Baru Penyesuaian Arsitektur Kinerja 2024					Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
27	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,267	IKU PD	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	105,28	Dinas Sumber Daya Air
28	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	56,89	IKU PD	Indeks Daya Rusak Air	Poin	57,04	58,53	Dinas Sumber Daya Air
29					Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	N/A	100	Dinas Sumber Daya Air
30					Persentase Penurunan Titik Banjir pada 2 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Persen	N/A	100,00	Dinas Sumber Daya Air
31					Persentase Infrastruktur Situ, Embung dan Waduk yang sesuai Standar	Persen	N/A	100	Dinas Sumber Daya Air
32	Persentase Situ yang Terpelihara	Persen	11,67	IKP	Persentase Infrastruktur Air Baku yang sesuai standar	Persen	N/A	100	Dinas Sumber Daya Air
	Rasio Luas Daerah Irigrasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	100	IKP	Persentase Infrastruktur Sungai di WS. Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar	Persen	N/A	100	Dinas Sumber Daya Air
33	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	50,71	IKP	Persentase Infrastruktur Pengaman Pantai di WS. Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar	Persen	N/A	100	Dinas Sumber Daya Air
34	Persentase Infrastruktur SDA	Persen	100	IKP	Persentase Rekomendasi Teknis	Persen	N/A	100	Dinas Sumber Daya Air





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi				yang Diterbitkan Sesuai Standar				
35					Persentase Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan Sumber Daya Air yang Diproses	Persen	N/A	100	Dinas Sumber Daya Air
36					Persentase Infrastruktur Irigasi Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar	Persen	N/A	100	Dinas Sumber Daya Air
37					Persentase Infrastruktur Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi yang sesuai Standar	Persen	N/A	N/A	Dinas Sumber Daya Air
38					Persentase Infrastruktur SDA yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	Persen	100	100	Dinas Sumber Daya Air
39					Persentase Infrastruktur Irigasi yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	Persen	100	100	Dinas Sumber Daya Air
40					Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Ciliwung-Cisadane	Persen	0,18	0,33	Dinas Sumber Daya Air
41					(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 10 Daerah Irigasi pada WS Ciliwung-Cisadane	Persen	58,16	59,27	Dinas Sumber Daya Air
42					Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung	Persen	0,65	0,84	Dinas Sumber Daya Air



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-65



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pada UPTD PSDA WS Cisadea-Cibareno				
43					(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 12 Daerah Irigasi pada WS Cisadea-Cibareno	Persen	53,78	56,76	Dinas Sumber Daya Air
44					Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Citarum	Persen	0,22	0,39	Dinas Sumber Daya Air
45					(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 34 Daerah Irigasi pada WS Citarum	Persen	54,57	55,07	Dinas Sumber Daya Air
46					Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung	Persen	0,53	0,95	Dinas Sumber Daya Air
47					(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 27 Daerah Irigasi pada WS Cimanuk-Cisanggarung	Persen	60,15	61,1	Dinas Sumber Daya Air
48					Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Citanduy	Persen	0,17	0,3	Dinas Sumber Daya Air
49					(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 10 Daerah Irigasi pada WS Citanduy	Persen	54,45	56,98	Dinas Sumber Daya Air
50					Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Ciwulan-Cilaki	Persen	0,4	0,61	Dinas Sumber Daya Air
51					(Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 6 Daerah	Persen	61,26	62,28	Dinas Sumber Daya Air





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Irigasi pada WS Ciwulan-Cilaki				
52	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung*	Persen	88,1	IKU PD	Bangunan Gedung yang memenuhi Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	95	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
53					Penanganan Bangunan dan Lingkungan	Persen	N/A	N/A	Dinas Perumahan Dan Permukiman
54	Akses Air Minum layak	Persen	95	IKU PD	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	37,60	Dinas Perumahan Dan Permukiman
55	Akses Sanitasi layak	Persen	76	IKU PD	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	N/A	13,5	Dinas Perumahan Dan Permukiman
56	Akses Penanganan Sampah di Perkotaan	Persen	77	IKU PD	Penurunan pengangkutan sampah ke TPA	Persen	N/A	66,96	Dinas Perumahan Dan Permukiman
57	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio	0,4	IKP	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	N/A	16	Dinas Perumahan Dan Permukiman
58	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	88,1	IKP	Persentase Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	N/A	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
59	Persentase Kumulatif Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Kawasan Tematik	Persen	40	IKU PD	Persentase Terbangunnya Infrastruktur di Kawasan Strategis Provinsi	Persen	N/A	N/A	Dinas Perumahan Dan Permukiman





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
60					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	Persen	7,45	23,04	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
61	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Persen	100	IKP	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	Persen	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
62	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota	Persen	100		IKP	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Persen	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
63	Persentase Luas genangan yang tertangani	Persen	100			IKP				
64	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan di Perkotaan	Persen	77							
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	55,2	Indikator Tujuan	Penanganan PSU Permukiman	Persen	N/A	N/A	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
2					Rumah Tangga yang Menempati Rumah yang	Persen	78,81	79,82	Dinas Perumahan Dan Permukiman	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					Memenuhi Syarat Ketahanan Bangunan					
3	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	Persen	67,36	IKU PD	Penurunan Persentase Sisa Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)	persen	67,05	60,14	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
4	Persentase Warga Negara Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100		IKP	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
5	Persentase perumahan terfasilitasi PSU	Persen	56,88	IKP	Persentase Satuan Permukiman yang mendapatkan penanganan PSUnya	Persen	N/A	20	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
6	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (10-15 Ha)	Persen	32,64	IKP	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang telah Ditangani	Persen	32,9	39,8	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
7					Persentase pengembang tersertifikasi	Persen	0	0	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
8	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	Persen	98,76	IKU PD						
5	TRANTIBUMLINMAS				TRANTIBUMLINMAS					
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	91	IKU PD	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	49,51	Satuan Polisi Pamong Praja	
2					Indeks Tantribumlimnas	Poin	N/A	65	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Persentase Penanganan Gangguan	Persen	95	IKP	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman	Persen	183	98	Satuan Polisi Pamong Praja	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan				dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan				
4	Persentase penanganan penegakan PERDA dan Peraturan Gubernur yang terselesaikan	Persen	60	IKP	Persentase penegakan PERDA dan Peraturan Gubernur yang terselesaikan	Persen	100	60	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80		Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	80	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Persentase anggota satpol PP dan PPNS yang mendapatkan pelatihan	Persen	92		Persentase anggota satpol PP dan PPNS yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	90	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,73		Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,72	0,73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Nilai Penangan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Poin	0,76	IKP	Nilai Penangan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Poin	0,76	0,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Peresentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persen	100	IKP	Peresentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada	Persen	100		Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	saat keadaan Darurat Bencana				pada saat keadaan Darurat Bencana				
11	Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Poin	0,54	IKP	Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Poin	0,6	0,61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Persentase Kabupaten/Kota yang Terbina Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100		Persentase Kabupaten/Kota yang Terbina Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	SOSIAL				SOSIAL				
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,85 - 6,46	Indikator Tujuan, Target 2025 Hasil Rakortekrenbang 2024	Indeks kesejahteraan sosial (IKESOS)	Poin	56,88	57,38	Dinas Sosial
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	43,72	IKU PD	Indeks pemberdayaan sosial	poin	N/A	64.67	Dinas Sosial
3					Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	poin	N/A		Dinas Sosial
4					Indek penanganan bencana	poin	N/A	50	Dinas Sosial
5					Indeks rehabilitasi sosial	poin	N/A	15	Dinas Sosial
6					Persentase PSKS yang Aktif	Persen	100	100	Dinas Sosial
7	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	Persen	100	IKP	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	100	100	Dinas Sosial





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Darurat bencana provinsi*								
8	Persentase Pekerja Migran korban tindak kekerasan yang tertangani*				Persentase warga negara korban tindak kekerasan yang terlindungi	Persen	100	100	Dinas Sosial
9	Persentase Penyaluran Bansos Bagi KPM	Persen	100	IKP	Persentase bansos kesejahteraan keluarga yang disalurkan tepat sasaran	Persen	98	98	Dinas Sosial
10	Persentase Kemandirian Ekonomi Bagi Masyarakat (KAMI BISA) yang Berhasil dalam Pengelolaan Usaha	Persen	45	IKP	Persentase KUBE yang meningkat pendapatnnya	Persen	30	30	Dinas Sosial
11	Persentase Anak yang Mendapat Orang Tua Angkat	Persen	75	IKP	Persentase Anak yang Mendapat Pengasuhan Orang Tua Angkat	Persen	100	100	Dinas Sosial
12	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti*	Persen	100	IKP	Persentase Anak Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali	Persen	100	100	Dinas Sosial
13	Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali	Persen	92	IKP	Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali	Persen	100	100	Dinas Sosial
14					Persentase Penyandang Disabilitas yang tertangani dan berfungsi sosial kembali	Persen	100	100	Dinas Sosial
15					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali	Persen	100	100	Dinas Sosial
16					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang	Persen	100	100	Dinas Sosial





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					tertangani dan berfungsi sosial kembali				
17					Persentase WRSE dan Wanita Tuna Susila yang tertangani dan berfungsi sosial kembali	Persen	100	100	Dinas Sosial
18	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	Persen	100	IKP	Indeks Kepuasan Masyarakat (TMP)	Indeks	B	B	Dinas Sosial
19	Persentase PPKS yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*	Persen	100	IKP					
20	Persentase UPTD yang Menerapkan Pedoman Rehabilitasi Sosial sesuai Ketentuan	Persen	100	IKP					
21	Persentase KPM yang Mendapatkan Bimbingan Kewirausahaan Sosial	Persen	100	IKP					
22	Persentase Penyaluran Bansos Bagi KPM	Persen	100	IKP					
23	Persentase Kemandirian Ekonomi Bagi Masyarakat (KAMI BISA) yang Berhasil dalam Pengelolaan Usaha	Persen	45	IKP					





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
24	Persentase Anak yang Mendapat Orang Tua Angkat	Persen	75	IKP						
25	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti*	Persen	100							
26	Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali	Persen	92							
27	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	Persen	100							
28	Persentase PPKS yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*	Persen	100							
29	Persentase UPTD yang Menerapkan Pedoman Rehabilitasi Sosial sesuai Ketentuan	Persen	100							
30	Persentase KPM yang Mendapatkan Bimbingan Kewirausahaan Sosial	Persen	100							
7	TENAGA KERJA				TENAGA KERJA					
1	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	34,36	IKU PD	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	N/A	27,51	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan	Persen	76,11	IKU PD	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Persen	N/A	74,62	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	IKP	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	100	IKP	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	59,26	48,15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	Persen	53,51	IKP	Persentase pencari kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	Persen	55,72	56,72	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
6	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	91	IKP	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	N/A	54	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
7	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen	20,2	IKP	Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	N/A	9,85	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK				





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,46	Menggantikan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,458	0,458	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	67,66	Indikator Tujuan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,51*	71,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	
3						Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	816	816	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
4						Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	62,02*	62,08	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
5					Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Regulasi Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	55,56	66,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	
	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender	Persen	100	IKU PD	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase Keberhasilan penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	100	IKU PD	Persentase Keberhasilan penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
7	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	100	IKU PD	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak	Persen	100	IKU PD	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
8	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persen	100	IKP	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
9	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Angka	1,67	IKP	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Angka	1,77	1,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	37,08	IKP	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang	Persen	18,52	33,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang mendapatkan penguatan untuk standardisasi di Jawa Barat				Mendapatkan Penguatan untuk Standardisasi di Jawa Barat				Dan Keluarga Berencana
10	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	Angka	0,19	IKP	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	Angka	0,29	0,26	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
11	Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	Persen	100		IKP				
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA	Persen	100	IKP					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
12	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	Persen	100	IKP					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
13	Persentase Sumber Daya Manusia terbina yang menerapkan	Persen	9,76	IKP					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengarusutamaan Gender								Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	72,1	Indikator Tujuan (BPS tidak melakukan perhitungan pada Tahun 2025)					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
9	PANGAN				PANGAN				
1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Tk. Konsumsi	Poin	94,36	Indikator Tujuan	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	Poin	93,28	94,36	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU)	Persen	N/A	4,58	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	Tingkat Konsumsi Pangan**			IKU PD (tambahan/sebelumnya tidak ada di RPD)	Tingkat konsumsi pangan (energi dan protein)				Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	a. Energi	kkal/kap/hr	2100		- energi	kkal/kap/hari	2069,90	2100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	b. Protein	gr/kap/hr	57		- protein	gr/kap/hari	62,3	57	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
4	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Tk. Ketersediaan	Poin	95,83	IKU PD	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan	Poin	95,37	95,45	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
5	Persentase peningkatan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	2	IKU PD turun level menjadi IKP. Perhitungan target menggunakan metode baru	Persentase penurunan lokasi rentan rawan pangan	Persentase	3	3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	sesuai standar mutu dan keamanan pangan*								
6					Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase	96	96	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
7	Persentase Cadangan Pangan	Persen	50	IKP	Persentase PSAT Pre Market yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase	N/A	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
8						Persentase masyarakat terbina yang menerapkan rencana tindak lanjut hasil pembinaan konsumsi pangan	Persentase	100	100
9	Persentase desa rentan pangan yang diintervensi	Persen	3	IKP	Persentase Cadangan Pangan	Persentase	69,53	50	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
10						Persentase Kab/kota dengan disparitas harga komoditas di Tk konsumen	Persentase	92	92,2
10	PERTANAHAN				PERTANAHAN				
1	Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	100	IKU PD	Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	113,8	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	IKP	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu	Persen	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persen	100		IKP	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Persen	100	100





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	untuk Pembangunan yang selesai tepat waktu				Pembangunan yang selesai tepat waktu				
4	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/kota	Persen	40	IKP	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
5	Persentase Inventarisasi sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100		Persentase Invetarisasi sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
6					Persentase Tanah Ulayat yang terinventarisir	Persen	N/A	N/A	Dinas Perumahan Dan Permukiman
7	Persentase jumlah kabupaten/kota terfasilitasi redistribusi tanah dan penataan akses dibagi jumlah kabupaten/kota	Persen	100	IKP	Persentase jumlah kabupaten/kota terfasilitasi redistribusi tanah dan penataan akses	Persen	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
11	LINGKUNGAN HIDUP				LINGKUNGAN HIDUP				
1	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	8,88	Indikator Tujuan/Indikator Gubernur	Indeks Respon Lingkungan Hidup	Poin	60,82	60,87	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	49,1	IKU PD	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	46,86	64,61	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	90,97	IKU PD	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	88,34	85,14	Dinas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	83,04	IKU PD	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	83,68	59,52	Dinas Lingkungan Hidup





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik*	Persen	N/A	IKU PD	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Poin	N/A	0,557	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah dan persampahan kumulatif	Persen	1,21		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor persampahan kumulatif	Persen	N/A	1,42	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase Perencanaan Pembangunan yang sudah terintegrasi dengan rencana pembangunan lingkungan hidup	Persen	100	IKP	Persentase Perencanaan Pembangunan yang sudah terintegrasi dengan rencana pembangunan lingkungan hidup	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Parameter COD (mg/L)	mg/L	24,74		Penurunan Parameter COD	mg/L	24,83	24,58	Dinas Lingkungan Hidup
9	Parameter Pengujian Kualitas Air yang Terakreditasi	Persen	41	IKP	Parameter Pengujian Kualitas Air Laut yang terakreditasi	Persen	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
10	Parameter Pengujian Kualitas Udara Ambiens yang Terakreditasi	Persen	88		Parameter Pengujian Kualitas Udara yang Terakreditasi	Persen	26,92	30,77	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Persen	100	IKP	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
12	Penurunan konsentrasi parameter SO2	µg/m3	20,6		Penurunan konsentrasi parameter SO2	µg/m3	9,82	9,57	Dinas Lingkungan Hidup





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Persentase Taman Kehati atau RTH Kehati yang dibina	Persen	93,1	IKP	Persentase Lokasi Taman Kehati atau RTH Kehati yang dibina	Persen	0,66	0,72	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase penanganan pengaduan lingkungan Hidup	Persen	100		Persentase penanganan pengaduan lingkungan Hidup	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
15	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen Laboratorium	Persen	100		Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen Laboratorium	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
16	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan dan/atau produk hukum	Persen	100		Persentase Pembinaan Terhadap Kebijakan dan/atau Produk hukum	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
17	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	Persen	78,67	IKP	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	78,01	79,19	Dinas Lingkungan Hidup
18	Persentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	80,73		Persentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	82,11	86,96	Dinas Lingkungan Hidup
19	Persentase kab/kota di wilayah pesisir yang dibina	Persen	66,67		Persentase kab/kota di wilayah pesisir yang dibina	Persen	N/A	36,36	Dinas Lingkungan Hidup
20	Persentase Kampung Iklim yang dibina	Persen	75		Persentase Kampung Iklim yang dibina	Persen	74	75	Dinas Lingkungan Hidup
21	Persentase peningkatan Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisir di Kabupaten/Kota	Persen	87,5	IKP	Persentase peningkatan Masyarakat Hukum Adat yang terbina di Kabupaten/Kota	Persen	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-83



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Persentase pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi	Persen	100	IKP	Persentase Perencanaan Pembangunan yang sudah terintegrasikan dengan rencana pembangunan lingkungan hidup	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
23					Persentase Pembinaan Terhadap Kebijakan dan/atau Produk hukum	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
24					Parameter Pengujian Kualitas Air yang Terakreditasi	Persen	45,88	49,41	Dinas Lingkungan Hidup
25					Parameter Pengujian Kualitas Limbah dan B3	Persen	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
26	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai implementasinya	Persen	100	IKP	Persentase Dokumen Lingkungan yang di proses	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
27					Persentase Jumlah pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi	Persen	N/A	20	Dinas Lingkungan Hidup
28					Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Persen	N/A	100	Dinas Lingkungan Hidup
29					Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	48,13	58	Dinas Lingkungan Hidup
30	Persentase Peningkatan Sampah yang	Persen	90	IKP	Persentase Jasa Layanan Sampah yang	Persen	28,53986375	2854,00%	Dinas Lingkungan Hidup



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dikelola Di 3 TPA/TPST Regional				dikelola di TPA/TPST Regional				
31	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Sektor Limbah dan Persampahan	Persen	100	IKP	Presentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK di Kabupaten/Kota	Persen	62,96	66,67	Dinas Lingkungan Hidup
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Persen	89,05	IKU PD	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Persen	81,52	83,37	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2					Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persen	71,15	73,50	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Kepemilian Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persen	98,39	IKP	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persen	54,02	55	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persen	99,05	IKP	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persen	88,28	92	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Data yang Dimanfaatkan	Persen	83,78	IKP	Persentase Data yang Dimanfaatkan	Persen	83,78	86,49	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7					Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Buku Profil Kependudukan	Persen	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	Persen	100	IKP					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Indeks Desa Membangun	Poin	0,8	Indikator Tujuan	Indeks Desa	Persen	77,11	77,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Desa Berkembang	Persen	12,63	IKU PD	Persentase Desa Mandiri	Persen	39,09	40,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3					Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	0,3	0,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4					Persentase Pengentasan Desa Sangat Tertinggal	Persen	0,02	0,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5					Persentase nilai indeks dimensi Lingkungan, Desa di kabupaten/kota	Persen	N/A	74,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6					Persentase nilai indeks dimensi Layanan Dasar Desa di kabupaten/kota	Persen	N/A	81,8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7					Persentase nilai indeks dimensi Aksesibilitas Desa di kabupaten/kota	Persen	N/A	87,34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8					Persentase nilai indeks dimensi sosial desa di kabupaten/kota	Persen	N/A	76,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9					Persentase nilai indeks dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa di kabupaten/kota	Persen	N/A	81,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10					Persentase nilai indeks dimensi ekonomi desa di kabupaten/kota	Persen	N/A	70,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Persentase Desa yang difasilitasi Penataannya	Persen	100	IKP					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Persentase Desa yang mendapat fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan Desa	Persen	100	IKP					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan Desa	Persen	100	IKP					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Persentase Kerjasama Antar Desa Kewenangan Provinsi yang Terfasilitasi	Persen	100	IKP					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	66,44*	69,71	Dinas Pemberdayaan



A040B8A293



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2	Angka Fertilitas Total (TFR)	Angka	2,05	IKU PD	Angka Fertilitas Total (TFR)	Angka	2,03	2,03	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3	Persentase penurunan jumlah perkawinan anak	Persen	5	IKP	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun	Persen	5,78	5,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
4	Persentase kebijakan pengendalian penduduk yang diterapkan	Persen	87,5	IKP	Persentase Kebijakan Pengendalian Penduduk yang Diterapkan	Persen	75	87,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
5	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	Persen	64,79	IKP	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	Persen	64,3	64,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,42	Indikator Tujuan					
15	PERHUBUNGAN				PERHUBUNGAN				
1	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum di Jawa Barat	Persen	5,7	IKU PD	Tingkat Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat	Persen	57,58	60,34	Dinas Perhubungan



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

REVISI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-88



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Tingkat Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat	Persen	51,75	IKU PD setelah disesuaikan dengan Cascading Kinerja Biro Organisasi	Modal Share Angkutan Umum	Persen	N/A	13,00	Dinas Perhubungan
3	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Darat	Persen	3	IKP, Terdapat Perubahan Nama Indikator serta Target	Persentase Konektivitas Transportasi Darat	Persen	93,01	93,75	Dinas Perhubungan
4	Persentase Perencanaan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	Persen	34	IKP	Persentase Daerah Rawan Kecelakaan dan Kemacetan yang Ditangani	Persen	53,64	61,32	Dinas Perhubungan
5	Persentase Kajian Hasil Pengembangan Bidang Transportasi yang Diterapkan	Persen	82	IKP	Persentase Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi Yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	Dinas Perhubungan
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	Persen	92,7	IKP	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah I	Persen	90,77	90,9	Dinas Perhubungan
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	Persen	90,7	IKP	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah II	Persen	91,64	91,8	Dinas Perhubungan
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	Persen	88,7	IKP	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah III	Persen	74,55	79,34	Dinas Perhubungan
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ	Persen	94,3	IKP	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan	Persen	96,75	96,78	Dinas Perhubungan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)				LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah IV				
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan ASDP	Persen	87,3	IKP	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Darat	Persen	N/A	3	Dinas Perhubungan
11	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Laut dan ASDP	Persen	9		IKP	Persentase Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Persen	92,86	92,86
12	Persentase Peningkatan Simpul Transportasi yang terkoneksi Angkutan Umum	Persen	100	IKP		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPTD PP LLASDP	Persen	89,88	90,03
13	Persentase Persyaratan Pengelolaan Pelabuhan Laut yang Terpenuhi	Persen	61		IKP	Persentase Persyaratan Pengelolaan Pelabuhan Laut yang Terpenuhi	Persen	59,38	59,38
14	Persentase Peningkatan Simpul Transportasi Laut dan ASDP yang terkoneksi	Persen	22	IKP		Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Laut dan ASDP	Persen	N/A	1
15	Persentase Kajian Hasil Pengembangan Perkeretaapian yang Diterapkan	Persen	100		IKP	Persentase Perencanaan Perkeretapian di Jawa Barat yang Dimanfaatkan	Persen	8,33	9,52
16	Persentase Peningkatan Pengguna Kereta Api	Persen	5,53	IKP		Persentase Peningkatan Pengguna Kereta Api	Persen	N/A	3
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	84,47	IKU PD	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	N/A	77,75	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,16	IKU PD	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	4,73	4,74	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3					Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	N/A	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4	Persentase Layanan Publik Perangkat Daerah yang terpusat dalam portal layanan publik berbasis elektronik	Persen	35	IKP	Indeks Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Poin	79,52	79,57	Dinas Komunikasi Dan Informatika
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persen	75	IKP					Dinas Komunikasi Dan Informatika
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Nilai	5	IKP					Dinas Komunikasi Dan Informatika
7	Nilai Perencanaan Strategis SPBE	Nilai	4	IKP					Dinas Komunikasi Dan Informatika
8	Nilai Penyelenggaraan SPBE	Nilai	5	IKP					Dinas Komunikasi Dan Informatika
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Nilai	5	IKP					Dinas Komunikasi Dan Informatika





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Nilai Ketersediaan Informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru	Nilai	94,5	IKP					Dinas Komunikasi Dan Informatika
11	Nilai Akses dan Diseminasi Informasi	Persen	94,5						Dinas Komunikasi Dan Informatika
12	Persentase arahan pimpinan daerah bersifat strategis yang memanfaatkan pusat kendali	Persen	72						Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	26	IKU PD	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	2,66	2,85	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
2	Persentase UMKM yang naik kelas	Persen	27,5	IKU PD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persen	0,23	0,25	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
3	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi	Persen	9	IKP	Persentase Bimbingan/Konsultasi Izin Usaha Koperasi	Persen	100	100	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi yang Melaporkan RAT	Persen	8		Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Persen	70,4	74,2	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
4					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persen	9	10,88	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
5	Persentase UMKM yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	Persen	66,6	IKP	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	Persen	100	100	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	17	IKP	Persentase UMKM Yang Mendapatkan Fasilitas Pemerintah Daerah	Persen	2,84	10	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
7	Persentase Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	Persen	51		Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen	100	100	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
8	Persentase Kepatuhan Koperasi	Persen	16		Persentase Kepatuhan Koperasi	Persen	15	16	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
9	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	30	IKP	Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persen	25	30	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
10	Persentase Unit Usaha UMKM yang Difasilitasi Pemasaran	Persen	44	IKP	Persentase UMKM Binaan yang Meningkatkan Omzet Usahanya	Persen	12	13	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
11	Persentase UMKM yang Berpotensi Ekspor	Persen	22	IKP					Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
18	PENANAMAN MODAL				PENANAMAN MODAL				
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	657,77	Inidktoar Tujuan	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	Persen	N/A	8,05	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	233,26		IKU PD	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	251,14	271,35
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Poin	92	IKU PD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	91,81	92,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Jumlah Investor yang berminat untuk Investasi	Investor	12	IKP	Persentase Potensi Investasi di 27 Kabupaten/Kota yang Teridentifikasi	Persen	96	96	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase peningkatan investor	Persen	10		IKP	Jumlah Investor yang berminat untuk Berinvestasi	Calon Investor	12	12
6	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai standar	Persen	100	IKP		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar	Persen	100	100
7	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal	Persen	16		IKP	Jumlah Proyek yang Dilaporkan Melalui LKPM		113.000	120.000
8	Persentase Layanan PMPTSP yang memanfaatkan Sistem Informasi	Persen	100	IKP		Digitalisasi dan Pemanfaatan Data Informasi PMPTSP	Persen	100	100
9						Jumlah kerjasama antar pemerintah, swasta, asosiasi, komunitas, media dan akademisi untuk meningkatkan investasi	Kesepakatan	N/A	10
10	Persentase Pengaduan dan Permohonan Advokasi yang terlayani sesuai standar	Persen	100	IKP					
11	Persentase dokumen data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	Persen	100		IKP				





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Persentase perubahan untuk mendukung implementasi RB,ZI, kinerja PPB dan MCP	Persen	100	IKP					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik yang Sesuai Ketentuan	Persen	100	IKP					Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA				KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA				
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	52,51	Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	61,10*	62,51	Dinas Pemuda dan Olahraga
2					Indeks Pembangunan Olahraga	indeks	0,409	0,413	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	36,67	Indikator Sasaran PD	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	46,16	47,45	Dinas Pemuda dan Olahraga
4					Indeks Partisipasi olahraga	Indeks	0,208	0,227	Dinas Pemuda dan Olahraga
5					Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Besar	1,00	3,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
6					Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	17	17,19	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Persentase Peningkatan Masyarakat aktif Berolahraga	Persen	10	IKP	Persentase Peningkatan Masyarakat aktif Berolahraga	Persen	10	10	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan	Persen	88,31	IKP	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan	Persen	87,5	87,87	Dinas Pemuda dan Olahraga





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
9					Persentase atlet yang mendapatkan penghargaan sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga	
10					Rasio Wirausaha Pemuda	Poin	0,69	0,7	Dinas Pemuda dan Olahraga	
11	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang dimanfaatkan	Persen	73,09	IKP	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang dimanfaatkan	Persen	72	72,72	Dinas Pemuda dan Olahraga	
12					Angka pemuda aktif mengikuti organisasi	Poin	1,76	1,79	Dinas Pemuda dan Olahraga	
13					Angka pemuda yang menduduki posisi manajerial	Poin	3,87	3,91	Dinas Pemuda dan Olahraga	
14					Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	16	16,47	Dinas Pemuda dan Olahraga	
15	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	61,64		Indikator Sasaran PD					Dinas Pemuda dan Olahraga
16	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Besar	3	IKU PD					Dinas Pemuda dan Olahraga	
17	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	18,2		IKP					Dinas Pemuda dan Olahraga
18	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	4,27							Dinas Pemuda dan Olahraga
19	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	14,46	IKP						Dinas Pemuda dan Olahraga



A040B8A293



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan	Persen	17,05	IKP					Dinas Pemuda dan Olahrga
21	Persentase Medali Emas yang Diperoleh dalam Event Nasional	Persen	20						Dinas Pemuda dan Olahrga
20	STATISTIK				STATISTIK				
1					Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,07	3,07	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	poin	2,87	IKU PD					Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100						Dinas Komunikasi Dan Informatika
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100						Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	PERSANDIAN				PERSANDIAN				
1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	639	IKU PD	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	642	716	Dinas Komunikasi Dan Informatika





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Persen	98,52	IKP					Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi	Persen	99	IKP					Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	KEBUDAYAAN				KEBUDAYAAN				
1	Persentase Pembangunan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	33,21	Indikator Tujuan	Nilai Dimensi Warisan Budaya	Poin	N/A	56,64	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2						Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Poin	N/A	27,36
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	33,21	IKU PD	Penetapan Warisan Budaya Jawa Barat (sasaran)	Poin	47	35	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase Penanganan Cagar Budaya	Persen	33,33		IKP	Persentase Cagar Budaya yang terlindungi dan dimanfaatkan	Persen	43,18	16,67
5	Persentase Benda Koleksi Museum yang Dilindungi	Persen	33,18	IKP	Jumlah Benda Koleksi Museum Sri Baduga dan Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang lestari	Koleksi	N/A	7390	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persentase Pengelolaan Warisan Budaya	Persen	33,47		IKP	Persentase Warisan Budaya Jawa Barat yang dilindungi	Persen	N/A	16,67
23	PERPUSTAKAAN				PERPUSTAKAAN				
1					Indeks Budaya Literasi	Poin	73,68	73,69	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	72,84	IKU PD	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	72,76	72,77	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	73,1	IKU PD	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Poin	75,07	75,08	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	27	IKP	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	24	32	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
5	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Poin	14.902	IKP	Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Persen	N/A	27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
6	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Poin	0,0028	IKP	Persentase Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Persen	N/A	88,96	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
7	Tingkat Kunjungan masyarakat perhari	Poin	0,4282	IKP	Tingkat Kunjungan ke Perpustakaan	Persen	N/A	93,75	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
8	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Poin	21.991	IKP	Persentase Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Persen	N/A	30	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
24	KEARSIPAN				KEARSIPAN					
1					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Poin	93,50	93,60	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
2					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Poin	80,5	81,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
					Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Poin	82,00	82,50	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawabana Nasional	Persen	100	IKP	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	100	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
4	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip*	Persen	100		IKU PD (semula Indikator Program)	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persen	70	71	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
5						Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persen	N/A	60	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
6	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik	Perangkat Daerah	37	IKU PD					Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN				KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan**	Miliar Rupiah	25.309.19	IKU Perangkat Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	1,40	6,31	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
2					Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	1.589.396,38	1.591.708,47	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3					Tingkat keberlanjutan kawasan konservasi di perairan wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil yang dikelola (EVIKA)	Poin	58,5	58,6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
4	Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan	Persen	86	IKP	Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan	Persen	85,5	87,21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5					Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persen	32,43	32,5	Dinas Kelautan Dan Perikanan
6	Jumlah produksi Garam	Ton	67	IKP	Jumlah Produksi Garam	Ton	211.046,32	215.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
7	Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	65,75	IKP	Persentase Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	82,5	85,75	Dinas Kelautan Dan Perikanan
8	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	281.600,00	IKP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	291.284,15	282.608,47	Dinas Kelautan Dan Perikanan
9	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.309.100,00	IKP	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	1.298.112,23	1.309.100,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
10	Angka Konsumsi Ikan**	Kg/Kap/th	39,8	IKP	Angka Konsumsi Ikan	(KG/KAP/THN)	46,61	24,17	Dinas Kelautan Dan Perikanan
11	Persentase produk perikanan yang sesuai standar mutu dan keamanan	Persen	100	IKP	Persentase produk perikanan yang sesuai standar mutu dan keamanan	Persen	100	100	Dinas Kelautan Dan Perikanan
12	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	persen	94	IKP	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Sektor Kelautan dan Perikanan	Persen	96,05	80	Dinas Kelautan Dan Perikanan
26	PARIWISATA				PARIWISATA				
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan	Persen	3,19	Indikator Tujuan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,07	3,10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	akomodasi dan makan minum									
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat*	Persen	12,85	IKU PD	Proporsi Investasi Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	17,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Barat*	Persen	9,15		IKU PD	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Persen	69,10	5,73	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	4,01	IKU PD	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Persen	3	0,89	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
5	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,52	IKU PD	Pertumbuhan Investasi Industri Kreatif	Rupiah (Triliun)	44,09	44,83	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
6					Persentase Promosi melalui Media	Persen	31,82	11,76	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
7	Persentase Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Nusantara	Persen	31,82	IKP	Persentase pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi	Persen	91,82	14,29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
8	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	60	IKP, Kondisi Awal 2023 merupakan Data 2022	Persentase Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar	Persen	40	60	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	35,22	IKP	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	163.814	155.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
27	PERTANIAN				PERTANIAN					





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	108,44	Indikator Tujuan	Indeks harga yang diterima (IT) Peternak	Poin	125,54	126,10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	Persen	75		IKP	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	Persen	74,09	5
3	Persentase peningkatan mutu produk hewan*	Persen	15	IKU PD turun level menjadi IKP		Persentase peningkatan Mutu Produk Hewan	Persen	18,33	15
4						Persentase peningkatan sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teruji	Persen	311	236
5					Persentase produk Susu ASUH yang tersertifikasi	Persen	80	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
6					Tingkat Kesembuhan pasien	Persen	97,21	93,2	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
7	Tingkat pemenuhan penataan prasarana peternakan	Persen	66,7	IKP	Persentase peningkatan prasarana peternakan	Persen	20	20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
8						Persentase peningkatan prasarana peternakan di UPTD BKHKMV	Persen	50	60
9					Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan di UPTD BPPTDK Margawati	Persen	0	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
10					Persentase Kelompok Peternak Binaan yang mendapatkan Bantuan DOC	Persen	100	8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
11					Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Persen	0	5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-103



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					di UPTD BPPTU Jatiwangi				
12					Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan pada UPTD BPPTSPHPT Cikole	Persen	33,3	42	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
13					Persentase peningkatan prasarana peternakan pada UPTD BPMKP/BP	Persen	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
14					Persentase peningkatan prasarana peternakan pada UPTD BPPIBTSP Bunikasih	Persen	33,3	33,3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
15					Persentase peningkatan prasarana peternakan pada UPTD BPPIBTSP Ciamis	Persen	40	40	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
16					Persentase peningkatan prasarana peternakan pada UPTD RSH	Persen	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
17	Produksi Peternakan	Ton	2.180.630	IKU PD	Produksi peternakan	Ton	2.167.697	2.180.630	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
18					Persentase unit usaha distributor obat hewan yang mematuhi ketentuan persyaratan teknis	Persen	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
19	Persentase peningkatan tingkat kelahiran ternak	Persen	1,5	IKP	Persentase produksi benih/bibit ternak domba yang memenuhi standar	Persen	89,45	85	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
20					Persentase menetasnya ternak Ayam Sentul dan Itik Rambon	Persen	71	74	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21					Persentase volume susu segar yang memenuhi standar percontohan	Persen	98	98	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
22					Persentase permohonan pengujian mutu dan keamanan pakan yang terlayani sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
23					Persentase performa bibit ternak sapi perah di BPPIBTSP Bunikasih yang sesuai standar	Persen	37	75	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
24					Persentase bibit dan benih sapi potong percontohan yang sesuai standar	Persen	N/A	22	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
25	Persentase pelaku usaha peternakan dengan produktivitas yang meningkat kinerjanya	Persen	75	IKP	Persentase Pelaku Usaha Peternakan yang produktif	Persen	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
26					Persentase alumni pelatihan yang menerapkan Hasil Pelatihan Bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan	Persen	60	60	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
27	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	15.698.506	IKU PD	Jumlah Produksi Tanaman pangan dan hortikultura	Ton	16.490.893	16.575.500	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
28	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	Persen	4,5	IKP	Persentase Luas Lahan yang Terlindungi dari Serangan OPT/DPI	Persen	98,22	98,5	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
29					Persentase Sarana Produksi dan Produk Hasil Pertanian yang	Persen	100	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					memiliki hasil uji kandungan kimia				
30					Persentase Peningkatan petani yang terlindungi usaha pertaniannya	Persen	N/A	1	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
31	Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	1.983.690	IKP	Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan	Persen	N/A	10	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
32	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	231,237	IKP	Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura	Persen	N/A	20	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
33	Indeks Pertanaman (IP)	Persen	2,07	IKP	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Persen	N/A	11,5	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
34					Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pengawasan Sarana Pertanian	Persen	N/A	12	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
35	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	Persen	93,13	IKP	Persentase Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	100	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
36	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	62,85	IKP, Data Kondisi Awal 2023, masih menggunakan Data 2022	Persentase Peningkatan Produksi Benih Padi dan Palawija	Persen	10	25	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
37	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	160,75	IKP	Persentase Peningkatan Produksi Benih Tanaman Hortikultura	Persen	N/A	5	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
38					Persentase Peningkatan Produksi Benih Kentang	Persen	N/A	5	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
39					Persentase Penggunaan Alat Mesin Pertanian	Persen	100	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
40	Jumlah petani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh	Orang	7,2	IKP	Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh	Persen	99,6	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
41	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	Persen	37,88	IKP	Persentase SDM Pertanian yang bersertifikat kompetensi	Persen	19,7	21	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
42	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	Persen	100	IKP	Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan/kompetensi produsen dan pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura	Persen	100	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
43	Nilai Tambah Produk Perkebunan	Persen	50	IKU PD	Nilai Tambah Produk Perkebunan secara Berkelanjutan	Persen	51,77	35	Dinas Perkebunan
44	Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Persen	2	IKU PD	Laju peningkatan produktivitas komoditas unggulan utama perkebunan	Persen	1,58	0,5	Dinas Perkebunan
45	Laju peningkatan area lahan perkebunan yang terfasilitasi penanganan dan pengendalian bencana perkebunan	Persen	63,5	IKP	Persentase luas lahan perkebunan terdampak perubahan iklim yang tertangani	Persen	21,8	3,38	Dinas Perkebunan
46	Laju Peningkatan Luas Serangan Organisme	Persen	25	IKP	Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas	Persen	25	25	Dinas Perkebunan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				serangan OPT tanaman perkebunan (serangan on call + preventif)				
47					Persentase poktan yang meningkatkan produktivitas olahannya	Persen	4,63	21,3	Dinas Perkebunan
48	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	Persen	20	IKP	Persentase pengembangan jalan produksi perkebunan yang berfungsi	Persen	19,8	2,78	Dinas Perkebunan
49	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	Persen	41	IKP	Persentase poktan yang menerapkan GAP Perkebunan	Persen	5,55	8,6	Dinas Perkebunan
50	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,54	Indikator Tujuan	Persentase Poktan yang produktif mendiversifikasi produk perkebunan	Persen	13,49	24,19	Dinas Perkebunan
51					Persentase benih perkebunan yang bersertifikat	Persen	N/A	16,6	Dinas Perkebunan
52	Persentase Kelompok Tani yang dibina oleh Penyuluh	Persen	99,1	IKP	Persentase Pengguna Benih yang terlayani kebutuhan benih bermutu	Persen	N/A	100	Dinas Perkebunan
53	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	Persen	29,5	IKP	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan	Persen	34,52	75	Dinas Perkebunan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
54	Persentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi	Persen	25	IKP	Persentase Perkebunan Besar yang berizin dan meningkat kinerjanya	Persen	9,87	15,79	Dinas Perkebunan	
55	Laju Peningkatan Petani yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan	Persen	15					IKP		
56	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana pascapanen dan pengolahan produk Perkebunan	Persen	10	IKP						
57	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana pengolahan Perkebunan	Persen	15	IKP						
58	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	89,70	IKP						
28	KEHUTANAN				KEHUTANAN					
1	Persentase Peningkatan Pengelola Jasa Lingkungan Hutan yang Produktif	Persen	5	IKP	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Persen	5	5	Dinas Kehutanan	





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (Poin)	Poin	43,28	IKU PD	Persentase Tutupan Hutan	Persen	42,15	42,15	Dinas Kehutanan
3						Persentase Penurunan Kerusakan Areal Preservasi dan Perlindungan Setempat yang ditangani	Persen	N/A	5
4	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	5	IKP	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	8,06	10	Dinas Kehutanan
5	Persentase Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai yang sudah Dipulihkan	Persen	57,09		IKP	Nilai Kondisi Lahan DAS	Poin	50	49
6	Persentase Gangguan dan kerusakan hutan di Jawa Barat yang tertangani	Persen	0,3	IKP	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan terhadap kawasan hutan dan hutan rakyat	Persen	N/A	0,5	Dinas Kehutanan
7	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	Persen	100		IKP	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	Persen	100	100
8	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	33	IKU PD	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar	Persen	10	10	Dinas Kehutanan
9						Persentase pengolahan Hasil Hutan Kayu yang berkualitas	Persen	10	10



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

V-110



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persen	5	IKP	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar	Persen	10	10	Dinas Kehutanan
11					Persentase pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berkualitas	Persen	10	10	Dinas Kehutanan
12					Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	Dinas Kehutanan
13	Persentase Lahan Kritis yang ditangani	Persen	5	IKP	Persentase Penurunan Lahan Kritis	Persen	6,44	11	Dinas Kehutanan
14	Persentase Peningkatan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix yang Ditangkarkan	Persen	23	IKP					Dinas Kehutanan
15	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	20,55	IKU PD					Dinas Kehutanan
16	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	1,5	IKP					Dinas Kehutanan
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
1					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	7,61	7,68	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



A040B8A293



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Jumlah Konsumsi Listrik di Jawa Barat	GWh	78,758	IKU PD	Jumlah Konsumsi Listrik di Jawa Barat	GWh	70.064	71.670	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
3	Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.400***		Indikator Tujuan, Target sudah disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek teknis dan aspek pengusahaan	Persen	56,67	59,17
4					Persentase peningkatan titik muka air tanah yang dimanfaatkan	Persen	31,45	32,45	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
5					Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Jawa Barat	Persen	61,03	64,08	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
6					Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas I Cianjur	Persen	62,34	65,46	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7					Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas II Bogor	Persen	58,99	61,94	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
8					Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	67,28	70,64	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
9					Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas IV Bandung	Persen	63,94	67,14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10					Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas V Sumedang	Persen	58,19	61,1	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
11					Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	55,87	58,66	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
12					Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	60,58	63,61	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
13					Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Jawa Barat	Persen	91,22	92,22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
14					Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	95,06	92,22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
15					Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	95,4	92,22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
16					Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah	Persen	97,35	92,22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta				
17					Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	80,23	92,22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
18					Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	83,68	92,22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
19					Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	100	92,22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
20	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	66	IKP	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	100	92,22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
21	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil	Persen	66		Persentase Meningkatnya Pengujian Kualitas Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	Persen	82,34	83	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor								
22	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	66	IKP	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi	Persen	n/a	17,13%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
23	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	66	IKP	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	n/a	0,47%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
24	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas	Persen	66	IKP	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	n/a	3,30%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ESDM Wilayah V Sumedang								
25	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	66	IKP	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	n/a	7,66%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
26	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	66		Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	n/a	1,99%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
27					Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	n/a	3,01%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
28	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan	Persen	62	IKP	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah	Persen	n/a	0,01%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



A040B8A293



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya				
29	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	62	IKP	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	n/a	0,69%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
30	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	62	IKP	Persentase komoditas EBT yang diuji atau dikembangkan	Persen	33	41,67	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
31	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	62	IKP	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur	Persen	0	60	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
32	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	62	IKP	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	65	70	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
33	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	62	IKP	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	65	70	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
34	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	62		Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	65	70	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
35	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	62		Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	65	70	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
36					Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	65	70	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
37					Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang	Persen	65	70	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya				
38					Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	65	70	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
39					Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat	Persen	0	25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
40					Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	0	25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
41					Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	0	25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
42					Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga	Persen	0	25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-119



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta				
43					Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	0	25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
44					Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	0	25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
45					Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	0	25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
46					Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum	Persen	0	25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon				
47					Persentase usaha pertambangan yang menerapkan aspek teknis	Persen	56,67	59,17	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
48					Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan	Persen	76,86	78,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
49					Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	75	76	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
50					Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	88,89	89,89	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
51					Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	80	81	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
52					Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas	Persen	70	71	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					ESDM Wilayah IV Bandung				
53					Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	70	71	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
54					Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	71,43	72,43	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
55					Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	75	76	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
56					Persentase pengujian kualitas bahan tambang	Persen	70,59	80	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
30	PERDAGANGAN				PERDAGANGAN				
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,85	Indikator Tujuan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,85	4,17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Triliun Rupiah	06-Feb	IKU PD	Nilai Tambah Perdagangan	Trilyun Rupiah	252,24	262,75	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Laju pertumbuhan ekspor non migas	Persen	01-Jan	IKU PD	Nilai Ekspor	Milyar USD	37,87	38,88	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3					Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)	Trilyun Rupiah	10,45	10,5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna SKA	Miliar USD	10,5	IKP	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada pemasaran produk dalam negeri	Persen	24	25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5	Peningkatan Nilai omzet pelaku usaha yang terfasilitasi pemasaran produk dalam negeri	Persen	25		IKP	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berfungsi	Persen	5,19	5,75
6						Laju Pertumbuhan Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)	Persen	2,83	2,75
7	Pertumbuhan Layanan SKA	Persen	2,75	IKP	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan perdagangan	Persen	100	100	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
8						Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Persen	3,15	6
9					Persentase penyaluran pupuk bersubsidi	Persen		6	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
10	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	73	IKP	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berkaitan Keamanan Produk dan Jasa Serta Ketentuan Lain Sesuai dengan Perundang-Undangan	Persen	N/A	85	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
11	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Air	Poin	05-Apr		IKP	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Air Minum	Poin	5	4-5



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BARU - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-123



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Minum Dalam Kemasan Cirebon				Dalam Kemasan Cirebon				
12	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Agro Bandung	Poin	05-Apr	IKP	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Agro Bandung	Poin	5	4-5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
13	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Logam Elektronika Karawang	Poin	05-Apr		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Logam Elektronika Karawang	Poin	5	4-5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
14	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Keramik, Tabung Gas Bogor	Poin	05-Apr		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Air Keramik dan Tabung Gas Bogor	Poin	5	4-5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
15	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perdagangan	Persen	09-Apr						Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkatkan Kualitasnya	Persen	5,75	IKP					Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
17	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan barang pokok	Persen	6	IKP					Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
18	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	90	IKP					Dinas Perindustrian Dan Perdagangan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Persentase barang beredar dan/atau jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	77	IKP					Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
31	PERINDUSTRIAN				PERINDUSTRIAN				
1					Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persen	98,64	98,82	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2					Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Trilyun Rupiah	133,13	113,87	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3					Persentase peningkatan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persen	33,02	11	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4	Persentase peningkatan industri yang masuk SIINas	Persen	11	IKP	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri terhadap Izin Usaha Industri	Persen	87,5	> 50	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Terhadap Izin Usaha Industri	Persen	> 50%	IKP	Nilai Produksi Industri Pengolahan	Trilyun Rupiah	1120	1164	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Nilai produksi Industri Pengolahan	Triliun Rupiah	1,164	IKP	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam/	Pelaku Usaha	30	35	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
7	Pertambahan jumlah industri	Pelaku Usaha	35	IKP	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah	Pelaku Usaha	100	110	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kecil menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam				baru yang dilayani pada UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan				
8	Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani Pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Pelaku Usaha	110						Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
9	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5,84	Indikator Tujuan					
10	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Triliun Rupiah	1.167,82	IKU PD					
32	TRANSMIGRASI				TRANSMIGRASI				
1					Persentase Transmigran yang ditempatkan	Persen	100	87	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
32	SEKRETARIAT DAERAH				SEKRETARIAT DAERAH				
1					Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	Biro Kesejahteraan Rakyat
2					Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	2,142	1,444	Biro Perekonomian
3					Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General)	Persen	86,44	86,45	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
4					Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,81	9,64	Biro Hukum dan HAM
5					Persentase BUMD Sehat	Persen	N/A	78,37	Biro Kesejahteraan Rakyat
6					Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,30	89,32	Biro BUMD, Investasi, dan



A040B8A293



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Administrasi Pembangunan
7					Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	80,22	80,72	Biro Hukum dan HAM
8					Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	Persen	63,04	63,28	Biro Kesejahteraan Rakyat
9					Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90,29	90,3	Biro Perekonomian
10					Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,76	4,76	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
11					Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	68,45	68,45	Biro Organisasi
12					Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	87	89	Biro Organisasi
13					Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,55	13,58	Biro Organisasi
14					Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	N/A	TINGGI	Biro Organisasi
15					Persentase Kebijakan Pendidikan Tinggi yang Diimplementasi	Persen	N/A	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
16					Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Poin	15,46	20,1	Biro Kesejahteraan Rakyat
17					Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Poin	23,9	20,1	Biro Perekonomian
18					Persentase Kebijakan Pengendalian Inflasi yang Diimplementasi	Persen	N/A	100	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
19					Return of Assets (RoA) BUMD Jabar	Persen	0,65	0,68	Biro Hukum dan HAM





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20					Nilai Deregulasi Kebijakan	Poin	N/A	20,4	Biro Hukum dan HAM
21					Persentase Regulasi Daerah yang Harmonis	Persen	N/A	24,22	Biro Kesejahteraan Rakyat
22					Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Poin	43,94	44,1	Biro Kesejahteraan Rakyat
23					Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Poin	40,6	43	Biro Kesejahteraan Rakyat
24					Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Invenstasi Daerah	Poin	39,44	40,36	Biro Perekonomian
25					Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Invenstasi Daerah	Poin	38,72	39,54	Biro Perekonomian
26					Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi akselerasi Kinerja	Persen	NA	100	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
27					Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
28					Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal SANGAT BAIK	Persen	84,62	86,96	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
29					Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur	Poin	37,378	37,378	Biro Pengadaan Barang dan Jasa





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30					Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses	Poin	31,071	31,071	Biro Organisasi
31					Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi	Persen	100	100	Biro Organisasi
32					Nilai Budaya Kerja BerAKHLAK Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	77,308	77,408	Biro Organisasi
33					Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal A	Persen	100	100	Biro Organisasi
34					Peresentase tinjut LHE SAKIP dari kemenpan RB	Persen	100	100	Biro Organisasi
35					Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Meningkatkan	Persen	37,72	42,11	Biro Organisasi
36					Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Mengalami Peningkatan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	55,56	59,26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
37					Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	35,29	40,84	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
38					Nilai Kualitas Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	27,55	35,31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
39					Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa yang Direkomendasikan	Persen	N/A	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
40					Persentase Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP yang Terlaksana sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
41					Persentase Kerja Sama Daerah yang Efektif	Persen	N/A	80,66	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
42					Persentase Kerja Sama Internasional yang Efektif	Persen	N/A	80,66	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
43					Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Sesuai Standar	Persen	N/A	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
44					Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi	Persen	N/A	100	Biro Administrasi Pimpinan
45					Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai	82,66	82,7	Biro Umum
46					Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	N/A	100	Biro Umum
47					Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi	Persen	N/A	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-130



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Lingkup Biro Hukum dan HAM				
48					Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persen	N/A	100	Biro Hukum dan HAM
49					Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Perekonomian	Persen	N/A	100	Biro Kesejahteraan Sosial
50					Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Persen	N/A	100	Biro Perekonomian
51					Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	NA	100	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
52					Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Organisasi	Persen	NA	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
53					Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persen	NA	100	Biro Organisasi
54					Persentase Capaian Kinerja Intervensi	Persen	N/A	100	Biro Administrasi Pimpinan





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Umum				
55	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	Indikator Tujuan					
56	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	80,83	IKU PD					
57	Persentase Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis	Persen	87,12	IKP					
58	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Poin	50,2	IKP					
59	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	50,2	IKP					
60	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Poin	50,2	IKP					
61	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	Poin	50,2	IKP					
62	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup Administrasi Pembangunan	Persen	100	IKP					
63	Level Maturitas UKPBJ	Level	3	IKP					



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

RABV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-132



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
64	Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	Peringkat	4	IKP					
65	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	Persen	85		IKP				
66	Nilai Pelaporan Kinerja	Poin	12,44	IKP					
67	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai budaya kerja minimal "Baik"	Persen	73,68	IKP					
68	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal kategori “B”	Persen	94	IKP					
69	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan kebijakan sistem kerja Dinamis	Persen	100	IKP					
70	Nilai AKIP Setda	Poin	84,52	IKP					
71	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum dan HAM	Poin	87,37	IKP					
72	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan	Poin	91,34	IKP					





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Biro Kesejahteraan Rakyat								
73	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	86,35	IKP					
74	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perekonomian	Poin	95,29	IKP					
75	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Poin	89,84	IKP					
76	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	96,91	IKP					
77	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Organisasi	Poin	88,59	IKP					
78	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Administrasi Pimpinan	Poin	94,71	IKP					
79	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum	Poin	91,58	IKP					



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BARUV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-134



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
33	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	4,78	IKU PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	4,77	4,78	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2						Persentase Keprotokolan Kegiatan Pimpinan DPRD Lancar	Persen	100	100
3	Persentase penyusunan Peraturan Daerah dan pelaksanaan publikasi	Persen	100	IKP	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lancar	Persen	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4						Persentase kegiatan DPRD yang terpublikasikan	Persen	100	100
5	Persentase penyusunan pembangunan berdasarkan penjangkaran aspirasi	Persen	100	IKP	Persentase Pembahasan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Lancar	Persen	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6						Persentase Pembahasan Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Lancar	Persen	100	100
7					Persentase Profesionalisme Anggota DPRD	Persen	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	Persentase penyusunan persetujuan anggaran dan pengawasan APBD	Persen	100	IKP	Persentase Pembahasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Lancar	Persen	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9						Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Lancar	Persen	100	100



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan keuangan kesejahteraan, dan administrasi secara tepat waktu	Persen	100	IKP	Persentase Anggota DPRD yang Terpenuhi Haknya	Persen	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34	PERENCANAAN				PERENCANAAN				
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	26	IKU PD	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	26,32	26,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	26,69	IKU PD	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	27,05	27,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	13,55	IKP	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	poin	13,85	13,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Poin	13,29	IKP	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	poin	13,76	13,79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat	Poin	13,27	IKP	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	poin	13,65	13,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
6	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	11,93	IKP	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	poin	10,34	10,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA.	Poin	9,9	IKP	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	poin	10,05	10,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Poin	11,98	IKP	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	poin	9,5	9,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	13,44	IKP	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	poin	13,79	13,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan	Poin	11,4	IKP	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	poin	10,13	10,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Daerah								
35	KEUANGAN				KEUANGAN				
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	IKU Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Indeks Pengelolaan Aset	Poin	90	IKP	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Poin	Baik (2,63)	Baik (2,65)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3	Persentase pendapatan pemanfaatan BMD terhadap total PAD	Persen	0,077	IKP	Rata-rata Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Poin	N/A	N/A	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4					Indeks Realisasi Penerimaan Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Poin	N/A	N/A	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	Jumlah terbit buku sertifikat tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Buku Sertifikat	150	IKP	Indeks Sertifikasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah	Poin	N/A	N/A	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
6	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu	Persen	100	IKP	Persentase Prioritas Pembangunan Daerah yang Dianggarkan Dalam APBD	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
7	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah	Persen	100	IKP	Persentase TindakanjUt Usulan Pencairan Dana yang Tepat Waktu	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dengan Penerbitan SP2D								
8	Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Pajak yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKP	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
9	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu	Persen	100	IKP	Persentase Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Diterapkan Oleh Kabupaten/Kota	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKP	Kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	N/A	Sangat Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
11	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat beserta Pergub Penjabarannya	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKP	Persentase Kepgub Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran APBD Kab/Kota dan Kepgub Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12					Persentase Kepgub Hasil Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
13					Persentase Dokumen Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
14					Persentase Dokumen Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
15					Persentase Dokumen Dana Darurat dan Mendesak Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-140



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
16					Persentase Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persen	N/A	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
17	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	64,26	IKU PD	Laju Pertumbuhan Pendapatan	Persen	N/A	1,99	Badan Pendapatan Daerah
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Persen	85,20	IKU PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92,87	90	Badan Pendapatan Daerah
19					Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	100	100	Badan Pendapatan Daerah
36	KEPEGAWAIAN				KEPEGAWAIAN				
1	Indeks Sistem Merit	Poin	397,5	IKU PD	Indeks Sistem Merit	Poin	400	400	Badan Kepegawaian Daerah
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin	45,9	IKU PD	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin	53,93	53,96	Badan Kepegawaian Daerah
3	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	117,5	IKP	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	115	115	Badan Kepegawaian Daerah



A040B8A293



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	40	IKP	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	40	40	Badan Kepegawaian Daerah	
5	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	120	IKP	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	125	125	Badan Kepegawaian Daerah	
6	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120	IKP	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120	120	Badan Kepegawaian Daerah	
7	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	13	IKP	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	20,88*	20,9	Badan Kepegawaian Daerah	
8	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	28	IKP	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	28,06*	28,07	Badan Kepegawaian Daerah	
9	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	4,99	IKP	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	5,00*	4,99	Badan Kepegawaian Daerah	
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	31	IKU PD	Indeks Profesional ASN Dimensi Kompetensi	Poin	32,80	33,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Persentase peningkatan kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial	Persen	75	IKP	Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Manajerial dan Dasar Serta Pimpinan Daerah Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial	Persen	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3	Persentase peningkatan Kompetensi ASN di Bidang Kompetensi	Persen	75	IKP	Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Teknis dan Fungsional Berdampak	Persentase peningkatan Kompetensi ASN di	Persen	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Teknis dan Fungsional				Pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional			
4	Indeks Implementasi Corporate University	Kategori	B	IKP	Meningkatnya Implementasi Corporate University	Indeks Maturitas Corporate University	Kategori	Mature (2955)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	71,76 (Sangat Inovatif)	Indikator Tujuan	Skor Satuan Inovasi Daerah	Poin	149,17	149,20	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dirujuk oleh Dokumen Perencanaan Daerah	Persen	100		IKU PD	Persentase rancangan kebijakan hasil riset berbasis isu strategis	Persen	N/A	100
3	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dirujuk dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100	IKP, sudah disesuaikan dengan Biro Organisasi		Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup pemerintahan dan pengkajian peraturan berbasis isu strategis	Persen	N/A	100
4	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang dirujuk dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100		IKP	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup sosial dan kependudukan berbasis isu strategis	Persen	N/A	100





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentaase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dirujuk dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100	IKP	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup ekonomi dan pembangunan berbasis isu strategis	Persen	N/A	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
6	Persentase Hasil Kelitbangan yang didiseminasikan	Persen	100	IKP	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Didiseminasikan	Persen	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7	Persentase Jurnal yang memenuhi Standar SINTA 5	Persen	100	IKP	Peringkat jurnal yang memenuhi Akreditasi	Peringkat Akreditasi	N/A	SINTA 4	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
8	Persentase Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan Sertifikat HKI	Persen	100	IKP	Persentase Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	Persen	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
9	Persentase Usulan Inovasi Perangkat Daerah yang terdaftar Indeks Inovasi Daerah (IID)	Persen	100	IKP	Persentase Usulan Inovasi Daerah yang Dilaporkan	Persen	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10					Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Didiseminasikan	Persen	100	N/A	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
11					Peringkat jurnal yang memenuhi Akreditasi	Peringkat Akreditasi	N/A	N/A	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
12					Persentase Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	Persen	100	N/A	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah	
								2025		
Semula					Menjadi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
13	Persentase Kematangan Inovasi Daerah	Persen	67,05	IKU PD	Persentase Usulan Inovasi Daerah yang Dilaporkan	Persen	100	N/A	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
14										Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
15										Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
39	PENGHUBUNG				PENGHUBUNG					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penghubung	Poin	96,75	IKU PD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Badan Penghubung	Poin	96,75	96,90	Badan Penghubung	
2						Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol & Promosi Informasi yang Difasilitasi	Persen	100	100	Badan Penghubung
3	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol, Promosi, dan Informasi yang Difasilitasi	Persen	100	IKP					Badan Penghubung	
40	PENGAWASAN					PENGAWASAN				
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dimensi Evaluasi	Kategori	A	IKU PD	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi evaluasi	Nilai	N/A	21,43	Inspektorat Daerah	
2	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Persen	71,54		IKU PD	Indeks Integritas Nasional	Poin	73,84	72,96	Inspektorat Daerah
3	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan	Opini	WTP		IKU PD	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	Inspektorat Daerah



A040B8A293



Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat				(LKPD) Provinsi Jawa Barat				
4	Level/Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3	IKU PD	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level (Skor)	3 (3,377)	3 (3,323)	Inspektorat Daerah
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	72,5	IKU PD (Indikator Baru)	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	95,10	72,50	Inspektorat Daerah
6	Nilai dampak implementasi SAKIP*	Persen	A	IKP,	Nilai dampak implementasi SAKIP	Nilai	AA (91,40)	A (84,80)	Inspektorat Daerah
7	Persentase rekomendasi hasil reviu LKPD yang ditindaklanjuti dalam LKPD	Persen	100	IKP	Persentase rekomendasi hasil reviu LKPD yang ditindaklanjuti dalam LKPD	Persen	100	100	Inspektorat Daerah
8	Persentase kasus Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan	Persen	72	IKP	Persentase kasus Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan	Persen	100	72	Inspektorat Daerah
9	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	72,5	IKP	Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI yang diselesaikan	Persen	70,20	72,50	Inspektorat Daerah
10	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan	Persen	100	IKP	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persen	100	100	Inspektorat Daerah



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

RABV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-146



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pengawasan umum dan tujuan tertentu								
11	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	77	IKP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal	Persen	95,1	77	Inspektorat Daerah
12					Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP eksternal	Persen	100	90	Inspektorat Daerah
13					Persentase Kabupaten/kota yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan umum dan tujuan tertentu	Persen	100	100	Inspektorat Daerah
14	Persentase KCD yang mematuhi ketentuan PPDB	Persen	100	IKP	Persentase KCD yang mematuhi ketentuan PPDB	Persen	100	100	Inspektorat Daerah
15	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BUMD	Persen	82	IKP	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BUMD	Persen	N/A	62	Inspektorat Daerah
16					Persentase Kab/Kota penerima Bantuan Keuangan Kab/Kota yang patuh	Persen	100	100	Inspektorat Daerah
17	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh	Persen	92	IKP	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh	Persen	100	92	Inspektorat Daerah
18	Persentase sampling sekolah penerima dana BOS, BOPD dan BPMU yang patuh	Persen	92	IKP	Persentase sampling sekolah penerima dana BOS, BOPD dan BPMU yang patuh	Persen	100	92	Inspektorat Daerah





Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Persentase kepatuhan dalam penerapan P3DN	Persen	100	IKP	Persentase kepatuhan dalam penerapan P3DN	Persen	100	100	Inspektorat Daerah
20	Persentase hasil review LPPD yang diterapkan dalam penyusunan LPPD	Persen	100	IKP	Persentase hasil review LPPD yang diterapkan dalam penyusunan LPPD	Persen	100	100	Inspektorat Daerah
21	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP*	Persen	100	IKP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persen	100	100	Inspektorat Daerah
22	Level Maturitas APIP*	Persen	3	IKP	Level Maturitas APIP	Level	3 (3,290)	3 (3,184)	Inspektorat Daerah
23	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM)*	Perangkat Daerah	5	IKP	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM)	Perangkat Daerah	5	5	Inspektorat Daerah
24	Persentase nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Persen	97,27	IKP	Persentase nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Persen	97	97,27	Inspektorat Daerah
25	Nilai RB General Inspektorat*	Nilai	A	IKP					Inspektorat Daerah
26	Persentase Belanja PDN Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)*	Persen	95	IKP					Inspektorat Daerah
27	Persentase rekomendasi hasil audit SPBE pada pemeritah daeerah provinsi jawa barat yang diterapkan	Persen	85	IKP					Inspektorat Daerah
41	PEMERINTAHAN UMUM				PEMERINTAHAN UMUM				
1	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin		Indikator Tujuan					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>

BARUV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-148



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi*	Persen	100	IKU PD					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3					Meningkatnya partisipasi dan aksesibilitas politik masyarakat dalam proses demokrasi	Persen	N/A	75	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4					Menurunnya persentase kasus kejadian konflik sosial yang terdata/ terdeteksi	Persen	N/A	75	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5					Persentase penurunan kasus diskriminasi dan intoleran	Persen		63,64	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi	Persen	0,041	IKP	Persentase Masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	76		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial*	Persen	100	IKP Indikator Baru, Terdapat komponen Nilai kesetaraan, kebebasan dan kapasitas Lembaga demokrasi yang melebihi kewenangan Kesbangpol	Persentase Pengurangan Potensi Konflik Sosial	Persen		14,85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik





No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2025	Keterangan	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target	Perangkat Daerah
								2025	
Semula					Menjadi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Persentase peserta (pemilih) yang mengikuti pendidikan politik	Persen	0,007	IKP	Persentase usia pemilih yang menerapkan hasil pembinaan pendidikan politik	Persen		39,06	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
9	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	47,78	IKP	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan	Persen	50,96		
10	Persentase pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan beragama	Persen	0,414	IKP					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
11	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	100	IKP					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
12	Persentase Kerjasama Lembaga antar umat beragama	Persen	41,18	IKP					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
13	Persentase pencegahan pengguna narkotika bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	5678	IKP					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



BAB VI

PENUTUP



A040B8A293

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A040B8A293>



BAB VI

P E N U T U P

Perubahan RKPD Tahun 2025, selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Nomor 900.1.1.640/SC tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025, bahwa pemerintah daerah diminta segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam dokumen Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:

- Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam rancangan akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- Realisasi SILPA Tahun 2024 berada di bawah proyeksi SiLPA pada APBD tahun 2025 sehingga harus dilakukan penyesuaian;
- Pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- Perubahan nilai pada beberapa indikator kinerja pembangunan.
- Efisiensi anggaran yang diperintahkan/menjadi arahan dari Gubernur baru.

Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 masih perlu melaksanakan dan mengakselerasi berbagai program prioritas





pembangunan. Dinamika yang terjadi dalam berbagai sektor pembangunan hingga triwulan II inilah yang menjadi dasar perlu dilakukannya berbagai penyesuaian dalam alokasi pendanaan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 memiliki peran yang penting, yaitu menjadi dasar bagi penyusunan perubahan renja perangkat daerah dan merupakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD) yang harus segera dibuat setelah Perubahan RKPD ini ditetapkan.

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2025 berupa pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, mengawal, dan melaksanakan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dengan harapan target pembangunan pada tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam penyiapan infrastruktur dasar dan penguatan fondasi pembangunan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI



A040B8A293